TUGAS AKHIR – 184802

STRATEGI PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN WONOKUSUMO KOTA SURABAYA BERDASARKAN PRINSIP GOALS 11 *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Oleh:
OLIVIA PANDORA
08211640000110

Dosen Pembimbing :
Dian Rahmawati, ST., MT.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020

TUGAS AKHIR – 184802

STRATEGI PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN WONOKUSUMO KOTA SURABAYA BERDASARKAN PRINSIP GOALS 11 *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (*SDGs)*

Oleh:
OLIVIA PANDORA
NRP 08211640000110

Dosen Pembimbing :
Dian Rahmawati, ST., MT.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

FINAL PROJECT – 184802

STRATEGY OF SLUM RENEWAL IN WONOKUSUMO SURABAYA CITY BASED ON GOALS 11 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Author:
OLIVIA PANDORA
NRP 08211640000110

Advisor:
Dian Rahmawati, ST., MT.

Departement of Urban And Regional Planning
The Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering
Sepuluh Nopember Institute of Technology
2020

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN WONOKUSUMO KOTA SURABAYA BERDASARKAN PRINSIP GOALS 11 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
Pada
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh:
OLIVIA PANDORA
NRP. 08211640000110

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir:

Dian Rahmawati S.T., M.T
NIP. 198206072009122002

Surabaya, Agustus 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

STRATEGI PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN WONOKUSUMO KOTA SURABAYA BERDASARKAN PRINSIP GOALS 11 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Nama	**: Olivia Pandora**
NRP	**: 08211640000110**
Departemen	**: Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSLK – ITS**
Pembimbing	**: Dian Rahmawati S.T., M.T.**

Abstrak

Penyediaan permukiman yang layak huni menjadi salah satu rencana global yang dimuat dalam SDGs Goals 11 dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H. Namun hal tersebut menjadi permasalahan di kota-kota besar, dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan bermukim sehingga terpaksa tinggal atau memenuhi kawasan kurang layak, seperti yang terjadi di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya. Kelurahan Wonokusumo termasuk Prioritas I dalam penanganan kumuh serta menjadi kawasan kumuh terluas di Surabaya memiliki karakteristik kawasan sangat padat. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih besar. Permasalahan tersebut meliputi tingginya kawasan tergenang banjir, penumpukkan sampah, serta kurangnya ketersediaan lahan dengan keterbatasan ekonomi membuat warga mengabaikan keamanan dan kelayakhunian sesuai SDGs Goals 11. Sehingga, penanganan tidak hanya dilakukan terhadap aspek fisik saja, melainkan harus terdapat penanganan aspek non fisik sesuai tujuan pembangunan global khususnya SDGs Goals 11. Maka perlu dirumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh sesuai karaktersitik fisik dan non fisik di Kelurahan Wonokusumo.

Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, tahap pertama membahas karakteristik permukiman kumuh yang dikelompokkan menjadi tiga klaster berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Karakeristik tersebut didasari data-data sekunder yang ditunjang hasil kuisioner kepada 170 responden. Tahap kedua membahas arahan kebijakan terkait permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo baik dari dokumen tata ruang ataupun dokumen penanganan permukiman kumuh yang menjadi peluang dalam bentuk support system terhadap perumusan strategi peremajaan. Kemudian, pada tahap ketiga dilakukan penyilangan matrik SWOT untuk mendapatkan strategi peremajaan permukiman kumuh berdasarkan prinsip SDGs Goals 11.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan tiga klaster kumuh di Kelurahan Wonokusumo berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Klaster I yang terdiri dari yang terdiri dari RW 7 pada RT 1, 2, 4, 5, 8, 11, kemudian RW 15 pada RT 2, 3, 4, 5 dan RW 6 RT 6 dapat dirumuskan menjadi 15 strategi. Klaster II yang terdiri dari RW 7 pada RT 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, kemudian RW 6 pada RT 5 dapat dirumuskan 16 strategi. Sedangkan Klaster III yang terdiri dari RW 7 RT 18 dan RT 21 dapat dirumuskan 16 strategi.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, SDGs Goals 11, Peremajaan

STRATEGY OF SLUM RENEWAL IN WONOKUSUMO SURABAYA BASED ON GOALS 11 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Nama	**: Olivia Pandora**
NRP	**: 08211640000110**
Departemen	**: Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSLK – ITS**
Pembimbing	**: Dian Rahmawati S.T., M.T.**

Abstract

The provision of adequate housing is one of the global plans stated in Sustainable Development Goals 11 and mandated in the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. But that becomes a problem in big cities, where the public cannot meet the needs of settling, so they are forced to live in less decent areas such as those that occur in Wonokusumo Surabaya. Wonokusumo being the first priority in handling slums and being the widest slum area in Surabaya has the characteristic of a very dense settlement. This makes some problems in the environment, social and economy. These problems such as flooded areas, rubbish heap, and lack of land availability with economic limitations make the ignority of security and habitability aspect according to SDGs Goals 11. Based on this, the prevention should not only be done on physical aspects, rather there must be non-physical aspects following SDGs Goals 11.So it is necessary to formulate a strategy for slum renewal by the physical and non physical characteristics in Wonokusumo.

This research consisted of 3 stages, the first stage was discussing the characteristic of slum which are grouped into three clusters based on similar characteristics. Those characteristics are based on secondary data and supported by questionnaire results to 170 respondents. The second stage was discussing the policies related to slum handling of Wonokusumo, both from spatial planning document

or the slum handling document that provide opportunities in the form of a support system for the formulation of slum renewal strategies.Then, in the third stage, the SWOT matrix is crossed to get a slum renewal strategies based on SDGs Goals 11 principle.

The results of the study show that three clusters were obtained in Wonokusumo based on similar characteristics. The first cluster consists of RW 7 in RT RT 1, 2, 4, 5, 8, 11, then RW 15 in RT 2, 3, 4, 5 and RW 6 in RT 6 can be formulated into 15 strategies. The second cluster consists of RW 7 in RT 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, and RW 6 in RT 5 can be formulated into 16 strategies. While the third cluster consists of RW 7 in RT 18 and RT 21 can be formulated into 16 strategies.

Keywords: *Slum, SDGs Goals 11, Slum renewal.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Strategi Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya berdasarkan Prinsip Goals 11 *SDGs*". Dalam penyelesaiannya, tentu mendapatkan banyak dukungan dan bantuan yasng bernilai positif dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kedua orang tua, Thien Suhartini dan Ali Suhardi, serta adik saya M. Haikal Syafi Alawiy yang telah mendukung baik secara moril maupun materil demi kelancaran tugas akhir ini.
3. Ibu Dian Rahmawati, ST., MT., sebagai Dosen Pembimbing dari seminar hingga tugas akhir atas asistensi, bimbingan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ibu Karina Pradinie T., ST., M.Eng., sebagai Dosen Penguji 1 dan Pak I Dewa Made Frendika S., ST., MT., MSc., Ph.D., sebagai Dosen Penguji 2 atas tanggapan dan saran perbaikan yang diberikan selama siding.
5. Seluruh teman-teman Corazon 2016 yang telah menemani dan bersama-sama memberikan cerita dari awal perkuliahan.
6. Mas/ Mbak Alumni yang telah memberikan asistensi, membantu mendapatkan data dan survey instansional.
7. Pak Matiin dan seluruh RT terkait yang membantu mengumpulkan warga dalam pengisian kuisioner.
8. Teman-teman pembimbing penelitian saya yaitu Chalimatus, Cinthya, Hendy, Ayyas dan Ahul sebagai teman seperjuangan.
9. Teman-teman *penduduk surga* yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam pengerjaan TA ini.

10. Teman-teman yaitu Alfie, Chalimatus, Tata, Dyah, Mita dan Shabrina yang selalu mendengarkan keluh kesah dan mendukung dari awal perkuliahan hingga tugas akhir.
11. Radifa Akbar yang telah membantu draft dan menemani selama pengerjaan TA hingga proses sidang.
12. Seluruh teman-teman di Cirebon dan Surabaya yang memberikan semangat dalam pengerjaan TA.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan karunia-Nya serta membalas semua kebaikan yang telah dilakukan dengan berlipat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada tugas akhir ini dan masih jauh dari kesempurnaan, yang dikarenakan penulis masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya mendatang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN v
ABSTRAK vii
ABSTRACT ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR TABEL xxiii
BAB I 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan dan Sasaran 6
1.4. Ruang Lingkup Penelitian 7
1.4.1. Ruang Lingkup Pembahasan 7
1.4.2. Ruang Lingkup Substansi 7
1.4.3. Ruang Lingkup Wilayah 7
1.5. Manfaat Penelitian 10
1.5.1. Manfaat Praktis 10
1.5.2. Manfaat Teoritis 10
1.6. Sistematika Penulisan 10
1.7. Kerangka Berpikir 11
BAB II 15
2.1. Teori Permukiman Kumuh 15

2.1.1. Pengertian Perumahan dan Permukiman 15
2.1.2. Pengertian Permukiman Kumuh 16
2.1.3. Penyebab Permukiman Kumuh..... 17
2.1.4. Karakteristik Permukiman Kumuh 19
2.1.5. Pola Penanganan Permukiman Kumuh 21
2.1.6. Peremajaan Permukiman Kumuh 23
2.1.7. Kriteria Permukiman Kumuh..... 26
2.2. Teori Pembangunan Berkelanjutan 45
2.2.1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan..... 45
2.2.2. Pilar Pembangunan Berkelanjutan 46
2.2.3. Indikator Permukiman Kumuh berdasarkan *Sustainable Development Goals* 46
2.2.4. Kriteria *Sustainable Development Goals* 11 47
2.3. Studi Penelitian Terdahulu 70
2.3.1. Assesing Urban Sustainability of Slum Settlements in Bangladesh: Evidence from Chittagong City..... 70
2.4. Sintesa Teori 73
BAB III 85
3.1. Pendekatan Penelitian 85
3.2. Jenis Penelitian..... 85
3.3. Variabel Penelitian 86
3.4. Populasi dan Sampel 97
3.4.1. Populasi 97
3.4.2. Sampel..... 97

3.5. Metode Penelitian 99
3.5.1. Metode Pengumpulan Data 99
3.5.2. Metode Analisis 103
BAB IV 143
4.1. Gambaran Umum Permukiman 143
4.1.1. Orientasi Wilayah Studi 143
4.1.2. Kondisi Fisik Wilayah 146
4.1.3. Kondisi Kependudukan 146
4.1.4. Kondisi Sosial Ekonomi 154
4.1.5. Kondisi Fisik Bangunan 155
4.1.6. Kondisi Legalitas Lahan 161
4.1.7. Kondisi Drainase 165
4.1.8. Kondisi Persampahan 166
4.1.9. Kondisi Sanitasi 167
4.1.10. Kondisi Air Bersih 169
4.1.11. Kondisi Jalan 171
4.1.12. Kondisi Sarana Permukiman 173
4.1.13. Kondisi Penggunaan Lahan 209
4.2. Analisa Karakteristik Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo 215
4.3. Analisa Kebijakan terkait Peremajaan Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya 269

4.3.1. Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2018-2038 269

4.3.2. Arahan Kebijakan dalam Rencana Penanganan Permukiman Kumuh 298

4.3.3. Hasil *Content Analysis* pada Dokumen Kebijakan 337

4.4. Analisis Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh di Wonokusumo Kota Surabaya 351

4.4.1. Tahap Pengumpulan Data untuk Analisis SWOT 351

4.4.2. Tahap Analisis Data SWOT 372

4.4.3. Tahap Pengambilan Keputusan..... 405

BAB V 413

5.1. Kesimpulan 413

5.2. Saran 415

DAFTAR PUSTAKA..... 417

Lampiran 1. Desain Survey Penelitian 427

Lampiran 2. Kuisioner Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh 439

Lampiran 3. Rekapitulasi Data Karakteristik Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo..... 446

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 447

Lampiran 5. Hasil Analisis Pembagian Cluster Menggunakan SPSS 459

Lampiran 6. Hasil Coding Dokumen Kebijakan..... 473

BIOGRAFI PENULIS..... 475

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ruang Lingkup Penelitian..... 9
Gambar 1.2. Kerangka Berpikir 13
Gambar 2.1. Pola Penanganan Permukiman Kumuh 26
Gambar 2.2. Sustainable Development Goals 46
Gambar 3.1. Proses Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh Wonokusumo 128
Gambar 3.2 Proses Content Analysis Sasaran 2 129
Gambar 3.3. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi 133
Gambar 4.1. Peta Wilayah Studi Kelurahan Wonokusumo ... 145
Gambar 4.2. Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2011 – 2018... 147
Gambar 4.3. Proporsi Perubahan Jumlah Penduduk 150
Gambar 4.4. Grafik Komposisi Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan Kelurahan WonokusumoTahun 2018 151
Gambar 4.5. Grafik Jumlah dan Persentase Bangunan di Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo..... 155
Gambar 4.6. Diagram Perbandingan Kondisi Fisik Bangunan di Permukiman Kumuh Wonokusumo 160
Gambar 4.7. Kondisi Bangunan di Permukiman Kumuh Wonokusumo..... 160
Gambar 4.8. Peta Lokasi Aset Tanah Kota Surabaya 162

Gambar 4.9. Diagram Persentase Kepemilikkan Surat/ Akta yang Diakui oleh Pemerintah 163
Gambar 4.10. Diagram Persentase Kepemilikkan Surat Bangunan yang Diakui oleh Pemerintah 164
Gambar 4.11. Surat Petok D yang Dimiliki Masyarakat..... 164
Gambar 4.12. Kondisi Gang Blewah dan Gang Masjid yang Tidak Terlayani Drainase 166
Gambar 4.13. Kondisi Drainase Terbuka dan Tertutup 166
Gambar 4.14. Tempat Sampah Pribadi 167
Gambar 4.15. Kondisi Sanitasi Masyarakat 168
Gambar 4.16. Jamban Umum 168
Gambar 4.17. Kondisi Air Bersih dari Pipa PDAM..... 169
Gambar 4.18. Kondisi Sumur Masyarakat..... 170
Gambar 4.19. Penjual Air 171
Gambar 4.20. Kondisi Perkerasan Jalan 171
Gambar 4.21. Ruas Jalan yang digunakan untuk Parkir 171
Gambar 4.22. Penerangan Jalan dari Swadaya Masyarakat ... 173
Gambar 4.23. Peta Persebaran Sarana Pendidikan di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo..... 175
Gambar 4.24. Kondisi Fasilitas Pendidikan di Permukiman Kumuh Wonokusumo 177
Gambar 4.25. Peta Keterjangkauan Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kelurahan Wonokusumo..... 179

Gambar 4.26. Peta Keterjangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Wonokusumo 181
Gambar 4.27. Peta Keterjangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelurahan Wonokusumo 183
Gambar 4.28. Peta Keterjangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelurahan Wonokusumo..... 185
Gambar 4.29. Persebaran Fasilitas Kesehatan di Permukiman Kumuh Wonokusumo 187
Gambar 4.30. Kondisi Fasilitas Kesehatan di Permukiman Kumuh Wonokusumo 188
Gambar 4.31. Peta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Posyandu di Permukiman Kumuh Wonokusumo 189
Gambar 4.32. Peta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Klinik Bersalin di Permukiman Kumuh Wonokusumo 191
Gambar 4.33. Peta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Permukiman Kumuh Wonokusumo 193
Gambar 4.34. Peta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Praktek Dokter di Permukiman Kumuh Wonokusumo 195
Gambar 4.35. Persebaran Sarana Peribadatan di Permukiman Kumuh Wonokusumo 197
Gambar 4.36. Kondisi Fasilitas Peribadatan di Permukiman Kumuh Wonokusumo 198
Gambar 4.37. Peta Keterjangkauan Fasilitas Peribadatan Masjid di Permukiman Kumuh Wonokusumo 201

Gambar 4.38. Kondisi Perdagangan dan Jasa di Permukiman Kumuh Wonokusumo 202
Gambar 4.39. Kondisi Fasilitas Sosial Budaya di Permukiman Kumuh Wonokusumo 203
Gambar 4.40. Persebaran Sarana Sosial dan Budaya di Permukiman Kumuh Wonokusumo 205
Gambar 4.41. Peta Keterjangkauan Fasilitas Sosial Budaya Balai Pertemuan RW di Permukiman Kumuh Wonokusumo 207
Gambar 4.42. Kondisi Lahan Kosong di Permukiman Kumuh Wonokusumo 208
Gambar 4.43. Peta Rencana Penggunaan Lahan di Permukiman Kumuh 211
Gambar 4.44. Peta Penggunaan Lahan Eksisting di Permukiman Kumuh Wonokusumo 213
Gambar 4.45. Diagram Karakteristik Keteraturan Bangunan di Masing-Masing RT 216
Gambar 4.46. Diagram Karakteristik Kepadatan Bangunan di Masing-Masing RT 217
Gambar 4.47. Diagram Kualitas Bangunan di setiap RT 218
Gambar 4.48. Diagram Karakteristik Lokasi Hunian di Masing-Masing RT 219
Gambar 4.49. Diagram Kondisi Jalan di Masing-Masing RT 219
Gambar 4.50. Kondisi Drainase di Masing-Masing RT..... 220
Gambar 4.51. Karakteristik Air Bersih Masing-Masing RT .. 221

Gambar 4.52. Karakteristik Sanitasi Masing-Masing RT 221
Gambar 4.53. Karakteristik Persampahan setiap RT 222
Gambar 4.54. Diagram Karakteristik Proteksi Kebakaran di Masing-Masing RT 223
Gambar 4.55. Diagram Karakteristik Akses Sarana Kesehatan di Masing-Masing RT 223
Gambar 4.56. Diagram Karakteristik Akses Sarana Pendidikan di Masing-Masing RT 224
Gambar 4.57. Ketersediaan RTH di Masing-Masing RT..... 225
Gambar 4.58. Diagram Karakteristik Status Kepemilikan Lahan di Masing-Masing RT 225
Gambar 4.59. Diagram Karakteristik Status Kepemilikan Bangunan di Masing-Masing RT 226
Gambar 4.60. Karakteristik Kepadatan Penduduk setiap RT. 227
Gambar 4.61. Diagram Karakteristik Tingkat Pendidikan..... 228
Gambar 4.62. Karakteristik Tingkat Partisipasi Setiap RT 228
Gambar 4.63. Karakteristik Frekuensi Kegiatan Masyarakat di Masing-Masing RT 229
Gambar 4.64. Diagram Karakteristik Frekuensi Kriminalitas 229
Gambar 4.65. Diagram Karakteristik Tingkat Kemiskinan Setiap RT 230
Gambar 4.66. Diagram Karakteristik Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni Masing-Masing RT 231

Gambar 4.67. Diagram Karakteristik Tingkat Pendapatan di Masing-Masing RT 231
Gambar 4.68. Pemetaan Klaster Permukiman Kumuh Wonokusumo 241
Gambar 4.69. Karakteristik Kualitas Bangunan Klaster I..... 243
Gambar 4.70. Kesesuaian Lokasi Hunian di Klaster I 244
Gambar 4.71. Legalitas Lahan dan Bangunan di Klaster I 247
Gambar 4.72. Karakteristik Kualitas Bangunan Klaster II 251
Gambar 4.73. Kesesuaian Lokasi Hunian di Klaster II 252
Gambar 4.74. Legalitas Lahan dan Bangunan di Klaster II ... 255
Gambar 4.75. Karakteristik Kualitas Bangunan Klaster III ... 259
Gambar 4.76. Kesesuaian Lokasi Hunian di Klaster II 261
Gambar 4.77. Legalitas Lahan dan Bangunan di Klaster III .. 264

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pola Penanganan Permukiman Kumuh 21
Tabel 2.2. Kriteria Permukiman Kumuh 33
Tabel 2.3. Kriteria Permukiman Kumuh SDGs 11 59
Tabel 2.4. Sintesa Teori 74
Tabel 2.5. *Linkage* kriteria SDGs Goals 11 dan Variabel yang Telah Dipilih 79
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 87
Tabel 3.2. Distribusi Sampel Penelitian..... 98
Tabel 3.3. Survei Lapangan dalam Perolehan Data Primer ... 100
Tabel 3.4. Survei Instansi untuk Data Sekunder 101
Tabel 3.5. Metode Analisis setiap Sasaran 103
Tabel 3.6. Nilai Bobot Masing-Masing Variabel..... 107
Tabel 3.7. Kode variabel dan Kode Warna Katagori 134
Tabel 3.8. Kode Dokumen Kebijakan *Content Analysis*..... 135
Tabel 3.9. Metode Penyusunan Matriks SWOT 136
Tabel 4.1. Jumlah dan Analisa Kepadatan Penduduk 148
Tabel 4.2. Tabel Perubahan Jumlah Penduduk 149
Tabel 4.3. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Kelurahan Wonokusumo 151
Tabel 4.4. Tabel Komposisi Penduduk berdasarkan Agama di Kelurahan Wonokusumo Tahun 2019 152

Tabel 4.5. Tabel Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kelurahan Wonokusumo Tahun 2019 153
Tabel 4.6. Komposisi Penduduk berdasarkan dengan Tingkat Pendidikan 154
Tabel 4.7. Kondisi Kemiskinan Wonokusumo 154
Tabel 4.8. Tabel Jumlah dan Kepadatan Bangunan 157
Tabel 4.9. Klasifikasi Bangunan berdasarkan Bahan Dasar .. 159
Tabel 4.10. Tabel Kebutuhan Sarana Pendidikan 177
Tabel 4.11. Kebutuhan Sarana Kesehatan 188
Tabel 4.12. Kebutuhan Sarana Peribadatan 198
Tabel 4.13. Anggota Klaster Permukiman Kumuh 234
Tabel 4.14. Tabel Karakteristik Masing-Masing Permukiman Kumuh Wonokusumo 235
Tabel 4.15. Tabel Karakteristik Klaster I ditinjau berdasarkan SDGs Goals 11 249
Tabel 4.16. Tabel Karakteristik Klaster II ditinjau berdasarkan SDGs Goals 11 257
Tabel 4.17. Tabel Karakteristik Klaster III ditinjau berdasarkan SDGs Goals 11 265
Tabel 4.18. Perbandingan Ketercapaian Kriteria SDGs Klaster I, Klaster II, dan Klaster III 267
Tabel 4.19. Hasil Pengkodean Data pada Dokumen Kebijakan 1 (Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2018-2038) 269

Tabel 4.20. Hasil Pengkodean Data pada Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surabaya 299
Tabel 4.21. Hasil Pengkodean Data pada Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Wonokusumo 319
Tabel 4.22. Hasil *Content Analysis* berdasarkan Dokumen Kebijakan Terpilih 337
Tabel 4.23. Induksi Hasil Content Analisis Kebijakan terhadap Klaster I, II dan III 347
Tabel 4.24. Penentuan IFAS dan EFAS dalam Klaster I 353
Tabel 4.25. Penentuan IFAS dan EFAS dalam Klaster II 359
Tabel 4.26. Penentuan IFAS dan EFAS dalam Klaster III 365
Tabel 4.27. Penyilangan SWOT Klaster I 372
Tabel 4.28. Penjelasan Strategi Peremajaan di Klaster I..... 374
Tabel 4.29. Penyilangan SWOT Klaster II 383
Tabel 4.30. Penjelasan Strategi Peremajaan di Klaster II 385
Tabel 4.31. Penyilangan SWOT Klaster III 394
Tabel 4.32. Penjelasan Strategi di Klaster III 396
Tabel 4.33. Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh Klaster I, Klaster II dan Klaster III 405
Tabel 4.34. Nilai Tambah Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh Berdasarkan Prinsip SDGs 409

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana global dalam pembangunan berkelanjutan dimuat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Rencana global tersebut memuat 17 tujuan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan hingga tahun 2030.

Diantara 17 tujuan tersebut, terdapat tujuan dalam mengatasi permasalahan perkotaan dengan membentuk kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan dalam Goals 11 yaitu Sustainable Cities and Communities. Poin dari Goals 11 tersebut adalah mencapai akses perumahan layak, aman dan terjangkau, akses layanan infrastruktur dasar, penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan, layanan ruang publik yang memadai, dan pengelolaan urbanisasi di permukiman perkotaan (SDG Goal 11 Monitoring Framework, 2016). Ketercapaian Goals 11 tersebut menemui beberapa rintangan terutama di daerah perkotaan. UN (2018) menyatakan bahwa daerah perkotaan memiliki ekspansi setengah kali lipat lebih besar dari pertumbuhan populasinya. Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan termasuk dalam hal penyediaan ruang publik, pengelolaan sampah, dan kawasan permukiman kumuh yang menjadi salah satu target SDG Goals 11. Dalam hal penyediaan ruang publik, UN (2018) menyatakan bahwa lahan yang dialokasikan untuk ruang publik di sebagian besar kota di Asia kurang dari 15% luas wilayah. Selain itu, 74% sampah yang dihasilkan berasal dari perkotaan dimana kurang dari 50% sampah tersebut yang berhasil dikelola serta 90% kawasan perkotaan memiliki kondisi udara yang buruk.

Sama halnya dengan penyediaan ruang publik dan pengelolaan sampah, permasalahan permukiman kumuh memiliki beberapa rintangan. Terkait dengan penanganan permukiman kumuh, SDGs Goals 11 memiliki target untuk mengurangi populasi yang tinggal di permukiman kumuh (slum), permukiman informal (informal settlements), atau rumah tidak layak huni (inadequate housing). Namun, dalam pencapaian pembangunan tersebut, populasi dunia yang tinggal di kawasan kumuh semakin meningkat. UN-Habitat (2016) mencatat 883 juta manusia atau sekitar 30% populasi dunia bertempat tinggal di kawasan kumuh pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat dari tahun 2000 yaitu sebesar 760 juta manusia, dimana terjadi peningkatan sebesar 121 juta jiwa atau sekitar 16% peningkatan dalam waktu 15 tahun (World Cities Report 2016 dalam Slum Almanac, 2016). Perkotaan menjadi kawasan yang memiliki perkembangan permukiman kumuh yang pesat karena peningkatan jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. *United Nations* (2018) menyatakan bahwa populasi masyarakat yang tinggal di perkotaan pada tahun 2050 akan mencapai 6,2 miliar atau 70% dari total populasi manusia. Tingginya penduduk perkotaan akan meningkatkan permintaan lahan terutama untuk kebutuhan bermukim. Namun, keterbatasan lahan di perkotaan dengan tekanan ekonomi bagi kaum urban memaksa mereka menempati daerah-daerah pinggiran dan membentuk permukiman kumuh baru (Adisasmita dalam Suud dan Navitas, 2015). Hal yang sama dinyatakan oleh *UN Habitat* (2005) bahwa pada tahun 2050 hampir setengah populasi perkotaan atau sekitar 3 miliar akan tinggal di kawasan kumuh. Fenomena tersebut membuat *Goals 11 SDGs* harus segera diwujudkan sebagai upaya menangani permasalahan kumuh serta melindungi hak-hak hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Hak-hak hidup di lingkungan tempat tinggal yang baik dan sehat serta penjaminan kehidupan warga Indonesia secara lahir dan batin

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28 H. Poin dari pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan amanat tersebut, pemenuhan tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat berarti tidak hanya disediakan sekedarnya, melainkan harus memiliki standar-standar tertentu yang dianggap layak.

Permasalahan permukiman kumuh di Indonesia telah mencapai luas 38.431 Ha yang tersebar di 4.108 kawasan, dimana 9,6 juta rumah tangga menempati kondisi tidak layak huni (Kementrian PUPR, 2015). Dilain sisi, kebutuhan perumahan layak huni akan semakin meningkat. Pada tahun 2025 diperkirakan kebutuhan perumahan layak huni mencapai 30 juta unit dengan kebutuhan rumah 1,2 juta unit per tahunnya (Bappenas, 2005). Kebutuhan rumah layak huni tersebut sering menjadi permasalahan kota-kota besar di Indonesia. Hal tersebut disebabkan kawasan perkotaan besar menjadi magnet yang sangat kuat, mengingat kesempatan kerja yang lebih besar. Namun, beberapa kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan terpaksa tinggal atau memenuhi kawasan yang kurang layak hingga timbul permukiman kumuh (Nursyahbani dan Pigawati, 2015). Maka, keberadaan permukiman kumuh khususnya di perkotaan perlu segera ditangani agar tidak memunculkan permukiman kumuh baru lainnya.

Surabaya sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta sekaligus menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk yang pesat, yaitu mencapai 0,43% pada tahun 2016 – 2017 dengan kepadatan penduduk 8.201 jiwa/km2 (BPS Surabaya). Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya menyebabkan permasalahan terhadap permukiman, termasuk keberadaan permukiman kumuh. Pada tahun 2018, Kota Surabaya tercatat memiliki luas kawasan kumuh sebesar 145,931 Ha (Baseline Permukiman Kumuh Surabaya 2018).

Berdasarkan SK Walikota No. 188.145/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang dibagi berdasarkan prioritas penanganannya, yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Fenomena permukiman kumuh di Kota Surabaya memiliki karakteristik beragam sehingga dalam penanganannya dikelompokkan dalam 16 klaster yang mencakup 29 kawasan kumuh (RP2KPKP Kota Surabaya, 2017). Berdasarkan pengelompokkan tersebut, Wonokusumo memiliki luas kawasan kumuh tertinggi dibandingkan kawasan lainnya, yaitu sebesar 20,44 Ha atau sekitar 14% dari total luas kawasan kumuh di Kota Surabaya (*Baseline Permukiman Kumuh Surabaya*, 2018). Selain memiliki luasan kumuh terbesar, Kelurahan Wonokusumo menduduki Prioritas I, yang artinya penanganan permukiman kumuh di Wonokusumo yang termasuk kategori kumuh sedang memiliki status penanganan yang paling diprioritaskan.

Kelurahan Wonokusumo yang memiliki karakteristik kawasan padat menimbulkan beberapa permasalahan. Berdasarkan Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), kawasan kumuh Wonokusumo memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi yaitu 646 jiwa/Ha, yang diikuti pula dengan kepadatan bangunannya yang tinggi yaitu sebesar 98 unit/ Ha. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak aktivitas masyarakat terbatas dan lingkungan menjadi sangat padat. Akibatnya, timbul permasalahan lain di lingkungan permukiman. Masalah tersebut berupa genangan seluas 13,8 Ha atau 67% kawasan (*Baseline Permukiman Kumuh*, 2018), penumpukan sampah, dan kriminalitas yang tinggi. Selain itu, keberadaan masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 1.862 KK atau sekitar 46% menyebabkan masyarakat tetap menempati hunian secara turun temurun karena tidak mampu mengakses hunian yang lebih layak. Kondisi tersebut membuat kawasan permukiman semakin padat dan mengakibatkan tidak didapatkannya kembali keamanan dan kenyamanan pada lingkungan permukiman jika tidak segera ditangani. Selain itu, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti amanat UUD 1945, serta standar-standar permukiman yang harus

dipenuhi sesuai tujuan pembangunan global khususnya pada *SDG Goals 11* menjadi terancam.

Ditinjau dari status kekumuhan dan legalitas lahannya, Kelurahan Wonokusumo yang memiliki kekumuhan sedang dengan status lahan legal dalam penanganannya perlu dilakukan peremajaan (*RPLP Wonokusumo, 2018*). Namun, upaya penanganan yang telah direncanakan pemerintah seperti KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ataupun dokumen penanganan kumuh lainnya masih berlandaskan tingkat kekumuhan dan masih cenderung dalam penanganan aspek fisik. Permukiman kumuh Wonokusumo yang memiliki kecenderungan permasalahan lingkungan dan sosisal ekonomi yang lebih besar memerlukan strategi yang mengatur secara teknis bagaimana peremajaan dapat diterapkan di kawasan tersebut. Sehingga, perumusan strategi yang lebih mikro diharapkan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat sekaligus menjamin kebutuhan masyarakat di generasi yang akan datang sesuai target SDGs Goals 11, baik secara fisik ataupun non fisik. Oleh karena itu, diperlukan strategi peremajaan dalam rangka mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo sesuai prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)* Goals 11.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu fokus dalam rencana global yang dimuat dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tujuan tersebut dimuat dalam *Goals 11* yaitu *Sustainable Cities and* Communities, dimana pada 2030 memiliki target untuk mencapai akses perumahan layak, aman dan terjangkau, akses layanan infrastruktur dasar, penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan, layanan ruang publik yang memadai, dan pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman perkotaan. Perlindungan terhadap kesejahteraan dan lingkungan tempat tinggal yang baik juga diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H, dimana pemenuhan kebutuhan permukiman harus memiliki standar-standar tertentu yang dianggap layak.

Permukiman kumuh Wonokusumo yang terletak di Kota Metropolitan Surabaya termasuk dalam Prioritas I dimana memiliki luasan terbesar dibanding kawasan kumuh lainnya membuat penanganan kumuh di kawasan tersebut akan berdampak besar bagi Kota Surabaya. Permukiman kumuh Wonokusumo memiliki beberapa permasalahan akibat tingginya kepadatan penduduk dan bangunan yang membuat penurunan kualitas sarana dan prasarana lingkungan. Selain itu, tingginya jumlah MBR mengakibatkan ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi lingkungan tempat tinggal yang layak. Sehingga, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti amanat UUD 1945 dan tujuan SDGs *Goals 11* tersebut menjadi terancam.

Upaya penanganan terhadap permukiman kumuh Wonokusumo yang memiliki kondisi kumuh sedang dan status tanah legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ialah peremajaan. Namun, arahan, kebijakan, dan program yang telah dirumuskan pemerintah masih memerlukan strategi teknis yang lebih mikro, terutama strategi terkait bagaimana peremajaan dapat diterapkan di Permukiman Kumuh Wonokusumo. Hal tersebut diharapkan penanganan permukiman kumuh di Wonokusumo lebih maksimal serta sesuai dengan karakteristik kawasan.

Maka dari itu, diperlukan strategi peremajaan yang bersifat mendetail berdasarkan prinsip keberlanjutan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah *"Sejauh mana prinsip-prinsip Sustainable Development Goals 11 dapat diterapkan dalam strategi Peremajaan permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya?"*

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo berdasarkan prinsip berkelanjutan sesuai dengan *SDGs Goals 11*.

Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh Wonokusumo, Kota Surabaya berdasarkan indikator permukiman kumuh dan indikator SDGs Goals 11.
2. Mengidentifikasi kebijakan terkait peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya.
3. Merumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo berdasarkan prinsip SDGs Goals 11.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah identifikasi karakteristik permukiman kumuh, mengidentifikasi kebijakan terkait peremajaan permukiman kumuh, dan merumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya.

1.4.2. Ruang Lingkup Substansi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam penelitian substansi yang dijadikan sebagai pedoman meliputi beberapa pustaka atau teori yang berkaitan yaitu sebagai berikut.

1. Teori Permukiman Kumuh
2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

1.4.3. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian adalah kawasan permukiman kumuh dalam Kelurahan Wonokusumo. Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo meliputi RW 6 (RT 5,6), RW 7 (seluruh RT), dan RW 15 (RT 2,3,4,5). Batas administrasi wilayah tersebut adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara	: Kelurahan Wonokusumo RW 4
Sebelah Timur	: Kelurahan Wonokusumo RW 16
Sebelah Selatan	: Kelurahan Wonokusumo RW 9, RW 8
Sebelah Barat	: Kelurahan Wonokusumo RW 14

Peta ruang lingkup wilayah ditunjukkan pada Peta 1.1. sebagai berikut.

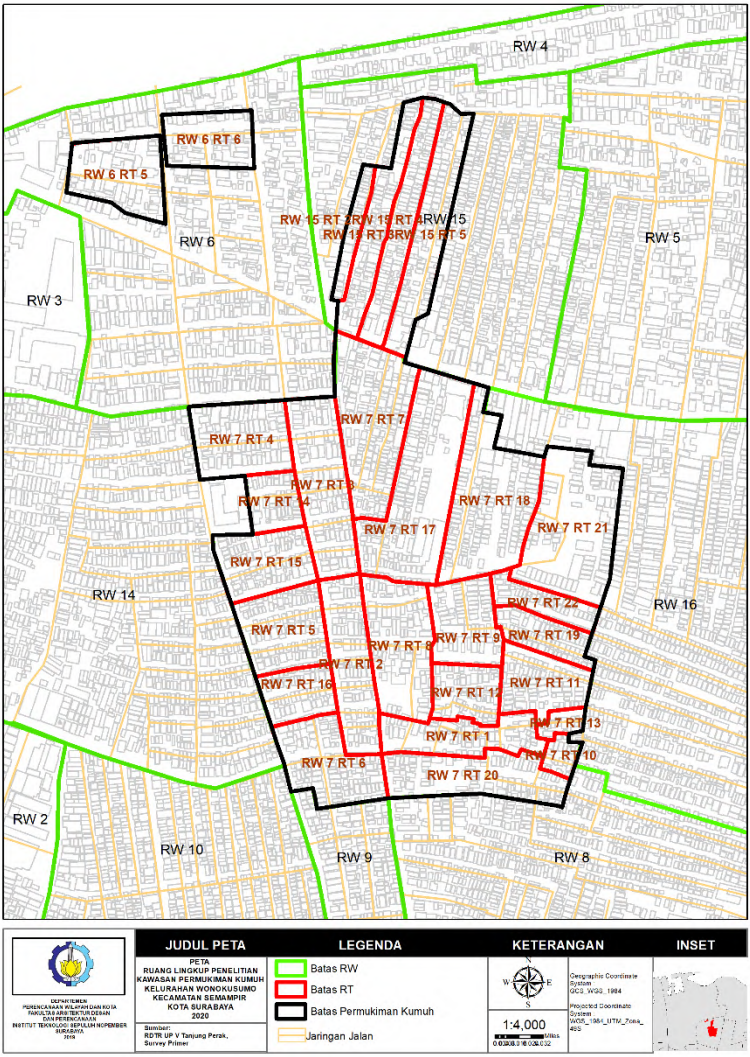

JUDUL PETA	LEGENDA	KETERANGAN	INSET
PETA RUANG LINGKUP PENELITIAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA 2020 Sumber: RDTR UP V Tanjung Perak, Survey Primer	Batas RW Batas RT Batas Permukiman Kumuh Jaringan Jalan	1:4,000 Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Projected Coordinate System WGS_1984_UTM_Zone_49S	

DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS ARSITEKTUR DESAIN DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2018

Gambar 1. 1.Ruang Lingkup Penelitian
Sumber : RPLP Kelurahan Wonokusumo, 2018

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan mengenai peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan prinsip keberlanjutan baik bagi pemerintah daerah maupun pusat terhadap Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya.

1.5.2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan dengan prinsip keberlanjutan.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang pengambilan permasalahan permukiman kumuh di Wonokusumo, rumusan masalah beserta pertanyaan penelitian permukiman kumuh Wonokusumo beserta, tujuan dan sasaran, dan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian berupa ruang lingkup pembahasan tentang karakteristik permukiman kumuh, identifikasi kebijakan peremajaan permukiman dan perumusan strategi permukiman kumuh di Wonokusumo Surabaya. Ruang lingkup substansi berupa pedoman atau teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori permukiman kumuh dan teori pembangunan berkelanjutan. Sedangkan, ruang lingkup wilayah berupa kawasan yang ditetapkan dalam penelitian, yaitu RW 6 (RT 5,6), RW 7 (seluruh RT), dan RW 15 (RT 2,3,4,5) di Kelurahan Wonokusumo.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tinjauan pustaka berupa teori dan kebijakan terkait penelitian, yang meliputi teori permukiman kumuh dan teori pembangunan berkelanjutan. Pada Bab II juga dirumuskan sintesa

pustaka dari tinjauan literatur mengenai penanganan permukiman kumuh.

Bab III Metode Penelitian

Bab III berisi metode yang digunakan peneliti dalam menjawab tujuan dan sasaran penelitian. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta metode analisis dalam perumusan strategi peremajaan permukiman kumuh Wonokusumo berdasarkan SDGs Nomor 11.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV berisi gambaran umum kondisi kawasan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo dari kompilasi berbagai data sekunder dan primer. Selain itu, Bab IV juga membahas analisis strategi peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab V berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi yang dapat ditinjau untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya.

1.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir disusun berdasarkan sistematika perumusan masalah hingga menghasilkan output yang diharapkan yaitu merumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh berdasarkan prinsip *Sustainable Development Goals*. Kerangka berpikir yang digunakan ditunjukkan oleh Gambar 1.1. sebagai berikut.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Gambar 1. 2.Kerangka Berpikir

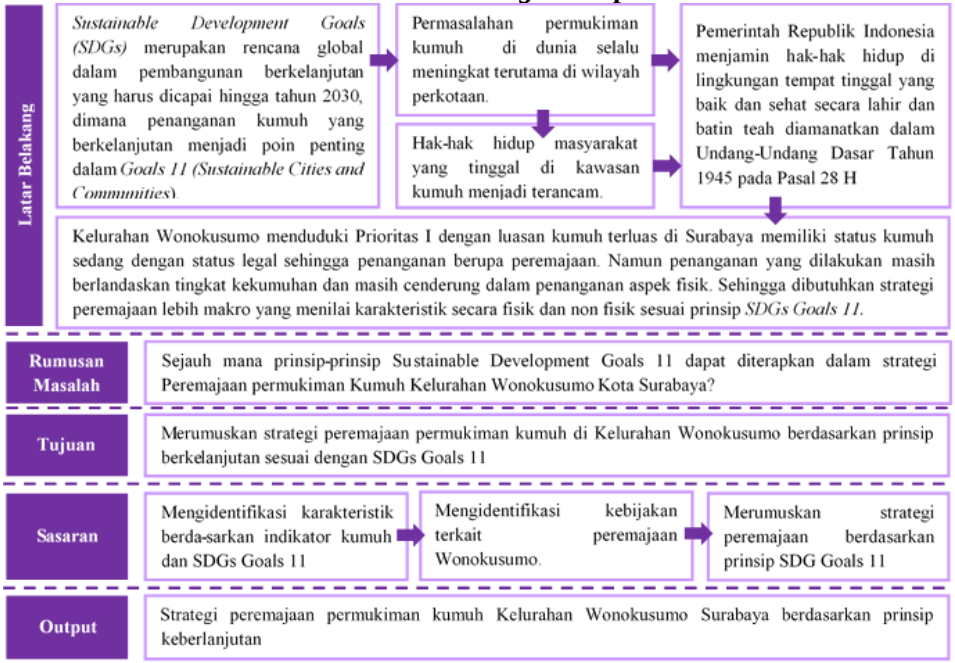

Sumber : Analisis Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Permukiman Kumuh

2.1.1. Pengertian Perumahan dan Permukiman

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016). Menurut Silas dalam Aulia dan Santosa (2013), rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman berupa proses berlanjut dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya. Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).

Sedangkan, permukiman adalah lingkungan huninan yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas. Hermanislamet (1993) mendefinisikan permukiman sebagai sejumlah besar rumah pada kawasan tertentu dimana pada tingkat primer berfungsi untuk “merumahi” sejumlah keluarga yang membutuhkan tempat tinggal, dan pada tingkat lebih lanjut sebagai

penyangga kawasan fungsional lainnya seperti kawasan industri, pusat pertambangan serta kawasan produktif lainnya. Pendapat lain dinyatakan oleh As'ari (2018) dimana permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan. Sedangkan, permukiman menurut Rachman (2010) adalah suatu lingkungan dimana terdapat bangunan fisik, manusia dengan aktifitasnya serta di dalamnya terdapat sarana dan prasarana sebagai wadah pendukung.

Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permukiman adalah lingkungan yang terdiri dari kumpulan rumah dengan sarana dan prasarana di dalamnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

2.1.2. Pengertian Permukiman Kumuh

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin, dan memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sanitasim dan lapangan terbuka) sehingga kondisi tersebut menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia (seperti kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor (Hariyanto, 2007). Sedangkan, Smith dalam Istikasari dan Khadiyanto (2014) mendefinisikan kawasan kumuh sebagai daerah yang ditandai oleh bentuk rumah kecil-kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola *settlement* yang tidak teratur serta kualitas lingkungan yang rendah juga minimunya fasilitas umum.

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Krisandriyana, dkk. (2019) mendefinisikan permukiman kumuh sebagai kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi dan budaya dan dihuni oleh penduduk yang padat. Definisi permukiman kumuh juga dinyatakan oleh Eko dalam Fitria (2014), dimana permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayaninya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Kohli dalam Badmos (2020) juga mendefinisikan permukiman kumuh sebagai kawasan permukiman yang memiliki kondisi fisik bangunan dan infrastruktur yang rendah serta kondisi sosioekonomi masyarakat sangat bergantung pada pendapatan masyarakatnya. Definisi lain dinyatakan Syam (2017) bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni dan memiliki sarana dan prasarana yang tidak layak bagi masyarakat.

2.1.3. Penyebab Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh dapat disebabkan berbagai hal. Suud dan Navitas (2015) menyatakan bahwa permukiman kumuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : faktor laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, faktor keterbatasan ruang terbuka, faktor jenis pekerjaan informal dengan pendapatan rendah, faktor keterbatasan lahan permukiman, faktor kurang tegasnya pemerintah dalam

menangani permukiman kumuh, dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan. Sedangkan, menurut Krisandriyana, dkk (2019), keberadaan permukiman kumuh dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, faktor urbanisasi tinggi yaitu berupa penduduk yang melakukan perpindahan ke perkotaan memaksa penduduk tersebut untuk membangun hunian dilahan yang tidak sesua dengan peruntukan permukiman, seperti bantaran sungai dengan kondisi bangunan non permanen yang semakin lama akan mengalami penurunan kualitas hunian dan menyebabkan kekumuhan lingkungan. Kedua, faktor sarana prasarana dimana permukiman yang tidak ditunjang dengan sarana prasara permukiman akan menyebabkan lingkungan permukiman tersebut menjadi kotor dan kumuh. Sarana dan prasarana tersebut berupa air bersih, sanitasi, dan persampahan. Ketiga, faktor ekonomi masyarakat berupa keberadaan masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, faktor keterbatasan lahan perkotaan yaitu semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat sehingga mendorong keberadaan permukiman yang kurang layak atau kumuh. Kelima, faktor pemahaman penduduk mengenai tata ruang dimana jika penduduk kurang memahami tentang kesesuaian pemanfaatan ruang, maka semakin mendorong penduduk tersebut untuk mendirikan hunian di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan permukiman. Keenam, faktor daya tarik perkotaan yang memicu urbanisasi. Ketujuh, faktor sosial budaya berupa keberagaman struktur dan norma penduduk yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan antar penduduk dan kesejahteraan di kawasan tersebut. Kedelapan, faktor status kepemilkan bangunan mempengaruhi cara pandang penduduk dalam menjaga kualitas hunian yang ditempati, dimana penduduk enggan untuk memperbaiki hunian tersebut sehingga semakin lama kualitas hunian menurun. Kesembilan, faktor lama tinggal penghuni yaitu semakin lama penduduk yang mendiami hunian dengan kondisi non permanen, maka akan menurunkan kualitas hunian dan menjadikan

lingkungan kawasan menjadi kumuh. Penyebab permukiman kumuh menurut Wilandari dan Sulistyarso (2017) terdiri dari faktor peran pemerintah, faktor ekonomi, faktor kependudukan, faktor infrastruktur permukiman, dan faktor standard pemanfaatan ruang sekitar TPA. Faktor peran pemerintah berupa kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak belum signifikan, seperti belum tersedia atau rusaknya infrastruktur permukiman dan sebagainya. Faktor ekonomi yaitu jenis pekerjaan warga mengasilkan penghasilan yang rendah dan tidak menentu, dimana banyak warga di permukiman kumuh bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah atau dibawah UMR sehingga menyebabkan ketidakmampuan memiliki hunian yang layak huni. Faktor kependudukan menjadi penyebab permukiman kumuh dimana permukiman temporer yang dibangun pendatang di lahan kosong yang tidak tertata karena ketidakmampuan dalam memiliki hunian yang layak huni akibat rendahnya *skill* dan pendidikan, serta kesadaran atau kepedulian warga. Faktor infrastruktur permukiman menyebabkan kekumuhan mencakup kurangnya pelayanan air bersih, fasilitas persampahan, saluran air hujan atau drainase, dan jaringan jalan. Faktor standard pemanfaatan ruang sekitar TPA menyebabkan kumuh karena dekatnya jarak permmukiman terhadap TPA sehingga dampak bau sangat terasa, pencemaran air tanah, keberadaan hewan-hewan yang mengganggu kesehatan seperti lalat, nyamuk dan serangga lainnya.

Berdasarkan hasil kajian teori mengenai faktor-faktor penyebab permukiman kumuh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh dapat disebabkan beberapa faktor, dimana dapat dikelompokkan menjadi faktor fisik, faktor sosial kependudukan, dan faktor regulasi.

2.1.4. Karakteristik Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, seperti aspek fisik, ekonomi,

sosial, dan budaya. Karakteristik permukiman kumuh menurut Suparlan dalam Handryant (2011) adalah permukiman kumuh memiliki fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai, kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin, tingkat frekuensi dan kepadatan bangunan yang tinggi sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya, memiliki satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, memiliki penghuni yang tidak homogen secara sosial dan ekonomi, dan sebagian besar penghuni permukiman kumuh bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Sedangkan menurut Herlianto dalam Prasetyo (2009), permukiman kumuh memiliki karakteristik berupa kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan berupa ketidaktersediaan prasarana, fasilitas dan utilitas, kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan-bahan bangunan yang digunakan bersifat semi permanen, dan memiliki kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Menurut Solehati, dkk (2017), karakteristik permukiman kumuh yaitu memiliki kondisi bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis (segi keselamatan, kenyamanan dan kesehatan), memiliki kualitas jalan lingkungan yang buruk, drainase lingkungan tidak melayani seluruh permukiman atau memiliki kualitas yang buruk, penyediaan air minum tidak melayani seluruh penduduk, memiliki pengelolaan air limbah dan sanitasi yang buruk, memiliki sarana dan prasarana persampahan yang buruk, dan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran.

Berdasarkan hasil kajian teori mengenai karakteristik permukiman kumuh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh memiliki karakteristik yang ditinjau dari kondisi fisik, penyediaan sarana dan prasarana, serta sosial demografi penduduknya. Karakteristik tersebut dinilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

2.1.5. Pola Penanganan Permukiman Kumuh

Pola penanganan permukiman kumuh menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 meliputi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh. Pola penanganan pencegahan terdiri dari pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, peningkatan kualitas terdiri atas pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali yang ditinjau berdasarkan kondisi kekumuhan serta legalitas lahan.

Penanganan pemugaran dilakukan pada status lahan legal dengan kondisi kekumuhan ringan. Penanganan peremajaan dilakukan pada status lahan legal serta kondisi kekumuhan sedang hingga berat. Sedangkan, pada status lahan yang tidak legal perlu dilakukan permukiman kembali. Berikut Gambar 2.1. menunjukkan konsep atau pola penannganan ditinjau dari kondisi kekumuhan.

Tabel 2.1 Pola Penanganan Permukiman Kumuh

	Kondisi Kekumuhan	Konsep atau Pola Penanganan
Pencegahan	Permukiman kumuh baru	• Pengawasan dan Pengendalian • Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kualitas	• Berat • Legal	Peremajaan
	• Sedang • Legal	Peremajaan
	• Ringan • Legal	Pemugaran
	• Tidak Legal	Pemukiman kembali

Sumber: RP2KPKP Surabaya, 2017

Berdasarkan Tabel 2.1. didapatkan bahwa dalam peningkatan kualitas dapat dilakukan tiga penanganan yaitu Peremajaan, Pemugaran, dan Pemukiman kembali.

Pemugaran diartikan sebagai pola penanganan yang dilakukan untuk perbaikan perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016). Pemugaran dilakukan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat parsial pada perumahan dan permukiman kumuh yang berdiri sesuai peruntukkan ruangnya atau legal.

Peremajaan diartikan sebagai pola penanganan yang dilakukan dengan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016). Beddu (2015) menyatakan bahwa peremajaan dilakukan dengan pembongkaran dalam rangka pembaharuan struktur fisik dan fungsi. Jenis-jenis penanganan pada peremajaan terdiri dari *renewal, redevelopment,* dan *restorasi. Renewal* adalah peremajaan yang bersigat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian dibangun kembali secara struktural pada lahan yang sama. *Redevelopment* adalah peremajaan dengan menata kembali suatu permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan yang tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. Sedangkan, restorasi adalah peremajaan yang bertujuan mengembalikan kondisi permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan peryaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang hilang tanpa menambah unsur baru.

Sedangkan, pemukiman kembali diartikan sebagai pola penanganan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin

dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016). Jika ditinjau dari kondisi kekumuhan serta legalitas lahan, permukiman kembali dilakukan pada permukiman yang berstatus tidak legal. Selain itu, permukiman kembali dilakukan jika memberikan dampak negatif yang lebih besar jika tetap dipertahankan. Ridho dalam Musthofa (2011) menyatakan bahwa permukiman kembali dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu pendekatan interaktif kepada masyarakat, pembentukan forum diskusi warga, penyusunan penempatan lokasi rumah tinggal baru, dan memindahkan warga ke lokasi yang baru.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga pola penananganan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh, didapatkan bahwa penentuan pola didasarkan pada kondisi kekumuhan serta status legalitas lahan. Berdasarkan tingkat kekumuhannya, Kelurahan Wonokusumo memiliki kondisi kumuh sedang. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan legalitas lahannya, Kelurahan Wonokusumo tidak menempati lahan aset pemerintah atau tanah illegal. Sehingga, strategi peremajaan dapat diterapkan di Kelurahan Wonokusumo.

2.1.6. Peremajaan Permukiman Kumuh

Definisi dan tujuan peremajaan permukiman kumuh telah banyak diatur baik dalam peraturan perundang-undangan ataupun pendapat para ahli. Peremajaan didefinisikan sebagai kegiatan dengan perombakan mendasar yang bersifat menyeluruh dan memerlukan peran serta masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, peremajaan diupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas terhadap kawasan hunian yang kumuh. Definisi peremajaan menurut Mentari (2018) adalah upaya dalam mewujudkan lingkungan menjadi lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Selain itu, Wibawa (2019) mengatakan bahwa

peremajaan permukiman kumuh merupakan kegiatan untuk memperbaiki dan untuk memperbaharui suatu kawasan kota yang memiliki mutu lingkungan yang rendah. Peremajaan permukiman tersebut dikatakan Ervianto (2019) bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi hak-hak keselamatan warganya. Sehingga, berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peremajaan permukiman kumuh adalah sebuah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas permukiman yang buruk, dengan melakukan perombakan sebagian atau seluruh kawasan hingga menjadi kawasan yang aman, nyaman, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Tahapan dalam melakukan peremajaan permukiman kumuh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nonor 14 Tahun 2018. Secara garis besar, peremajaan dilakukan melalui tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

Tahap pra konstruksi diawali dengan proses identifikasi lokasi kawasan kumuh yang akan diremajakan. Identifikasi tersebut memuat gambaran umum lokasi beserta permasalahan yang dapat dirumuskan. Sehingga, pada proses ini menghasilkan kebutuhan peremajaan berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah dirumuskan permasalahan dan kebutuhan peremajaan, ditetapkan lokasi hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak selama proses peremajaan. Kemudian, dilanjutkan kepada sosialisasi dan rembuk warga yang dilaksanakan kepada kelompok masyarakat yang terdampak. Pada proses sosialisasi dan rembuk warga bertujuan untuk pengkondisian warga serta penjaringan aspirasi. Hasil musyawarah dan diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan yang dilibatkan dalam penyusunan rencana peremajaan.

Tahap konstruksi pada proses peremajaan terdiri dari proses ganti rugi, penghunian sementara ke lokasi lain, pelaksanaan konstruksi

peremajaan, pemantauan/ evaluasi, dan proses penghunian kembali masyarakat yang terdampak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016, terdapat perbedaan proses ganti rugi antara penganganan permukiman kumuh metode peremajaan dengan permukiman kembali. Proses ganti rugi dengan metode permukiman kembali dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan pada status lahan ilegal. Sedangkan, proses ganti rugi dengan metode peremajaan dilakukan lebih fleksibel dimana ganti rugi kepada masyarakat terdampak dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan. Kemudian, pelaksanaan peremajaan dilakukan, dimana sebelumnya masyarakat yang terdampak dipindahkan terlebih dahulu ke lokasi hunian sementara yang telah ditetapkan pada tahap pra konstruksi. Setelah itu, dilakukan penghunian kembali ke lokasi semula.

Sedangkan, pada tahap pasca konstruksi peremajaan meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan serta perbaikan. Tahap pasca konstruksi tersebut bertujuan agar fungsi kawasan permukiman yang telah diremajakan tetap berfungsi dengan baik dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Pada tahap pasca konstruksi dilakukan dengan pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut Gambar 2.1. menunjukkan tahapan peremajaan.

Gambar 2.1 Pola Penanganan Permukiman Kumuh

Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2018

Berdasarkan penjelasan dan Gambar 2.1. tersebut, dipahami bahwa dalam melaksanakan peremajaan, diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang akan menghasilkan kebutuhan peremajaan. Selanjutnya perlu dilakukan sosialiasi dan mendata masyarakat yang terdampak proses perombakkan. Lalu disusun rencana dalam melakukan peremajaan permukiman.

2.1.7. Kriteria Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh memiliki beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan. Kriteria tersebut mengacu

pada Peraturan Menteri PUPR No.2 Tahun 2016 tetang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, yang mencakup :
   a. Ketidakteraturan Bangunan yang tidak memenuhi ketentuan RDTR dan/atau RTBL.
   b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
   c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan, mencakup:
   a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
   b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum, yang mencakup :
   a. Ketidaktersediaan akses aman air minum
   b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan, yang mencakup :
   a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
   b. Ketidaktersediaan drainase
   c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
   d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya
   e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah, mencakup :
   a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
   b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan, yang terdiri dari :
   a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
   b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
   c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase
7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran, mencakup :
   a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
   b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

Kriteria lain digunakan oleh Asa (2015) dalam menilai permukiman kumuh dengan beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Rasio keteraturan bangunan, berupa jumlah bangunan yang tidak membelakangi sungai, menghadap jalan, dan berada di sempadan pantai dibagi dengan jumlah keseluruhan bangunan.
2. Tingkat kepadatan bangunan, yang dinilai berdasarkan jumlah bangunan dibagi dengan luas lahan terbangun.
3. Tingkat kualitas bangunan, berupa jumlah bangunan permanen dan non permanen beserta kondisinya.
4. Rasio kelancaran drainase, dinilai berdasarkan kelancaran drainase (lancar, tidak lancar, tergenang dan tidak ada genangan),

tinggi genangan, durasi genangan, frekuensi genangan dan sumber gangguan.

5. Rasio pelayanan air bersih, yang dinilai berdasarkan jangkauan pelayanan PDAM.
6. Rasio jenis sanitasi, yang dinilai berdasarkan jenis pembuangan air limbah rumah tangga.
7. Tingkat pelayanan pengangkutan sampah domestik, berupa frekuensi pengangkutan sampah dalam seminggu.
8. Tingkat kondisi perkerasan jalan, yang dinilai berdasarkan kondisi perkerasan jalan (baik, sedang, buruk, sangat buruk).
9. Rasio fasilitas pendidikan, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi jumlah fasilitas pendidikan
10. Rasio fasilitas kesehatan,yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi jumlah fasilitas kesehatan.
11. Rasio fasilitas sosial budaya, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi jumlah fasilitas sosial budaya.
12. Rasio RTH, berupa luas RTH dibagi luas wilayah.
13. Status kepemilikan lahan, yang dinilai berdasarkan presentase status kepemilikan lahan.
14. Frekuensi banjir yang terjadi dalam setahun
15. Frekuensi kebakaran yang terjadi dalam setahun.
16. Kepadatan penduduk, yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah.
17. Kepadatan hunian, yang dinilai berdasarkan luas bangunan dibagi dengan jumlah penghuni rumah.
18. Tingkat pendidikan, berupa pendidikan terakhir yang ditempuh.
19. Angka kesakitan, yang dinilai berdasarkan frekuensi dan jenis penyakit yang serting melanda masyarakat dalam setahun.
20. Tingkat kriminalitas, yang dinilai berdasarkan frekuensi tindak kejahatan dalam setahun.

21. Tingkat pendapatan berupa pengeluaran dan tabungan perbulan.
22. Tingkat kemiskinan, yang dinilai berdasarkan jumlah KK Pra Sejahtera, Sejahtera I dan penerima Raskin.

Sunarti, dkk (2019) juga mengungkapkan kriteria-kriteria dalam menilai permukiman kumuh yaitu sebagai berikut.

1. Rasio bangunan tidak layak huni, yang dinilai berdasarkan persentase bangunan non permanen terhadap total bangunan.
2. Kepadatan bangunan, yang dinilai dari jumlah bangunan dibagi luas wilayah.
3. Ketidakteraturan bangunan yang dinilai berdasarkan persentase bangunan yang tidak teratur dibagi total bangunan.
4. Kualitas jaringan jalan, yang dinilai berdasarkan panjang jalan yang sudah diperkeras dan tidak mengalami kerusakan terhadap total panjang jalan.
5. Pelayanan air bersih, yang dinilai berdasarkan jumlah KK yang tidak terlayani air bersih untuk kebutuhan air minum, mandi dan mencuci terhadap total KK.
6. Pelayanan drainase, yang dinilai berdasarkan panjang drainase yang mengalami kerusakan dan luas permukiman yang mengalami banjir atau genangan.
7. Air limbah, yang dinilai berdasarkan jumlah KK yang tidak terlayani sanitasi.
8. Persampahan, yang dinilai berdasarkan jumlah KK yang tidak terlayani fasilitas persampahan.
9. Proteksi kebakaran, yang dinilai berdasarkan ketersediaan fasilitas proteksi kebakaran di lingkungan permukiman.
10. Kepadatan penduduk, yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah.
11. Tingkat kemiskinan, yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk.

12. Legalitas lahan, yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk yang tidak memiliki surat atau akta sebagai bukti kepemilikan bangunan yang ditempati.

Selain itu, Wimardana (2016) menilai permukiman kumuh menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan lahan, yang dinilai berdasarkan status kepemilikan tanah yang ditinggali.
2. Kualitas bangunan, yang dinilai berdasarkan jenis material dan konstruksi bangunan.
3. Kepadatan bangunan, yang dinilai dari jumlah bangunan per hektar.
4. Pertambahan bangunan kumuh, yang dinilai berdasarkan luas perkembangan permukiman kumuh (Ha).
5. Jarak antar bangunan, yang dinilai dari jarak antar sisi bangunan satu dengan bangunan lainnya.
6. Kualitas jaringan jalan lingkungan, yang dinilai dari jenis perkerasan dan lebar jalan yang digunakan.
7. Kualitas drainase, yang dinilai berdasarkan ketersediaan jaringan drainase dan tingkat kinerja drainase melalui tingginya muka air jika terjadi genangan.
8. Kualitas jaringan air minum, yang dinilai berdasarkan tingkat pelayanan penggunaan fasilitas air bersih (terlayani atau tidak terlayani), jenis sumber air, dan konsumsi penggunaan jaringan air.
9. Kualitas persampahan yang dinilai berdasarkan pola pengelolaan sampah (ditimbun, dibakar, dibuang ke sungai, atau ditampung di bak).
10. Kualitas air limbah, yang dinilai berdasarkan jumlah MCK individu dan MCK umum.

11. Katagori bencana, yang dinilai berdasarkan jenis bencana yang terjadi di kawasan permukiman.
12. Penanggulangan bencana, yang dinilai berdasarkan ketersediaan jalur evakuasi bencana.
13. Kesesuaian dengan perundang-undangan dan dasar penataan ruang, yang dinilai dari luas kawasan peruntukkan permukiman sesuai dengan dokumen perencanaan.
14. Kepadatan penduduk yang dinilai dari kepadatan penduduk per Ha.
15. Pertumbuhan penduduk dinilai dari laju pertumbuhan setiap tahunnya.
16. Kegiatan masyarakat, yang dinilai dari intensitas kegiatan gotong royong di kawasan permukiman kumuh.
17. Tingkat pendidikan, yang dinilai berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir.
18. Pola mata pencaharian, yang dinilai dari jenis mata pencaharian penduduk.
19. Tingkat pendapatan penduduk, dinilai dari besar penghasilan.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, berikut Tabel 2.2. menunjukkan kriteria kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2 Tahun 2016 tetang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta kriteria dari para ahli.

Tabel 2.2. Kriteria Permukiman Kumuh

Sumber	Kriteria		Definisi
Peraturan Menteri PUPR No.2 Tahun 2016	Fisik bangunan	Ketidakteraturan bangunan	Bangunan yang tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR atau RTBL, meliputi bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan.
		Tingkat Kepadatan Bangunan	KDB atau KLB tidak sesuai RDTR dan/atau RTBL. Kepadatan bangunan tidak melebihi 250 unit/Ha (metropolitan) dan 200 unit/Ha (kota sedang dan kota kecil)
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Kondisi bangunan tidak memenuhi persyaratan pengendalian dampak lingkungan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan gedung.

Sumber	Kriteria		Definisi
	Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Ketersediaan akses jalan lingkungan di permukiman
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	Kondisi jalan lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman
	Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	Ketersediaan akses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
		Pemenuhan kebutuhan air minum setiap individu	Pemenuhan kebutuhan air minum minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari.
	Drainase Lingkungan	Kemampuan mengalirkan limpasan	Kemampuan drainase mengalirkan limpasan air sehingga tidak menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun

Sumber	Kriteria		Definisi
		Ketersediaan drainase	Ketersediaan saluran drainase lingkungan berupa saluran tersier dan/atau saluran lokal.
		Keterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	Keterhubungan drainase dengan saluran pada hirarki diatasnya
		Pemeliharaan drainase	Ketersediaan pemeliharaan drainase secara rutin di kawasan permukiman.
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas drainase meliputi material pelapis atau penutup dan tidak terjadi kerusakan.
	Air Limbah	Sarana prasarana pengelolaan air limbah	Ketersediaan pengelolaan air limbah pada lokasi yang memadai berupa kakus atau kloset yang terhubung dengan tangki septik.
	Persampahan	Sarana prasarana persampahan	Ketersediaan sarana prasarana persampahan dengan pemeliharaan rutin

Sumber	Kriteria		Definisi
	Proteksi Kebakaran	Sarana Prasarana	Ketersediaan sarana prasarana proteksi kebakaran
Marga-retha (2015)	Keteraturan bangunan		Jumlah bangunan yang tidak membelakangi sungai, menghadap jalan, dan berada di sempadan pantai dibagi dengan jumlah keseluruhan bangunan.
	Kepadatan bangunan		Jumlah bangunan dibagi dengan luas lahan terbangun.
	Kualitas bangunan		Jumlah bangunan permanen dan non permanen beserta kondisinya.
	Kelancaran drainase		Kelancaran drainase, tinggi genangan, durasi genangan, frekuensi genangan, dan sumber gangguan.
	Pelayanan air bersih		Jangkauan pelayanan air bersih.
	Jenis sanitasi		Jenis pembuangan air limbah rumah tangga.
	Pelayanan pengangkutan sampah domestik		Frekuensi pengangkutan sampah dalam seminggu

Sumber	Kriteria	Definisi
	Kondisi perkerasan jalan	Kondisi perkerasan jalan (baik, sedang, buruk, sangat buruk)
	Rasio fasilitas pendidikan	Jumlah penduduk dibagi jumlah fasilitas pendidikan
	Rasio fasilitas sosial budaya	Jumlah penduduk dibagi jumlah fasilitas sosial budaya.
	Rasio RTH	Luas RTH dibagi luas wilayah
	Status kepemilikan lahan	Persentase status kepemilikan lahan
	Frekuensi banjir	Banyaknya kejadian banjir dalam satu tahun
	Frekuensi kebakaran	Banyaknya kejadian kebakaran dalam satu tahun
	Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk dibagi luas wilayah
	Kepadatan hunian	Luas bangunan dibagi dengan jumlah penghuni rumah.

Sumber	Kriteria	Definisi
	Tingkat pendidikan	Pendidikan terakhir yang ditempuh
	Angka kesakitan	Frekuensi dan jenis penyakit yang melanda masyarakat dalam satu tahun
	Tingkat kriminalitas	Frekuensi tindak kejahatan dalam setahun
	Tingkat pendapatan	Pengeluaran dan tabungan perbulan
	Tingkat kemiskinan	Jumlah KK Pra Sejahtera, Sejahtera I dan penerima Raskin.
Sunarti, dkk (2019)	Rasio bangunan tidak layak huni	Jumlah bangunan non permanen dibagi total bangunan
	Kepadatan bangunan	Jumlah bangunan dibagi luas wilayah
	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan yang tidak teratur dibagi total bangunan

Sumber	Kriteria	Definisi
	Kualitas jaringan jalan	Panjang jalan yang sudah diperkeras dan tidak mengalami kerusakan dibagi total panjang jalan
	Pelayanan air bersih	Jumlah KK yang tidak terlayani air bersih
	Drainase	Luas wilayah yang memiliki drainase rusak sehingga menimbulkan genangan atau banjir
	Air Limbah	Jumlah KK yang tidak memiliki sanitasi
	Persampahan	Jumlah KK yang tidak terlayani fasilitas persampahan
	Proteksi Kebakaran	Ketersediaan fasilitas proteksi kebakaran di lingkungan permukiman

Sumber	Kriteria	Definisi
	Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk dibagi luas wilayah
	Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk
	Legalitas lahan	Jumlah penduduk yang tidak memiliki surat atau akta
Wimar-dana (2014)	Kepemilikan lahan	Status kepemilikan tanah yang ditinggali
	Kualitas bangunan	Jenis material dan konstruksi bangunan yang digunakan.
	Kepadatan bangunan	Jumlah bangunan per hektar
	Pertambahan bangunan kumuh	Luas perkembangan pertambahan permukiman kumuh (Ha).

Sumber	Kriteria	Definisi
	Jarak antar bangunan	Jarak antar sisi bangunan satu dengan bangunan lainnya
	Kualitas jaringan jalan lingkungan	Jenis perkerasan dan lebar jalan yang digunakan
	Kualitas drainase	Ketersediaan jaringan drainase dan tingkat kinerja drainase melalui tingginya muka air jika terjadi genangan
	Kualitas jaringan air minum	Tingkat pelayanan penggunaan fasilitas air bersih (terlayani atau tidak terlayani), jenis sumber air, dan konsumsi penggunaan jaringan air
	Kualitas persampahan	Pola pengelolaan sampah (ditimbun, dibakar, dibuang ke sungai, atau ditampung di bak).
	Kualitas air limbah	Jumlah MCK individu dan MCK umum.

Sumber	Kriteria	Definisi
	Kategori bencana	Jenis bencana yang terjadi di kawasan permukiman
	Penanggulangan bencana	Ketersediaan jalur evakuasi bencana
	Kesesuaian dengan perundang-undangan dan dasar penataan ruang	Luas kawasan peruntukkan permukiman yang sesuai dengan dokumen perencanaan
	Kepadatan penduduk	Kepadatan penduduk per Ha.
	Pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk
	Kegiatan masyarakat	Intensitas kegiatan gotong royong di kawasan permukiman kumuh
	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir
	Pola mata pencaharian	Jenis mata pencaharian penduduk
	Tingkat pendapatan penduduk	Besar penghasilan

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.2 Tahun 2016, Margaretha (2015),Sunarti (2019), dan Wimardana (2014).

Berdasarkan kriteria penilaian permukiman tersebut, dapat diketahui bahwa kriteria penilaian permukiman kumuh terdiri dari keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah rumah tangga, air bersih, rasio fasilitas pendidikan, rasio fasilitas kesehatan, rasio fasilitas sosial budaya, rasio luas RTH, status kepemilikan lahan, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kriminalitas, tingkat pendapatan, tingkat kemiskinan.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

2.2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

2.2.1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Keberlanjutan merupakan suatu kondisi yang dapat menopang, mempertahankan, memelihara atau melestarikan sesuatu yang lain (Ferreira dalam Feil, 2017). Fauzi (2014) mendefisikan keberlanjutan sebagai *continuing without lessening*, yang berarti melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi.

Sedangkan menurut *World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam Klarin (2018), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan di generasi yang akan datang. Moffat dalam Feil (2017) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertahankan atau memastikan bahwa suatu sistem bekerja dalam jangka panjang, dimana kualitas hidup dimasa depan harus lebih baik dari saat ini. Definisi lain disampaikan oleh Gomis,dkk (2011) dimana pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tindakan dalam menghindari efek destruktif lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta konsisten dalam mewujudkan hubungan yang harmonis untuk menjamin kehidupan di masa yang akan datang. Emil dalam Jaya (2004) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia dengan pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Berdasarkan hasil kajian teori mengenai definisi pembangunan berkelanjutan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi dan melindungi kebutuhan manusia dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi tanpa mengorbangkan kebutuhan di masa yang akan datang.

2.2.2. Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan berlandaskan tiga dimensi atau pilar keberlanjutan yang harus dilaksanakan secara seimbang, yaitu ekologi atau lingkungan, sosial dan ekonomi (Elkington dalam Klarin, 2018**)**. Keberlanjutan dalam pilar lingkungan berarti menjaga keutuhan lingkungan sebagai syarat mutlak untuk menjamin perkembangan kehidupan dan kualitas hidup, diantaranya adalah perlindungan terhadap lingkungan, pengurangan emisi polutan, penggunaan sumber daya secara rasional, dan sebagainya. Keberlanjutan dalam pilar sosial berarti pelestarian nilai-nilai sosial sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan, diantaranya adalah pelestarian identitas masyarakat dan budaya, penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, ras, dan agama, dan sebagainya. Sedangkan, Keberlanjutan dalam pilar ekonomi berarti mencapai pendapatan dan standar hidup masyarakat dengan menjaga modal alam, sosial dan manusia.

2.2.3. Indikator Permukiman Kumuh berdasarkan *Sustainable Development Goals*

Pembangunan berkelanjutan memiliki 17 tujuan global yang dimuat dalam *Sustainable Development Goals* (UN, 2019). Tujuan tersebut ditunjukkan oleh Gambar 2.2. sebagai berikut.

Gambar 2.2 *Sustainable Development Goals*

Sumber: UNDP, 2018

Tujuan global tersebut memiliki 169 target dimana setiap target memiliki *proposed indicator* yang saling terkait. Berdasarkan tujuan global yang ditunjukkan oleh Gambar 2.1., tujuan atau *Goals 11 SDGs* atau yang lebih dikenal dengan *urban SDG* adalah mewujudkan suatu perkotaan dan permukiman inklusif yang aman, tangguh dan berkelanjutan. Permasalahan terkait permukiman yang ditangani oleh *Goals 11 SDGs* tersebut berupa permukiman kumuh (slums), permukiman illegal (informal settlements), dan perumahan tidak layak huni (inadequate housing). *United Habitat* (2016) menyusun kerangka untuk mencapai tujuan SDGs nomor 11 tersebut kedalam beberapa target dan *proposed indicator* sebagai berikut.

2.2.4. Kriteria *Sustainable Development Goals* Nomor 11

Sustainable Development Goals 11 memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu perkotaan dan permukiman inklusif yang aman, tangguh dan berkelanjutan (*Make cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable*). UN Habitat (2016) telah menyepakati bahwa SDG Goals 11 memiliki 7 target yang akan dicapai pada tahun 2030. Masing-masing target tersebut memiliki indikator dan *proposed indicator* sebagai standar pengukuran.

Target pertama dari *SDGs Goals 11* adalah mewujudkan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau serta meningkatkan kualitas di permukiman kumuh (*Adequate, Safe and Affordable Housing*). *Indicator* dalam target pertama *SDGs Goals 11* adalah mengurangi populasi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh (*slum*), permukiman informal (*informal settlements*), dan perumahan tidak layak huni (*inadequate housing*). Masing-masing indikator tersebut, baik permukiman kumuh, pernukiman informal atau permukiman tidak layak huni memiliki *proposed indicator* yang menjadi standar untuk mencapai target pertama *SDGs Goals 11*.

Proposed indicator dalam penanganan permukiman kumuh (slum) harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut.

1. Kriteria kualitas bangunan (*structural quality/ durability of dwellings*) yang memiliki standar dalam struktur bangunan, standar bangunan, dan lokasi bangunan. Struktur bangunan dikatakan memenuhi syarat jika memiliki struktur permanen (baik atap, dinding, dan lantai) serta bangunan tidak mengalami kerusakan (*not in need major repair*). Standar bangunan dikatakan terpenuhi jika bangunan mematuhi kode bangunan atau *building Code*. *APEC (2013)* menyatakan bahwa *Building Code* yang terdapat di Indonesia telah disahkan setelah tahun 2005, dimana merupakan amanat dari Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. *Building code* di Indonesia menyangkut *Electrical Code*, *Energy code*, *Water and Sanitation*, *Indoor air Quality*, *Lightning*, *Fire*, *Structural*, dan *Safety*. Terkait dengan struktur bangunan atau *structural* diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2002 (National Regulation Law 28 of 2002) dan PP Nomor 36 Tahun 2005 (Regulation 36 of 2005). Berdasarkan standar minimum tersebut, disebutkan bahwa struktur bangunan harus memiliki beberapa sifat. Bangunan yang ditempati harus bersifat stabil yang artinya kondisi tidak mudah terguling, miring atau tergeser. Bangunan juga harus memiliki struktur kuat atau kokoh dengan memenuhi persyaratan keselamatan sehingga memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan bagi penghuninya. Berdasarkan kriteria tersebut, kategori bangunan permanen yang juga disyaratkan pada kriteria *Durability of Dwellings* telah memenuhi *building codes* jika didirikan sesuai syarat dan tidak mengalami kerusakan. Sedangkan, Lokasi bangunan dikatakan sesuai jika bangunan tersebut tidak terletak di lokasi yang membahayakan seperti daerah rawan bencana, sekitar pembuangan limbah,

sekitar tegangan listrik, bantaran rel kereta, serta daerah rawan lainnya.

2. Kriteria ruang huni yang cukup (*sufficient living spaces*) yang terpenuhi jika tidak lebih dari tiga orang yang menghuni satu ruang bersama. Ruang yang dimaksud adalah ruang yang dapat ditinggali (*habitable room*) yaitu kamar. Foye (2017) menyatakan bahwa kriteria ini berkaitan dengan kesejahteraan penghuni, dimana semakin sempit hunian akan mengakomodasi aktivitas yang kecil pula. Selain itu, UNSD (2018) berpendapat bahwa hunian yang padat dapat berbahaya bagi kesehatan, seperti flu, pneumonia, TBC dan lainnya. Dalam kriteria ini, UNSD menjelaskan lebih detail bahwa hunian yang tergolong padat tersebut selain dihuni lebih dari tiga orang, juga ukuran ruangan tidak lebih dari 2x2 m. Namun, dikatakan bahwa kriteria ini hanya memberikan signifikan yang kecil bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Kriteria air bersih (*access to improved water*) yang memiliki standar dalam besaran konsumsi air yang digunakan, sumber air bersih, dan maksimal penduduk yang mengakses sumber air tersebut. Jika dilihat berdasarkan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, kriteria ini terpenuhi jika kebutuhan masyarakat terhadap air bersih telah terpenuhi (20 liter/ orang/ hari). Sedangkan, berdasarkan sumber air yang digunakan, WHO (2017) mendefinisikan *improved water* sebagai sumber yang dapat memberikan air bersih baik secara alami ataupun konstruksi yang sengaja dibuat. Sumber tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu perpipaan (*piped* supplies) dan non perpipaan (*non piped supplies*). Sumber air perpipaan yang dianggap layak berupa sambungan perpipaan yang didistribusikan ke rumah-rumah warga ataupun keran air minum publik yang dapat

digunakan bersama-sama. Sedangkan, sumber air non perpipaan yang dianggap layak terdiri dari sumur bor (*boreholes*), sumur dan mata air yang terlindungi, penampung air hujan (*rain water harvesting*), dan *packaged water* (termasuk air minum kemasan).Secara kualitas, air bersih dapat diklasifikasikan menjadi lima katagori, yaitu *No service/ Surface Water, unimproved, limited, basic,* dan *safely managed*. *No service/ Surface Water* diartikan sebagai air yang terhubung langsung dari air permukaan seperti sungai, danau, kolam, dan lainnya. *Unimproved* diartikan sebagai air yang sebenarnya didapat dari sumber yang terlindung namun memiliki kualitas buruk karena kontaminasi, seperti sumur yang tercemar, atau mata air yang terkontaminasi. *Limited* diartikan sebagai air bersih yang didapat dari sumber terlindungi, dimana waktu untuk mengaksesnya lebih dari 30 menit (termasuk waktu mengantri air bersih). Sedangkan, basic diartikan sebagai air bersih yang didapat dari sumber terlindungi, dimana waktu untuk mengaksesnya kurang dari 30 menit. *Safely managed* diartikan sebagai air bersih yang didapat dari sumber yang terlindungi, dapat diakses kapanpun, dan terhindar dari pencemaran. Berdasarkan katagori tersebut, air bersih yang termasuk *improved water* terdiri dari kategori *safely managed* dan *basic*. Artinya, secara kualitas air bersih yang dianggap layak adalah air bersih yang didapat dari sumber yang terlindungi dari pencemaran dan dapat diakses maksimal 30 menit. Jika ditinjau berdasarkan maksimal penduduk yang mengakses air bersih, air bersih dianggap layak jika sumber air bersih tidak diakses lebih dari lima keluarga.

4. Kriteria sanitasi yang layak (*access to adequate sanitation*) memiliki standar dalam jenis sanitasi dan jumlah maksimal keluarga yang mengakses sanitasi. WHO (2017) menyatakan bahwa kategori sanitasi dibagi menjadi lima katagori, yaitu *open*

defecation, unimproved, limited, basic, dan *safely managed*. *Open defecation* diartikan sebagai jenis sanitasi yang langsung dibuang ke ruang terbuka, seperti lapangan, hutan, semak-semak, pantai, dan lainnya. *Unimproved sanitation* terdiri dari jamban tanpa papan pijakan (*pit latrines without a slab*), jamban umum terbuka (*hanging latrine*), dan pispot (*bucket latrines*). Sedangkan katagori *Limited* artinya sanitasi tertutup yang digunakan oleh lebih dari dua KK. *Basic* diartikan sebagai jenis sanitasi yang hanya digunakan oleh satu hingga dua keluarga. Katagori *safely managed* diartikan sebagai sanitasi yang hanya digunakan maksimal dua keluarga dan limbah tersebut dikelola secara *in situ* atau diangkut dan dikelola secara *offsite*. UNICEF (2019) menyatakan bahwa pengelolaan *in situ* berarti limbah dari sanitasi tersebut tidak dikosongkan, melainkan limbah tetap berada di dalam tanah. Jika penuh, limbah akan dikubur dengan disalurkan ke lubang tertutup tanpa diangkut keluar. Sedangkan, pengelolaan secara *offsite* berarti limbah dari sanitasi dikumpulkan oleh truk pengangkut melalui *septictank*, kemudian dibawa kepada fasilitas pembuangan publik untuk dikelola secara komunal. Baik pengelolaan *in situ* ataupun *offsite* dianggap memenuhi kriteria *adequate sanitation*. Berdasarkan kelima kategori yang termasuk *adequate sanitation* adalah katagori *safely managed, basic* dan limited, yang artinya sanitasi tidak digunakan lebih dari dua keluarga dan terdapat pengelolaan in situ atau terdapat *septictank* dan dikelola secara *offsite*.

5. Kriteria keamanan bermukim (*security of tenure*) yang terpenuhi jika memiliki status tanah legal dan tidak menimbulkan ancaman serta dapat melindungi penghuninya dari penggusuran paksa. UNSD (2018) menyatakan bahwa syarat keamanan bermukim (*security of tenure*) merupakan hak semua individu untuk

mendapatkan perlindungan yang sama. UN Habitat (2017) menjelaskan bahwa status tanah tersebut harus dibuktikan dalam dokumen yang diakui secara hukum sehingga hak mereka atas tanah yang ditempati dapat terlindungi.

Target pertama dari SDG nomor 11 juga memuat *proposed indicator* dalam penanganan permukiman informal (*informal settlements*). *Proposed indicator* dalam penanganan permukiman informal adalah sebagai berikut.

1. Kriteria keamanan bermukim (*security of tenure*) yang terpenuhi jika penduduk memiliki kepemilikan legal atas tanah yang ditinggali. Kepemilikan tersebut dibuktikan dengan surat atau akta.
2. Kriteria akses terhadap fasilitas umum (*basic services and infrastructure*) yang terpenuhi jika permukiman memiliki akses terhadap sarana dan prasarana umum.
3. Kriteria kesesuaian perencanaan (*planning and building regulations*) yang terpenuhi jika kawasan memiliki kesesuaian terhadap rencana permukiman.

Selain memuat tentang indikator permukiman kumuh (*slum*) dan permukiman informal, target pertama SDGs nomor 11 juga memiliki *proposed indicator* mengenai permukiman yang tidak layak huni (*inadequate housing*). *Proposed indicator* yang dimuat bagi permukiman tidak layak huni adalah sebagai berikut.

1. Kriteria legalitas lahan (*legal security of tenure*) yang terpenuhi jika permukiman memiliki status tanah yang legal sehingga keberadaan permukiman tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi penghuninya.
2. Kriteria keterjangkauan (*affordability*) yang terpenuhi jika kemampuan dalam mengakses rumah tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan. Almaden (2014) dan Schwartz (2018) menyatakan

bahwa hunian dikatakan terjangkau jika biaya untuk mengakses hunian tersebut beserta pemenuhan dasarnya tidak lebih dari 30% dari pendapatan penghuniya.

3. Kriteria kelayakhunian (*habitability*) yang terpenuhi jika rumah dapat melindungi penghuninya dari berbagai ancaman seperti melindungi penghuni dari udara dingin, panas, hujan atau ancaman lainnya. *International Council for Science (2017)* menyatakan bahwa kriteria *habitability* ditujukan untuk mengurangi resiko bahaya baik bahaya yang bersifat menular, atau terjadi karena dipicu oleh lingkungan luar. UN (2016) lebih menspesifikkan kriteria *habitability* kepada ruang hunian yang cukup dan struktur bangunan yang aman.
4. Kriteria ketersediaan fasilitas penunjang permukiman (*availability of services*) yang terpenuhi jika fasilitas dapat memenuhi kebutuhan penghuninya, antara lain ketersediaan air minum yang layak, sanitasi, energi gas untuk memasak, energi listrik untuk pencahayaan, dan sistem pembuangan limbah rumah tangga.
5. Kriteria aksesibilitas (*accessibility*) yang terpenuhi jika tidak ada kelompok yang tersisihkan dalam mengakses rumah, seperti kelompok tidak mampu, disabilitas, korban bencana, atau diskriminasi suatu kelompok. UN (2011) menyatakan bahwa kriteria aksesibilitas dapat tercapai jika kelompok tersebut merasa aman dan nyaman terhadap hunian yang ditinggali.
6. Kriteria lokasi (*location*) yang terpenuhi jika lokasi permukiman dapat menjangkau kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, atau tempat untuk bekerja. Selain terletak pada lokasi yang dapat menjangkau pelayanan dasar, kriteria lokasi juga terpenuhi jika lokasi tidak terletak pada kawasan yang

membahayakan penghuninya, seperti rawan bencana ataupun kawasan dengan polusi tinggi.

7. Kriteria kesesuaian budaya (*cultural adequacy*) yang terpenuhi jika permukiman tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat.

Target kedua dari SDGs nomor 11 adalah mewujudkan sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan khususnya bagi wanita, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Target kedua memiliki *proposed indicator* dengan kriteria aksesibilitas (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*), kualitas (*quality*), dan *modal shift*. Aksesibilitas dinilai berdasarkan proporsi masyarakat yang terlayani fasilitas transportasi. Hal tersebut didapatkan dari *buffer* sejauh 500 meter dari setiap titik pemberhentian, lalu menghitung populasi masyarakat di setiap wilayah permukiman yang termasuk buffer tersebut. Keterjangkauan biaya (*affordability*) terpenuhi jika harga yang dibayarkan tidak lebih dari 5% dari pendapatan kelompok masyarakat yang meiliki pendapatan terendah. Kualitas (*quality*) yang dinilai berdasarkan waktu pelayanan, keterjangkauan rute terhadap fasilitas umum, keamanan, dan kenyamanan. *Modal shift* dinilai berdasarkan jenis moda yang digunakan dengan jarak tempuh dari suatu daerah ke daerah lainnya. Hal tersebut untuk mengukur kontribusi emisi CO2 atas moda yang digunakan.

Target ketiga dari SDGs nomor 11 adalah mewujudkan urbanisasi yang inklusif dan manajemen permukiman yang partisipatif, terintegrasi serta berkelanjutan. Target ketiga tersebut memiliki *proposed indicator* berupa konsumsi lahan (*land consumption rate*) dan partisipasi (*direct participation*). Konsumsi lahan (*Land consumption rate*) menilai seberapa besar pertambahan luas lahan terbangun dalam rentang waktu tertentu. *Land consumption rate* tersebut memiliki rumus pertambahan luas lahan terbangun dibagi pertambahan penduduk di setiap tahunnya.

Sedangkan, partisipasi yang dimaksud pada target ketiga adalah menilai tingkat keterlibatan masyarakat terhadap perencanaan permukiman. Penilaian tersebut dinilai dengan Skala Likert, dimana proses perencanaan tersebut meliputi persetujuan rencana, keuangan, dan evaluasi (penampungan kritik dan saran). Hasil penilaian tersebut dihitung dengan jumlah responden yang memilih diatas skala rata-rata dibagi total reponden serta disajikan dalam persentase.

Target keempat dari SDGs nomor 11 adalah melindungi warisan setempat dengan *proposed indicator* berupa proporsi pengeluaran biaya untuk warisan tersebut (*public expenditure*). UN (2019) menyatakan bahwa hal itu bertujuan untuk mengukur usaha para pihak pengelola, baik swasta atau pemerintah setempat agar warisan tersebut tetap menarik masyarakat. Pada target keempat, warisan yang dimaksud dibagi dalam tiga jenis, yaitu warisan budaya (*cultural heritage*), warisan alam (*natural heritage*), dan warisan dunia (*world heritage*). Warisan budaya terdiri dari artefak, monumen, situs budaya, dan museum yang menyimpan peninggalan sejarah. Warisan alam yang dimaksud berupa habitat hewan atau tumbuhan yang terancam punah, wilayah konservasi, kebun raya dan suaka. Sedangkan, warisan dunia merupakan situs atau peninggalan yang telah dicatat oleh UNESCO. Pengeluaran biaya tersebut dapat berupa biaya perawatan, donasi, dan insentif.

Target kelima dari SDGs nomor 11 adalah melindungi masyarakat yang terdampak bencana, terutama kelompok rentan. *Proposed indicator* dalam target ini adalah proporsi korban jiwa yang terdampak dalam 100.000 penduduk. Korban jiwa tersebut termasuk korban meninggal, hilang, dan korban terdampak langsung. UN (2018) menyebutkan bahwa *proposed indicator* tersebut diadopsi dari *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, dimana menjadi acuan secara global dalam hal mengurangi resiko bencana. Adapun proporsi korban jiwa yang

dimaksud dihitung dengan cara menjumlahkan korban jiwa yang meninggal, hilang dan terdampak per 100.000 penduduk, lalu dibagi dengan total populasi.

Target keenam dari SDGs nomor 11 adalah meningkatkan kualitas udara dan pengelolaan limbah. Target keenam memiliki *proposed indicator* berupa meningkatkan proporsi limbah yang dikelola (*adequate final discharge*) dan konsentrasi partikel kawasan terhadap kota (*fine suspended particles*). *Proposed indicator* pengelolaan limbah merupakan proporsi limbah kota yang dikelola melalui empat tahap (penghasil limbah, pengumpulan dan pengangkutan, daur ulang dan pengelolaan, serta pembuangan akhir) terhadap total limbah yang dihasilkan. UN (2016) menyatakan bahwa limbah yang diaggap telah dikelola dengan layak adalah limbah yang dikelola baik secara *on-site* ataupun *offsite.* Sedangkan, *proposed indicator* kedua adalah tingkat konsentrasi partikel di suatu kota. Tingkat konsentrasi partikel tersebut menyangkut kualitas udara, dimana polusi yang tinggi akan menyebabkan partikel masuk ke saluran pernapasan hingga mengalami gangguan kesehatan khususnya pernapasan (UN, 2017).Konsentrasi partikel berlaku pada penilaian skala perkotaan.

Target ketujuh dari SDGs Goals 11 adalah meningkatkan akses terhadap ruang publik yang aman, inklusif dan hijau, khususnya bagi wanita dan anak-anak, lansia dan disabilitas. Target ketujuh ini memiliki dua *proposed indicator. Proposed indicator* pertama adalah proporsi ruang publik yang tersedia terhadap total luas lahan. UN (2018) menyatakan bahwa ruang publik yang dimaksud terdiri dari taman, tempat rekreasi, taman sipil (taman dengan penggunaan terbatas untuk acara), atau plaza. *Proposed indicator* ruang publik dinyatakan dalam persentase luas tutupan lahan yang digunakan untuk ruang publik dibagi luas daerah terbangun. Sedangkan, *proposed indicator* kedua adalah proporsi masyarakat yang mengalami kekerasan di ruang publik dalam kurun waktu satu tahun terakhir.UN (2018) menyatakan bahwa *proposed indicator* tersebut

berkaitan dengan kerugian yang diderita korban berupa hilangnya rasa aman untuk beraktifitas di ruang publik, hingga kerugian fisik dan emosional. *Proposed indicator* tersebut dihitung berdasarkan jumlah korban yang mengalami kekerasan di ruang publik dibagi total populasi, yang kemudian dinyatakan dalam persentase.

Berdasarkan penjelasan dari ketujuh Target SDGs Goals 11 tersebut, berikut Tabel 2.2. menunjukkan *proposed indicator* dari masing-masing target. Dimana beberapa *proposed indicator* tersebut menjadi standar atau penilaian yang digunakan berdasarkan prespektif SDGs Goals 11.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut kriteria yang terdapat di SDG Goal 11 ditunjukkan oleh Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kriteria Permukiman Kumuh berdasarkan SDG Goal 11

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
11.1.	Meningkatkan akses terhadap permuki-man layak (*adequate*), aman (*safe*), terjangkau (*affordable*	**11.1.1**	Proporsi pendu-duk yang tinggal di permuki-man kumuh, informal, Atau	**Permukiman Kumuh / Slum**	
				Durability of Dwellings	Bangunan memiliki struktur dinding, atap, dan lantai yang permanen serta tidak mengalami kerusakan.
				Compliance with Building Code	Bangunan mematuhi kode bangunan, dengan syarat minimal memiliki struktur kuat dan kokoh serta menjamin keselamatan penghuninya.
				Not in need of Major Repair	Bangunan tidak mengalami kerusakan

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
	housing), dan akses terhadap sarana pelayanan umum (*basic services*) serta mengatasi permukiman kumuh.		peruma-han tidak layak	***Location of House***	Bangunan tidak terletak di lokasi yang berbahaya: pembuangan limbah, rawan bencana, bantaran rel kereta, sekitar bandara, dan sekitar tegangan listrik.
				Sufficient Living Spaces	Kepadatan hunian yang layak, maksimal ditinggali 3 otang dalam satu *habitable room* atau ruang yang dapat ditinggali.
				Access to Safe Water	Penduduk dapat memenuhi kebutuhan air bersih minimal 20 liter/ orang/ hari, diperoleh dari sumber yang tidak terkontaminasi (katagori *safely managed* dan *basic*), serta dapat diakses maksimal 30 menit.Untuk sumber air bersih publik maksimal digunakan lima keluarga.

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
				Access to Adequate Sanitation	Memiliki akses sanitasi tertutup maksimal digunakan dua keluarga, dengan pengelolaan secara *in situ* atau *offsite* (terhubung *septictank*).
				Security of Tenure	Memiliki status tanah legal dengan bukti kepemilikan sehingga melindungi penghuni dari penggusuran.
				Permukiman Informal/ *Informal Settlement*	
				Security of Tenure	Memiliki status kepemilikan tanah yang legal dengan bukti kepemilikan.
				Basic Services and Infrastructure	Memiliki akses terhadap sarana dan prasarana umum.

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
				Planning and Building Regulations	Memenuhi kesesuaian perencanaan permukiman dan kesesuaian bangunan
				Hunian yang Layak/ *Adequate Housing*	
				Legal Security of Tenure	Memiliki status tanah legal dengan bukti kepemilikan resmi yang melindungi penghuni dari ancaman penggusuran
				Keterjang-kauan/ *Affordability*	Biaya mengakses rumah dan kebutuhan dasar (listrik, air bersih, persampahan) tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan lainnya (tidak lebih dari 30% dari pendapatan penghuninya.

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
				Habitability	Hunian dapat melindungi penghuninya dari bahaya, berupa kapasitas ruang hunian yang cukup dan struktur bangunan yang aman.
				Availability of Services	Hunian memiliki akses kebutuhan dasar, berupa air minum, sanitasi, listrik, dan persampahan.
				Accessibility	Tidak ada kelompok yang tersisihkan dalam akses hunian dan pelayanan dasar permukiman (kelompok MBR, disabilitas,dan korban bencana), dapat tercapai jika kelompok tersebut merasa aman dan nyaman terhadap lingkungan hunian yang ditinggali.
				Location	Lokasi hunian dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat bekerja.

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
				Cultural Adequacy	Memperhatikan nilai-nilai budaya di kawasan permukiman.
11. 2.	Mencipta kan transporta si publik yang aman, terjangkau , dan mudah diakses	**11. 2.1**	Akses transpor tasi publik yang nyaman	**Aksesibilitas/ *Accesibility***	Persentase penduduk yang terlayani fasilitas transportasi layak maksimal 500 meter dari setiap titik pemberhentian atau fasilitas transportasi lainnya.
				Keterjangkau-an/ *Afforda-bility*	Keterjangkauan biaya transportasi dimana tidak lebih dari 5% pendapatan kelompok terendah di kawasan tersebut.
				Kualitas/ *Quality*	Kualitas pelayanan transportasi publik dalam hal waktu, keamanan, dan kenyamanan.
				Modal Shift	Kontribusi emisi CO2 berdasarkan jenis moda yang digunakan dan jarak yang ditempuh.
11. 3	Mencipta kan urbanisasi	**11. 3.1.**	Konsum si Lahan	**Ekspansi Lahan Terbangun**	Perubahan area terbangun dibagi pertambahan penduduk dalam tahun yang sama (%)

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
	yang positif dan partisipasi masyarakat	**11.3.2.**	Partisipasi	**Tingkat Partisipasi**	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan permukiman, mulai dari persetujuan rencana, keuangan, dan evaluasi (penampungan kritik dan saran).
11.4.	Melin-dungi warisan budaya dan alam	**11,4.1**	Pembiayaan warisan budaya	**Alokasi Biaya**	Proporsi biaya yang disediakan untuk melindungi kawasan warisan budaya, alam atau dunia terhadap total pendapatan.
11.5.	Perlin-dungan terhadap masyarakat rentan	**11.5.1.**	Jumlah Korban terdampak bencana	**Jumlah Korban Terdampak**	Persentase korban bencana yang meninggal, hilang, dan terdampak langsung per 100.000 jiwa.

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
		11.5.2.	Kerusakan Fisik	**Kerusakan Infrastruktur**	Besarnya kerugian akibat kerusakan infrastruktur fisik bangunan
11.6.	Kualitas udara dan pengelolaan limbah	**11.6.1.**	Pengelolaan limbah	Persentase limbah kota yang yang dikelola dengan layak mulai dari penghasil limbah, pengumpulan dan pengangkutan, daur ulang dan pengelolaan, serta pembuangan akhir terhadap total limbah yang dihasilkan. Pengelolaan limbah yang layak adalah limbah yang dikelola secara *in situ* atau *off site.*	
		11.6.2.	Konsentrasi partikel udara terhadap populasi	**Partikel udara perkotaan**	Konsentrasi partikel udara di kota dibagi populasi kota
11.7.	Ruang publik yang	**11.7.1.**	Proporsi ruang publik	**Persentase Luas Ruang Publik**	Proporsi ruang publik terhadap daerah terbangun yang dihitung berdasarkan total lahan untuk ruang publik dibagi tutupan lahan daerah terbangun

Target		Proposed Indicator		Kriteria	Definisi
	aman dan inklusif	**11. 7.2.**	Tingkat kekerasan yang terjadi di ruang publik	**Frekuensi Kejadian Kekerasan**	Jumlah penduduk yang mengalami kekerasan di ruang publik dibagi jumlah penduduk

Sumber: UN Monitoring Framework and Metadata, 2016

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Kriteria lain digunakan oleh Teferi (2017) dalam menerapkan SDGs untuk menilai permukiman kumuh Addis Ababa dengan beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Kriteria air bersih (*water*) yang dinilai berdasarkan besarnya kebutuhan air yang dikonsumsi per keluarga.
2. Kriteria energi (energy) yang dinilai berdasarkan jenis dan besarnya kebutuhan pembangkit yang digunakan (*Electricity/ Kerosine/ Charcoal/ Gasoline/ Diesel*)
3. Kriteria limbah padat (*solid waste*) yang dinilai berdasarkan banyaknya limbah yang dihasilkan per keluarga.
4. Kriteria limbah cair (*liquid waste*) yang dinilai berdasarkan banyaknya limbah yang dihasilkan per keluarga.
5. Kriteria ekonomi (*economic*) yang dinilai berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan per keluarga.
6. Kriteria hunian (*housing*) yang dinilai berdasarkan jenis konstruksi bangunan, tingkat kerusakan bangunan (*minor improvement* dan *need everything* unchanged), ketersediaan sanitasi, dan kepemilikan bangunan.
7. Kriteria pendidikan (*education*) yang dinilai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh.
8. Kriteria komunitas (*community*) yang dinilai berdasarkan kondisi lingkungan permukiman dilihat dari tingkat keamanan yang dirasakan penduduk (*feel secure*), tingkat kenyamanan (*happy to live there*), tingkat keterikatan sosial (*trust neighbours*), dan tingkat akses sarana prasarana.

2.3. Studi Penelitian Terdahulu

2.3.1. Assesing Urban Sustainability of Slum Settlements in Bangladesh: Evidence from Chittagong City

Penelitian bertujuan menguji indikator-indikator terkait keberlanjutan pada permukiman kumuh dan liar di negara berkembang dengan studi kasus Kota Chittagong di Bangladesh. Indikator tersebut diuji secara kualitatif kepada 97 responden melalui metode FGD. Hasil yang didapatkan adalah penduduk pada permukiman kumuh tersebut memiliki kondisi perumahan dibawah standar, padat dan tidak sehat. Selain itu, layanan kesehatan, sanitasi, air, dan pembuangan limbah yang menghambat pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini kemudian diintrepertas untuk selanjutnya dirumuskan permasalahan atau potensi dari masing-masing variabel tersebut. Adapun variabel serta indikator yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Variabel karakteristik rumah tangga (*Household characteristic*), yang dinilai berdasarkan kondisi sosioekonomi meliputi kelompok umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Kelompok umur dikelompokkan dalam 10 kelompok dari 15 hingga 61 tahun, dimana untuk mengetahui dominasi kelompok umur yang dianggap usia produktif untuk bekerja, yaitu antara 25 tahun hingga 50 tahun. Tingkat pendidikan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan responden, yang terdiri dari kelompok *Illiterate* (tidak mengenyam pendidikan formal), *Primary School* (setara pendidikan dasar), SSC/ *Secondary School* (setara dengan pendidikan vokasional), dan *HSC/Higher Secondary School* (Setara pendidikan sarjana). Selain diidentifikasi dari tingkat pendidikannya, penelitian ini mendeskripsikan karakteristik lain dari responden jika dilihat dari tingkat pendidikannya. Hal tersebut didapatkan bahwa pada lokasi penelitian, perempuan cenderung memiliki akses

pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dimana perempuan cenderung melakukan pernikahan muda dan melakukan pendidikan non formal untuk bekerja. Sedangkan, tingkat pendapatan diidentifikasi berdasarkan jenis pekerjaan beserta tingkat pendapatannya. Hasil dari penilaian berdasarkan tingkat pendapatan didapatkan bahwa penduduk memiliki sektor pekerjaan informal dan pekerjaan yang tidak menentu (*seasonal occupation*).

2. Variabel karakteristik perumahan (*Housing characteristic*), yang dinilai berdasarkan struktur bangunan, lokasi hunian dan kepadatan hunian. Struktur bangunan menghasilkan persentase bangunan yang memiliki struktur permanen dan dapat melindungi penghuni dari ancaman cuaca seperti hujan dan panas. Kepadatan hunian menghasilkan persentase kepadatan setiap ruangannya yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, mulai dari 1 penghuni/ ruangan hingga 10 penghuni/ ruangan. Lokasi hunian diidentifikasi berdasarkan persentase rumah yang tinggal di lokasi yang membahayakan, baik dari segi keselamatan ataupun ancaman penggusuran. Penelitian ini menggambarkan bahwa beberapa wilayah permukiman berada di tanah milik pemerintah dan terletak di sempadan rel di area *Tulatoli.*
3. Variabel akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih (*Access to health and water services*), yang dinilai berdasarkan akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan, dan akses terhadap air bersih beserta sumber air bersih yang digunakan. Akses kesehatan dinilai berdarkan sumber pelayanan kesehatan yang diakses oleh masyarakat, dimana pada penelitian menyebutkan hanya 1 dari 4 responden yang memilih fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Sedangkan, mayoritas lebih menggunakan jasa tetua yang dianggap dapat menyembuhkan

penyakit mereka (pengobatan alternatif) atau disebut *kabiraj*. Sedangkan, air bersih dinilai berdasarkan persentase sumber air bersih yang terlindungi serta tidak terkontaminasi.

4. Variabel akses terhadap sanitasi dan pembuangan limbah (*Access to sanitation and waste disposal*), yang dinilai berdasarkan ketersediaan akses terhadap sanitasi, akses terhadap pembuangan air limbah, dan jenis sanitasi berupa toilet yang digunakan beserta banyaknya rumah tangga dalam memanfaatkan toilet tersebut.
5. Variabel akses terhadap listrik dan gas (*Access to electricity and gas*), yang dinilai berdasarkan ketersediaan akses terhadap jaringan listrik dan gas.
6. Variabel keamanan (*security and hazard*), yang dinilai berdasarkan frekuensi kriminalitas yang terjadi di kawasan permukiman kumuh.

Setelah diidentifikasi dari masing-masing variabel tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Chittagong, Bangladesh. Perumusan masalah tersebut didasarkan pada standar-standar keberlanjutan pada permukiman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permukiman di Kota Chittagong memiliki beberapa permasalahan, yaitu terletak pada tingkat pendidikan, kesehatan, sanitasi dan kemiskinan. Secara umum, hasil dari FGD merumuskan penyelesaian permasalahan berupa pembentukan program yang dapat menginisiasi masyarkat untuk sadar terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan fasilitas publik, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Dari penelitian ini menyarankan keterlibatan swasta dalam perbaikan permukiman.

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa dalam menganalisis karakteristik keberlanjutan permukiman kumuh diperlukan standar-standar tertentu, yang dapat menyatakan lingkungan tersebut layak. Standar tersebut perlu diterapkan baik secara fisik maupun non fisik. Jika ditinjau dari variabel yang

digunakan, untuk mengetahui keberlanjutan permukiman kumuh di Kota Chittagong, sebagian besar penilaian mengadaptasi dari indikator SDGs nomor 11, seperti variabel karakteristik perumahan, sanitasi, dan variabel keamanan. Penilaian tersebut dapat digolongkan dalam persentase, yang kemudian menghasilkan permasalahan berdasarkan standar keberlanjutan yang terkait.

Jika dibandingkan dengan penanganan permukiman kumuh yang terdapat di RP2KPKP, RPLP Kelurahan, dan dokumen penanganan kumuh lainnya, penilaian berkelanjutan khususnya sesuai indikator SDGs *Goals 11*, memiliki beberapa perbedaan yang dapat melengkapi indikator kumuh. Indikator-indikator pada SDGs Goals tersebut melingkupi penilaian non fisik seperti unsur sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya. Dimana, penilaian keberlanjutan tersebut bersifat lebih mikro jika dibandingkan dari penilaian indikator kumuh. Namun, baik dari indikator kumuh ataupun penilaian berkelanjutan, sama-sama dapat menghasilkan karakteristik untuk menilai permukiman kumuh yang akan menghasilkan permasalahan-permasalahan di kawasan tersebut. Sehingga, dengan menggabungkan indikator-indikator baik dari permukiman kumuh atau SDGs dapat menghasilkan strategi peremajaan yang lebih mikro dan dapat menangani permasalahan secara mendetail.

2.4. Sintesa Teori

Permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni dan memiliki sarana dan prasarana yang tidak layak bagi masyarakat. Keberadaan permukiman kumuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor fisik, faktor kependudkan, faktor ekonomi dan lainnya. Dalam mencegah perkembangan perkembangan permukiman kumuh, maka dibentuk pola penanganan yang dimuat dalam Undang Nomor 1 Tahun 2011 meliputi pencegahan dan peningkatan kualitas terdap permukiman kumuh. Peningkatan

kualitas permukiman kumuh terdiri atas pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Untuk mengetahui strategi bagi peningkatan kualitas permukiman kumuh berkelanjutan yang sesuai amanat *Sustainable Development Goals* Nomor 11, perlu memperhatikan variabel-variabel permukiman kumuh dan pembangunan berkelanjutan. Maka, variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4. Sintesa Teori

No	Indikator	Variabel	Alasan Memilih
1	Fisik Bangunan	Keteraturan Bangunan	Fisik bangunan yang buruk atau kurang layak akan mengganggu kenyamanan penghuni serta estetika dari kawasan permukiman. Selain itu, fisik bangunan menjadi tempat yang ditinggali setiap hari atau sebagai tempat penghuni melakukan aktivitas. Sehingga, indikator dan variabel-variabel tersebut akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.
		Kepadatan Bangunan	
		Kualitas Bangunan	
		Lokasi Hunian	
2	Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Sarana dan Prasarana menjadi tempat pemenuhan kebutuhan penduduk dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keberadaannya perlu dijamin baik secara fisik ataupun kualitasnya.
		Kelancaran Drainase	
		Ketersedia-an Air Bersih	

No	Indikator	Variabel	Alasan Memilih
		Kondisi Sanitasi	Sehingga, sarana dan prasarana yang buruk atau tidak memenuhi persyaratan akan mengganggu aktivitas penduduk dan mempengaruhi kualitas kawasan permukiman kumuh.
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	
		Proteksi Kebakaran	
		Akses Sarana Kesehatan	
		Akses Sarana Pendidikan	
		Ketersedia-an RTH	
3	Status Legalitas	Status Kepemili-kan Lahan	Status legalitas berpengaruh dalam penentuan penanganan permukiman kumuh, baik legalitas lahan ataupun legalitas bangunannya. Selain berkaitan dengan penentuan jenis penanganan yang dapat

No	Indikator	Variabel	Alasan Memilih
		Legalitas Bangunan	dilakukan, status legalitas juga berpengaruh terhadap keamanan bermukim penghuninya, dimana dapat melindungi penghuni dari ancaman penggusuran. Sehingga, indikator dan variabel ini dianggap relevan terhadap penelitian.
4	Sosial Kependu-dukan	Kepadatan Penduduk	Kondisi sosial kependudukan berpengaruh terhadap perilaku dan aktivitas masyarakat yang mendukung penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan kualitas permukiman yang baik dan aman.
		Tingkat Pendidikan	
		Tingkat Partisipasi	
		Frekuensi Kegiatan Masyarakat	
		Frekuensi Kriminali-tas	
5	Sosial Ekonomi	Tingkat Kemiski-nan	Kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

No	Indikator	Variabel	Alasan Memilih
		Kemam-puan Pemenuhan Rumah Layak Huni	Kesejahteraan tersebut berdampak pada kondisi kawasan permukiman, baik secara fisik ataupun non fisik.
		Tingkat Pendapatan	

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Dalam memperjelas kriteria SDGs Goals 11 terhadap variabel yang dipilih, berikut *linkage* ditunjukkan oleh Tabel 2.5.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Tabel 2.5. *Linkage* kriteria SDGs Goals 11 dan Variabel yang Telah Dipilih

Kriteria SDGs Goals 11	Variabel																						
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Durability of Dwellings	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compliance with Building Code	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not in need of Major Repair	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location of House	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sufficient Living Spaces	Kriteria *Sufficient Living Space* dimana menilai kelayakan hunian berdasarkan maksimal penghuni dalam satu kamar tidak dilibatkan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan kriteria ini memberikan signifikan yang kecil terhadap kesejahteraan masyarakat (UNSD, 2018). Serta, kelayakan hunian dapat dilihat dari variabel kualitas bangunan serta pemenuhan rumah layak huninya.																						
Access to Safe Water	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kriteria SDGs Goals 11	Variabel																						
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Access to Adequate Sanitation	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Security of Tenure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Basic Services and Infrastructure	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planning and Building Regulations	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal Security of Tenure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Affordability	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
Habitability	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Availability of Services	-	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kriteria SDGs Goals 11	Variabel																						
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Accessibility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultural Adequacy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
Transportation Accesibility	Kriteria *Transportation Accesibility*, *Affordability*, *Quality*, dan *Modal Shift* yang menjadi proposed indicator Goals 11 pada 11.2.1 tidak dilibatkan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan penilaian kriteria tersebut tidak dapat dilihat hanya dalam skala RT/RW dalam permukiman kumuh Wonokusumo saja. Serta terdapat beberapa keterbatasan data seperti Kontribusi emisi CO2 setiap moda yang digunakan dalam kriteria Modal Shift																					
Transportation Affordability																							
Transportation Quality																							
Modal Shift																							
Ekspansi Lahan Terbangun	Kriteria Ekspansi Lahan Terbangun tidak dilibatkan dalam penelitian karena keterbatasan data untuk pertumbuhan area yang terbangun.																						

Kriteria SDGs Goals 11	Variabel																						
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Tingkat Partisipasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
Alokasi Biaya Warisan Budaya dan Alam	-	-	Kriteria tidak dilibatkan karena tidak terdapat warisan budaya atau alam.																			-	-
Jumlah Korban Terdampak Bencana	-	Kriteria Jumlah Korban Terdampak Bencana tidak dilibatkan dalam penelitian karena penilaian kriteria ini berdasarkan skala kota (yang dihitung per 100.000 jiwa).																					-
Kerusakan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	Kriteria ini tidak dilibatkan karena keterbatasan data untuk besaran kerusakan infrastruktur akibat bencana														-
Pengelolaan Limbah	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kriteria SDGs Goals 11	Variabel																						
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Konsentrasi Partikel di Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kriteria ini tidak dilibatkan karena penilaian berdasarkan skala kota dan keterbatasan data untuk mengetahui konsentrasi partikel di udara.																						
Persentase Luas Ruang Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frekuensi Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Keterangan:

V1 = Keteraturan Bangunan
V2 = Kepadatan Bangunan
V3 = Kualitas Bangunan
V4 = Lokasi Hunian
V5 = Kondisi Jalan
V6 = Kelancaran Drainase
V7 = Ketersediaan Air Bersih
V8 = Kondisi Sanitasi
V9 = Kondisi Persampahan
V10 = Proteksi Kebakaran
V11 = Akses Sarana Kesehatan
V12 = Akses Sarana Pendidikan
V13 = Ketersediaan RTH
V14 = Status Kepemilikan Lahan
V15 = Status Legalitas Bangunan

V16 = Kepadatan Penduduk
V17 = Tingkat Pendidikan
V18 = Tingkat Partisipasi
V19 = Frekuensi Kegiatan Masyarakat
V20 = Frekuensi Kriminalitas
V21 = Tingkat Kemiskinan
V22 = Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni
V23 = Tingkat Pendapatan

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitan yang digunakan dalam merumuskan strategi peremajaan di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya. Adapun hal-hal yang dibahas dalam bab ini berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tahapan penelitian. Berikut dijelaskan lebih lanjut.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik. Menurut Muhadjir (1996) pendekatan rasionalistik merupakan pendekatan yang mengakui kebenaran etik dari teori-teori yang mendasar, logis, dan berdasarkan proses ketajaman fikir manusia dalam memberikan sebuah makna. Sehingga, penelitian ini memiliki landasan teori yang bersumber pada fakta-fakta empirik. Artinya, ilmu yang dibangun berdasarkan pengamatan indera atau nalar yang dikuatkan dengan landasan teori.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian campuran atau *mix methods.* Menurut Sugiyono dalam Sirnayatin (2013), penelitian campuran atau *mix method* diartikan sebagai suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. Creswell (2014) menyatakan beberapa keunggulan menggunakan *mix method* dalam suatu penelitian. Pertama, *mix method* dapat menghasilkan fakta atau data yang lebih luas dengan mengintegrasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga menghasilkan data yang

lebih valid. Kedua, *mixed method* dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Ketiga *mix method* dapat memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggunakan metoda dalam meneliti sebuah masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan *mix method* dalam memperoleh hasil penelitian, sehingga data yang diperoleh diharapkan lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Mix method yang digunakan dalam penelitian ini bersifat mengeksplorasi permasalahan yang sedang terjadi dengan memanfaatkan dukungan teori-teori yang telah ada. Permasalahan didapatkan dengan metode kuantitatif yang diperoleh dari hasil klaster berlandaskan data sekunder, naskah kuisioner, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan metode kualitatif diterapkan dalam analisis kebijakan sebagai pendukung dari permasalahan yang telah dirumuskan.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah atribut atau objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono dalam Qurrotullain, 2013). Berdasarkan definisi tersebut, untuk mempelajari dan memperoleh informasi, suatu variabel harus bersifat dapat diukur baik secara kuantitatif atau kualitatif. Dalam pengukurannya, variabel tersebut harus didefinisikan secara operasional supaya variabel tersebut bersifat spesifik (tidak berintrepertasi ganda) dan terukur. Variabel dan definisi operasional tersebut didapatkan dari sintesa pustaka yang menjadi dasar pengukuran penelitian ini. Berdasarkan hasil sintesa tinjauan pustaka, didapatkan indikator, variabel dan defisi operasional yang ditunjukkan oleh Tabel 3.1. sebagai berikut.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
1. Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo 2. Menganalisis kebijakan terkait peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya.	Fisik Bangunan	Keteraturan Bangunan	Persentase jumlah bangunan yang memiliki keteraturan dengan lingkungannya dan tidak mengganggu aktivitas seperti tidak menghalangi jalan, tidak berada di sepadan pantai atau sungai dibagi dengan total bangunan.
		Kepadatan Bangunan	Tingkat kepadatan bangunan permukiman yang dinilai dari jumlah bangunan dibagi luas wilayah.

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
		Kualitas Bangunan	Persentase bangunan yang memiliki kondisi layak huni dan menjamin keselamatan penghuni (bangunan permanen dan tidak mengalami kerusakan) dibagi total bangunan.
		Lokasi Hunian	Persentase luas kawasan permukiman yang tidak terletak di lokasi berbahaya, meliputi kawasan rawan bencana, sekitar tegangan listrik, bantaran rel kereta, dan pembuangan limbah.
	Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Persentase panjang jalan yang permukaannya sudah diperkeras (beraspal atau berpaving) dan tidak

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
			mengalami kerusakan dibagi total panjang jalan.
		Kelancaran Drainase	Persentase panjang jaringan drainase yang tidak mengalami kerusakan serta memiliki kapasitas cukup untuk mengalirkan air limpasan sehingga tidak menimbulkan banjir atau genangan, dibagi total panjang saluran.

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
		Ketersediaan Air Bersih	Persentase KK yang memiliki sumber air bersih yang tidak terkontaminasi baik warna, bau, dan rasa (termasuk katagori *safely managed* dan *basic*), dapat diakses maksimal 30 menit, serta maksimal digunakan oleh lima keluarga.
		Kondisi Sanitasi	Persentase KK yang memilki ketersediaan akses sanitasi tertutup maksimal digunakan oleh dua keluarga, dengan pengelolaan secara *in situ* atau *offsite* (terhubung *septic tank*).

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
		Kondisi Persampahan	Persentase KK yang memiliki sarana persampahan dengan pengangkutan rutin sehingga tidak terjadi penumpukkan sampah di kawasan permukiman.
		Proteksi Kebakaran	Ketersediaan fasilitas proteksi kebakaran dikawasan permukiman.

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
		Akses Sarana Kesehatan	Ketersediaan akses sarana kesehatan dengan kondisi fisik yang layak dan memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat (termasuk kelompok rentan : MBR, disabilitas, dan lansia).
		Akses Sarana Pendidikan	Ketersediaan akses sarana pendidikan sesuai jangkauan pelayanannya dengan kondisi fisik yang layak dan dapat diakses seluruh kelompok masyarakat.
		Ketersedia-an RTH	Persentase luas RTH yang tersedia sebagai sarana berkumpul dan berinteraksi terhadap total luas wilayah.

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
	Status Legalitas	Status kepemilikan lahan	Persentase penduduk dengan kepemilikan lahan yang legal dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM).
		Status Legalitas Bangunan	Persentase penduduk yang memiliki bangunan legal atau memiliki status bangunan yang jelas, dibuktikan dengan kepemilikan IMB.
	Sosial Kependu-dukan	Kepadatan Penduduk	Jumlah penduduk dalam satuan luas, yang dihitung dari total penduduk dibagi luas wilayah
		Tingkat Pendidikan	Kualitas SDM di kawasan permukiman kumuh yang diukur dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh.

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
		Tingkat Partisipasi	Persentase KK yang berpartisipasi atau berperan dalam penanganan permukiman kumuh.
		Frekuensi Kegiatan Masyarakat	Intensitas kegiatan gotong royong atau kegiatan lainnya terkait penanganan permukiman kumuh dalam kurun waktu satu tahun.
		Frekuensi Kriminalitas	Intensitas kejadian tindak kriminal dalam satu tahun yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat teruatama di ruang publik.

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
	Sosial Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Tingkat kualitas hidup masyarakat yang dinilai dari jumlah KK non MBR dibagi dengan total KK.
		Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni	Persentase KK yang dapat memenuhi kebutuhan rumah layak huni beserta kebutuhan dasarnya (listrik, air, persampahan), dimana biaya kebutuhan dasar yang diakses tidak lebih dari 30% total pendapatan.
		Tingkat Pendapatan	Besar penghasilan yang diterima oleh satu KK dalam satu bulan.

Sasaran	Indikator	Variabel	Definsi operasional
3. Merumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo dengan prinsip berkelanjutan	Input dari hasil output sasaran 1 dan 2		

Sumber: Analisa Penulis, 2020

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti (Amirullah, 2015). Menurut Kerlinger dalam Susilana (2015), populasi dapat berupa orang, kejadian, atau objek yang dirumuskan dengan jelas dan menjadi pusat perhatian penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa populasi adalah seluruh elemen berupa objek atau subjek dalam penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang terlibat adalah seluruh KK yang tinggal di kawasan permukiman kumuh Wonokusumo.

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian (Amirullah, 2015). Menurut Margono dalam Susilana (2015), sampel dalam suatu penelitian digunakan dengan tujuan mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi serta mengatasi permasalahan lain seperti keterbatasan waktu dan biaya. Berdasarkan hal tersebut, dipahami bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat menggambarkan karakteristik populasi tersebut. Dalam teknik pengambilan sampel dapat digunakan dua metode, yaitu pengambilan sampel secara acak (*random sampling/ probability sampling*) dan pengambilan sampel secara tidak acak atau *non-probability sampling* (Triyono, 2018). *Random sampling/ Probability sampling* memberikan kesempatan yang sama kepada setiap elemen populasi. Sedangkan, elemen populasi dalam *non-probability sampling* tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Berdasarkan hal tersebut, penelitan ini menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* untuk mendapatkan sampel

masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh Wonokusumo.

a. Penentuan *Simple Random Sampling*

Random sampling digunakan untuk mendapatkan responden pada sasaran 1. Teknik ini dilakukan untuk memilih sampel secara random dari masing-masing RW yang ada di kawasan kumuh Wonokusumo. Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam menentukan jumlah sampelnya dengan rumus sebagai berikut.

$$\mathbf{n} = \frac{N}{1 + N\,(e)^2}$$

dimana,
n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
e = *Error tolerance* penelitian

Berdasarkan rumus tersebut, N (ukuran populasi) yang digunakan berupa total KK yang tinggal di kawasan permukiman kumuh yaitu 4.054 KK. Sedangkan, e atau *error tolerance* yang ditetapkan peneliti adalah sebesar 10% (0,1). Berdasarkan hasil perhitungan Rumus Slovin didapatkan jumlah sampel sebanyak 169 KK. Jumlah sampel yang pada masing-masing RW di Kelurahan Wonokusumo ditunjukkan oleh Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Distribusi Sampel Penelitian

Kelurahan	RW terdelineasi kumuh	RT terdelineasi kumuh	Jumlah KK	Banyak sampel
Wonokusu-mo	RW 6	RT 5, RT 6	344	$\frac{344}{4.054}$ x 169 = 14 KK
	RW 7	RT 1–RT 22	3.161	$\frac{3.161}{4.054}$ x 169 = 132 KK
	RW 15	RT 2-RT 5	549	$\frac{549}{4.054}$ x 169 = 23 KK

Total KK	4.054	**169 KK**

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Berdasarkan jumlah sampel tersebut didapatkan bahwa minimal melibatkan 169 KK. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 170 KK sebagai sampel.

Adapun kriteria responden yang ditetapkan peneliti dalam memenuhi quota sampling tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jenis kelamin pria atau wanita.
2. Berusia >17 tahun agar informasi yang didapatkan valid/sah.
3. Telah tinggal di permukiman kumuh Wonokusumo lebih dari lima tahun untuk memastikan bahwa responden memahami secara betul kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo.

3.5. Metode Penelitian

3.5.1. Metode Pengumpulan Data

3.5.1.1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2014). Pengumpulan data primer dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran kondisi faktual wilayah studi atau objek penelitian serta melengkapi kebutuhan data sekunder. Metode pengumpulan data primer yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, penyebaran kuisioner, dan wawancara.

a. Observasi Lapangan

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkonfirmasi kebenaran dari data sekunder yang didapatkan terhadap data-data yang dapat diamati. Selain itu, observasi dalam

penelitian ini juga bertujuan memperbaharui data atau fakta yang didapatkan sehingga sesuai dengan kondisi terkini. Hasil dari observasi lapangan berupa foto yang menggambarkan kondisi eksising di wilayah penelitian.

b. Kuisioner

Kuisioner merupakan seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden terkait data penelitian yang ingin diteliti (Arikunto dalam Alwan, 2017). Kuisioner dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang diajukan kepada sampel KK di permukiman kumuh WOnokusumo. Kuisioner tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh yang lebih dikhususkan kepada data terkait SDG Goals 11, dimana data-data tersebut tidak tersedia pada literatur lain.

Metode yang digunakan dalam memperoleh data primer dari masing-masing sasaran ditunjukkan oleh tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3. Survei Lapangan dalam Perolehan Data Primer

Sasaran	Metode	Keterangan
Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo.	Kuisioner	Menyebarkan kuisioner sesuai proporsi responden yang telah ditentukan di Kelurahan Wonokusumo. Kuisioner ditujukan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dari data sekunder, seperti tingkat pendapatan,

		kualitas bangunan, sarana prasarana dan sebagainya
	Observasi	Pengamatan mengenai kondisi permukiman kumuh sebagai penunjang data sekunder.

Sumber: Analisa Penulis, 2020

3.5.1.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari literatur atau tidak dikumpulkan sendiri. Data-data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari instansi-instansi terkait dan studi pustaka dari penelitian sebelumnya. Dokumen dan kebutuhan data yang diperlukan dalam pengumpulan data sekunder ditunjukkan oleh tabel 3.4. sebagai berikut.

Tabel 3.4. Survei Instansi dalam untuk Data Sekunder

Instansi	Dokumen	Data
➢ BPS Kota Surabaya	1. Kecamatan Semampir dalam Angka	1. Data jumlah dan persebaran sarana di Wonokusumo (pendidikan dan kesehatan)
➢ Kelurahan Wonokusumo	1. Profil Kelurahan	1. Data terkait kependudukan masing-masing RT

Instansi	Dokumen	Data
	Wonokusumo	• Jumlah penduduk masing-masing RT • Junlah KK 2. Batas dan luas masing-masing RT
➢ Bappeko Surabaya ➢ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	1. RDTRK UP V Tanjung Perak 2. RP2KPKP Kota Surabaya	1. Data penggunaan lahan eksisting dan rencana 2. Status permukiman kumuh Wonokusumo
➢ KOTAKU	1. RPLP Kelurahan Wonoku-sumo	1. Data baseline permuki-man Kumuh Wonokusu-mo, meliputi : • Jumlah bangunan • Panjang Jalan • Panjang Drainase • Jumlah proteksi kebakaran • Jumlah kepemilikan SHM • Jumlah kepemilikan IMB

Instansi	Dokumen	Data
		• Delineasi permukiman kumuh Wonokusumo

Sumber: Analisa Penulis, 2020

3.5.2. Metode Analisis

Analisis data merupakan proses pengujian secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan temuan yang dapat diinformasikan kepada orang lain (Stainback dalam Hakim, 2017). Dalam menjawab tujuan penelitian, diperlukan metode analisa yang sesuai untuk mengolah data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan dalam merumuskan strategi peremajaan di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo dijelaskan oleh Tabel 3.5. sebagai berikut.

Tabel 3.5. Metode Analisis setiap Sasaran

Sasaran	Alat Analisis	Input	Output
Mengidentifi-kasi karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Wonokus-umo.	➢ Statistik Deskrip-tif ➢ Analisis Klaster	➢ Keteraturan bangunan ➢ Kepadatan Bangunan ➢ Kualitas bangunan ➢ Kepadatan hunian ➢ Kondisi jalan ➢ Kelancaran drainase	Mapping klasterisasi permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo
Menganalisis kebijakan terkait	➢ Content Analysis		*Support system* untuk penanganan

Sasaran	Alat Analisis	Input	Output
peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya.		➢ Ketersediaan air bersih ➢ Ketersediaan sanitasi ➢ Kualitas persampahan ➢ Ketersediaan proteksi kebakaran ➢ Ketersediaan fasilitas kesehatan ➢ Ketersediaan RTH ➢ Status kepemilikan lahan ➢ Tingkat pendapatan penduduk ➢ Jumlah penduduk miskin	kumuh berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.
Merumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo berdasarkan	➢ SWOT	Sesuai hasil analisis 1 dan 2	Strategi peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo Surabaya.

Sasaran	Alat Analisis	Input	Output
prinsip keberlanjutan			

Sumber: Analisa Penulis, 2020

3.5.2.1. Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo

Analisis karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo dicapai dengan metode statistika deskriptif dan analisa klaster (*cluster analysis*). Statistika deskriptif didefinisikan sebagai metode statistik yang pengerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan (Sholikhah, 2016). Dalam penyajiannya, statistika deskriptif dapat disajikan dalam bentuk diagram, persentase, histogram, frekuensi, dan bentuk lainnya. Analisis statistika deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah data awal terhadap masing-masing RT. Penyajian data berupa persentase yang divisualisasi dengan diagram batang dengan bertujuan memberikan gambaran nilai setiap variabel di masing-masing RT.

Hasil persentase setiap variabel dari masing-masing RT kemudian dilakukan skoring. Skoring dinyatakan dapat membantu dalam proses serta identifikasi analisis selanjutnya (*cluster analysis*) karena data akan dikelompokkan dalam klasifikasi atau katagori yang sama (Barbara, 2014). Dalam penelitian ini, skoring dilakukan berdasarkan peraturan atau standar serta literatur berupa jurnal. Skoring mengelompokkan

data dalam tiga katagori, yaitu buruk (50), sedang (30), dan baik (20). Nilai masing-masing variabel ditunjukkan oleh Tabel 3.6. sebagai berikut.

Tabel 3.6. Nilai Bobot Masing-Masing Variabel

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
Keteraturan Bangunan	<25% bangunan memiliki keteraturan	25%-50% bangunan memiliki keteraturan	>50% bangunan memiliki keteraturan	**Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006** •Nilai 50 untuk <25% bangunan sesuai. •Nilai 30 untuk 25%-50% bangunan sesuai. •Nilai 20 untuk >50% bangunan sesuai.
Kepadatan Bangunan	>100 unit/hektar	80-100 unit/hektar	<80 unit/hektar	**Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006** •Nilai 50 untuk >100 rumah/Ha •Nilai 30 untuk 60-100 rumah/Ha •Nilai 20 untuk <60 rumah/Ha

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
Kualitas Bangunan	<25% bangunan permanen kondisi baik (tanpa kerusakan)	25%-50% bangunan permanen kondisi baik (tanpa kerusakan)	>50% bangunan permanen kondisi baik (tanpa kerusakan)	**Uddin, 2018** Penggolongan kualitas bangunan (*Housing characteristic*) dalam penilaian keberlanjutan permukiman kumuh Bangladesh digolongkan berdasarkan struktur bangunan : solid and permanent (*Pucca*), semi permanent (*semi Pucca/ Tin shed*), dan temporary (*kutcha, jhupri/Mud*) yang dinyatakan dalam persentase. **UN Habitat, 2016** Jika dilihat dari struktur bangunannya, bangunan yang layak memiliki kriteria struktur

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
				dinding, atap, dan lantai yang permanen (*Durability of Dwellings*), dan tidak mengalami kerusakan (*Not in need of Major Repair*). **Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006** • Nilai 50 untuk >50% bangunan permanen. • Nilai 30 untuk 25%-50% bangunan permanen. • Nilai 20 untuk <25% bangunan permanen
Lokasi Hunian	<25% luas kawasan	25%-50% luas kawasan	>50% luas kawasan	**UN Habitat, 2016**

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	permukiman yang tidak terletak di lokasi berbahaya.	permukiman yang tidak terletak di lokasi berbahaya.	permukiman yang tidak terletak di lokasi berbahaya.	Jika dilihat dari lokasi, kawasan permukiman yang layak adalah kawasan yang tidak berbahaya meliputi bantaran rel kereta, sekitar bandara dan sekitar tegangan listrik.
Kondisi Jalan	<50% panjang jalan sudah diperkeras dengan kondisi baik	50%-70% panjang jalan sudah diperkeras dengan kondisi baik	>70% panjang jalan sudah diperkeras dengan kondisi baik	**Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006** • Nilai 50 untuk >70% jalan dengan kondisi buruk. • Nilai 30 untuk 50%-70% jalan dengan kondisi buruk. • Nilai 20 untuk <50% jalan dengan kondisi buruk.
Kelancaran Drainase	<25% drainase	25%-50% drainase dapat	>50% drainase dapat	**Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006**

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	dapat mengalirkan limpasan air sehingga tidak terjadi genangan	mengalirkan limpasan air sehingga tidak terjadi genangan	mengalirkan limpasan air sehingga tidak terjadi genangan	• Nilai 50 untuk kawasan dengan tingkat volume genangan air sangat buruk yaitu lebih dari 50%. • Nilai 30 untuk kawasan dengan tingkat volume genangan air sedang yaitu antara 25%-50%. • Nilai 20 untuk kawasan dengan tingkat volume genangan air normal yaitu kurang dari 25%.
Air Bersih	<30% KK memiliki akses air bersih dari sumber	30%-60% KK memiliki akses air bersih dari sumber yang	>60% KK memiliki akses air bersih dari sumber	**Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006** • Nilai 50 untuk pelayanan air bersih kurang dari 30%.

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	yang terlindungi, dapat diakses maksimal 30 menit, dan maksimal digunakan oleh 5 KK.	terlindungi, dapat diakses maksimal 30 menit, dan maksimal digunakan oleh 5 KK	yang terlindungi, dapat diakses maksimal 30 menit, dan maksimal digunakan oleh 5 KK	• Nilai 30 untuk pelayanan air bersih 30%-60%. • Nilai 20 untuk pelayanan air bersih >60% **WHO, 2017** Secara kualitas air bersih yang dianggap layak adalah air bersih yang didapat dari sumber yang terlindungi dari pencemaran dan dapat diakses maksimal 30 menit, serta sumber air bersih tidak diakses lebih dari lima keluarga.
Sanitasi	<30% memiliki MCK	30%-60% memiliki MCK pribadi	>60% memiliki MCK	**Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006**

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	pribadi terhubung septictank	terhubung septictank	pribadi terhubung septictank	• Nilai 50 untuk tingkat pelayanan <30%. • Nilai 30 untuk tingkat pelayanan 30%-60% • Nilai 20 untuk tingkat pelayanan >60%. **WHO 2017** Sanitasi yang layak adalah tidak digunkan lebih dari dua keluarga dan terdapat pengelolaan in situ atau terdapat *septictank* dan dikelola secara *offsite.* **Uddin, 2018** Penggolongan Sanitasi (*Access to sanitation and Waste Disposal*) dalam penilaian keberlanjutan permukiman kumuh Bangladesh

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
				digolongkan berdasarkan jenis toilet (*sanitary latrine*, *pit latrine* dan *hanging/open spaces*), jumlah pengguna dan pembuangan limbah.
Persampahan	<50% memiliki sarana prasarana persampahan dengan pengangkutan minimal dua kali seminggu	50% - 70% memiliki sarana prasarana persampahan dengan pengangkutan minimal dua kali seminggu	>70 % memiliki sarana prasarana persampahan dengan pengangkutan minimal dua kali seminggu	**Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006** • Nilai 50 untuk tingkat pelayanan <50%. • Nilai 30 untuk tingkat pelayanan 50%-70% • Nilai 20 untuk tingkat pelayanan >70%.
Proteksi kebakaran	<30% tersedia	30%-60% tersedia	>60% tersedia	**Sunarti, 2019**

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	proteksi kebakaran	proteksi kebakaran	proteksi kebakaran	Penggolongan berdasarkan ketersediaan proteksi kebakaran
Akses terhadap sarana kesehatan	<30% masyarakat menyatakan sarana kesehatan memiliki kondisi fisik bangunan yang layak dan fasilitas telah memenuhi	30%-60% masyarakat menyatakan sarana kesehatan memiliki kondisi fisik bangunan yang layak dan fasilitas telah memenuhi pelayanan	>60% masyarakat menyatakan sarana kesehatan memiliki kondisi fisik bangunan yang layak dan fasilitas telah memenuhi	**Asa, 2015** Penggolongan sarana pendidikan digolongkan menjadi: • 40 untuk fasilitas memadai dengan kondisi baik • 30 untuk fasilitas kurang memadai dengan kondisi baik • 20 untuk fasilitas memadai dengan kondisi buruk • 10 untuk fasilitas kurang memadai dengan kondisi buruk

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.	berdasarkan kebutuhan penduduk.	pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.	**Uddin, 2018** Penggolongan akses sarana kesehatan (*Sources of Health Facilities*) dalam penilaian keberlanjutan permukiman kumuh Bangladesh digolongkan berdasarkan akses sarana kesehatan yang digunakan oleh masyarakat (*Government Medical Hospital, Community Clinic, Pharmacy/ Quack* dan *Kabiraj*). Berdasarkan penggolongan tersebut dianggap memenuhi pelayanan jika mengakses *Government Medical Hospita* dan, *Community Clinic* karena ditanggung pemerintah (bantuan kesehatan).

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
Akses terhadap sarana pendidikan	<30% masyarakat memiliki akses terhadap sarana pendidikan sesuai standar yang berlaku dan memiliki kondisi fisik bangunan	30%-60% masyarakat memiliki akses terhadap sarana pendidikan sesuai standar yang berlaku dan memiliki kondisi fisik bangunan yang layak serta fasilitas	>60% masyarakat memiliki akses terhadap sarana pendidikan sesuai standar yang berlaku dan memiliki kondisi fisik bangunan	**Asa, 2015** Penggolongan sarana pendidikan digolongkan menjadi: • 40 untuk fasilitas memadai dengan kondisi baik • 30 untuk fasilitas kurang memadai dengan kondisi baik • 20 untuk fasilitas memadai dengan kondisi buruk • 10 untuk fasilitas kurang memadai dengan kondisi buruk

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	yang layak serta fasilitas telah memenuhi pelayanan berdasar-kan kebutuhan penduduk.	telah memenuhi pelayanan berdasarkan kebutuhan penduduk.	yang layak serta fasilitas telah memenuhi pelayanan berdasar-kan kebutuhan penduduk.	
Ketersediaan RTH	Permukiman memiliki RTH publik sebagai sarana rekreasi	Permukiman memiliki RTH publik sebagai sarana	Permukiman tidak memiliki RTH publik sebagai	**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008** • RTH RT minimal 250m^2 dengan radius kurang dari 300

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	dengan luas minimal 250m^2	rekreasi <250 m^2	sarana rekreasi	m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. • RTH RW minimal 1.250 m^2 dengan radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. • RTH Kelurahan minimal 9.000m2 yang terletak di Kelurahan yang bersangkutan.
Status Kepemilikan Lahan	<30% bangunan memiliki SHM	30%-60% bangunan memiliki SHM	>60% bangunan memiliki SHM	**Rachmad, 2020** Kepemilikan lahan digolongkan menjadi SHM atas nama penghuni, SHM bukan atas nama penghuni, dan Non SHM. **Wiratawan, 2017**

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
				Status kepemilikan lahan berupa persentase hukum perlindungan terhadap status kepemilikan yang dibuktikan dengan kepemilikan SHM.
Status Legalitas Bangunan	<30% bangunan memiliki IMB	30%-60% bangunan memiliki IMB	>60% bangunan memiliki IMB	**Rahmatsyah, 2009** • Katagori sangat baik untuk 85%-100% memiliki IMB. • Katagori baik untuk 67%-84,99% memiliki IMB. • Katagori biasa saja untuk 51%-66,99% memiliki IMB. • Katagori tidak baik untuk 35%-50,99% memiliki IMB • Katagori sangat tidak baik untuk 20%-34,99% memiliki IMB

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
Kepadatan Penduduk	>500 jiwa/ hektar	400-500 jiwa/ hektar	<400 jiwa/ hektar	**Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006** • Nilai 50 untuk 500 jiwa/hektar • Nilai 30 untuk 400-500 jiwa/hektar • Nilai 20 untuk <400 jiwa/hektar
Tingkat pendidikan	Mayoritas tidak lulus pendidikan dasar	Mayoritas lulus pendidikan dasar	Mayoritas lulus pendidikan menengah	**Asa, 2015** Penggolongan tingkat pendidikan digolongkan menjadi: • 40 untuk mayoritas lulus pendidikan tinggi • 30 untuk mayoritas lulus pendidikan menengah

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
				• 20 untuk mayoritas lulus pendidikan dasar • 10 untuk mayoritas tidak lulus pendidikan dasar
Tingkat Partisipasi	<30% masyarakat terlibat dalam kegiatan masyarakat terkait penanganan permukiman kumuh	30%-60% masyarakat terlibat dalam kegiatan masyarakat terkait penanganan permukiman kumuh	>60% masyarakat terlibat dalam kegiatan masyarakat terkait penanganan permukiman kumuh	**UN Habitat, 2016** Dinilai berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan permukiman, dari perumusan rencana, pelaksanaan hingga evaluasi.

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
Frekuensi Kegiatan Masyarakat	>2 bulan sekali	1-2 bulan sekali	<1 bulan sekali	**Wimardana, 2016** Frekuensi kegatan masyarakat digolongkan berdasarkan intensitas kegiatan setiap bulannya
Frekuensi Kriminalitas	>2 kali setahun	1-2 kali setahun	Tidak pernah	**Asa, 2015** Penggolongan tingkat kriminalitas digolongkan menjadi: • 40 untuk kriminalitas terjadi 0 kali/ tahun • 30 untuk kriminalitas terjadi 1-2 kali/ tahun • 20 untuk kriminalitas terjadi 3-4 kali/ tahun

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
				• 10 untuk kriminalitas terjadi 5-7 kali/ tahun
Tingkat kemiskinan	<30% termasuk KK non MBR	30%-60% termasuk KK non MBR	>60% termasuk KK non MBR	**Asa, 2015** Penggolongan tingkat kemiskinan digolongkan berdasarkan persentase KK miskin dalam satu RW
Kemampuan pemenuhan rumah layak huni	<30% KK dapat memenuhi kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, listrik, persampaha	30%-60% KK dapat memenuhi kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, listrik, persampahan	>60% KK dapat memenuhi kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, listrik, persampaha	**Almaden, 2014** Penggolongan kemampuan pemenuhan rumah layak huni (*affordability*) digolongkan menjadi • *Housing costs* kurang dari 30% pendapatan (*income*). • *Housing costs* sama dengan 30% pendapatan (*income*).

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	n) dengan biaya yang dibayarkan tidak lebih 30% dari pendapatan per bulan	) dengan biaya yang dibayarkan tidak lebih 30% dari pendapatan per bulan	n) dengan biaya yang dibayarkan tidak lebih 30% dari pendapatan per bulan	• *Housing costs* lebih dari 30% pendapatan (*income*). **Schwartz, 2018** Penggolongan kemampuan pemenuhan rumah layak huni (*affordability*) digolongkan menjadi: • *Without burden : under 30% of income spent on housing cost* • *Moderate burden : 30%-49.9% of income spent on housing cost* • *Severe burden : over 50% of income spent on housing cost*
Tingkat Pendapatan	Mayoritas KK	Mayoritas KK memiliki	Mayoritas KK	**Selomo, 2016**

Variabel	Bobot			Pedoman
	50	30	20	
	memiliki pendapatan <Rp.1.250.000,00 per bulan	pendapatan Rp.1.250.000,00 – Rp.2.500.000,00 per bulan.	memiliki pendapatan >Rp.2.500.000,00 per bulan.	Penggolongan tingkat pendapatan terdiri dari >Rp.2.500.000,00/ bulan (tinggi), Rp.1.250.000,00 – Rp.2.500.000,00 (sedang), dan <Rp.1.250.000,00 (rendah).

Sumber : Diadaptasi dari berbagai sumber, 2020

Setelah dilakukan pengelompokkan karakteristik masing-masing variabel berdasarkan Tabel 3.6., selanjutnya dilakukan analisis klaster. Analisis klaster (*cluster analysis*) merupakan pengelompokan objek atau kasus menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dimana setiap kelompok berisi objek yang mirip satu sama lain (Supranto dalam Fathia, 2016). Adapun metode analisis *cluster* terbagi atas metode hirarki dan metode non hirarki (*k-mean cluster*). Dalam penelitian ini menggunakan metode *cluster hierarki*, dimana digunakan untuk sampel yang relatif sedikit yaitu 28 RT (tidak lebih dari 50) dengan pengelompokkan subjek berdasarkan kemiripan karakter atau kemiripan persepsi baik dari hasil kuisioner ataupun data sekunder. Analisis klaster dalam penelitian ini menggunakan *software SPSS.* Adapun sebelum dilakukan *Cluster Analysis,* perlu dilakukan beberapa uji data. Uji data tersebut terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reabilitas yang juga dilakukan dengan *Software* SPSS. Agar lebih jelas, berikut Gambar 3.1. menunjukkan tahap analisis karakteristik permukiman kumuh di Wonokusumo.

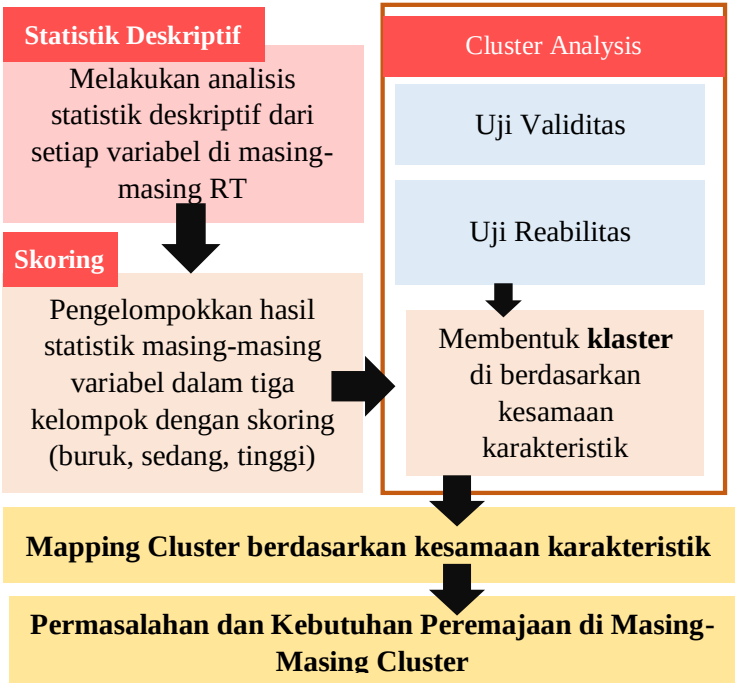

Gambar 3.1. Proses Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Penulis, 2020

3.5.2.2. Analisis kebijakan terkait peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya

Analisis kebijakan terkait peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya dilakukan dengan metode *Content Analysis (CA)*. Analisis isi atau *Content Analysis (CA)* diartikan sebagai metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Berelson dalam Ahmad, 2018). *Content Analysis* dipilih peneliti dalam menganalisis kebijakan karena metode ini dinilai dapat

menafsirkan unit-unit observasi secara objektif. Menurut Fraenkel dan Wallen dalam Munthmainah (2015), *Content analysis* dapat diterapkan untuk menganalisis segala bentuk media komunikasi, seperti artikel, pidato, buku teks, koran, lagu, dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa *Content Analysis* dapat diterapkan dalam dokumen-dokumen kebijakan, termasuk dokumen tata ruang dan dokumen penanganan permukiman kumuh.

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan yang telah diterapkan dalam penanganan permukiman kumuh, serta rencana penanganan permukiman kumuh yang akan datang. Sehingga, strategi peremajaan yang nantinya dihasilkan dapat mendetailkan secara operasional dari arahan kebijakan yang telah ada. Dimana, *output* dari analisis ini berupa *support system* yang mendukung perumusan strategi peremajaan. Analisis kebijakan menggunakan *Content Analysis* dilakukan pada dokumen RDTRK UP V Tanjung Perak, RP2KPKP Kota Surabaya, dan RPLP Kelurahan Wonokusumo. Ketiga dokumen tersebut dipilih dengan pertimbangan mewakili kebijakan dari segi tata ruang dan penanganan kumuh di kawasan permukiman.

Langkah *Content Analysis* menurut Arafat (2018) dibagi menjadi beberapa tahap. Tahapan tersebut ditunjukkan oleh Gambar 3.2. sebagai berikut.

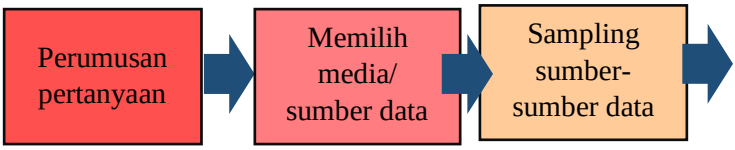

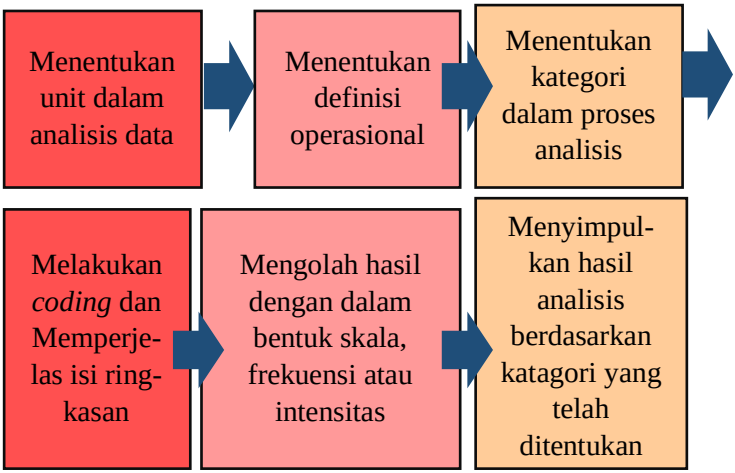

Gambar 3.2 Proses Content Analysis Sasaran 2

Sumber : diadaptasi dari Arafat, 2018

Berdasarkan Gambar 3.2. tersebut, berikut penjelasan penerapan *Content Analysis* pada penelitian ini.

1. **Perumusan Pertanyaan**

   Pertanyaan yang ditetapkan untuk *Content Analysis* di penelitian ini berupa kebijakan atau rencana terdahulu apa saja yang telah atau akan ditetapkan dalam penanganan permukiman kumuh Wonokusumo.

2. **Memilih Media/ Sumber Data**

   Menurut Marsh (2006), media atau sumber data digunakan sebagai referensi untuk mencapai pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sumber data tersebut harus bersifat variatif dimana menjadi populasi yang selanjutnya diambil beberapa sampel untuk dilanjutkan dalam proses analisis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menetapkan sumber data berupa dokumen kebijakan yang mengatur penanganan kumuh dalam Rencana Tata Ruang dan Rencana Penanganan Permukiman Kumuh terkait Permukiman Kumuh Wonokusumo Kota Surabaya. Sehingga, sumber data dalam Proses *Content Analysis* di penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Rencana Tata Ruang, yang terdiri dari :
   - RTRW Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031.
   - RTRW Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034.
   - RDTRK UP V Tanjung Perak Tahun 2018 – 2038
   - RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
b. Rencana Penanganan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari :
   - RP3KP Provinsi Jawa Timur
   - RP2KPKP Kota Surabaya Tahun 2017.
   - RPLP Wonokusumo Tahun 2018.

3. Sampling Sumber-Sumber Data

Menurut Arafat (2018), prinsip sampling dalam *Content Analysis* sama dengan teknik sampling umumnya, yang dapat berupa model probabilitas (*probability sampling*) dan nonprobabilitas (*nonprobability*). Dari sumber-sumber data yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini menetapkan tiga dokumen untuk dilanjutkan dalam proses analisis, yaitu RDTRK UP V Tanjung Perak Tahun 2018 – 2038, RP2KPKP Kota Surabaya Tahun 2017 dan RPLP Wonokusumo Tahun 2018.

4. **Menentukan Unit Analisis Data**

Menurut Efferin dalam Faizal (2018), unit analisis merupakan satuan terkecil dari objek penelitian yang akan dikumpulkan. Arafat (2018) menyatakan bahwa unit analisis dalam *Content Analysis* dapat berupa : kata atau simbol tunggal, tema, karakter, kalimat atau paragraph, dan item-item lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menetapkan unit analisis berupa kalimat dalam sampel sumber data yang digunakan, dimana peneliti melakukan proses pengunitan terhadap tiga dokumen kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. **Menentukan Definisi Operasional**

Menurut Damara (2017), definisi operasional dari proses *Content Analysis* diartikan sebagai proses operasionalisasi dengan seperangkat prosedur agar dapat diamati secara langsung. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi dari masing-masing variabel yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

6. **Menentukan Kategori dalam Proses Analisis**

Menurut Arafat (2018), kategori dalam *Content Analysis* didefinisikan sebagai penggolongan objek yang diteliti. Kategori tersebut yang nantinya dirumuskan dalam hasil *Content Analysis*. Pada penelitian ini, objek-objek yang diteliti memiliki lima kategori, yaitu fisik bangunan, sarana prasarana, status legalitas, sosial kependudukan dan sosial ekonomi.

7. **Melakukan *Coding* dan Memperjelas Isi Ringkasan**

Coding yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pencermatan teks dalam masing-masing dokumen kebijakan yang merepresentasikan makna sesuai tujuan analisis. *Coding* dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Merinci kutipan yang mengandung definisi operasional masing-masing variabal dari ketiga dokumen sesuai unit analisis (kalimat).
- Memberikan kode dengan formula sebagai berikut.

  Kode = Dx.Vy.z

  Dimana x adalah kode dokumen, y adalah urutan variabel dan y adalah urutan kemunculan variabel dalam kutipan
- Menentukan kata kunci yang bertujuan mempermudah pemahaman setiap kutipan
- Menarasikan maksud dari *coding* yang telah ditemukan.

8. **Mengolah Hasil dalam Bentuk Skala, Frekuensi atau Intensitas**

Pada penelitian ini, hasil *Content Analysis* diolah dalam tabel frekuensi untuk mendapatkan inti kebijakan yang terkandung dalam ketiga dokumen tersebut.

9. **Menyimpulkan Hasil Analisis berdasarkan Katagori yang Telah Ditentukan**

Pada langkah ini, hasil *Content Analisis* disimpulkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Penyimpulan hasil

analisa melalui pengelompokkan kode yang terangkum dari masing-masing katagori sehingga menghasilkan *output* sasaran 2. Kode variabel dan kode dokumen kebijakan ditunjukkan oleh Tabel 3.7 dan 3.8 sebagai berikut.

Tabel 3.7. Kode variabel dan Kode Warna Katagori

Variabel	Kode Variabel	Kode Warna Kategori
Keteraturan Bangunan	V1	Fisik Bangunan
Kepadatan Bangunan	V2	
Kualitas Bangunan	V3	
Lokasi Hunian	V4	
Kondisi Jalan	V5	Sarana Prasarana
Kelancaran Drainase	V6	
Ketersediaan Air Bersih	V7	
Kondisi Sanitasi	V8	
Kondisi Persampahan	V9	
Proteksi Kebakaran	V10	
Akses Sarana Kesehatan	V11	
Akses Sarana Pendidikan	V12	
Ketersediaan RTH	V13	
Status Kepemilikan Lahan	V14	Status Legalitas
Status Legalitas Bangunan	V15	
Kepadatan Penduduk	V16	Sosial Kependudukan
Tingkat Pendidikan	V17	
Tingkat Partisipasi	V18	
Frekuensi Kegiatan Masyarakat	V19	
Frekuensi Kriminalitas	V20	
Tingkat Kemiskinan	V21	Sosial Ekonomi
Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni	V22	
Tingkat Pendapatan	V23	

Sumber : Analisis penulis, 2020

Tabel 3.8. Kode Dokumen Kebijakan pada *Content Analysis*

Kode	Dokumen Kebijakan
D1	RDTRK UP V Tanjung Perak Tahun 2018 – 2038
D2	RP2KPKP Kota Surabaya Tahun 2017
D3	RPLP Wonokusumo Tahun 2018

Sumber : Analisis penulis, 2020

3.5.2.3. Merumuskan Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo

Strategi peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo dilakukan dengan analisis SWOT. Analisa SWOT diartikan sebagai alat untuk mengakomodasi kekuatan (strength) dan kelemahan (*weakness*) internal dengan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) eksternal (*Manteghi* dalam Hervino, 2014). Menurut Cui (2019), SWOT dapat digunakan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal untuk suatu pengambilan keputusan. Melalui analisis SWOT, dapat terbentuk empat tipe strategi yaitu SO, ST, WO, dan WT. Pada penelitian ini, pengklasifikasian antara internal dan eksternal dilakukan berdasarkan justifikasi karakteristik kumuh masing-masing kluster hasil sasaran pertama dan keberadaan rencana atau program dalam dokumen kebijakan pada hasil sasaran kedua.

Dalam perumusan strategi peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo digunakan Matriks SWOT

yang menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. Analisis ini diawali dengan menentukan IFAS dan EFAS. IFAS (*internal strategic factory analysis summary*) berupa faktor-faktor internal yang disusun dalam *strength* dan *weakness.* Sedangkan EFAS (*eksternal strategic factory analysis summary*) berupa faktor-faktor eksternal yang dirumuskan dalam *opportunities* dan *threats.* Cara menyusun matriks SWOT ditunjukkan oleh Tabel 3.9. sebagai berikut.

Tabel 3.9. Metode Penyusunan Matriks SWOT

IFAS / EFAS	**Kekuatan (*Strength*)**	**Kelemahan (*Weakness*)**
Peluang (*Opportunity*)	**Strategi S-O** Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	**Strategi W-O** Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (*Threats*)	**Strategi S-T** Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	**Strategi W-T** Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dalam menghindari ancaman

Sumber : Dewi, 2019

Proses analisis SWOT yang dilakukan untuk mencapai sasaran 3 adalah sebagai berikut.

1. **Tahap pengumpulan data**

   Pada tahap pengumpulan data, *output* dari sasaran sebelumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. Data eksternal dan internal tersebut diklasifikasikan dalam tiga klaster (Klaster I, Klaster II dan Klaster III).

2. **Tahap analisis**

   Tahap analisis bertujuan untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peremajaan permukiman kumuh Wonokusumo. Pada tahap ini dilakukan penyilangan antara EFAS dan IFAS dari masing-masing klaster untuk mendapatkan strategi dalam empat set alternatif yaitu SO, ST, WO, dan WT. Pada tahap ini juga dilakukan pembahasan teknis bagaimana strategi tersebut diterapkan berdasarkan literatur atau contoh penerapan di kawasan lain (*best practice*).

3. **Tahap pengambilan keputusan**

   Tahap pengambilan keputusan merupakan rangkuman dan perbandingan strategi yang telah dirumuskan di tiga klaster tersebut.

3.6. Tahapan Penelitian

Tahap dari penelitian ini terdiri dari persiapan, kajian pustaka, pengumpulan data, analisis dan perumusan kesimpulan.

3.6.1. Tahap Persiapan

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah tahap persiapan.Tahap persiapan terdiri atas empat kegiatan, yaitu memilih lokasi studi, merumuskan masalah, menetapkan tujuan penelitian dan menetapkan sasaran penelitian.

Permasalahan yang diangkat adalah Kelurahan Wonokusumo termasuk prioritas I dalam penananganan permukiman kumuh serta memiliki luas terbesar di Kota Surabaya.Keberadaan permukiman tersebut mengancam keberlanjutan permukiman sehingga diperlukan strategi penanganan berdasarkan prinsip keberlanjutan. Dari permasalahan tersebut, peneliti menetapkan tujuan untuk merumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo berdasarkan prinsip berkelanjutan. Adapun sasaran penelitian yang dibentuk adalah mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo, menganalisis kebijakan terkait peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya, dan merumuskan strategi peremajaan permukiman berdasarkan prinsip keberlanjutan.

3.6.2. Tahap Kajian Pustaka

Tahap kedua yang dilakukan oleh peneliti adalah kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur terkait permasalahan dan objek penelitian untuk menggali informasi lebih lanjut. Informasi tersebut berupa teori dan konsep yang bersumber dari buku, jurnal, atau penelitian sebelumya. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai landasan untuk penelitian.

3.6.3. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ketiga yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data-data yang menunjang tercapainya sasaran dimana data tersebut disesuaikan dengan analisa dan variabel yang dilakukan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan, teknik yang digunakan adalah survey primer (berupa observasi dan wawancara), serta survey sekunder.

3.6.4. Tahap Analisa

Tahap keempat yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, analisis klaster, *content analysis*, dan deskriptif.

a. Statistik deskriptif

   Statistik deskriptif digunakan untuk mengolah dan menyajikan data secara deskriptif, yang ditampilkan dalam bentuk presentase, proporsi atau frekuensi. Data yang terkumpul dari masing-masing variabel kemudian dibobotkan untuk mengkategorikan masing-masing variabel. Hasil bobot tersebut yang menjadi input dalam analisis klaster.

b. Analisis klaster

   Analisis klaster digunakan untuk mengetahui kelompok wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik. Karakteristik masing-masing klaster tersebut akan menghasilkan permasalahan, potensi dan kebutuhan peremajaan. Analisis klaster dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan mengelompokkan bobot masing-masing variabel.

c. *Content Analysisis*

   Analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kebijakan terkait penanganan permukiman kumuh berdasarkan dokumen kebijakan yang telah ada. Hasil dari *Content Analysis* berupa *support system* dalam menentukan peremajaan permukiman kumuh di Wonokusumo

d. Analisa SWOT

   Analisa SWOT digunakan untuk mencapai sasaran ketiga, yaitu merumuskan strategi peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo berdasarkan kriteria masing-

masing klaster dan kebijakan yang telah dianalisis sebelumnya.

3.6.5. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahap kelima yang dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah, tujuan dan sasaran pada tahap persiapan.

Gambar 3.3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

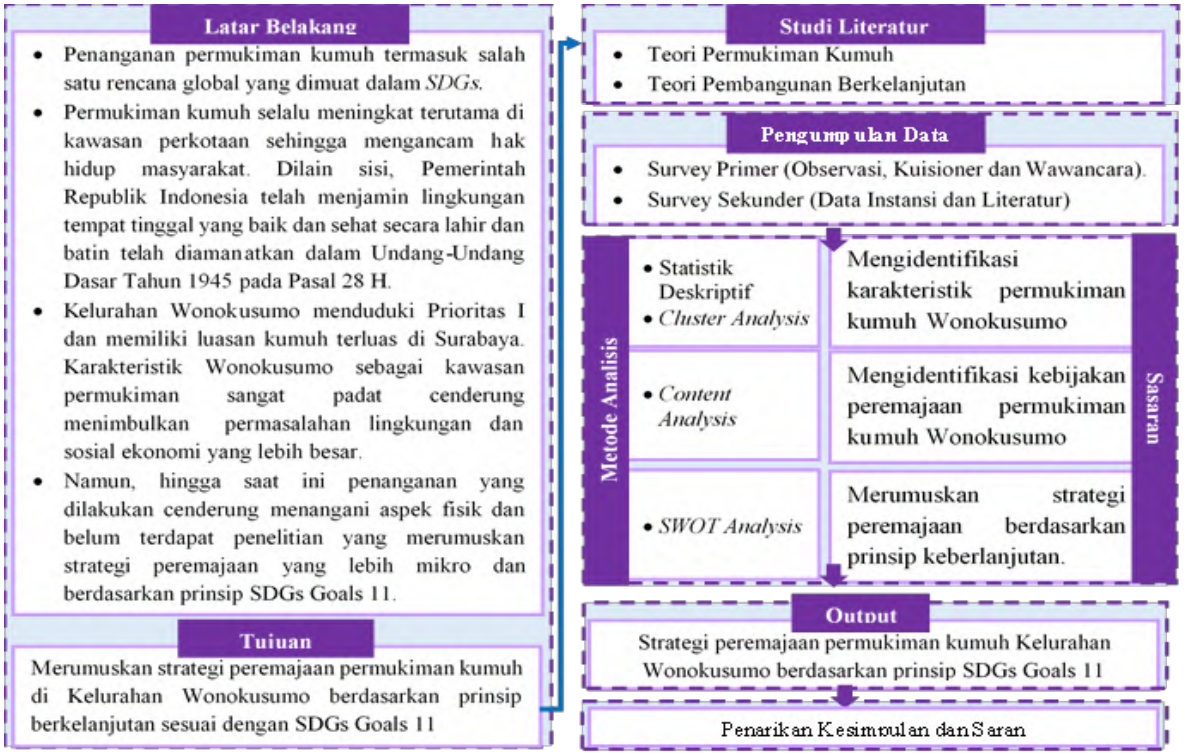

Sumber : Analisis Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Permukiman

4.1.1. Orientasi Wilayah Studi

Fokus penelitian ini terdapat di permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya. Kelurahan Wonokusumo terletak di Kecamatan Semampir memiliki luas 76 Ha (BPS, 2019). Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo meliputi RW 6 (RT 5,6), RW 7 (seluruh RT), dan RW 15 (RT 2,3,4,5). Sedangkan, luas permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo sebesar 20,45 Ha. Batas permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kelurahan Wonokusumo RW 4
Sebelah Timur : Kelurahan Wonokusumo RW 16
Sebelah Selatan : Kelurahan Wonokusumo RW 9, RW 8
Sebelah Barat : Kelurahan Wonokusumo RW 14

Peta batas wilayah kumuh di Kelurahan Wonokusumo dapat dilihat pada Gambar 4.1. sebagai berikut.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Gambar 4.1. Peta Wilayah Studi Kelurahan Wonokusumo

Sumber : RPLP Kelurahan Wonokusumo, 2018

4.1.2. Kondisi Fisik Wilayah

Kelurahan Wonokusumo terletak di Kecamatan Semampir termasuk wilayah Geografis Kota Surabaya Utara. Kelurahan Wonokusumo memiliki ketinggian 4,6 meter diatas permukaan laut. Kondisi klimatologi Kelurahan Wonokusumo tidak berbeda dengan Kota Surabaya, dimana memiliki kelembaban maksimal sebesar 93% di Bulan Januari, sedangkan kelembaban minimum sebesar 85% di Bulan Agustus hingga Oktober. Temperatur maksimal di Kelurahan Wonokusumo sebesar 33,9°C dan temperatur minimum sebesar 25,2°C (Kecamatan Semampir dalam Angka, 2018).

Kelurahan Wonokusumo banyak didominasi oleh perdagangan dan jasa. Sedangkan, permukiman di Kelurahan Wonokusumo memiliki tipologi permukiman dataran rendah, dengan permukiman kumuh terdapat di RW 6 (RT 5,6), RW 7 (Seluruh RT) dan RW 15 (RT 2,3,4,5). Berdasarkan RPLP Wonokusumo, kondisi kekumuhan di kelurahan ini termasuk kumuh sedang.

4.1.3. Kondisi Kependudukan

Dalam merencanakan suatu wilayah, diperlukan identifikasi untuk mengetahui kondisi kependudukan di wilayah tersebut. Identifikasi tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk, perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, dan komposisi berdasarkan mata pencaharian.

Jumlah penduduk di Kelurahan Wonokusumo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kelurahan Wonokusumo mencapai 74.665 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 99 jiwa/km^2. Jumlah penduduk meningkat dari tahun 2011 yang ditunjukkan oleh Gambar 4.2. berikut.

Gambar 4.2. Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2011 - 2018

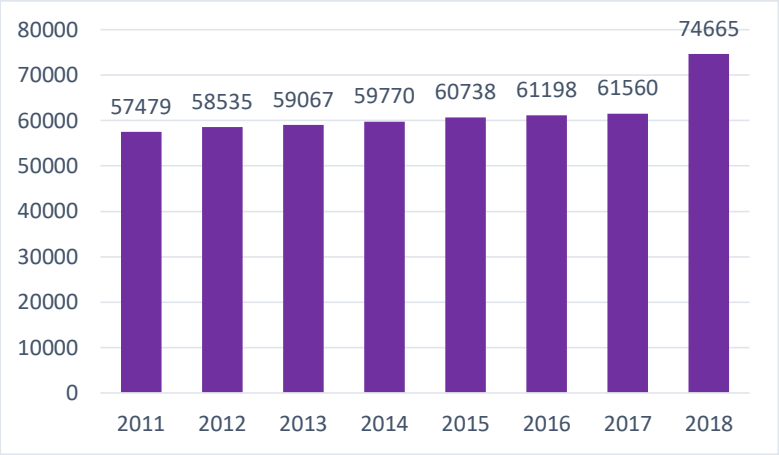

Sumber : Kecamatan Semampir dalam Angka, 2011-2018

Pada grafik yang ditunjukkan oleh Gambar 4.1. tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kelurahan Wonokusumo sebesar 17.187 jiwa selama 7 tahun. Peningkatan penduduk tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 30% atau sekitar 2.456 jiwa setiap tahunnya.

Sedangkan, jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh yang meliputi RW 6 (RT 5,6), RW 7 (Seluruh RT) dan RW 15 (RT 2,3,4,5) mencapai 12.777 jiwa (*Baseline Permukiman Kumuh, 2018*). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa 17% penduduk Kelurahan Wonokusumo menempati kawasan kumuh dengan kepadatan 626 jiwa/Ha. Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk yang mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, kepadatan penduduk dapat digolongkan menjadi kepadatan rendah (<150

jiwa/Ha), sedang (151-200 jiwa/Ha), tinggi (201-400 jiwa/Ha) dan sangat tinggi (>400 jiwa/Ha).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, berikut Tabel 4.1. menunjukkan luas, jumlah penduduk, kepadatan penduduk beserta katagori kepadatan dari masing-masing RW yang terdelineasi kumuh di Kelurahan Wonokusumo.

Tabel 4.1. Jumlah dan Analisa Kepadatan Penduduk

Kelura-han	Wilayah	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepada-tan Penduduk (jiwa/Ha)	Kategori Kepada-tan
Wono-kusumo	RW 6	1,05	1.174	1.119	Sangat tinggi
	RW 7	17,12	10.148	593	Sangat tinggi
	RW 15	2,27	1.883	830	Sangat tinggi
Total		20,45	13.205	646	Sangat tinggi

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan bahwa seluruh permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo termasuk dalam kategori kepadatan sangat tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi terdapat di RW 6 sebesar 1.119 jiwa.

Dalam merencanakan suatu lokasi, penting untuk mengidentifikasi struktur kependudukan yang ada pada wilayah studi. Struktur kependudukan diidentifikasi berdasarkan jumlah penduduk yang datang dan pindah dari wilayah studi, serta perubahan juga dapat dilihat dari kelahiran dan kematian. Perubahan penduduk di Kelurahan

Wonokusumo dari tahun 2011 hingga 2018 ditunjukkan oleh Tabel 4.2. sebagai berikut.

Tabel 4.2. Tabel Perubahan Jumlah Penduduk Tahun 2011-2018

Tahun	Lahir	Mati	Pindah	Datang
2011	189	16	141	83
2012	156	22	105	77
2013	108	24	79	68
2014	147	33	175	196
2015	1.008	321	1.128	1.068
2016	1.019	359	914	1.114
2017	945	745	679	841
2018	829	440	1.220	657
Rata-Rata	629	280	622	601

Sumber : Kecamatan Semampir dalam Angka, 2012-2019

Berdasarkan Tabel 4.2. tersebut, dapat diketahui bahwa perubahan penduduk di Kelurahan Wonokusumo banyak dipengaruhi oleh kelahiran, dimana memiliki rata-rata 629 jiwa lahir per tahunnya. Sedangkan, angka kematian cukup rendah yaitu memiliki rata-rata 280 jiwa per tahunnya. Sedangkan, jumlah penduduk yang pindah lebih besar dibandingkan penduduk yang datang, dimana memiliki rata-rata sebesar 622 jiwa pindah setiap tahunnya. Namun angka tersebut hampir memiliki rata-rata yang sama dengan penduduk yang datang yaitu rata-rata 601 jiwa datang setiap tahunnya. Fenomena tersebut menjadi salah satu penyebab Kelurahan Wonokusumo menjadi kawasan permukiman yang sangat padat.

Adapun perubahan jumlah penduduk datang, pindah, lahir, dan mati pada tahun 2018 ditunjukkan oleh Gambar 4.3. sebagai berikut.

Gambar 4.3. Grafik Proporsi Perubahan Jumlah Penduduk Tahun 2018

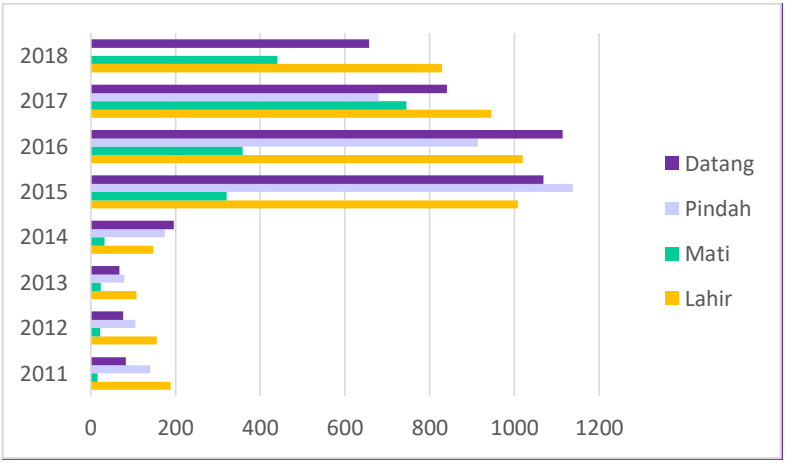

Sumber : Kecamatan Semampir dalam Angka, 2012-2019

Selain memperhatikan struktur kependudukan, penting untuk memperhatikan komposisi penduduk. Data dan gambaran umum mengenai komposisi penduduk bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing kelompok yang terbentuk dalam suatu perencanaan. Komposisi penduduk tersebut meliputi mata pencaharian, agama, kelompok umur, jenis kelamin, serta tingkat pendidikan.

Jika ditinjau dari jenis mata pencaharian, penduduk Kelurahan Wonokusumo didominasi oleh Ibu Rumah Tangga dan Buruh dengan total 8.844 pekerja (*Profil Kelurahan Wonokusumo, 2018).* Adapun pekerjaan lainnya adalah dokter, pedagang, karyawan swasta, wiraswasta, pedagang klontong, pegawai negeri sipil, bidan,

pemulung, pelajar, dan purnawirawan. Jumlah pekerja setiap jenis pekerjaan tersebut disajikan pada Tabel 4.3. sebagai berikut.

Tabel 4.3. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Kelurahan Wonokusumo

Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja
Dokter	39
Pedagang	1.900
Karyawan Swasta	4.120
Wiraswasta	7.321
Pedagang Klontong	3.342
Pegawai Negeri Sipil	2.042
Bidan	9
Ibu Rumah Tangga	8.844
Pemulung	612
Pelajar	5.444
Buruh	8.844
Purnawirawan	5.608
Total	**48.125**

Sumber : Profil Kelurahan Wonokusumo Tahun 2019

Secara keseluruhan, berikut adalah persentase komposisi penduduk Kelurahan Wonokusumo menurut jenis pekerjaan ditunjukkan oleh Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Grafik Komposisi Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan Kelurahan WonokusumoTahun 2018

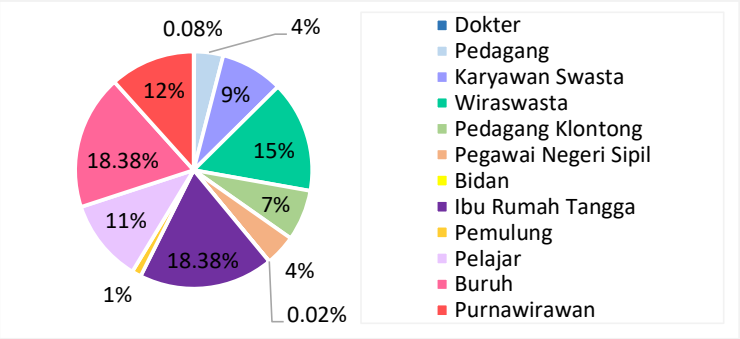

Sumber : Profil Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 4.4. tersebut, diketahui bahwa pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Buruh mendominasi sebesar 18,38% dari total pekerja yang ada di Kelurahan Wonokusumo. Sedangkan, pekerjaan Bidan memiliki persentase terendah dari keseluruhan pekerja yaitu sebesar 0,02%.

Jika ditinjau dari kelompok agama yang dianut di Kelurahan Wonokusumo, Agama Islam memiliki jumlah penganut tertinggi dengan jumlah 74.093 jiwa. Adapun jumlah penganut agama lainnya ditunjukkan oleh Tabel 4.4. sebagai berikut.

Tabel 4.4. Tabel Komposisi Penduduk berdasarkan Agama di Kelurahan Wonokusumo Tahun 2019

Agama	Jumlah Penganut (Jiwa)
Islam	74.389
Hindu	45
Katolik	337
Kristen	1.123
Budha	42
Total	**75.937**

Sumber : Profil Kelurahan Wonokusumo Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.4. tersebut, terlihat bahwa penduduk Kelurahan Wonokusumo sebagian besar memeluk Agama Islam dengan persentase 97,9%. Hal tersebut berpengaruh terhadap penyediaan sarana peribadatan berupa masjid dan langgar yang banyak ditemui di Kelurahan Wonokusumo.

Jika ditinjau dari kelompok umur, penduduk di Kelurahan Wonokusumo didominasi oleh kelompok umur 16-20 tahun, 36-40 tahun, dan 56-60 tahun. Jumlah dari masing-masing kelompok umur lainnya disajikan pada Tabel 4.5. sebagai berikut.

Tabel 4.5. Tabel Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kelurahan Wonokusumo Tahun 2019

Kelompok Umur	Jumlah	Kelompok Umur	Jumlah
0-5	7192	41-45	4856
6-10	7336	46-50	3686
11-15	8810	51-55	3426
16-20	8937	56-60	8937
21-25	4856	61-65	4856
26-30	3686	66-70	3686
31-35	8810	71-75	3426
36-40	8937	>75	206

Sumber : Profil Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo Tahun 2019

Sedangkan, untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di wilayah studi dibagi berdasarkan jenjang pendidikan. Data tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat jenjang pendidikan penduduk di wilayah studi. Penduduk di Kelurahan Wonokusumo didominasi oleh tingkat pendidikan tidak/belum sekolah dengan jumlah 16.831 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan lainnya ditunjukkan oleh Tabel 4.6. sebagai berikut.

Tabel 4.6. Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/ Belum Sekolah	16.831
Belum Tamat SD/ Sederajat	7.241
Tamat SD/ Sederajat	13.593
SLTP/ Sederajat	4.839
SLTA/ Sederajat	13.422
Diploma	556
Sarjana	1.921
Pascasarjana	124

Sumber : Kecamatan Semampir dalam Angka Tahun 2019

4.1.4. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi ditinjau dari jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di permukiman kumuh. Berdasarkan profil permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo Tahun 2018, jumlah keluarga MBR mencapai 1.862 KK. Sedangkan KK yang tidak tergolong MBR berjumlah 2.192 KK. Artinya sekitar 46% KK di permukiman kumuh tergolong MBR. Hal tersebut membuat kondisi perekonomian masyarakat cukup rendah. Dari ketiga RW yang tergolong bermukiman kumuh, RW 7 memiliki persentase MBR tertinggi dengan persentase 51%. Sedangkan, RW 15 memiliki persentase terendah yaitu 18%. Tabel 4.7 berikut menunjukkan jumlah dan presentase KK MBR dari masing-masing RW di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo.

Tabel 4.7. Kondisi Kemiskinan Wonokusumo

Kelura-han	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah KK MBR	Presentase (%)
Wono-kusumo	RW 6	344	152	44%
	RW 7	3.161	1.611	51%
	RW 15	549	99	18%

Total	4.054	1.862	46%

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.7. tersebut, terlihat bahwa jumlah KK MBR di permukiman kumuh cukup tinggi, dimana secara keseluruhan RW hampir mencapai 50%.

4.1.5. Kondisi Fisik Bangunan

Kondisi fisik bangunan dapat dilihat dari kepadatan bangunan dan kualitas bangunan. Jumlah bangunan di kawasan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo adalah 1.988 unit bangunan (*Baseline Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo, 2018*). Jika dilihat dari jumlah bangunan, RW 7 memiliki jumlah bangunan tertinggi dibandingkan RW lainnya yaitu sebesar 1.537 unit bangunan. Hal tersebut berbanding lurus dengan luas wilayahnya, dimana RW 7 memiliki wilayah terluas yaitu sebesar 17,1 Hektar. Jika ditinjau dari setiap RT, RT 17 RW 7 memiliki jumlah bangunan tertinggi yaitu 146 unit bangunan. Berikut grafik menunjukkan jumlah dan persentase bangunan dari masing-masing RW.

Gambar 4.5. Grafik Jumlah dan Persentase Bangunan di Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo

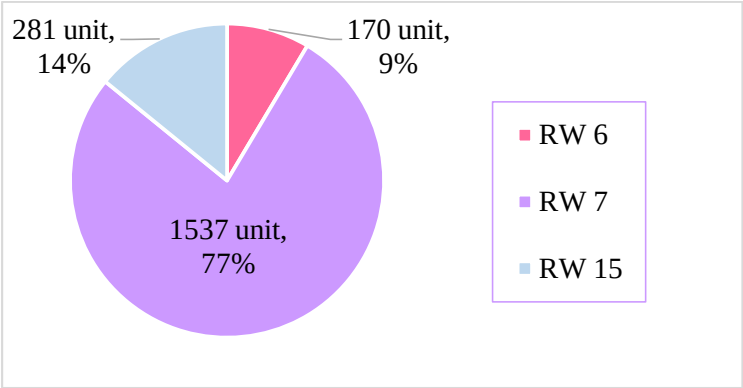

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh, 2018

Sedangkan, total kepadatan bangunan yang berada di kawasan permukiman kumuh mencapai 98 unit/ Ha. Dari ketiga RW, RW 6 memiliki kepadatan tertinggi yaitu sebesar 162 unit/ Ha. Sedangkan RW 7 memiliki kepadatan terendah sebesar 90 unit/ Ha. Adapun jumlah dan kepadatan bangunan di masing-masing RT ditampilkan pada Tabel 4.8. sebagai berikut.

Tabel 4.8. Tabel Jumlah dan Kepadatan Bangunan

RW	RT	Jumlah Bangunan (unit)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Bangunan (unit/Ha)
6	5	102	0,7	146
	6	68	0,35	194
7	1	64	0,42	152
	2	100	0,79	127
	3	58	1,02	57
	4	64	0,92	70
	5	71	0,75	95
	6	54	0,88	61
	7	61	0,97	63
	8	70	1,12	63
	9	83	0,8	104
	10	101	0,47	215
	11	47	0,86	55
	12	52	0,47	111
7	13	29	0,2	145
	14	61	0,25	244
	15	80	0,62	129
	16	74	0,41	180
	17	146	1,79	82
	18	55	1,16	47
	19	100	0,49	204
	20	50	1,04	48
	21	89	1,34	66
	22	28	0,35	80
15	2	76	0,48	158
	3	56	0,63	89
	4	75	0,55	136
	5	74	0,61	121

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh, 2018

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Selain dilihat dari kepadatannya, kondisi fisik bangunan juga perlu dilihat dari kualitas fisik bangunan tersebut. Kualitas fisik bangunan terdiri dari rumah permanen, semi permanen dan non permanen yang ditinjau dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2013. Perbandingan antara rumah permanen, semi permanen dan non permanen ditunjukkan oleh Tabel 4.9. sebagai berikut.

Tabel 4.9. Klasifikasi Bangunan berdasarkan Bahan Dasar

Aspek	Permanen	Semi Permanen	Non Permanen
Dinding	Pasangan beton ringan/ Bata merah	Setengah bagian menggunakan multiplek/ kayu	Triplek/ papan/ gedek/ sesek
Atap	Genting beton/ karang pilang/ sirap	Genting biasa/ seng/ eternit gelombang	Genting biasa/ seng/ eternit gelombang
Lantai	Marmer/ granit/ parkeet/ vinyl/ keramik	Tegel/ Plesteran semen	Tanah

Sumber : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2013

Berdasarkan hasil kuisioner terhadap responden, didapatkan 10 KK memiliki bangunan non permanen (6%), 20 KK memiliki bangunan semi permanen (12%) dan 140 KK memiliki bangunan permanen (82%).Perbandingan jenis rumah dapat dilihat pada Gambar 4.6. sebagai berikut.

Gambar 4.6. Diagram Perbandingan Kondisi Fisik Bangunan di Permukiman Kumuh Wonokusumo

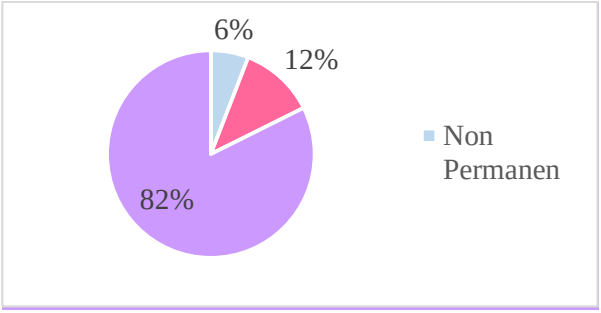

Sumber : Survey Primer, 2020

Berdasarkan Gambar 4.6. tersebut didapatkan bahwa kawasan permukiman kumuh Wonokusumo didominasi oleh bangunan permanen. Namun, hampir sebagian KK yaitu sebesar 76 KK atau 45% menempati rumah dengan kondisi yang tidak baik dimana mengalami kerusakan baik atap, dinding, ataupun lantai. Hal tersebut diakibatkan oleh seringnya terjadi genangan, hujan, serta kondisi perekonomian warga yang belum bisa memperbaiki rumahnya. Berikut Gambar 4.7. menunjukkan kondisi bangunan di lokasi penelitian.

Gambar 4.7. Kondisi Bangunan di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

4.1.6. Kondisi Legalitas Lahan

Permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Wonokusumo memiliki lahan dengan status legal (*RPLP Kelurahan Wonokusumo, 2018*). Adapun aset lahan milik pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Wonokusumo tidak ditempati permukiman lokasi tersebut. Lokasi aset lahan pemerintah tersebut ditunjukkan oleh Gambar 4.8. sebagai berikut.

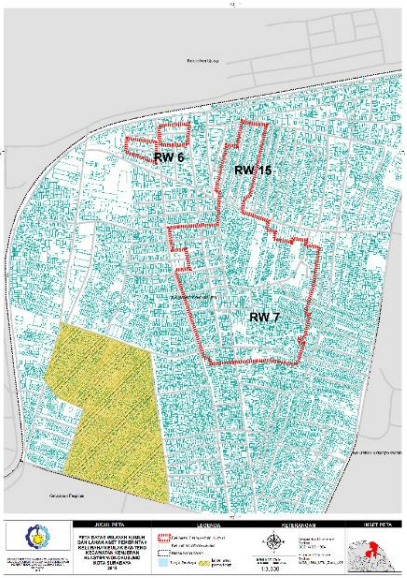

Gambar 4.8. Peta Lokasi Aset Tanah Pemerintah Kota Surabaya
Sumber : Pemerintah Kota Surabaya, 2019

Berdasarkan Gambar 4.4. tersebut, terlihat bahwa permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo tidak termasuk atau bersinggungan dengan aset tanah pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan yang ditempati memiliki status legal sehingga dapat dilakukan peremajaan.

Sedangkan, terkait kepemilikan lahan dan bangunan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Terkait ha katas tanah terdiri dari hak milik, hak pakai, hak sewa, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Status kepemilikan hak tanah tersebut berupa sertifikat, girik, pethuk, akte jual beli, dan akte/ bukti kepemilikan lainnya. Sedangkan, status

kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB tersebut sebagai bukti bahwa fungsi gedung sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).

Jika ditinjau dari status kepemilikan lahannya, 905 unit dari 1.988 unit bangunan di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo memiliki surat yang diakui pemerintah berupa SHM (*Baseline Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo, 2018*). Artinya hanya 45% unit yang memiliki bukti kepemilikan lahan. Dari ketiga RW di permukiman kumuh Wonokusumo, RW 7 memiliki kepemilikkan lahan tertinggi dibandingkan RW lainnya yaitu sebesar 738 surat. Berikut Gambar 4.5. menunjukkan persentase kepemilikkan surat/ akta tanah dari masing-masing RW di permukiman kumuh.

Gambar 4.9. Diagram Persentase Kepemilikkan Surat/ Akta yang Diakui oleh Pemerintah

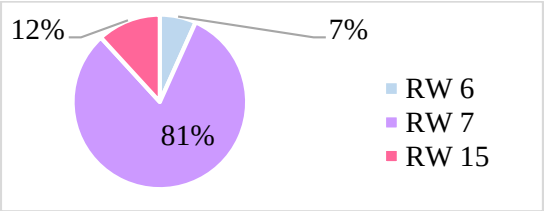

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh 2018

Jika ditinjau dari status kepemilikan bangunan, 839 unit dari 1.988 unit bangunan di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo memiliki surat yang diakui pemerintah berupa IMB (*Baseline Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo, 2018*). Artinya, 42% unit yang memiliki bukti kepemilikan bangunan. Dari ketiga RW di permukiman kumuh Wonokusumo, RW 7 memiliki kepemilikan

bangunan tertinggi dibandingkan RW lainnya yaitu sebesar 704 surat. Berikut Gambar 4.10. menunjukkan persentase kepemilikkan surat bangunan dari masing-masing RW di permukiman kumuh.

Gambar 4.10. Diagram Persentase Kepemilikkan Surat Bangunan yang Diakui oleh Pemerintah

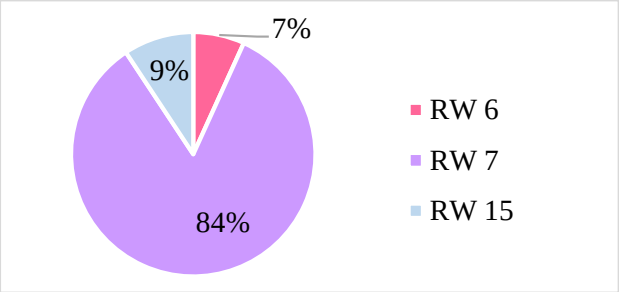

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa status kepemilikkan lahan dan bangunan di permukiman kumuh Wonokusumo didominasi oleh lahan yang tidak memiliki sertifikat. Adapun surat/ sertifikat lain berupa Petok D ditunjukkan Gambar 4.11. sebagai berikut.

Gambar 4.11. Surat Petok D yang Dimiliki Masyarakat

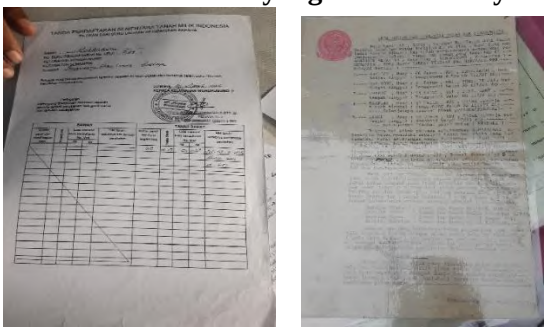

Sumber : Survey Primer, 2020

Jika ditinjau dari masing-masing RT, RT 7 di RW 7 memiliki kepemilikan lahan dan bangunan yang tinggi dibandingkan RT lainnya yaitu sebesar 80 unit bangunan (55%) memiliki SHM dan 72 unit bangunan (42%) memiliki IMB. Sedangkan, RT 4 RW 15 memiliki status kepemilikan lahan terendah yaitu 7 unit dari 75 unit bangunan atau sekitar 9%, serta RT 5 RW 7 hanya memiliki 4 unit dari 71 bangunan atau sekitar 6%.

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa lahan yang berstatus Petok D adalah warisan dari leluhur juga beberapa masyarakat menjadi tangan kedua setelah membeli dari orang lain. Selain faktor finansial, masyarakat enggan mengurus sertifikat karena lahan yang diwariskan sesuai Petok D tersebut sebagian besar telah dipetak-petakkan menjadi dua atau lebih unit rumah. Sehingga, proses administrasi menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lebih lama karena diperlukan pengukuran kembali. Selain itu, terdapat klaim tanah oleh PT.KAI yang terdapat di RW 7, khususnya di RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 14, RT 15, RT 16 dan RT 18.

Rendahnya status kepemilikan lahan atau bangunan di permukiman kumuh tentu mengancam keamanan dan kenyamanan warga dalam bermukim. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian status hukum bagi warganya, terutama terhadap bangunan yang sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikan. Sehingga, bangunan-bangunan tersebut rawan akan penggusuran.

4.1.7. Kondisi Drainase

Permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Wonokusumo sebagian besar sudah memiliki jaringan drainase. Namun terdapat beberapa ruas gang di RT 11 RW 7 yang belum terlayani saluran drainase, sehingga limbah dialirkan ke saluran di RT sekitarnya yaitu RT 19, RT 12, dan RT 13. Gang yang belum terlayani drainase antara lain Gang Blewah dan Gang Masjid. Berikut adalah kondisi RT 11 RW 7 yang tidak terlayani drainase ditunjukkan Gambar 4.12.

Gambar 4.12. Kondisi Gang Blewah dan Gang Masjid yang Tidak Terlayani Drainase

Sumber : Survey Primer, 2020

Total panjang saluran di kawasan permukiman kumuh adalah 9.550 meter (*Baseline Permukiman Kumuh, 2018).* Adapun panjang drainase yang mengalami kerusakan adalah 4.724 meter. Jika dilihat dari kondisi saluran drainase, beberapa saluran memiliki kondisi saluran drainase yang tertutup. Namun, beberapa masih ditemukan dalam kondisi drainase terbuka. Berikut adalah kondisi saluran drainase di lokasi studi ditunjukkan Gambar 4.13.

Gambar 4.13. Kondisi Drainase Terbuka dan Tertutup

Sumber : Survey Primer, 2020

4.1.8. Kondisi Persampahan

Ketersediaan sarana persampahan di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo sudah cukup baik. Hampir semua rumah sudah memiliki tempat sampah pribadi dengan pengangkutan 1-2 kali dalam satu minggu. Berikut adalah kondisi persampahan ditunjukkan Gambar 4.14. sebagai berikut.

Gambar 4.14. Tempat Sampah Pribadi
Sumber : Survey Primer, 2020

Sedangkan, dalam pengangkutan sampah, beberapa kawasan tidak terlayani. Hal tersebut disebabkan jaringan jalan sangat sempit sehingga fasilitas pengangkutan berupa gerobak sampah tidak dapat menjangkau kawasan tersebut. Sehingga, masyarakat membuang sampahnya sendiri ke TPS di dekat Sungai Mrutu, atau beberapa menimbunnya di lahan terbuka dekat kawasan tersebut.

4.1.9. Kondisi Sanitasi

Kondisi sanitasi di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo sudah baik. Mayoritas rumah penduduk sudah memiliki MCK pribadi. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak ditemukan sanitasi terpisah dari bangunan, yang bertujuan agar sanitasi tersebut digunakan bersama. Namun, jumlah pengguna tidak terlalu banyak, dimana hanya diakses oleh maksimal 2 KK. Umumnya jenis sanitasi tersebut terletak dibelakang rumah, yang penggunaannya terbatas oleh KK yang tinggal disebelahnya (dua bangunan mengakses sanitasi yang sama). Berikut adalah kondisi sanitasi masyarakat di lokasi studi.

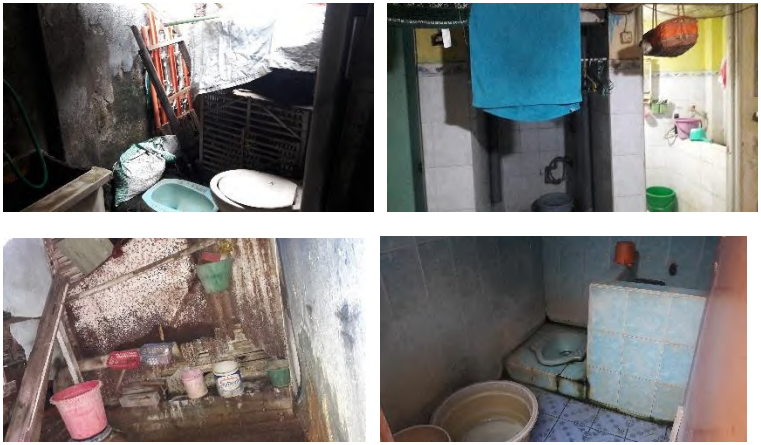

Gambar 4.15. Kondisi Sanitasi Masyarakat
Sumber : Survey Primer, 2020

Adapun keberadaan jamban umum terletak di RT 21 RW 7. Jamban umum tersebut memiliki empat ruang kamar mandi serta satu ruang untuk mencuci. Namun jamban umum tersebut tidak digunakan untuk aktifitas masyarakat karena kondisinya yang buruk, dimana memiliki air yang keruh dan genangan air yang bersumber dari rembesan tanah terutama ketika hujan. Ditambah lagi, faktor lahan sebelumnya digunakan sebagai makam membuat warga enggan untuk menggunakan jamban tersebut. Sehingga, jamban umum tidak digunakan oleh masyarakat sekitar.

Gambar 4.16. Jamban Umum

Sumber : Survey Primer, 2020

4.1.10. Kondisi Air Bersih

Ketersediaan air bersih di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo sudah cukup baik. Sebagian besar wilayah sudah tersambung saluran PDAM. Selain menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM, masyarakat di Kelurahan Wonokusumo juga menggunakan sumur. Namun, beberapa kendala terjadi pada ketersediaan air bersih dari pipa PDAM, seperti kendala air mati pada waktu tertentu, dan air yang keruh berwarna dan berasa harus didiamkan beberapa saat agar kembali jernih. Dilain sisi, tagihan selalu meningkat walaupun air sering mati. Sehingga, hal tersebut membuat beberapa masyarakat memutus saluran PDAM, ataupun pihak PDAM sendiri yang memutus karena besarnya tunggakan yang belum dibayar oleh masyarakat. Berikut kondisi air bersih yang diperoleh dari sumber pipa PDAM ditunjukkan oleh Gambar 4.17 sebagai berikut.

Gambar 4.17. Kondisi Air Bersih dari Pipa PDAM

Sumber : Survey Primer, 2020

Sumber air bersih lainnya yang digunakan masyarakat adalah sumur. Sumur yang digunakan warga terdiri dari sumur bor dan sumur galian. Sumur tersebut banyak digunakan masyarakat sebagai cadangan air jika PDAM mati. Sumur tersebut umumnya terletak di luar rumah, namun terdapat pula yang terletak didalam rumah. Sumur yang terletak diluar rumah tersebut bertujuan digunakan secara bersama, dimana maksimal digunakan oleh dua KK (menyatu dengan sanitasi bersama). Berikut adalah kondisi air bersih dari sumber sumur ditunjukkan oleh Gambar 4.18.

Gambar 4.18. Kondisi Sumur Masyarakat
Sumber : Survey Primer, 2020

Selain sumur dan pipa PDAM, air bersih juga didapatkan dari penjual air keliling. Dalam satu gerobak, dijual 12 dirijen yang masing-masing berisi 25 liter air. Adapun warga yang berada di kawasan yang tidak dapat diakses gerobak air, terpaksa mengangkut air dari tempat penjualan. Berdasarkan hasil wawancara, harga air yang dijual adalah Rp.2.500,00 hingga Rp.3.000,00 per dirijen.Namun jika membeli 12 dirijen sekaligus dikenakan harga Rp.25.000,00. Sayangnya, keberadaan penjual air tersebut tidak dapat dipastikan setiap hari. Selain itu, terdapat beberapa RT yang tidak terdapat penjual air, yaitu RT 18 dan RT 21 di RW 7. Sehingga, keberadaan sumber air bersih ini tidak dapat diakses kapanpun seperti sumur, melainkan tergantung terhadap ketersediaan air dan

penjualnya.Berikut adalah air bersih yang dijual di permukiman kumuh ditunjukkan oleh Gambar 4.19.

Gambar 4.19. Penjual Air

Sumber : Survey Primer, 2020

4.1.11. Kondisi Jalan

Kondisi jalan di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo sudah dalam kondisi baik yaitu sudah beraspal/ berkavling. Akan tetapi, beberapa ruas jalan yang berkavling mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil wawancara, ruas jalan yang rusak tersebut sulit untuk diperbaiki karena terletak pada kawasan yang tidak dapat diakses oleh alat berat. Sehingga, untuk memperbaikinya diperlukan swadaya dan partisipasi masyarakat dengan biaya yang lebih besar. Berikut adalah kondisi jalan ditunjukkan oleh Gambar 4.20.

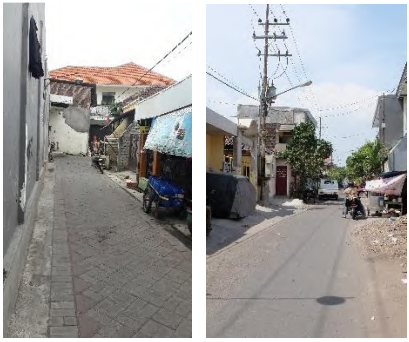

Gambar 4.20. Kondisi Perkerasan Jalan

Sumber : Survey Primer, 2020

Adapun permasalahan lainnya adalah ketidaktersediaan lahan terbuka untuk parkir membuat ruas jalan digunakan untuk parkir kendaraan pribadi. Hal tersebut membuat terganggunya ruang untuk bergerak masyarakat sehingga ruas jalan semakin sempit. Berikut ditunjukkan pada Gambar 4.21.

Gambar 4.21. Ruas Jalan yang digunakan untuk Parkir

Sumber : Survey Primer, 2020

Selain itu, beberapa ruas jalan masih memiliki penerangan yang kurang memadai, yang terletak di RT 13, 17 dan RT 22. Hal tersebut membuat daerah yang kurang terlayani penerangan menjadi rawan kriminalitas terutama saat malam hari. Berdasarkan wawancara dengan warga setempat, dahulu ruas jalan tersebut tidak memliki penerangan serta usulan pengadaan penerangan jalan belum mendapat tanggapan. Sehingga, warga mendirikan penerangan jalan secara swadaya seperti ditunjukkan oleh Gambar 4.22. sebagai berikut.

Gambar 4.22. Penerangan Jalan dari Swadaya Masyarakat

Sumber : Survey Primer, 2020

4.1.12. Kondisi Sarana Permukiman

Sarana yang terdapat di permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo terdiri dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, serta sosial budaya. Jika ditinjau berdasarkan ketersediaan sarana pendidikan, Kelurahan Wonokusumo memiliki 19 sarana pendidikan. Sarana pendidikan tersebut terdiri dari 10 sekolah SD/ MI, 6 sekolah SMP/MTS, 1 SMA/ MA, dan 2 SMK (*Kecamatan Semampir dalam Angka, 2019)*. Sedangkan, sarana pendidikan di wilayah permukiman kumuh Wonokusumo terdiri dari TK Kuncup Harapan yang terletak di RT 17 RW 7, TK An Nur di RT 15 RW 7, TK Darussalam RT 3 RW 25, TK Nusa Indah di RT 6 RW 7, TK Azzura di RT 20 RW 7, dan SD Al Furqon yang terletak di RW 7 RT 17. Selain itu, terdapat fasilitas pendidikan di RW 6 yang tidak terdelineasi kumuh atau tepatnya berada di RT 8 RW 6 yaitu SD Muhamadiyah 21 dan SMP Muhammadiyah 16. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat umumnya bersekolah di luar kawasan kumuh seperti TK Ujung Galuh di RT 3 RW 6 dan SDN Wonokusumo V-VII. Namun hal tersebut masih dapat dijangkau karena lokasi sekolah masih dekat dengan lokasi permukiman dengan jarak 600 meter. Fasilitas pendidikan tersebut dapat ditempuh dalam waktu 10-15 menit. Berikut adalah peta persebaran sarana pendidikan ditunjukkan oleh Gambar 4.23.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

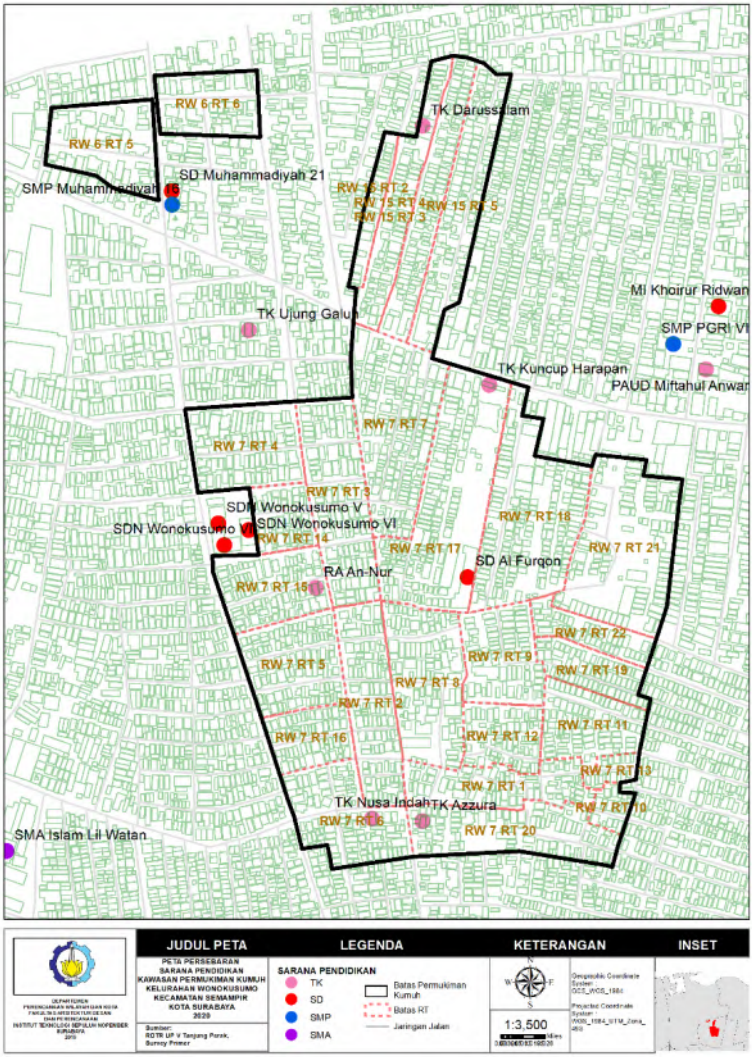

Gambar 4.23. Peta Persebaran Sarana Pendidikan di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo

Sumber : BPS dan Survey Primer, 2020

Berikut adalah kondisi fasilitas pendidikan di lokasi penelitian.

Gambar 4.24. Kondisi Fasilitas Pendidikan di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

Untuk mengukur keterjangkauan ketersediaan sarana pendidikan, diperlukan analisis terhadap standar penyediaan minimum masing-masing sarana pendidikan. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Berikut standar penyediaan fasilitas pendidikan menurut pedoman tersebut.

Tabel 4.10. Tabel Kebutuhan Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Radius Pencapaian
1.	Taman Kanak- Kanak	1.250	500 m^2
2.	Sekolah Dasar	1.600	1.000 m^2
3.	SLTP	4.800	1.000 m^2
4.	SMU	4.800	3.000 m^2
5.	Taman Bacaan	2.500	1,000 m^2

Sumber: SNI 03-1733-2004

Analisis keterjangkauan fasilitas pendidikan dapat dilakukan dengan metode GIS menggunakan *buffering* dengan melihat jangkauan suatu pelayanan terhadap jarak optimal untuk mencapai pelayanan tersebut (Ramadhana, 2018). Berikut keterjangkauan masing-masing jenis sarana pendidikan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

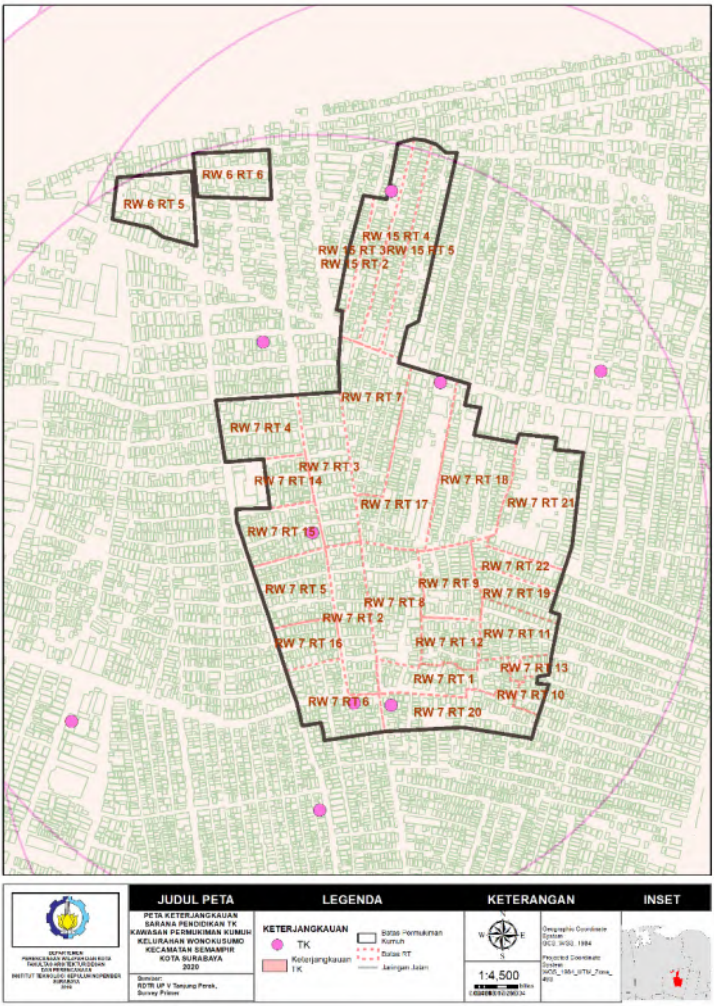

Gambar 4.25. Peta Keterjangkauan Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kelurahan Wonokusumo

Sumber : Analisis Peneliti, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

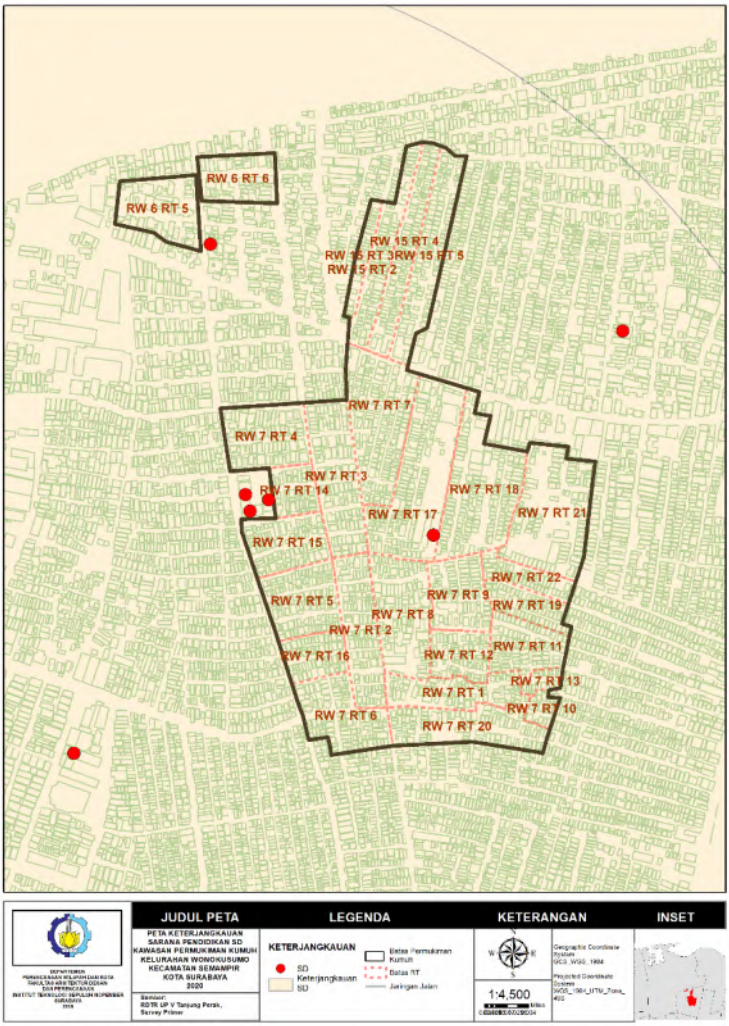

Gambar 4.26. Peta Keterjangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Wonokusumo

Sumber : Analisis Peneliti, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

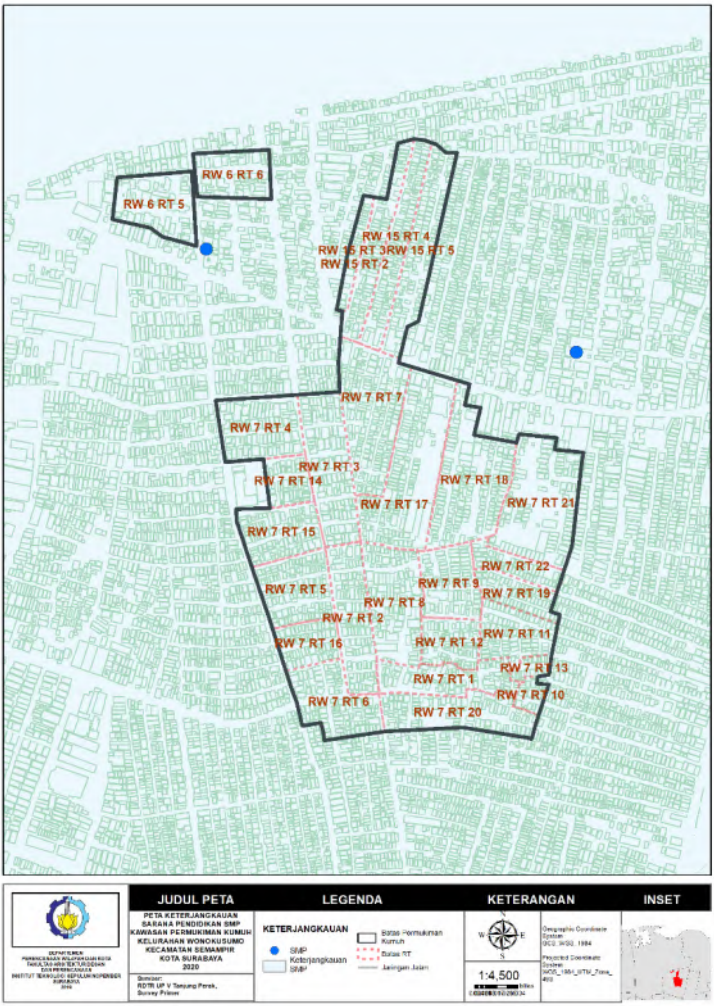

Gambar 4.27. Peta Keterjangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelurahan Wonokusumo

Sumber : Analisis Peneliti, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

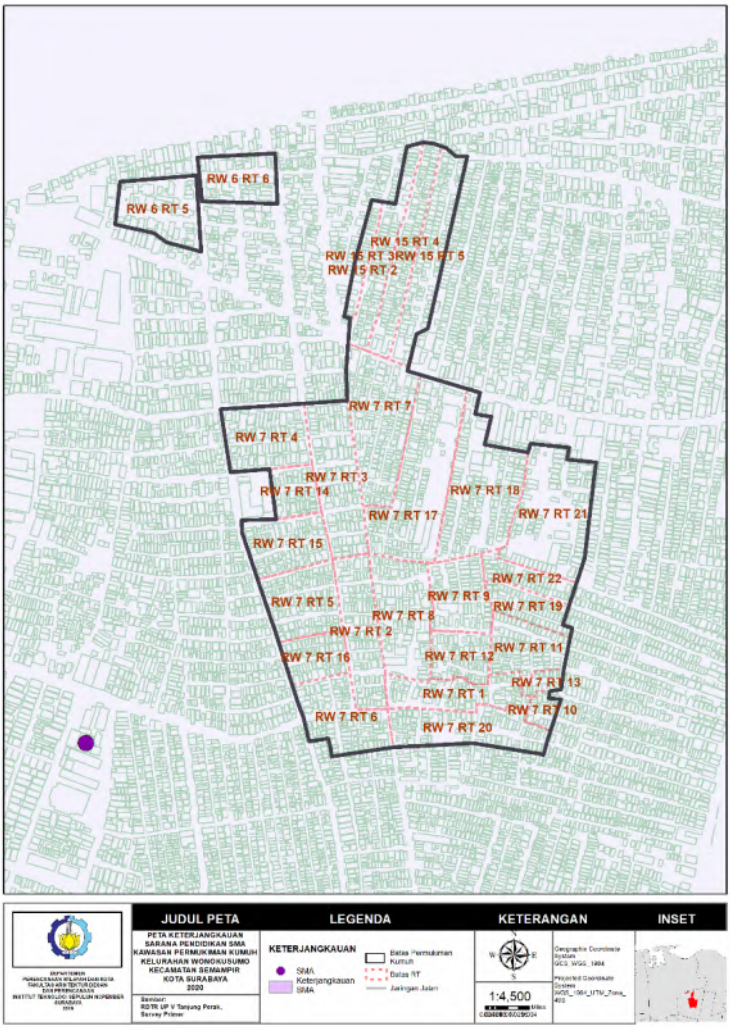

Gambar 4.28. Peta Keterjangkauan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelurahan Wonokusumo

Sumber : Analisis Peneliti, 2020

Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa Kelurahan Wonokusumo memiliki jenis fasilitas pendidikan TK hingga SMA dengan jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan keterjangkauannya, kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Wonokusumo sudah memiliki jangkauan mimunm untuk TK yaitu 500 m^2, SD yaitu 1.000 m^2, SMP yaitu 1.000 m^2, dan SMA yaitu 3.000 m^2. Sehingga, akses masyarakat di permukiman kumuh Wonokusumo terhadap sarana pendidikan secara keseluruhan sudah terpenuhi.

Sedangkan, sarana kesehatan yang terletak di Kelurahan Wonokusumo terdiri dari 1 Poskeskel, 51 Posyandu Balita, dan 11 Posyandu Lansia (*Kecamatan Semampir dalam Angka, 2019*). Sedangkan, sarana kesehatan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh hanya berupa klinik dokter. Klinik dokter tersebut terdiri dari Klinik Dokter Agus yang terletak di RT 5 RW 7 dan Klinik Dokter Sri yang terletak di RT 3 RW 7. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat umumnya pergi ke Puskesmas Wonokusumo yang terletak di RT 10 RW 1. Hal tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat memiliki akses bantuan kesehatan gratis seperti BPJS dan KIS. Namun, bantuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kesehatan terutama bagi masyarakat MBR. Hal tersebut disebabkan biaya iuran BPJS tidak mampu dibayar oleh masyarakat sehingga bantuan tersebut diblokir serta beberapa masyarakat tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi untuk mengakses bantuan tersebut. Hal tersebut membuat klinik dokter lebih banyak digunakan oleh masyarakat meskipun harus menunggu cukup lama dan karena banyaknya pasien yang berobat. Berikut adalah persebaran sarana kesehatan yang terdapat di permukiman kumuh Wonokusumo.

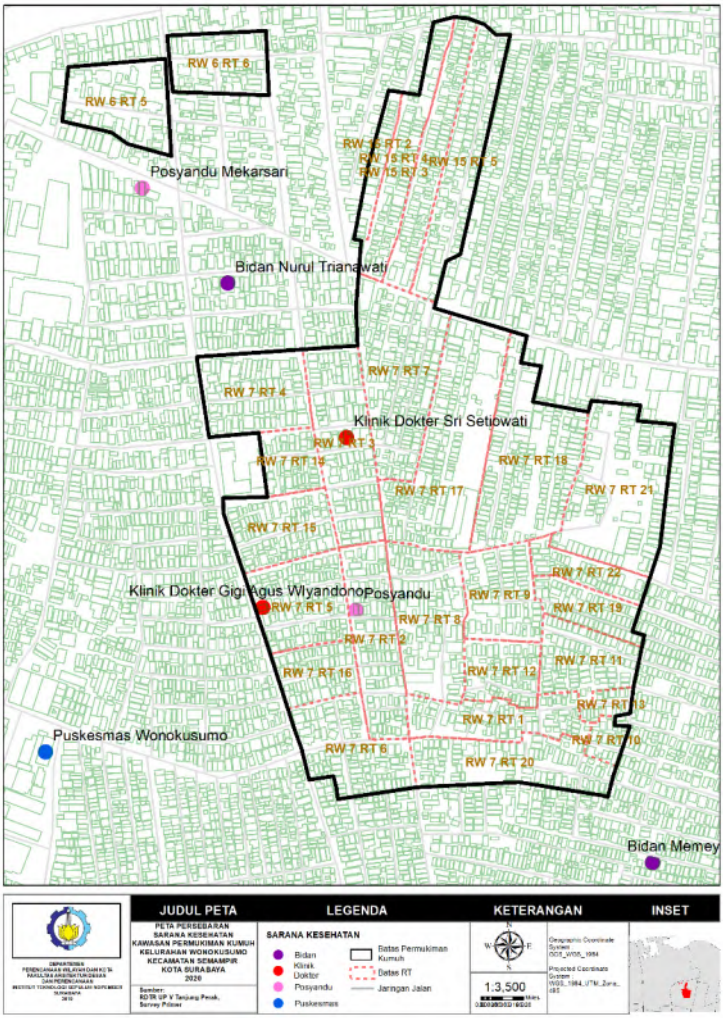

Gambar 4.29. Persebaran Fasilitas Kesehatan di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

Berikut adalah kondisi fasilitas kesehatan di Kelurahan Wonokusumo

Gambar 4.30. Fasilitas Kesehatan Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

Untuk mengukur keterjangkauan ketersediaan sarana kesehatan, diperlukan analisis terhadap standar penyediaan minimum masing-masing sarana kesehatan. Sama halnya dengan analisis keterjangkauan sarana pendidikan, peneliti mengacu pada SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 4.11. Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Radius Pencapaian
1.	Posyandu	1.250	500 m^2
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	1.000 m^2
3.	BKIA/ Klinik Bersalin	30.000	4.000 m^2
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai pengobatan Lingkungan	30.000	1.500 m^2
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000 m^2
6.	Praktek Dokter	5.000	1.500 m^2
7.	Apotik/ Rumah Obat	30.000	1.500 m^2

Sumber: SNI 03-1733-2004

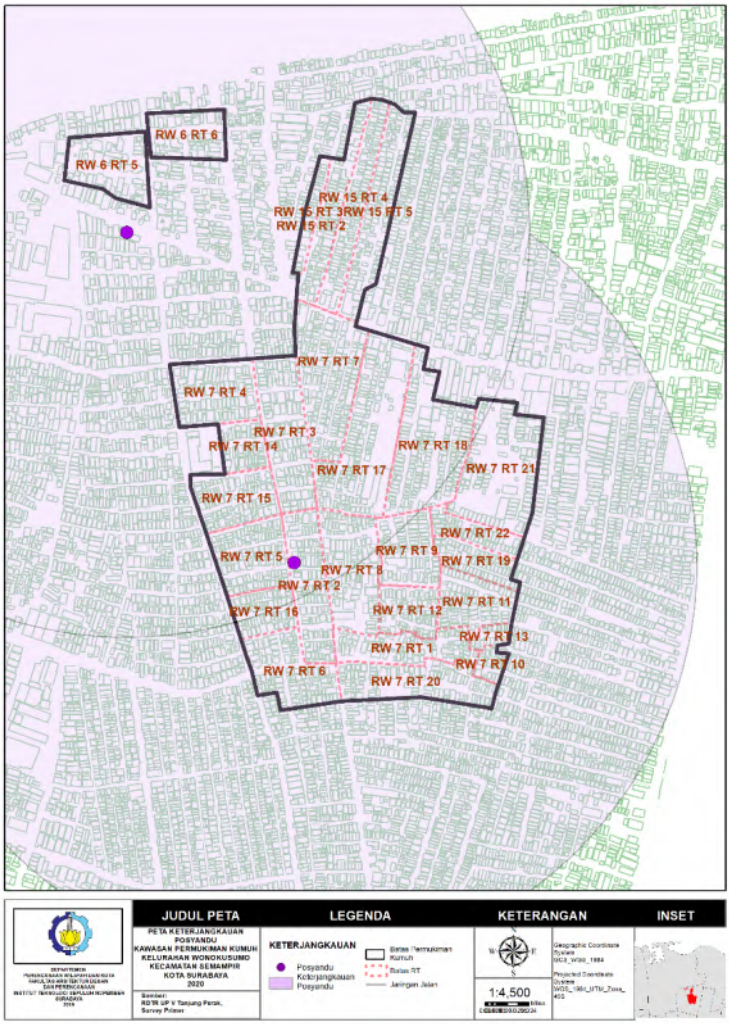

Gambar 4.31. Peta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Posyandu di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Analisa Peneliti, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

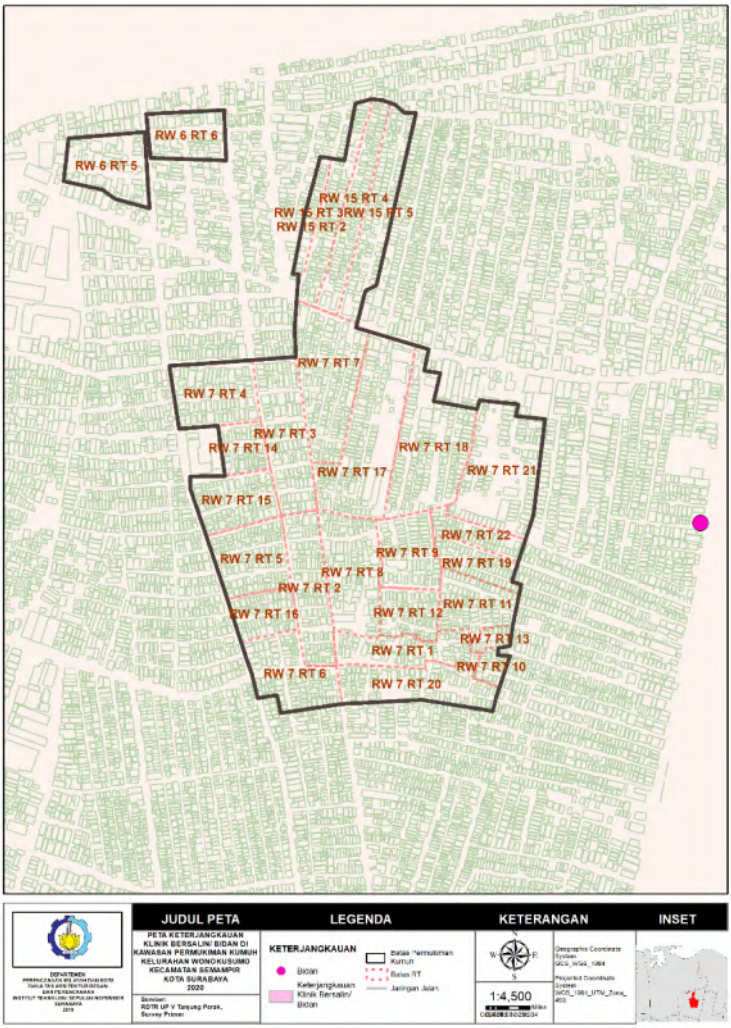

Gambar 4.32. Peta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Klinik Bersalin di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Analisa Peneliti, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

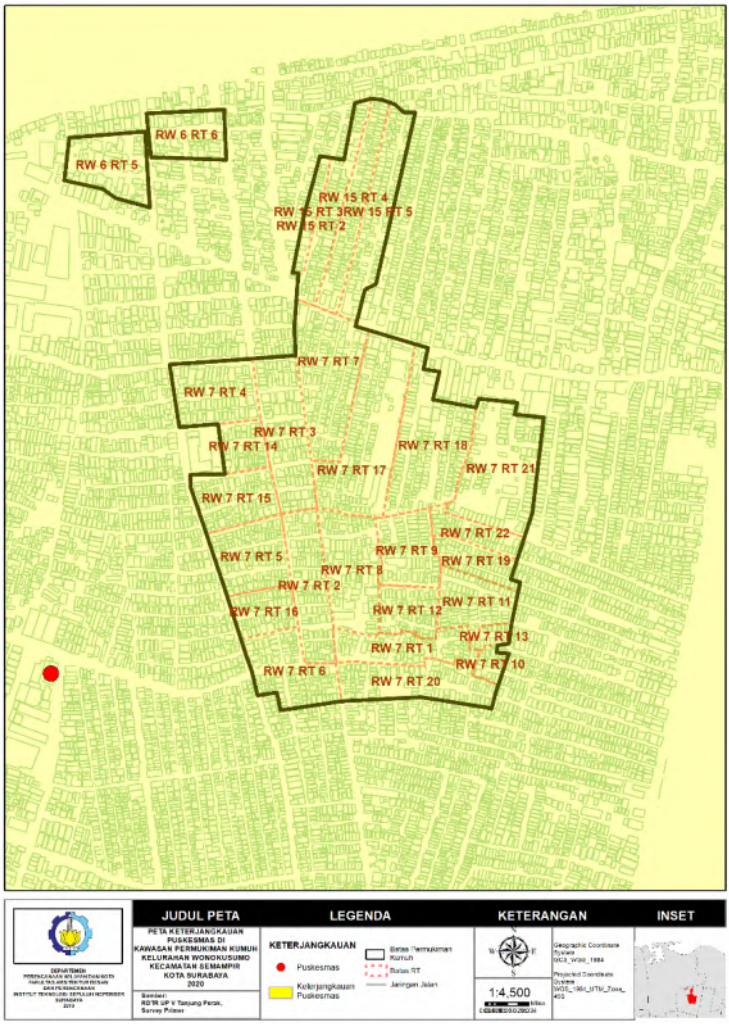

Gambar 4.33. Peta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Puskesmas di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Analisa Peneliti, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

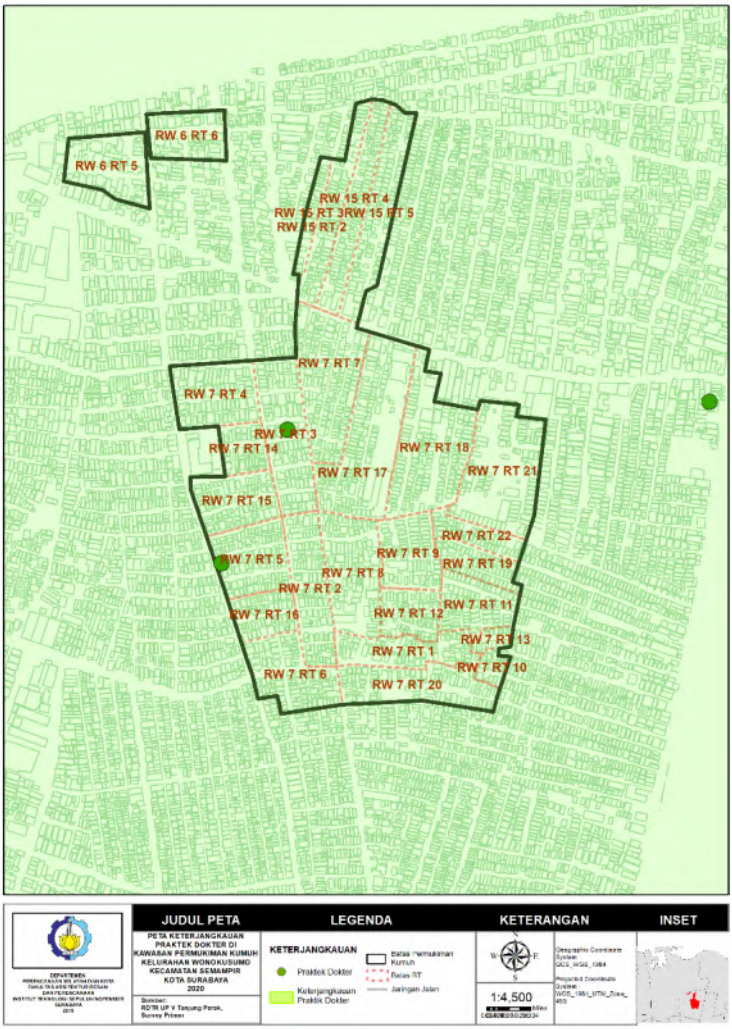

Gambar 4.34. Peta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Praktek Dokter di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Analisa Peneliti, 2020

Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa Kelurahan Wonokusumo memiliki jenis fasilitas kesehatan Posyandu, Klinik bersalin, Puskesmas dan Praktek dokter dengan jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan keterjangkauannya, kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Wonokusumo sudah terpenuhi dalam jangkauan minimum untuk posyandu yaitu 500 m^2, Klinik bersalin yaitu 4.000 m^2, Puskesmas yaitu 3.000 m^2, dan Praktek Dokter yaitu 1.500 m^2. Sehingga, ketersedian sarana kesehatan di permukiman kumuh Wonokusumo secara keseluruhan sudah terpenuhi.

Sarana peribadatan yang terdapat di Kelurahan Wonokusumo berjumlah 85 sarana, yang terdiri dari 29 masjid, 17 mushola, 37 langgar, dan 2 gereja protestan (*Kecamatan Semampir dalam Angka, 2019*). Sarana peribadatan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh terdiri dari dua masjid yang terletak di RT 17 RW 7 dan RT 21 RW 7 dan mushola sejumlah 8 yang terletak di RT 7 RW 7, RT 15 RW 7, RT 3 RW 7, RT 6 RW 7, RT 8 RW 7, RT 11 RW 7, RT 5 RW 15, dan RT 5 RW 6. Lokasi mushola tersebut tersebar di tengah permukiman warga. Masjid dan mushola tersebut sering digunakan warga untuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian rutin, tausyiah, dan lain-lain. Masyarakat juga masih memiliki keterikatan yang kuat dengan kegiatan di masjid atau mushola yang dibuktikan dengan terdapatnya kelompok keagamaan seperti remaja masjid dan kelompok pengajian. Sedangkan, lokasi gereja tidak terdapat di kawasan permukiman kumuh, melainkan terletak di RT 10 RW 11 dan RT 4 RW 16. Berikut adalah persebaran sarana peribadatan di lokasi penelitian ditunjukkan oleh Gambar 4.35.

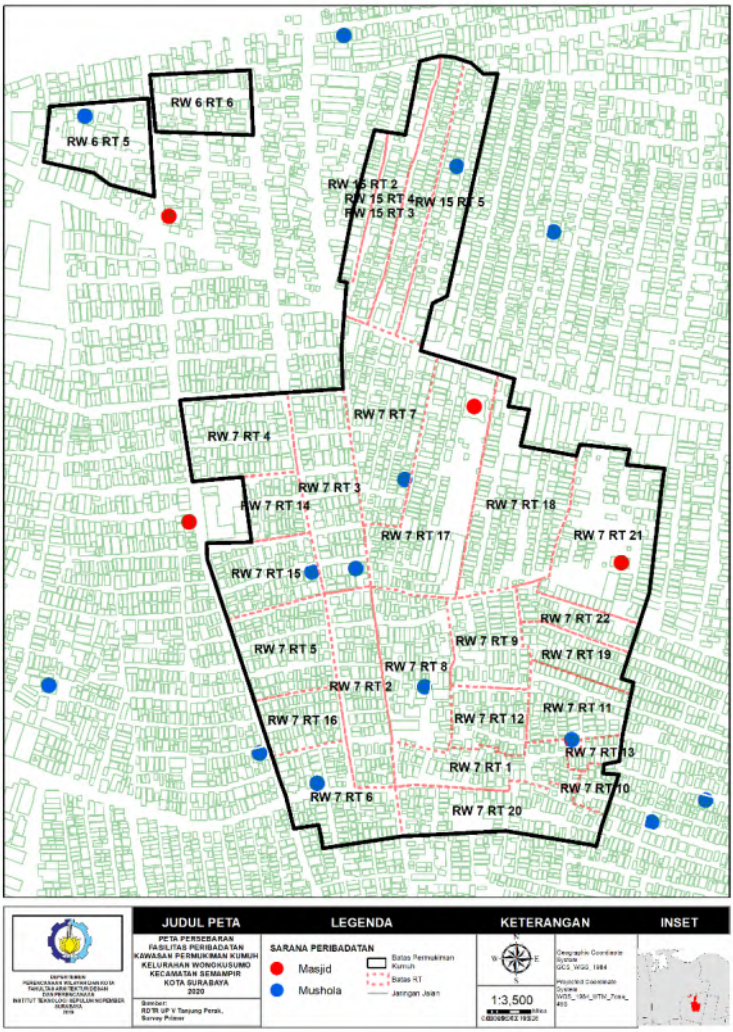

Gambar 4.35. Persebaran Sarana Peribadatan di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

Berikut adalah kondisi sarana peribadatan yang terletak di permukiman kumuh Wonokusumo.

Gambar 4.36. Kondisi Fasilitas Peribadatan di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

Untuk mengukur keterjangkauan ketersediaan sarana peribadatan, diperlukan analisis terhadap standar penyediaan minimum masing-masing sarana kesehatan. Sama halnya dengan analisis keterjangkauan sarana pendidikan dan kesehatan, peneliti mengacu pada SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Berikut standar penyediaan fasilitas kesehatan menurut pedoman tersebut.

Tabel 4.12. Kebutuhan Sarana Peribadatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Radius Pencapaian
1.	Musholla/ Langgar	250	100 m^2
2.	Masjid Warga	2.500	1.000 m^2
3.	Masjid Lingkungan (Kelurahan)	30.000	-
4.	Masjid Kecamatan	30.000	-
5.	Sarana Ibadah lain	Tergantung sistem kekerabatan	-

Sumber: SNI 03-1733-2004

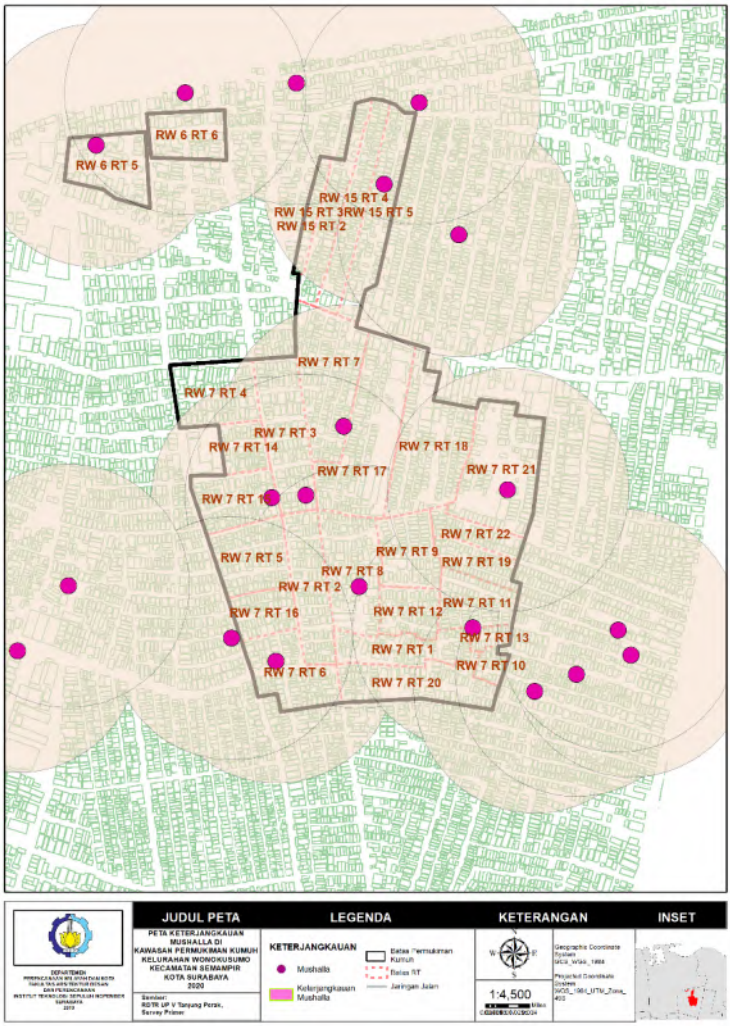

Gambar 4.37. Peta Keterjangkauan Fasilitas Peribadatan Mushola/Langgar di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Analisa Peneliti, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

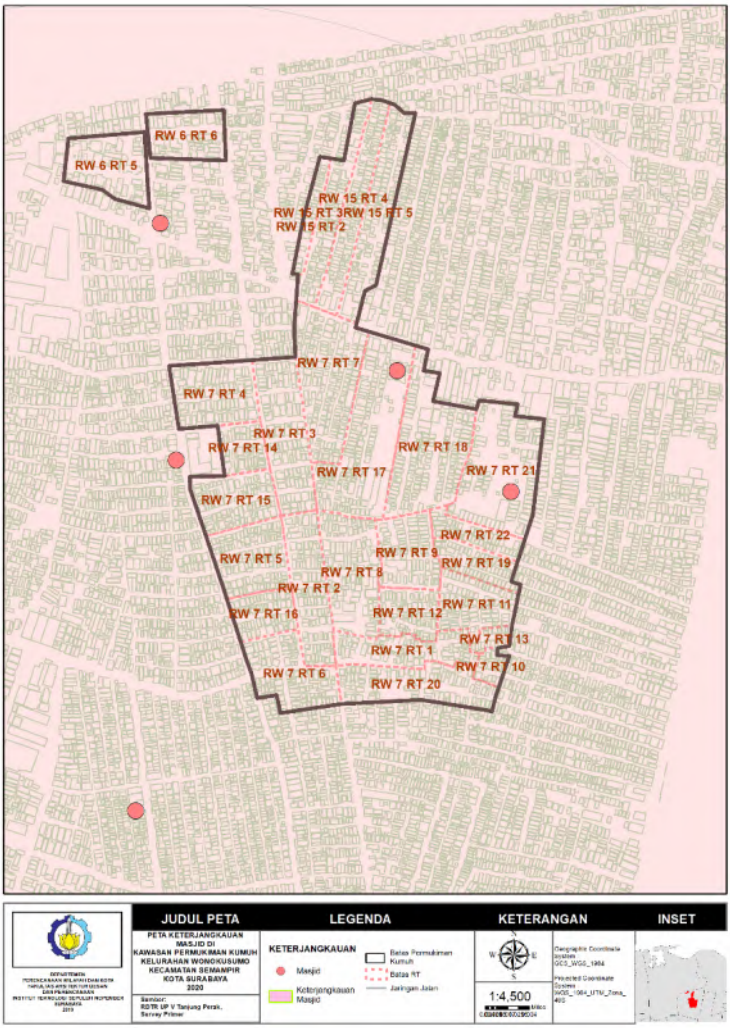

Gambar 4.37. Peta Keterjangkauan Fasilitas Peribadatan Masjid di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Analisa Peneliti, 2020

Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa Kelurahan Wonokusumo memiliki jenis fasilitas peribadatan berupa Masjid dan Musholla dengan jumlah yang berbeda-beda. Berdasarkan keterjangkauannya, kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Wonokusumo sudah terpenuhi dalam jangkauan minimum untuk Mushola yaitu 100 m^2, dan Masjid yaitu 1.000 m^2. Sehingga, ketersedian sarana peribadatan di permukiman kumuh Wonokusumo secara keseluruhan sudah terpenuhi.

Sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Kelurahan Wonokusumo terdiri dari 2 pasar dan 4 minimarket (*Kecamatan Semampir dalam Angka, 2019*). Sedangkan, perdagangan dan jasa yang terletak di permukiman kumuh terdiri dari minimarket yang terletak di perbatasan RW 15 dan RW 7. Selain itu, jenis perdagangan dan jasa yang terletak di permukiman di dominasi oleh jenis pertokoan dan warung sebagai tempat usaha warga. Berikut adalah kondisi perdagangan dan jasa di permukiman kumuh Wonokusumo.

Gambar 4.38. Kondisi Perdagangan dan Jasa di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

Sarana sosial dan budaya yang terdapat di kawasan permukiman kumuh Wonokusumo berupa Balai RW. Adapun beberapa RT di RW 7 yaitu RT 21 dan RT 22 memiliki pos RT namun sudah lama tidak digunakan karena kondisi yang rusak. Balai RW yang terdapat di permukiman kumuh berjumlah dua unit, yaitu Balai RW VII dan Balai RW XV. Adapun RW VI juga memiliki balai,

namun tidak terletak di wilayah yang terdelineasi kumuh melainkan di RT 3 RW 6. Balai tersebut digunakan warga untuk kegiatan sosial seperti perkumpulan kelompok masyarakat, kegiatan sosialisasi, senam rutin, musyawarah, pemungutan suara, dan sebagainya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, juga terdapat kelompok aktif sebagai pengurus dimana umumnya beranggotakan Ibu rumah tangga. Selain itu, Balai RW digunakan untuk kegiatan lainnya seperti tempat sekolah (TK/ PAUD) dan kegiatan Posyandu balita setiap sabtu atau minggu.

Gambar 4.39. Kondisi Fasilitas Sosial Budaya di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

Lokasi sarana sosial budaya berupa Balai RW tersebut cukup mudah dijangkau oleh masyarakat. Balai RW VII terletak di Jalan Wonosari Wetan Baru No.22 RT 2 RW 7 dan Balai RW XV terletak di Jalan Bulak Jaya V No.9 RT 5 RW 15. Kedua lokasi balai tersebut dapat dijangkau kendaraan, baik angkutan umum berupa Lyn, atau kendaraan pribadi. Kondisi. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, Balai Pertemuan RW memiliki radius pencapaian sebesar 500 m^2 dengan jumlah penduduk pendukung 2.500 jiwa. Berikut persebaran sarana sosial dan budaya di permukiman kumuh Wonokusumo beserta keterjangkauannya pada gambar dibawah ini.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

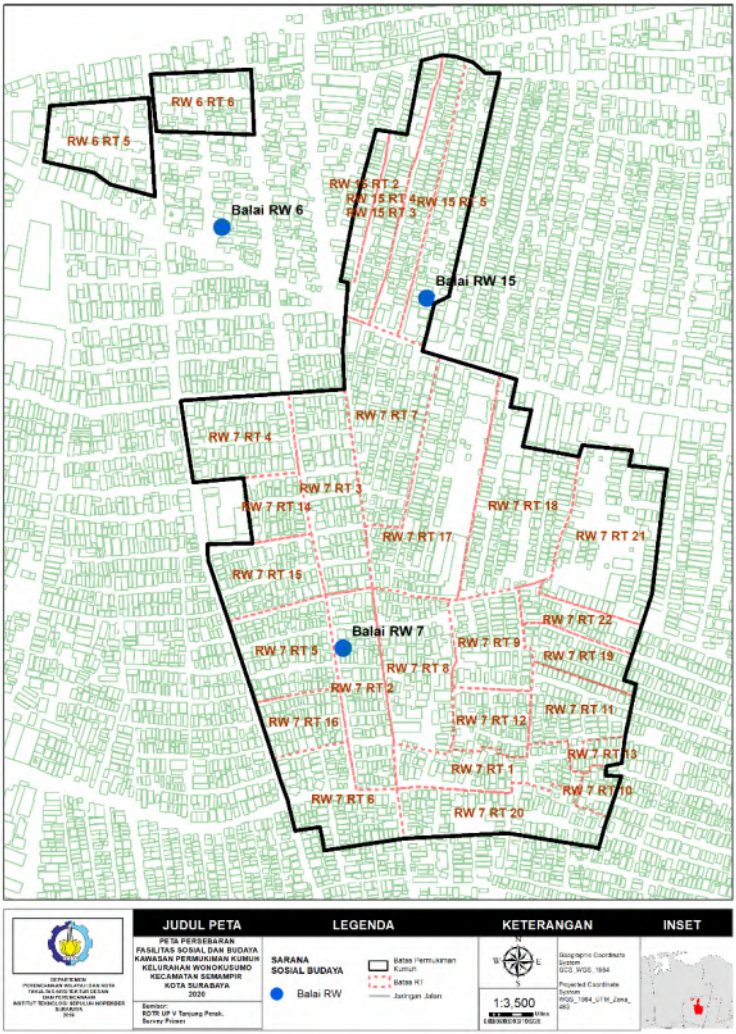

Gambar 4.40. Persebaran Sarana Sosial dan Budaya di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

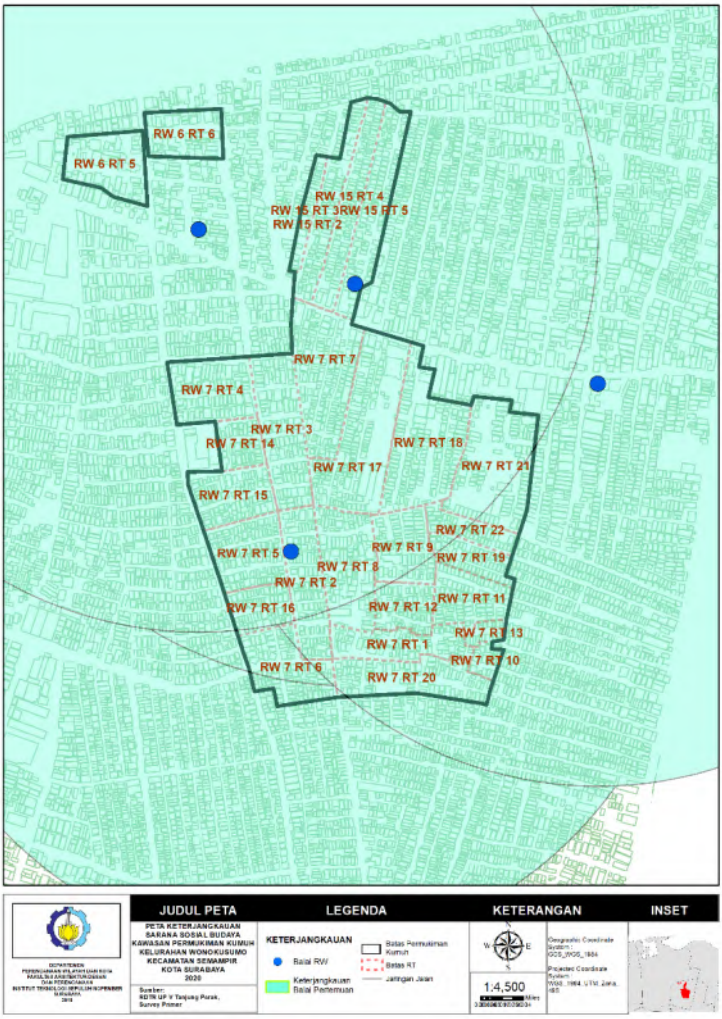

Gambar 4.41. Peta Keterjangkauan Fasilitas Sosial Budaya Balai Pertemuan RW di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Analisa Peneliti, 2020

Sedangkan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tidak ditemukan RTH di Permukiman Kumuh Wonokusumo seperti taman, lapangan, dan lainnya. Padatnya kawasan permukiman menyebabkan kurangnya lahan untuk penyediaan RTH, baik RTH publik ataupun RTH privat. Adapun RTH terdekat dengan kawasan permukiman kumuh Wonokusumo yaitu berupa makam. Makam tersebut terletak diluar Kelurahan Wonokusumo dan berjumlah tiga, yaitu Makam Wonokusumo Kidul dan Pegirian yang berada di Kelurahan Pegirian serta Makam Islam Kedungmangu yang berada di Kelurahan Sidotopo. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian responden masih aktif untuk mengunjungi makam tersebut untuk berziarah.

Adapun beberapa lahan kosong di kawasan permukiman kumuh terletak di RW 7 tepatnya berada di RT 17, RT 20, dan RT 21. Namun, lahan kosong tersebut digunakan untuk membuang sampah bagi warga yang tidak terlayani pengangkutan sampah akibat jaringan jalan di rumah mereka terlalu sempit untuk diakses gerobak atau bak sampah. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, lahan kosong di RT 21 yang cukup luas akan menggenang ketika hujan sehingga sampah-sampah masuk ke rumah-rumah warga. Berikut adalah kondisi lahan kosong di permukiman kumuh Wonokusumo.

Gambar 4.42. Kondisi Lahan Kosong di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

4.1.13. Kondisi Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan menjadi salah satu hal yang penting untuk diidentifikasi, baik kondisi penggunaan lahan eksisting ataupun kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana. Jika ditinjau berdasarkan dokumen RDTRK UP V Tanjung Perak, daerah permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo berada pada rencana peruntukkan permukiman dan perdagangan jasa dengan subzona rumah kepadatan tinggi dan perdagangan skala skala lokal atau lingkungan. Sehingga, status hukum terkait fungsi peruntukkan lahan tersebut sudah sesuai.

Jika ditinjau berdasarkan rencana tersebut, lokasi permukiman kumuh yang berada di Wonokusumo sudah sesuai dengan peruntukkannya yaitu perumahan kepadatan tinggi. Selain peruntukkan perumahan, lokasi fasilitas umum di permukiman kumuh Wonokusumo juga sudah sesuai antara eksisting dan rencana. Peta kesesuaian dan eksisting ditunjukkan gambar sebagai berikut.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Gambar 4.43. Peta Rencana Penggunaan Lahan di Permukiman Kumuh

Sumber : Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2018-2038

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

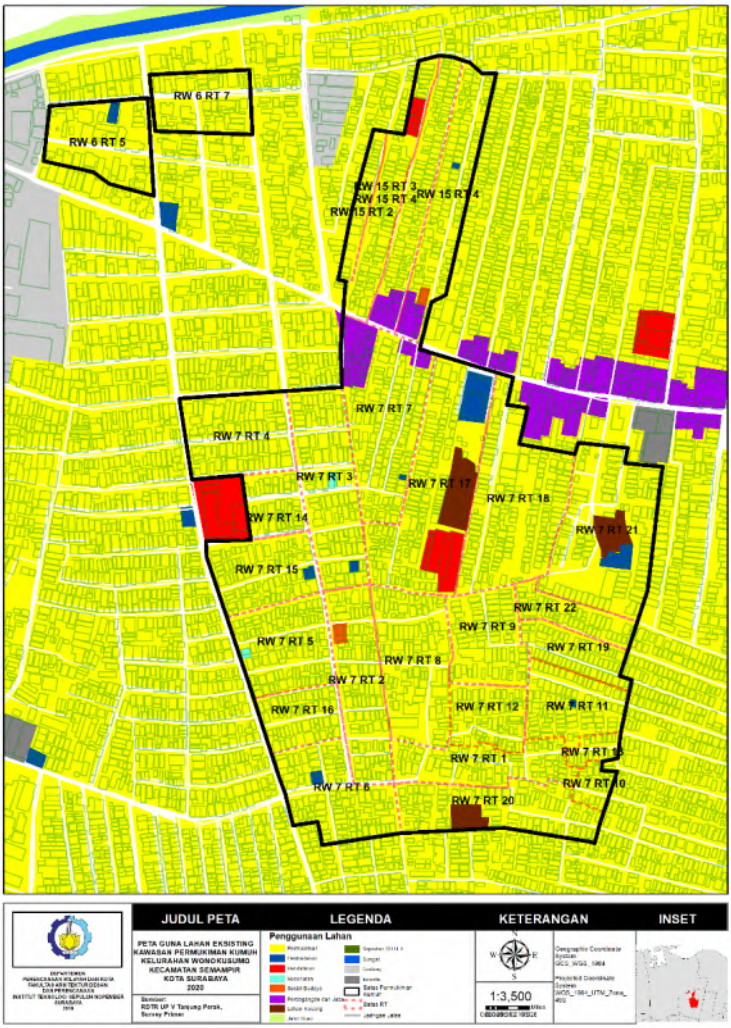

Gambar 4.44. Peta Penggunaan Lahan Eksisting di Permukiman Kumuh Wonokusumo

Sumber : Survey Primer, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

4.2. Analisa Karakteristik Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo

Sasaran pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo. Identifikasi tersebut dilakukan dengan kuisioner ke masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh Wonokusumo dan data-data sekunder.

Identifikasi tersebut ditinjau dari keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, lokasi hunian, kondisi jalan, kelancaran drainase, ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi, ketersediaan persampahan, poteksi kebakaran, akses sarana kesehatan, akses sarana pendidikan, ketersediaan RTH, Status kepemilikan lahan, status legalitas bangunan, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat partisipasi, frekuensi kegiatan masyarakat, frekuensi kriminalitas, tingkat kemiskinan, kemampuan pemenuhan rumah layak huni, dan tingkat pendapatan. Masing-masing variabel di setiap RT dilakukan pendataan dan dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya, dilakukan skoring terhadap persentase tersebut. Skoring tersebut dilakukan dengan memberikan nilai 20, 30, dan 50. Nilai 20 diberikan untuk kondisi yang paling baik. Nilai 30 diberikan untuk kondisi yang sedang. Sedangkan, nilai 50 diberikan untuk menilai kondisi yang buruk. Setelah dikelompokkan dalam tiga katagori tersebut, dilakukan analisis klaster. Dalam prosesnya, beberapa variable tidak dimasukkan dalam proses analisis karena pada kondisi eksisting memiliki kondisi yang sama.Adapun data disajikan secara lengkap di Lampiran 5. Berikut adalah diagram persentase dari masing-masing variabel.

4.2.1. Karakteristik Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan didapatkan dari jumlah bangunan yang memiliki keteraturan dan tidak mengganggu aktivitas, seperti tidak menghalangi jalan dan tidak berada di sempadan pantai atau sungai dibagi dengan jumlah keseluruhan bangunan. Data yang digunakan berasal dari *database* permukiman kumuh tahun 2018. Pada data

tersebut terdapat jumlah bangunan yang tidak teratur dari masing-masing RT, sehingga untuk mendapatkan jumlah bangunan teratur dilakukan dengan menghuting total bangunan dikurangi dengan jumlah bangunan yang tidak teratur.

Secara umum, keteraturan bangunan RW 7 dengan total bangunan 1.283 unit memiliki keteraturan 83%, RW 15 dengan total 281 unit bangunan memiliki keteraturan 0%, dan RW 6 dengan total 170 unit bangunan memiliki keteraturan 38%. Sedangkan, keteraturan masing-masing RT ditunjukkan oleh Gambar 4.45. sebagai berikut.

Gambar 4.45. Diagram Karakteristik Keteraturan Bangunan di Masing-Masing RT

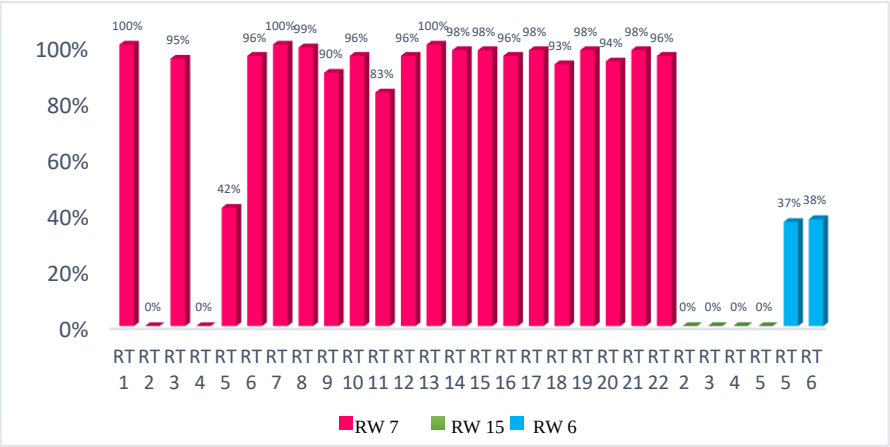

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.2. Karakteristik Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan didapatkan dari jumlah bangunan dibagi dengan luas masing-masing RT. Secara umum, kepadatan RW 7 dengan total luas 17,12 Ha adalah 90 unit/ Ha, RW 15 dengan total luas 2,27 Ha adalah 124 unit/ Ha, dan RW 6 dengan total luas 1,05 Ha

adalah 162 unit/ Ha. Kepadatan bangunan masing-masing RT ditunjukkan oleh Gambar 4.46. sebagai berikut.

Gambar 4.46. Diagram Karakteristik Kepadatan Bangunan di Masing-Masing RT

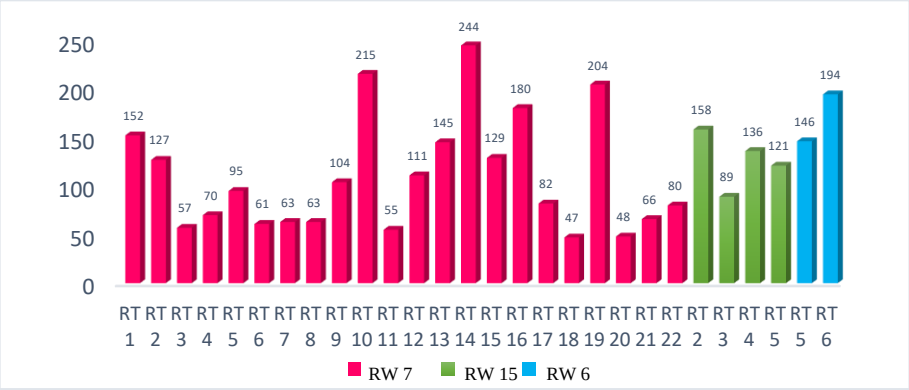

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.3. Karakteristik Kualitas Bangunan

Kualitas bangunan didapatkan dari persentase bangunan permanen tanpa adanya kerusakan baik pada atap, dinding atau lantai sehingga dapat melindungi penghuninya dari ancaman hujan, panas, dan lainnya (*durability of dwelling* dan *habitability*). Kualitas bangunan didapatkan dari hasil kuisioner dan pengamatan fisik terhadap hunian responden. Secara umum, RW 7 memiliki 53% bangunan yang sesuai, dimana 71 dari 133 KK memiliki hunian yang sesuai. RW 15 memiliki persentase kualitas bangunan sebesar 69% dimana 16 dari 23 KK memiliki hunian yang sesuai. Sedangkan, RW 6 memiliki persentase kualitas bangunan sebesar 57% dimana 8 dari 14 KK memiliki hunian yang sesuai. Karakteristik kualitas bangunan ditunjukkan oleh Gambar 4.47. sebagai berikut.

Gambar 4.47. Diagram Kualitas Bangunan di Masing-Masing RT

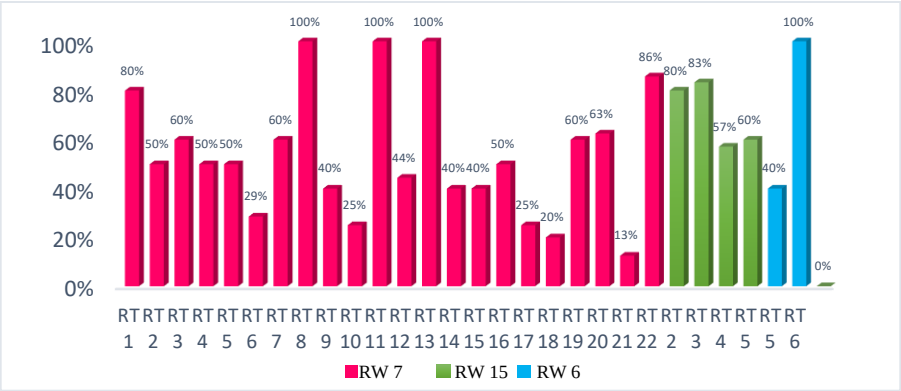

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.4. Karakteristik Lokasi Hunian

Lokasi hunian didapatkan dari persentase luas permukiman yang tidak terletak di lokasi yang berbahaya, meliputi rawan bencana, tegangan listrik, dan sekitar kawasan pembuangan limbah. Adapun lokasi hunian yang dianggap tidak layak di Kelurahan Wonokusumo berupa permukiman sempadan SUTT dan kawasan yang terdampak genangan. Karakteristik lokasi hunian ditunjukkan Gambar 4.48. sebagai berikut.

Gambar 4.48. Diagram Karakteristik Lokasi Hunian di Masing-Masing RT

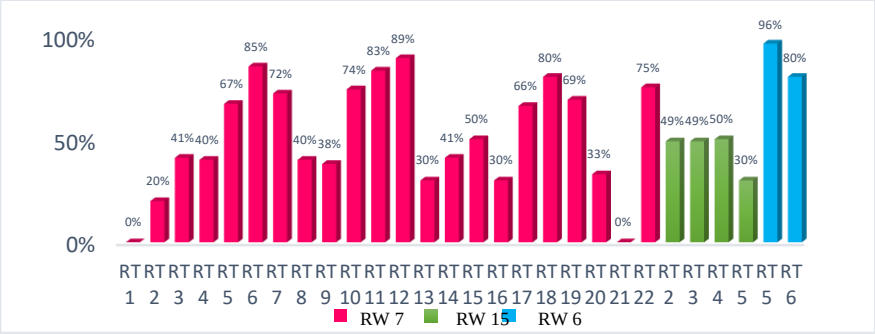

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.5. Karakteristik Kondisi Jalan

Kondisi jalan didapatkan dari persentase ruas jalan yang telah diperkeras dan tidak mengalami kerusakan. Dalam hal ini, perkerasan tersebut dapat berupa paving atau aspal. Ruas jalan yang rusak diperoleh dari *baseline* permukiman kumuh. Berikut ditunjukkan oleh Diagram 4.49.

Gambar 4.49. Diagram Kondisi Jalan di Masing-Masing RT

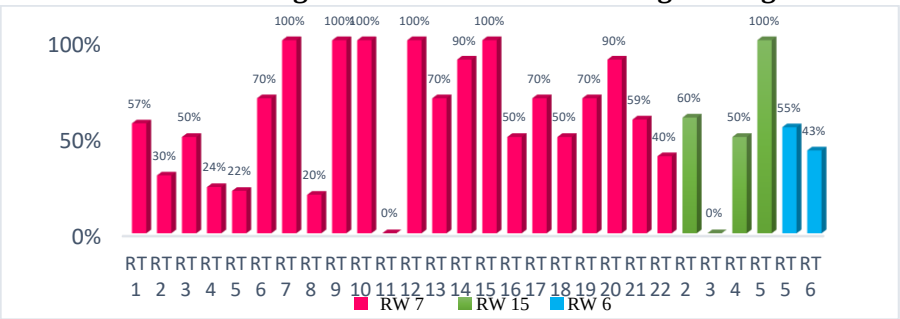

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.6. Kelancaran Drainase

Kelancaran drainase didapatkan dari persentase panjang drainase yang tidak mengalami kerusakan dan dapat mengalirkan limpasan air sehingga tidak terjadi genangan. Berikut ditunjukkan oleh Gambar 4.50.

Gambar 4.50. Kondisi Drainase di Masing-Masing RT

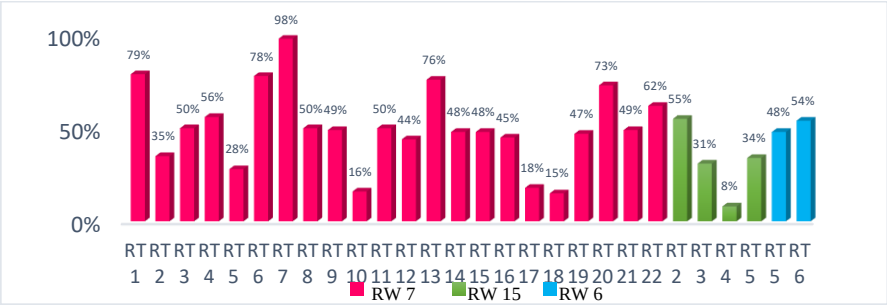

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.7. Karakteristik Air Bersih

Karakteristik air bersih didapatkan dari persentase KK yang memiliki akses air bersih yang terlindungi dari kontaminasi dimana dibuktikan dengan kualitas air yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Selain itu, sumber air bersih yang digunakan maksumal diakses oleh lima keluarga dan dapat diakses <30 menit.Karakteristik air bersih ditunjukkan oleh Gambar 4.51. sebagai berikut.

Gambar 4.51. Diagram Karakteristik Air Bersih di Masing-Masing RT

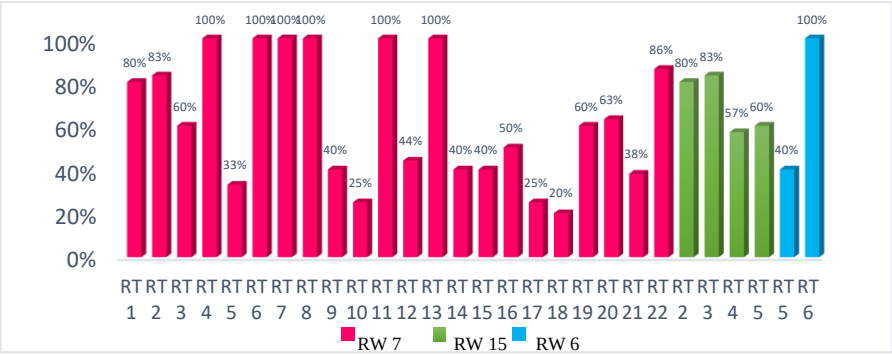

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.8. Karakteristik Sanitasi

Sanitasi terpenuhi jika masyarakat memiliki akses sanitasi dalam katagori *adequate sanitation*. Artinya sanitasi tidak digunakan lebih dari dua keluarga dan terdapat pengelolaan *in situ* atau *septictank* (dikelola *offsite*). Sehingga, karakteristik sanitasi didapatkan dari persentase KK yang memenuhi kondisi tersebut. Pada lokasi penelitian, semua KK sudah memiliki sanitasi pribadi yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Berikut ditunjukkan oleh Gambar 4.52.

Gambar 4.52. Diagram Karakteristik Sanitasi di Masing-Masing RT

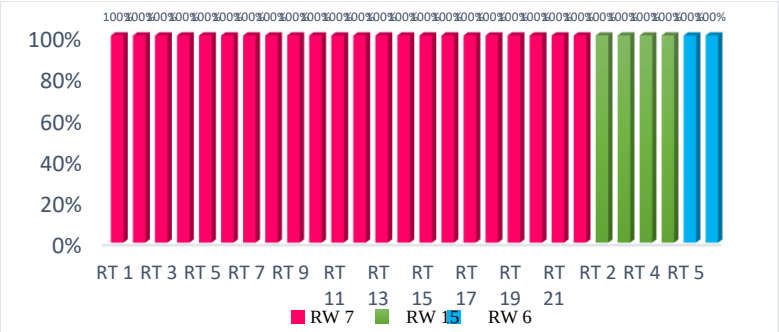

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.9. Karakteristik Persampahan

Persampahan terpenuhi jika masyarakat memiliki sarana prasarana persampahan dengan pengangkutan rutin sehingga tidak terjadi penumpukkan sampah di kawasan permukiman. Sehingga, karakteristik persampahan dinilai dari persentase KK yang memenuhi syarat tersebut. Berikut karakteristik persampahan ditunjukkan oleh Gambar 4.53.

Gambar 4.53. Diagram Karakteristik Persampahan di Masing-Masing RT

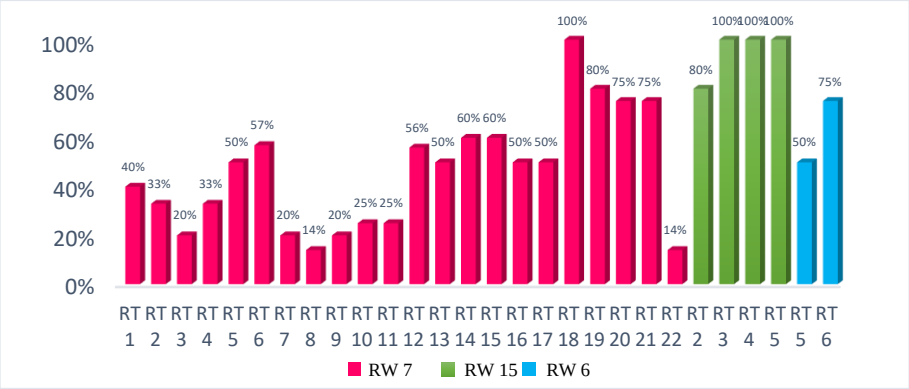

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.10. Karakteristik Proteksi Kebakaran

Proteksi kebakaran dinilai dari ketersediaan fasilitas proteksi kebakaran di kawasan permukiman. Berdasarkan observasi dan wawancara, seluruh RT tidak memiliki sarana proteksi kebakaran seperti yang ditunjukkan Diagram 4.54. sebagai berikut.

Gambar 4.54. Diagram Karakteristik Proteksi Kebakaran di Masing-Masing RT

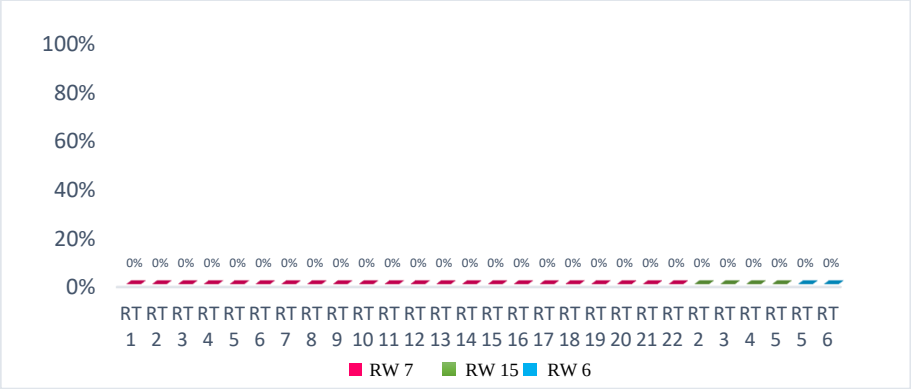

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.11. Karakteristik Akses Sarana Kesehatan

Akses sarana kesehatan dinilai dengan persentase KK yang terlayani sarana kesehatan dengan kondisi layak dan memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat. Berikut akses sarana kesehatan ditunjukkan oleh Diagram 4.55.

Gambar 4.55. Diagram Karakteristik Akses Sarana Kesehatan di Masing-Masing RT

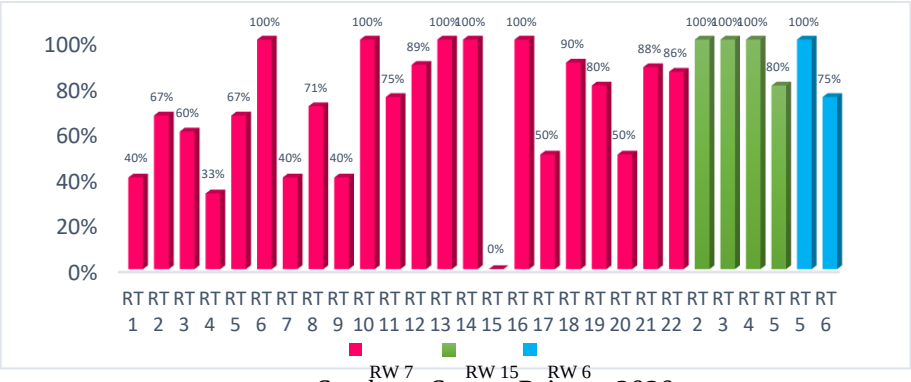

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.12. Karakteristik Akses Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan dinilai berdasarkan persentase KK yang terlayani sarana pendidikan dengan kondisi fisik yang layak dan dapat diakses seluruh kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh KK menyatakan telah mendapatkan akses pendidikan dengan fisik bangunan yang layak serta pelayanan yang telah memenuhi. Berikut karakteristik akses sarana pendidikan ditunjukkan oleh Diagram 4.56.

Gambar 4.56. Diagram Karakteristik Akses Sarana Pendidikan di Masing-Masing RT

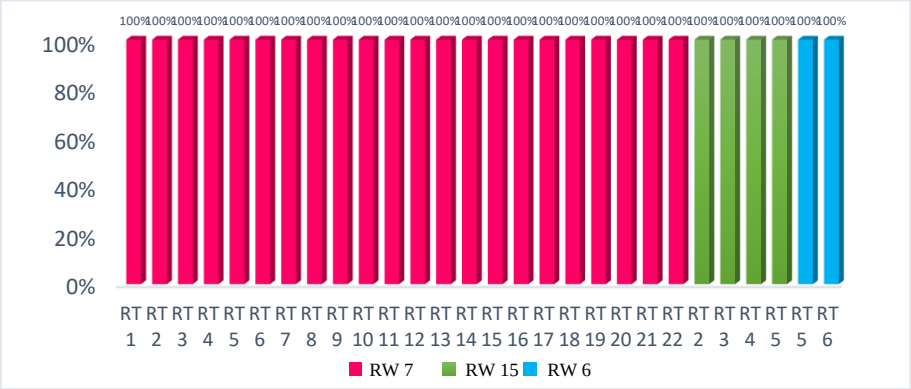

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.13. Karakteristik Ketersediaan RTH

Ketersediaan RTH didapatkan dari persentase luas RTH yang digunakan sebagai sarana berkumpul dan berinteraksi di masing-masing RT. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tidak ditemukan jenis RTH tersebut. Berikut karakteristik ketersediaan RTH di lokasi penelitian.

Gambar 4.57. Diagram Ketersediaan RTH di Masing-Masing RT

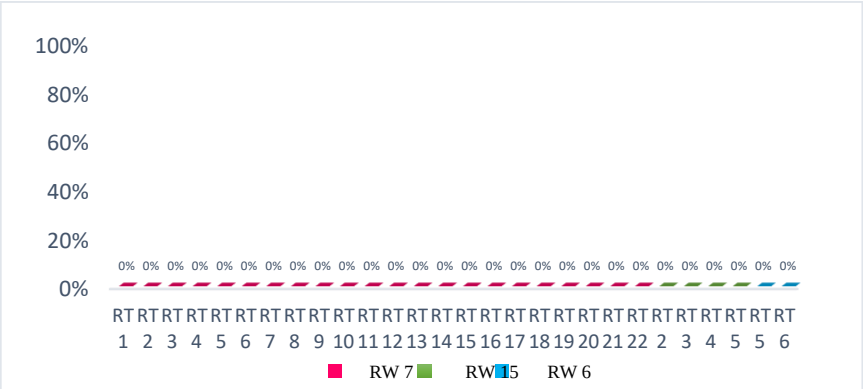

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.14. Karakteristik Status Kepemilikan Lahan

Karakteristik kepemilikan lahan didapatkan dari persentase bangunan yang memiliki perizinan berupa SHM atau surat lainnya sehingga dapat melindungi penghuni dari penggusuran. Secara umum, RW 7 memiliki 738 bangunan atau 48% yang berstatus lahan hak milik, RW 15 memiliki 107 bangunan atau 38% yang berstatus lahan hak milik, dan RW 6 memiliki 61 bangunan atau 36% yang berstatus lahan hak milik. Adapun kendala yang dihadapi dalam kepemilikan tersebut adalah keberadaan tanah PT.KAI di beberapa RT, dan rendahnya kepedulian warga atas kepemilikan legalitas lahan tersebut. Berikut karakteristik status kepemilikan lahan ditunjukkan oleh Gambar 4.58.

Gambar 4.58. Diagram Karakteristik Status Kepemilikan Lahan di Masing-Masing RT

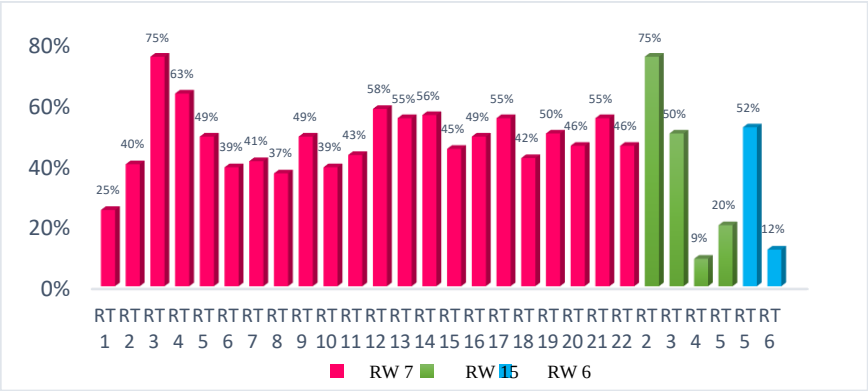

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.15. Karakteristik Legalitas Bangunan

Legalitas bangunan didapatkan dari persentase bangunan yang memiliki surat kepemilikan berupa IMB. Berikut karakteristik status kepemilikan bangunan ditunjukkan oleh Gambar 4.59.

Gambar 4.59. Diagram Karakteristik Status Kepemilikan Bangunan di Masing-Masing RT

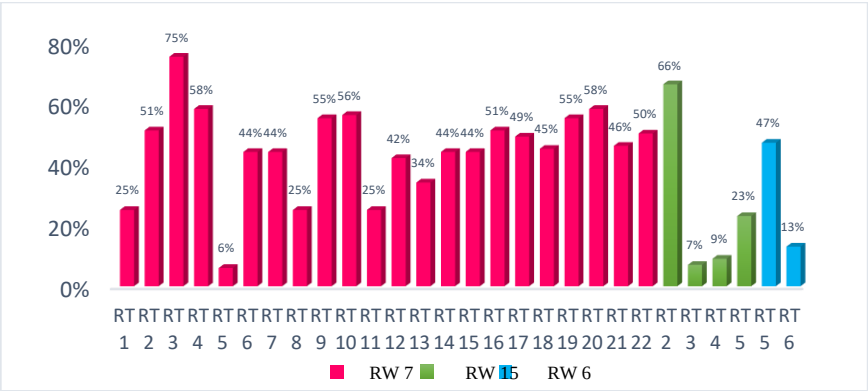

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.16. Karakteristik Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk didapatkan dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah (Ha). Berikut karakteristik kepadatan penduduk ditunjukkan oleh Gambar 4.60.

Gambar 4.60. Diagram Karakteristik Kepadatan Penduduk di Masing-Masing RT

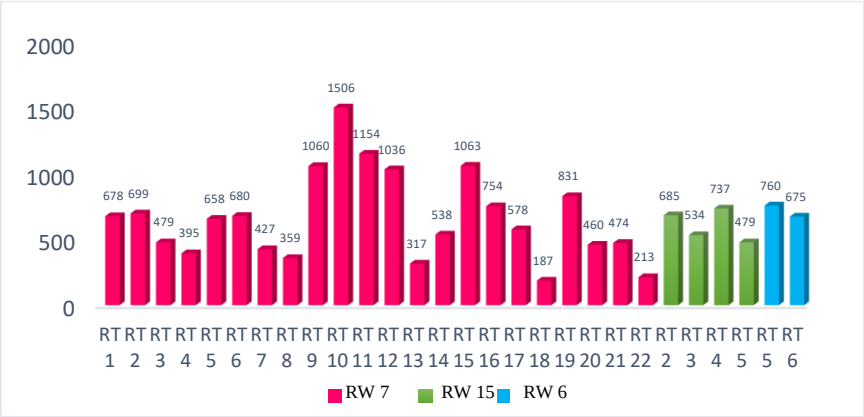

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.17. Karakteristik Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dinilai dari mayoritas tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh di masing-masing RT. Tingkat pendidikan terakhir tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lulus tingkat pendidikan menengah, lulus pendidikan dasar, dan tidak lulus pendidikan dasar. Berikut ditunjukkan Gambar 4.61.

Gambar 4.61. Diagram Karakteristik Tingkat Pendidikan

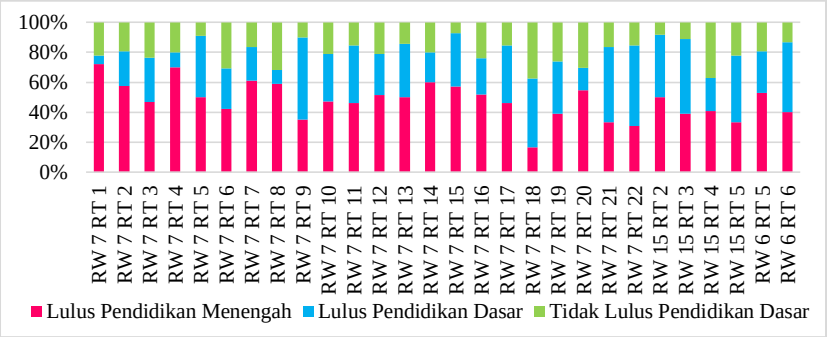

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.18. Karakteristik Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi dilihat berdasarkan persentase KK yang terlibat dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh seperti gotong royong atau kelompok lain yang berperan serta dalam penanganan kumuh. Berikut karakteristik tingkat partisipasi ditunjukkan oleh Gambar 4.62.

Gambar 4.62. Diagram Karakteristik Tingkat Partisipasi di Masing-Masing RT

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.19. Karakteristik Frekuensi Kegiatan Masyarakat

Frekuensi kegiatan masyarakat didapatkan dari intensitas kegiatan gotong royong atau kegiatan lainnya terkait penanganan permukiman kumuh dalam kurun waktu satu tahun. Berikut karakteristik frekuensi kegiatan masyarakat ditunjukkan oleh Gambar 4.63.

Gambar 4.63. Diagram Karakteristik Frekuensi Kegiatan Masyarakat di Masing-Masing RT

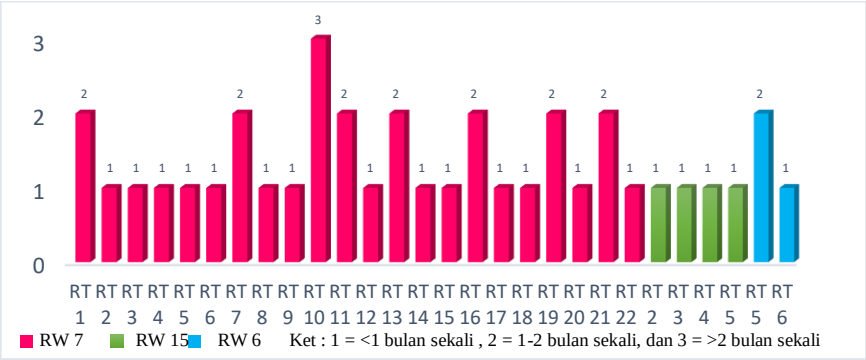

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.20. Karakteristik Frekuensi Kriminalitas

Frekuensi kriminalitas didapatkan dari intensitas kejadian tindak kriminal dalam satu tahun Berikut karakteristik frekuensi kriminalitas ditunjukkan oleh Gambar 4.64.

Gambar 4.64. Diagram Karakteristik Frekuensi Kriminalitas

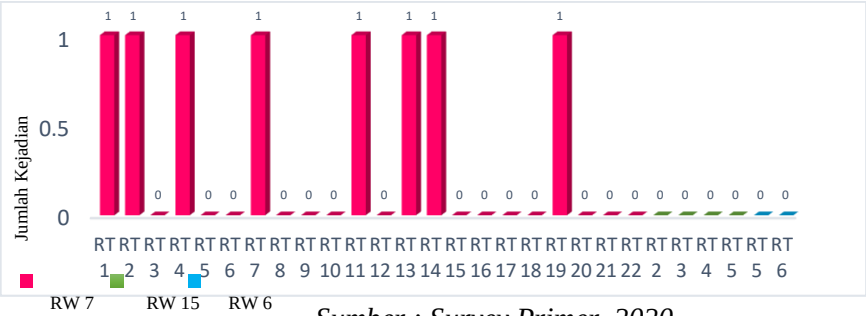

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.21. Karakteristik Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dilihat berdasarkan persentase KK non MBR terhadap jumlah KK dalam satu RT. Sehingga, karakteristik tingkat kemiskinan ditunjukkan oleh Gambar 4.65.

Gambar 4.65. Diagram Karakteristik Tingkat Kemiskinan Masing-Masing RT

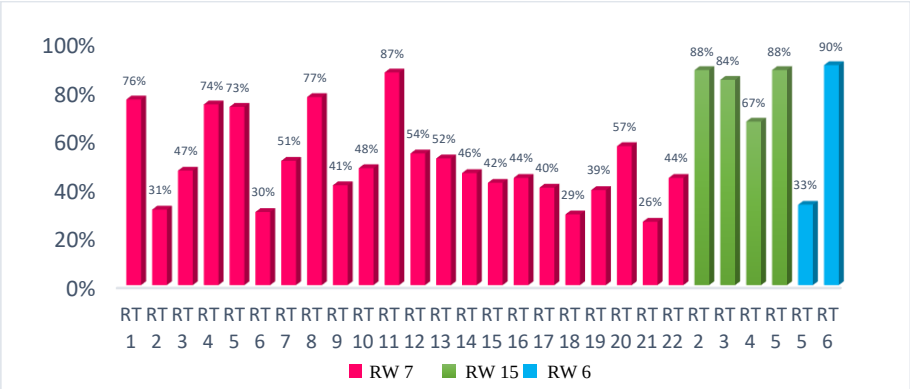

Sumber : Baseline Permukiman Kumuh Tahun 2018, DPKPCKTR Kota Surabaya

4.2.22. Karakteristik Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni

Kemampuan pemenuhan rumah layak huni didapatkan dari persentase KK yang dapat memenuhi kebutuhan rumah layak huni

beserta kebutuhan dasarnya (listrik, gas, air, persampahan, dan lainnya), dimana biaya kebutuhan dasar yang diakses tidak lebih dari 30% total pendapatan. Data tersebut didapatkan secara primer dengan mendata tingkat pendapatan dan biaya yang dibayarkan setiap bulan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti listrik, gas, air dan persampahan.Berikut karakteristik kemampuan pemenuhan rumah layak huni ditunjukkan oleh Gambar 4.66.

Gambar 4.66. Diagram Karakteristik Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni Masing-Masing RT

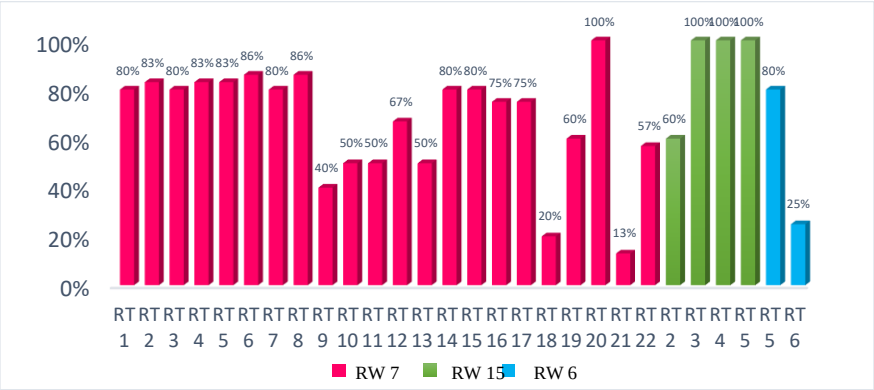

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.23. Karakteristik Tingkat Pendapatan

Karakteristik tingkat pendapatan didapatkan dari mayoritas rentang pendapatan yang diterima setiap KK per bulannya. Berikut ditunjukkan oleh Gambar 4.67. sebagai berikut.

Gambar 4.67. Diagram Tingkat Pendapatan di Masing-Masing RT

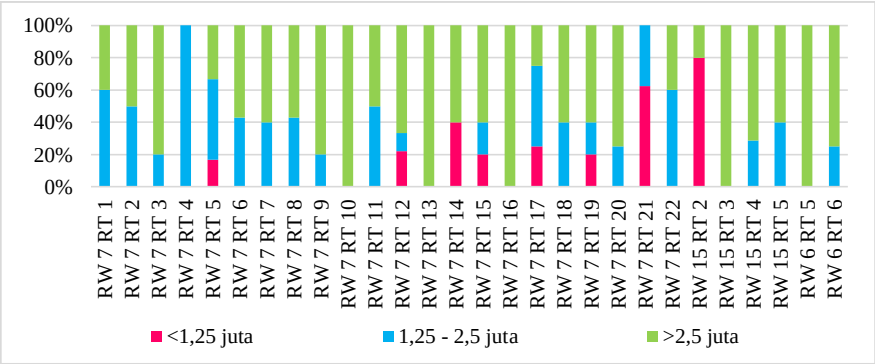

Sumber : Survey Primer, 2020

4.2.24. Pemetaan Karakteristik Permukiman Kumuh dengan *Cluster Analysis*

Setelah mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing variabel penelitian, selanjutnya dilakukan pengelompokkan masing-masing RT di permukiman kumuh berdasarkan kesamaan karakteristik menggunakan metode *Cluster Analysis*. Adapun metode analisis *cluster* terbagi atas metode hirarki dan metode non hirarki (*k-mean cluster*). Dalam penelitian ini menggunakan metode *cluster hierarki*, dimana digunakan untuk sampel yang relatif sedikit yaitu 28 RT dengan pengelompokkan subjek berdasarkan kemiripan karakter atau kemiripan persepsi baik dari hasil kuisioner ataupun data sekunder. Analisa *cluster* dilakukan dengan *software SPSS* yang dapat pada Lampiran 6. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pengelompokkan terdiri dari tiga klaster. Anggota masing-masing klaster ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4.13. Anggota Klaster Permukiman Kumuh Wonokusumo

Klaster I	Klaster II	Klaster III
RW 7 RT 1 RW 7 RT 2 RW 7 RT 4 RW 7 RT 5 RW 7 RT 8 RW 7 RT 11 RW 15 RT 2 RW 15 RT 3 RW 15 RT 4 RW 15 RT 5 RW 6 RT 6	RW 7 RT 3 RW 7 RT 6 RW 7 RT 7 RW 7 RT 9 RW 7 RT 10 RW 7 RT 12 RW 7 RT 13 RW 7 RT 14 RW 7 RT 15 RW 7 RT 16 RW 7 RT 17 RW 7 RT 19 RW 7 RT 20 RW 7 RT 22 RW 6 RT 5	RW 7 RT 18 RW 7 RT 21

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Sedangkan, karakteristik klaster ditunjukkan oleh Tabel 4.14. sebagai berikut. Karaktersitik ini berpengaruh terhadap strategi yang dirumuskan. Sehingga beberapa karakteristik tidak dideskripsikan karena bersifat kewilayahan/ kesisteman yang meliputi kondisi jalan, drainase, akses sarana kesehatan dan akses sarana pendidikan.

Tabel 4.14. Tabel Karakteristik Masing-Masing Cluster Permukiman Kumuh Wonokusumo

Karakteristik	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Keteraturan Bangunan	Keteraturan bangunan **sedang**, secara keseluruhan 30% unit bangunan teratur	Keteraturan bangunan **tinggi**, secara keseluruhan 91% unit bangunan teratur	Keteraturan bangunan **tinggi**, secara keseluruhan 96% unit bangunan teratur.
Kepadatan Bangunan	Kepadatan bangunan **tinggi**, secara keseluruhan 102 unit/ hektar	Kepadatan bangunan **tinggi**, secara keseluruhan 103 unit/ hektar	Kepadatan bangunan **rendah**, secara keseluruhan 58 unit/ hektar.
Kualitas Bangunan	Kualitas bangunan **baik**, secara keseluruhan 72% bangunan permanen tanpa kerusakan.	Kualitas bangunan **baik,** secara keseluruhan 53% bangunan permanen tanpa kerusakan.	Kualitas bangunan **buruk,** secara keseluruhan 17% bangunan permanen tanpa kerusakan.

Karakteristik	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Lokasi Hunian	Lokasi hunian **buruk,** secara keseluruhan 46% kawasan di lokasi aman. Ancaman berupa **permukiman sekitar tegangan listrik** dan **genangan.**	Lokasi hunian **baik,** secara keseluruhan 61% kawasan di lokasi aman. Ancaman berupa **genangan**.	Lokasi hunian **buruk,** secara keseluruhan 37% kawasan di lokasi aman. Ancaman berupa **genangan.**
Sanitasi	Kondisi sanitasi **baik,** 100% KK memiliki sanitasi yang layak.	Kondisi sanitasi **baik,** 100% KK memiliki sanitasi yang layak.	Kondisi sanitasi **baik,** 100% KK memiliki sanitasi yang layak.
Kondisi Persampahan	Kondisi persampahan **sedang**, dimana secara keseluruhan 51% KK memiliki persampahan yang layak	Kondisi persampahan **buruk**, dimana secara keseluruhan 49% KK memiliki persampahan yang layak	Kondisi persampahan **baik**, dimana secara keseluruhan 89% KK memiliki persampahan yang layak

Karakteristik	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Proteksi Kebakaran	**Tidak terdapat** proteksi kebakaran	**Tidak terdapat** proteksi kebakaran	**Tidak terdapat** proteksi kebakaran
Ketersediaan RTH	**Tidak tersedia** RTH	**Tidak tersedia** RTH	**Tidak tersedia** RTH
Status Kepemilkan Lahan	Status kepemilikan lahan **sedang**, 38% bangunan memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah.	Status kepemilikan lahan **sedang**, 50% bangunan memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah.	Status kepemilikan lahan **sedang**, 50% bangunan memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah.
Status Legalitas Bangunan	Legalitas bangunan **rendah**, 29% bangunan memiliki bukti kepemilikan bangunan yang sah	Legalitas bangunan **sedang**, 51% bangunan memiliki bukti kepemilikan bangunan yang sah	Legalitas bangunan **sedang**, 46% bangunan memiliki bukti kepemilikan bangunan yang sah

Karakteristik	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk **tinggi**, 684 jiwa per hektar	Kepadatan penduduk **tinggi**, 684 jiwa per hektar	Kepadatan penduduk **rendah**, 377 jiwa per hektar
Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan **tinggi**, mayoritas lulus pendidikan menengah.	Tingkat pendidikan **tinggi**, mayoritas lulus pendidikan menengah.	Tingkat pendidikan **rendah**, tidak lulus pendidikan dasar.
Tingkat Partisipasi	Tingkat partisipasi **tinggi**, 75% KK terlibat kegiatan gotong royong	Tingkat partisipasi **tinggi**, 81% KK terlibat kegiatan gotong royong	Tingkat partisipasi **tinggi**, 78% KK terlibat kegiatan gotong royong

Karakteristik	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Frekuensi Kegiatan Masyarakat	Umumnya dilaksanakan **1-2 bulan** sekali	Umumnya dilaksanakan **lebih dari satu kali** dalam satu bulan	Umumnya dilaksanakan **lebih dari satu kali** dalam satu bulan
Frekuensi Kriminalitas	Kriminalitas **tinggi** dimana terjadi empat kali dalam satu tahun, berupa maling dan copet	Kriminalitas **tinggi** dimana terjadi empat kali dalam satu tahun, berupa maling dan pengedar obat-obatan (sabu)	Kriminalitas **rendah**, tidak terjadi tindak kriminalitas
Tingkat Kemiskinan	Tingkat kemiskinan **rendah**	Tingkat kemiskinan **sedang**	Tingkat kemiskinan **tinggi**

Karakteristik	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni	Kemampuan pemenuhan rumah layak huni **tinggi**, secara keseluruhan 80% KK dapat mengakes hunian dan kebutuhan dasar.	Kemampuan pemenuhan rumah layak huni **tinggi**, secara keseluruhan 73% KK dapat mengakes hunian dan kebutuhan dasar.	Kemampuan pemenuhan rumah layak huni **rendah**, secara keseluruhan 17% KK dapat mengakes hunian dan kebutuhan dasar.
Tingkat Pendapatan	Tingkat pendapatan **tinggi**, mayoritsas KK memiliki pendapatan >Rp. 2.500.000	Tingkat pendapatan **sedang**, mayoritsas KK memiliki pendapatan >Rp. 1.250.000-2.500.000	Tingkat pendapatan **rendah**, mayoritsas KK memiliki pendapatan <Rp. 1.250.000

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berikut adalah Gambar 4.68. menunjukkan pemetaan Klaster 1, Klaster 2, dan Klaster 3.

Gambar 4.68. Pemetaan Klaster Permukiman Kumuh Wonokusumo

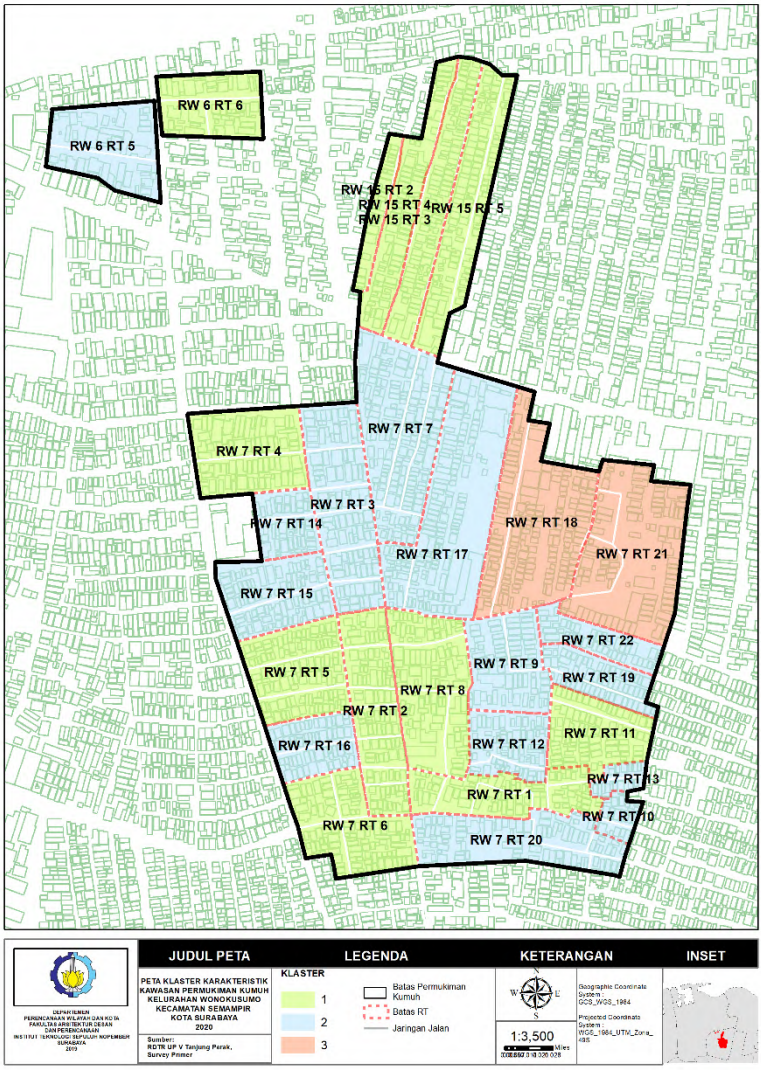

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berikut adalah deskripsi mengenai masing-masing cluster.

1. **Klaster 1**

Klaster 1 memiliki luas sebesar 7,48 Ha yang terdiri dari RW 7 pada RT 1, 2, 4, 5, 8, 11, kemudian RW 15 pada RT 2, 3, 4, 5 dan RW 6 RT 6. Klaster I memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan klaster II dan klaster III. Jika ditinjau dari keteraturan bangunannya, Klaster I memiliki tingkat keteraturan terendah dibandingkan Klaster II dan Klaster III yaitu terdapat 228 bangunan teratur atau sebesar 30% dari total bangunan. Sedangkan jika dilihat dari kepadatan bangunannya, Klaster I menjadi kluster terpadat kedua setelah Kluster II yaitu memiliki kepadatan 102 unit/ Hektar.

Namun, jika dilihat dari kualtias bangunannya, Klaster I memiliki persentase tertinggi dalam kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan, baik dalam kriteria permukiman kumuh atau kriteria SDGs Goals 11 yaitu sebesar 72%. Kriteria yang memenuhi tersebut berupa kondisi bangunan permanen dalam struktur atap, dinding, dan lantai yang baik atau tidak mengalami kerusakan. Berikut Diagram 4.69. menunjukkan karakteristik kualitas bangunan di Klaster I.

Gambar 4.69. Diagram Karakteristik Kualitas Bangunan Klaster I

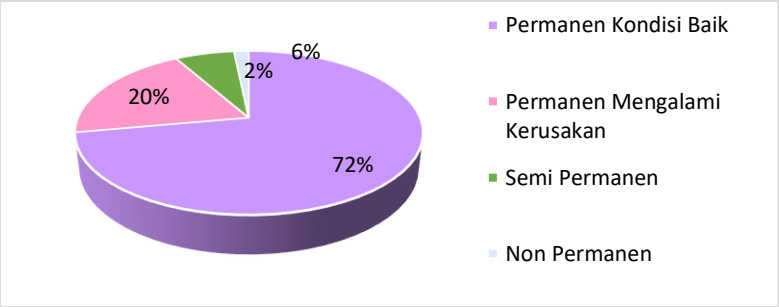

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Gambar 4.56. tersebut, kondisi yang dianggap layak yaitu sebesar 72%, dimana mendominasi bangunan di Klaster I. Jika ditinjau dari bahan penyusunnya, bangunan di klaster I didominasi oleh bangunan dengan struktur atap genting, dinding menggunakan tembok, dan lantai berkeramik.

Jika ditinjau berdasarkan kesesuaian lokasi permukiman, seluruh lokasi permukiman kumuh berada pada lahan peruntukkan permukiman. Adapun standar bahwa permukiman tersebut sesuai menurut *SDGs Goal 11* bahwa permukiman tidak boleh terletak di lokasi yang membahayakan. Lokasi tersebut antara lain dekat dengan pembuangan limbah (*toxic waste*), bantaran rel kereta (*railway*), dekat tegangan listrik (*powerlines*), lereng (*stepslope*), dan lokasi berbahaya lainnya. Berdasarkan standar tersebut, kawasan di Klaster I memiliki ancaman sekitar tegangan listrik SUTT dengan jarak aman kurang dari 20 meter sebesar 4 bangunan. Selain itu terdapat ancaman berupa genangan sebesar 54% kawasan. Berikut persentase kesesuaian lokasi berdasarkan standar SDGs.

Gambar 4.70. Diagram Kesesuaian Lokasi Hunian di Klaster I

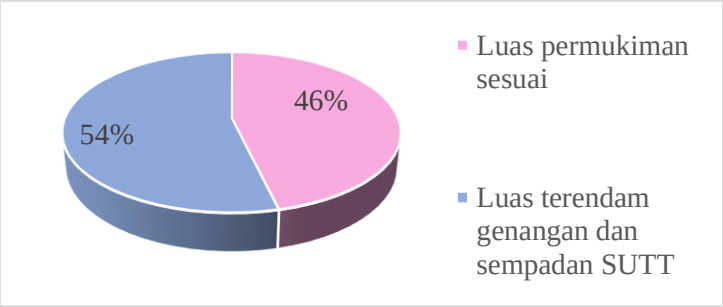

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar tersebut, lokasi hunian yang dianggap layak adalah sebesar 46%. Adapun kawasan yang dianggap berbahaya adalah kawasan terdampak genangan dan permukiman di sempadan SUTT. Permukiman tersebut berjarak kurang dari 3 meter dari SUTT dimana bagian bawah SUTT masih digunakan masyarakat untuk beraktivitas, seperti bermain, tempat parkir, atau berjualan. Sehingga, keadaan tersebut belum dianggap layak menurut standar SDGs.

Jika ditinjau dari kondisi sanitasi, Klaster I sudah memiliki akses sanitasi yang layak, dimana 100% KK memiliki sanitasi pribadi dengan terhubung ke *septic tank*. Limbah tersebut dikumpulkan oleh truk pengangkut untuk dibawa dan dikelola komunal. Sedangkan, dari banyaknya jumlah KK yang mengakses, sanitasi di Klaster I maksimal diakses oleh 2 KK sehingga sanitasi di Klaster I termasuk katagori *Limited* yang berarti sanitasi tertutup yang

digunakan oleh maksimal dua KK dengan pengolahan *offsite*.

Sedangkan, dari ketersediaan persampahan, sebesar 57% KK telah memiliki sarana dan terlayani fasilitas persampahan yang diangkut rutin. Hal tersebut membuat Klaster I cukup mengalami penumpukkan sampah. Kondisi kepadatan bangunan yang tinggi membuat beberapa lokasi tidak dapat dijangkau oleh pengangkutan sampah. Sehingga warga membuang sampah secara mandiri ke ruang terbuka terdekat.

Sama halnya dengan Klaster II dan Klaster III, Klaster I tidak memiliki proteksi kebakaran serta RTH. Hal tersebut disebabkan kepadatan bangunan yang tinggi membuat keberadaan lahan kosong sangat inim.

Sedangkan, tingkat pendidikan di Kluster I tinggi, dimana mayoritas lulus pendidikan menengah. Kondisi tersebut berdampak pula terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan Kluster I tergolong tinggi dimana mayoritas memiliki pendapatan lebih dari Rp. 2.500.000 dan memiliki tingkat kemiskinan paling rendah antara Klaster II dan Klaster III, yaitu hanya sebesar 27%. Selain itu, 82% KK mampu memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (air, listrik, gas dan persampahan).

Ketersediaan sarana umum ditinjau dari sarana kesehatan dan pendidikan. Kedua sarana tersebut ditinjau dari kualitas dan pelayanannya dimana tidak ada kelompok

yang tersisihkan dalam akses pelayanan termasuk kelompok MBR dan disabilitas.

Berdasarkan standar *SDGs* nomor 11, aksesibilitas dinilai baik jika tidak ada kelompok yang tersisihkan dalam akses pelayanan dasar permukiman. Berdasarkan hasil wawancara, aksesibilitas kesehatan yang dijamin oleh pemerintah dalam program KIS atau BPJS belum sepenuhnya menjamin akses kesehatan masyarakat terutama kelompok MBR. Hal tersebut disebabkan persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi MBR seperti pembayaran iuran rutin dan dokumen kelengkapan lainnya (KTP setempat, dokumentasi kondisi fisik hunian, dan lainnya). Sehingga masih terdapat eksklusifitas MBR dalam akses kesehatan di permukiman kumuh.

Jika ditinjau dari status legalitas baik legalitas lahan atau bangunannya, Klaster I memiliki persentase terendah dibandingkan Kalster II dan Klaster III, yaitu 38% untuk lahan yang memiliki surat yang legal, dan 29% bangunan yang memiliki IMB. Berikut diagram menunjukkan legalitas lahan dan bangunan di Klaster I.

Gambar 4.71. Diagram Legalitas Lahan dan Bangunan di Klaster I

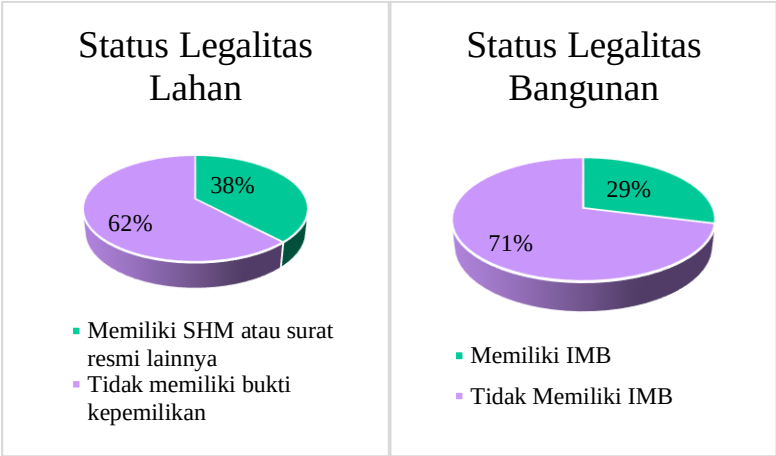

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat bahwa kepemilikan lahan dan bangunan di Klaster I didominasi oleh bangunan yang tidak memiliki bukti fisik kepemilikan sehingga hunian rawan terhadap penggusuran.

Sedangkan, berdasarkan kepadatan penduduknya, Klaster I memiliki kepadatan yang tergolong tinggi, dengan kepadatan penduduk 684 jiwa per Hektar. Penduduk yang tinggi tersebut sebagian besar ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan terkait penanganan kumuh seperti gotong royong yang umumnya dilaksanakan setiap bulan dengan persentase cukup tinggi yaitu sebesar 75% KK terlibat.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Berikut tabel karakteristik Klaster I jika ditinjau berdasarkan *SDGs Goals 11*.

Tabel 4.15. Tabel Karakteristik Klaster I ditinjau berdasarkan SDGs Goals 11

Goal 11. Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable	**Karakteristik Klaster I**
11.1. Meningkatkan akses terhadap permukiman layak (*adequate*), aman (*safe*), terjangkau (*affordable housing*), dan akses terhadap sarana pelayanan umum (*basic services*) serta mengatasi permukiman kumuh	Klaster I memiliki 72% bangunan memenuhi standar *durability of dwellings* dan *habitability* (permanen tanpa kerusakan)
	Hanya 46% wilayah di Kluster I yang terletak di lokasi aman. Ancaman berupa genangan dan permukiman di tegangan listrik.
	Sanitasi tergolong katagori *Limited* dengan pengelolaan *offsite.*
	Terdapat 71% bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan bermukim (*security of tenure*) dimana bangunan tidak memiliki surat atau bukti kepemilikan resmi sehingga penghuni rawan ancaman penggusuran.
	Memiliki 80% KK yang memenuhi standar *Affordability* atau terjangkau dalam mengakses rumah layak huni.

Goal 11. Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable	**Karakteristik Klaster I**
	Masih terdapat inklusifitas akses sarana kesehatan bagi MBR.
11.3. Menciptakan urbanisasi yang positif dan partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam tergolong tinggi dimana 75% KK terlibat. Namun keterlibatan tersebut hanya dalam proses pelaksanaan, yang artinya masyarakat tidak terlibat dalam persetujuan program atau evaluasi.
11.6. Kualitas udara dan pengelolaan limbah	Pengelolaan limbah dilakukan secara *offsite* dimana setiap bangunan sudah memiliki *septictank*, yang kemudian diangkut dan dikelola secara komunal.
11.7. Ruang publik yang aman dan inklusif	Klaster I tidak memiliki RTH
	Tingkat kriminalitas di Klaster I tergolong tinggi dengan ancaman pencopetan dan maling (*street crime*).

Sumber: Analisis, 2020

2. **Klaster II**

Klaster II memiliki luas sebesar 10,5 Ha yang terdiri dari RW 7 pada RT 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, kemudian RW 6 pada RT 5. Seperti Klaster I, Klaster II memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan Klaster I dan Klaster III. Bangunan di Klaster II memiliki keteraturan tertinggi kedua setelah Klaster III, dimana 981 unit bangunan teratur atau sebesar 91% dari total bangunan memiliki keteraturan. Walaupun memiliki keteraturan yang tinggi, Kluster II memiliki kepadatan bangunan tertinggi dibandingkan dua kluster lainnya, yaitu mencapai 103 unit/ hektar.

Sedangkan, jika dilihat dari kualitas bangunannya, Klaster II memiliki kualitas bangunan yang baik, dimana 53% telah memenuhi persyaratan, baik dalam kriteria permukiman kumuh atau kriteria SDGs Goals 11. Kriteria yang memenuhi tersebut berupa kondisi bangunan permanen dalam struktur atap, dinding, dan lantai yang baik atau tidak mengalami kerusakan. Berikut Diagram 4.72. menunjukkan karakteristik kualitas bangunan di Klaster II.

Gambar 4.72. Diagram Karakteristik Kualitas Bangunan Klaster II

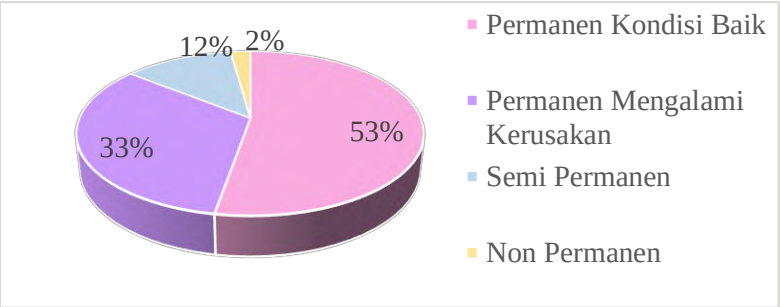

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Gambar 4.63. tersebut, kondisi yang dianggap layak yaitu sebesar 53%, dimana mendominasi bangunan di Klaster II. Jika ditinjau dari bahan penyusunnya, bangunan di Klaster II memiliki dominasi yang sama dengan Klaster I yaitu bangunan dengan struktur atap genting, dinding menggunakan tembok, dan lantai berkeramik.

Jika ditinjau berdasarkan kesesuaian lokasi permukiman, seluruh lokasi permukiman kumuh berada pada lahan peruntukkan permukiman. Jika dilihat dari standar menurut *SDGs Goals 11*, lokasi hunian termasuk baik dimana 61% terbebas dari kawasan berbahaya yaitu genangan. Hal tersebut didukung drainase yang sudah tergolong baik dimana 54% tidak mengalami kerusakan sehingga dapat mengalirkan limpasan air.

Gambar 4.73. Diagram Kesesuaian Lokasi Hunian di Klaster II

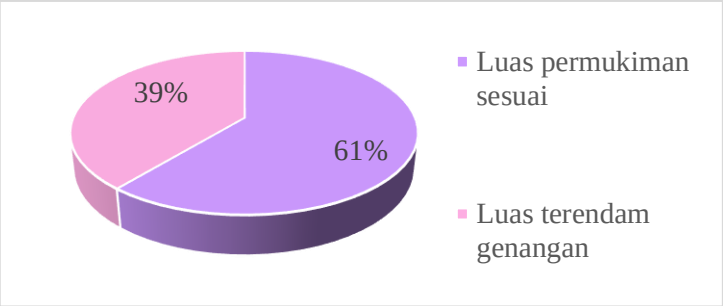

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar tersebut, lokasi hunian yang dianggap layak adalah sebesar 61%. Artinya, lokasi hunian yang layak mendominasi Klaster II. Berbeda dengan Klaster I, ancaman yang terdapat di Klaster II berupa genangan saja.

Selain itu, Klaster II sudah memiliki akses sanitasi yang layak, dimana 100% KK memiliki sanitasi pribadi dengan terhubung ke *septic tank*. Limbah tersebut dikumpulkan oleh

truk pengangkut untuk dibawa dan dikelola komunal. Sedangkan, dari banyaknya jumlah KK yang mengakses, sanitasi di Klaster II maksimal diakses oleh 2 KK sehingga sanitasi di Klaster II termasuk katagori *Limited* yang berarti sanitasi tertutup yang digunakan oleh maksimal dua KK dengan pengolahan *offsite*.

Namun, Kluster II memiliki ketersediaan persampahan terburuk diantara Kluster I dan Kluster III, dimana hanya 49% KK yang memiliki sarana dan terlayani fasilitas persampahan yang diangkut rutin. Penyebab permasalahan tersebut hampir sama dengan Kluster I, dimana Kondisi kepadatan bangunan yang tinggi membuat beberapa lokasi tidak dapat dijangkau oleh pengangkutan sampah. Sehingga warga membuang sampah secara mandiri ke ruang terbuka terdekat. Selain itu, lokasi Kluster II yang dekat dengan Kluster III membuat warganya membuang sampah ke lahan kosong di Klaster III.

Sama halnya dengan Klaster I dan Klaster III, Klaster II tidak memiliki proteksi kebakaran serta RTH. Hal tersebut disebabkan kepadatan bangunan yang tinggi serta lahan kosong lebih dipilih penduduk untuk menimbun sampah.

Sedangkan, tingkat pendidikan di Kluster II tinggi, dimana mayoritas lulus pendidikan menengah. Berbeda dengan Klaster I, kemiskinan di Klaster II tergolong sedang dimana 57% termasuk MBR dengan mayoritas pendapatan >Rp.1.25.000 – Rp. 2.500.000. Namun, kesadaran dalam rumah layak huni cukup tinggi dimana 73% KK dapat mengakses hunian dan memenuhi kebutuhan dasarnya (air, listrik, dan persampahan).

Ketersediaan sarana umum ditinjau dari sarana kesehatan dan pendidikan. Kedua sarana tersebut ditinjau dari kualitas dan aksesibilitas dimana tidak ada kelompok yang tersisihkan dalam akses pelayanan

termasuk kelompok MBR dan disabilitas. Berdasarkan standar *SDGs* nomor 11, aksesibilitas dinilai baik jika tidak ada kelompok yang tersisihkan dalam akses pelayanan dasar permukiman. Berdasarkan hasil wawancara, aksesibilitas kesehatan yang dijamin oleh pemerintah dalam program KIS atau BPJS belum sepenuhnya menjamin akses kesehatan masyarakat terutama kelompok MBR. Hal tersebut disebabkan persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi MBR seperti pembayaran iuran rutin dan dokumen kelengkapan lainnya (KTP setempat, dokumentasi kondisi fisik hunian, dan lainnya). Sehingga masih terdapat eksklusifitas MBR dalam akses kesehatan di permukiman kumuh. Hal lain ditunjukkan pada akses sarana pendidikan, dimana ketersediaan dari jenjang sekolah dasar hingga menengah sudah tersedia sesuai standar pelayanan dan seluruh KK di Klaster II menyatakan bahwa sarana pendidikan memiliki kualitas baik serta dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sedangkan, status legalitas baik legalitas lahan atau legalitas bangunan Klaster II memiliki persentase tertinggi diantara dua klaster lainnya. Klaster II memiliki 50% banngunan yang memiliki SHM atau surat lainnya yang diakui pemerintah dan 51% bangunan memiliki IMB. Berikut diagram menunjukkan legalitas lahan dan bangunan di Klaster II.

Gambar 4.74. Diagram Legalitas Lahan dan Bangunan di Klaster II

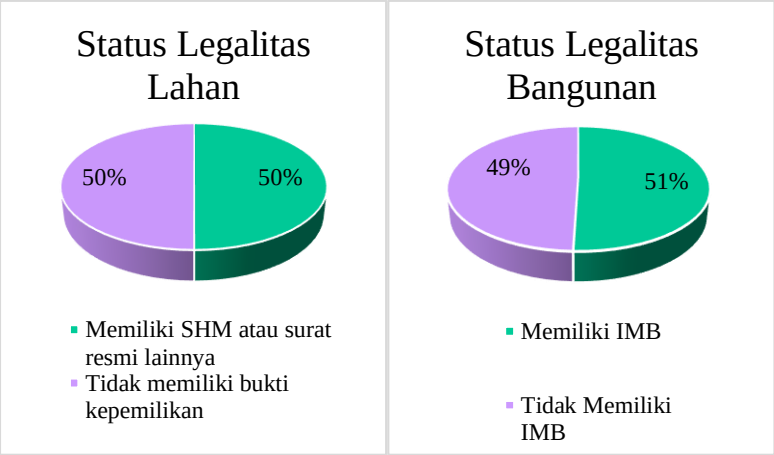

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat bahwa kepemilikan lahan dan bangunan di Klaster I didominasi oleh bangunan memiliki bukti fisik kepemilikan yang legal.

Sedangkan, berdasarkan kepadatan penduduknya, Klaster II memiliki kepadatan 684 jiwa per hektar. Penduduk yang tinggi tersebut sebagian besar ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan terkait penanganan kumuh seperti gotong royong yang umumnya dilaksanakan setiap bulan dengan persentase cukup tinggi yaitu sebesar 81% KK terlibat. Berikut tabel karakteristik Klaster II jika ditinjau berdasarkan *SDGs Goals 11*.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Tabel 4.16. Tabel Karakteristik Klaster II ditinjau berdasarkan SDGs Goals 11

Goal 11. Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable	**Karakteristik Klaster II**
11.1. Meningkatkan akses terhadap permukiman layak (*adequate*), aman (*safe*), terjangkau (*affordable housing*), dan akses terhadap sarana pelayanan umum (*basic services*) serta mengatasi permukiman kumuh	Klaster II memiliki 53% bangunan memenuhi standar *durability of dwellings* dan *habitability* (kondisi permanen tanpa kerusakan)
	61% wilayah di Kluster I yang tidak terletak di lokasi berbahaya. Ancaman yang terdapat di Klaster I adalah genangan.
	Sanitasi tergolong katagori *Limited* dengan pengelolaan *offsite.*
	Terdapat 49% unit bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan bermukim (*security of tenure*) dimana bangunan tidak memiliki surat atau bukti kepemilikan resmi sehingga penghuni rawan ancaman penggusuran.
	Memiliki 73% KK yang memenuhi standar *Affordability* atau terjangkau dalam mengakses rumah layak huni.

Goal 11. Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable	**Karakteristik Klaster II**
	Masih terdapat inklusifitas akses sarana kesehatan bagi MBR.
11.3. Menciptakan urbanisasi yang positif dan partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam tergolong tinggi dimana 81% KK terlibat. Namun keterlibatan tersebut hanya dalam proses pelaksanaan, yang artinya masyarakat tidak terlibat dalam persetujuan program atau evaluasi.
11.6. Kualitas udara dan pengelolaan limbah	Pengelolaan limbah dilakukan secara *offsite* dimana setiap bangunan sudah memiliki *septictank*, yang kemudian diangkut dan dikelola secara komunal.
11.7. Ruang publik yang aman dan inklusif	Klaster II tidak memiliki RTH
	Tingkat kriminalitas di Klaster II tergolong tinggi dengan ancaman maling dan pengedar obat-obatan (sabu).

Sumber:Analisis, 2020

3. **Klaster 3**

Klaster III memiliki luas sebesar 2,5 Ha yang terdiri dari RW 7 RT 18 dan RT 21. Hal tersebut membuat Klaster III cenderung lebih kecil dibandingkan kedua klaster lainnya. Klaster III memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan Klaster I dan Klaster II. Jika dibandingkan dengan kedua klaster lainnya, Klaster III memiliki keteraturan bangunan yang paling tinggi, dimana terdapat 138 bangunan teratur atau 96% dari total bangunan. Selain memiliki keteraturan bangunan tertinggi, Klaster III juga memiliki kepadatan bangunan terendah dibandingkan Klaster I dan Klaster II. Kondisi tersebut membuat Klaster III lebih tertata dan tidak terlalu padat dibanding klaster lainnya.

Sayangnya, kualitas bangunan di Klaster III cukup rendah, dimana hanya memiliki 17% bangunan yang memenuhi persyaratan baik dalam kriteria permukiman kumuh atau SDGs Goals 11. Kriteria yang memenuhi tersebut berupa kondisi bangunan permanen dalam struktur atap, dinding, dan lantai yang baik atau tidak mengalami kerusakan. Berikut Diagram 4.75. menunjukkan karakteristik kualitas bangunan di Klaster III.

Gambar 4.75. Diagram Karakteristik Kualitas Bangunan Klaster III

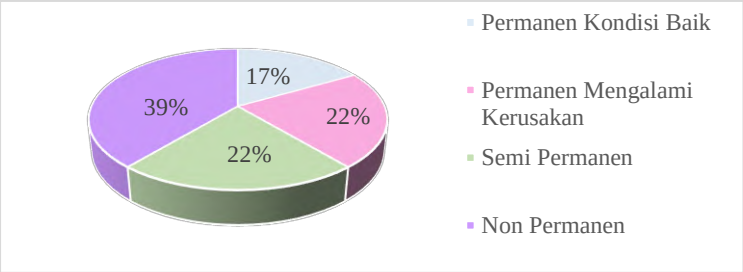

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Gambar 4.70. tersebut, kondisi yang dianggap layak yaitu sebesar 17%. Artinya, kualitas bangunan yang layak di Klaster III cenderung rendah, dimana Klaster III lebih didominasi oleh bangunan non permanen sebesar 39%. Jika ditinjau dari bahan penyusunnya, bangunan di Klaster III didominasi bangunan dengan struktur seng, tembok, dan semen atau tanah.

Jika ditinjau berdasarkan kesesuaian lokasi permukiman, seluruh lokasi permukiman kumuh berada pada lahan peruntukkan permukiman. Namun, jika dilihat dari standar menurut *SDGs Goals 11*, Klaster III memiliki ancaman berupa kawasan terendam genangan sebesar 1.57 hektar atau sebesar 63% dari total luas kawasan. Artinya, hanya sekitar 37% terhindar dari genangan. Angka bebas genangan tersebut tertinggi dibandingkan Klaster I dan Klaster II.

Genangan tersebut disebabkan oleh 68% panjang drainase kondisi buruk sehingga tidak dapat mengalirkan air limpasan. Selain itu, banyaknya lahan kosong di Klaster III membuat masyarakat membuang sampah di lokasi tersebut. Akibatnya sampah tersebut menyumbat drainase sekitar. Berikut diagram menunjukkan persentase kesesuaian lokasi di Klaster III berdasarkan standar SDGs.

Gambar 4.76. Diagram Kesesuaian Lokasi Hunian di Klaster II

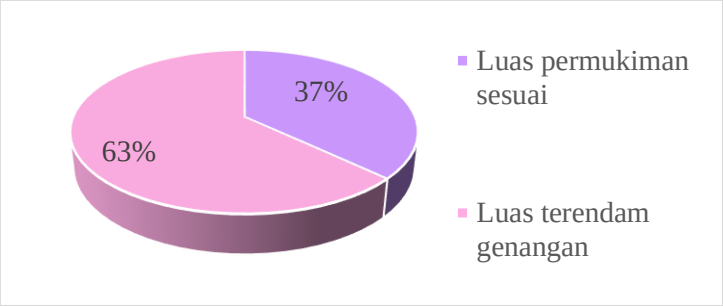

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar tersebut, lokasi hunian yang dianggap layak adalah sebesar 37%. Artinya, lokasi hunian yang layak mendominasi Klaster II. Sama halnya dengan Klaster II, ancaman di kawasan permukiman hanya berupa genangan.

Selain itu, Klaster III sudah memiliki akses sanitasi yang layak, dimana 100% KK memiliki sanitasi pribadi dengan terhubung ke *septic tank*. Limbah tersebut dikumpulkan oleh truk pengangkut untuk dibawa dan dikelola komunal. Sedangkan, dari banyaknya jumlah KK yang mengakses, sanitasi di Klaster III maksimal diakses oleh 2 KK sehingga sanitasi di Klaster III termasuk katagori *Limited* yang berarti sanitasi tertutup yang digunakan oleh maksimal dua KK dengan pengolahan *offsite*.

Jika ditinjau dari ketersediaan sarana prasarana persampahan, Klaster III memiliki persampahan berupa pengangkutan paling baik dibandingkan kedua klaster lainnya. Sama halnya dengan Klaster I dan Klaster II,

Klaster III tidak memiliki proteksi kebakaran serta RTH. Namun, masih banyak ditemukan lahan kosong di Kluster III yang cukup luas dimana pada kondisi eksisting digunakan untuk membuang sampah baik dari dalam atau luar kawasan.

Berbeda dengan Klaster I dan Klaster II, Klaster III memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dimana didominasi oleh tingkat pendidikan tidak lulus pendidikan dasar. Hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di Klaster III yang tinggi dimana 73% KK termasuk MBR. Selain tingkat kemiskinan yang tinggi, pendapatan masyarakat di Klaster III sangat rendah, dimana mayoritas KK memiliki pendapatan kurang dari Rp. 1.250.000 setiap bulannya. Hal tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni, dimana hanya 17% KK yang dapat mengakses hunian dengan kebutuhan dasar (air, listrik, dan persampahan). Berdasarkan hasil wawancara, kondisi perekonomian yang sulit tersebut membuat warga melakukan apapun seperti bekerja serabutan hingga terlilit hutang dengan menggadaikan sertifikat tanah.

Ketersediaan sarana umum ditinjau dari sarana kesehatan dan pendidikan. Kedua sarana tersebut ditinjau dari kualitas dan aksesibilitas dimana tidak ada kelompok yang tersisihkan dalam akses pelayanan termasuk kelompok MBR dan disabilitas. Berdasarkan standar *SDGs* nomor 11, aksesibilitas dinilai baik jika tidak ada kelompok yang tersisihkan dalam akses pelayanan dasar permukiman. Berdasarkan hasil wawancara, aksesibilitas kesehatan yang

dijamin oleh pemerintah dalam program KIS atau BPJS belum sepenuhnya menjamin akses kesehatan masyarakat terutama kelompok MBR. Hal tersebut disebabkan persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi MBR seperti pembayaran iuran rutin dan dokumen kelengkapan lainnya (KTP setempat, dokumentasi kondisi fisik hunian, dan lainnya). Sehingga masih terdapat eksklusifitas MBR dalam akses kesehatan di permukiman kumuh.

Hal lain ditunjukkan pada akses sarana pendidikan, dimana ketersediaan dari jenjang sekolah dasar hingga menengah sudah tersedia sesuai standar pelayanan dan seluruh KK di Klaster III menyatakan bahwa sarana pendidikan memiliki kualitas baik serta dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sedangkan, status legalitas baik legalitas lahan atau legalitas bangunan Klaster III memiliki persentase yang tinggi. Klaster II memiliki 50% banngunan yang memiliki SHM atau surat lainnya yang diakui pemerintah dan 46% bangunan memiliki IMB. Berikut diagram menunjukkan legalitas lahan dan bangunan di Klaster II.

Gambar 4.77. Diagram Legalitas Lahan dan Bangunan di Klaster III

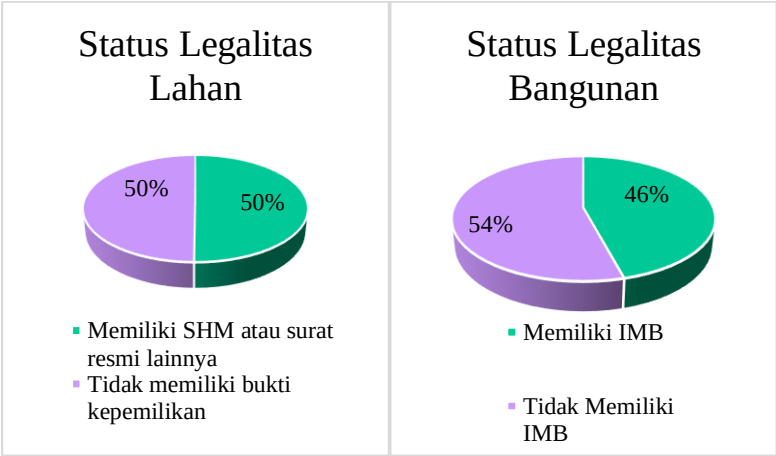

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Sedangkan, berdasarkan kepadatan penduduknya, Klaster III memiliki kepadatan terendah diantara kluster lainnya yaitu 377 jiwa per hektar.Walaupun memiliki kepadatan rendah, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait penanganan permukiman kumuh tergolong tinggi, dimana 78% KK terlibat dalam kegiatan seperti gotong royong yang dilaksanakan setiap bulan. Berikut tabel karakteristik Klaster II jika ditinjau berdasarkan *SDGs Goals 11*.

Tabel 4.17. Tabel Karakteristik Klaster III ditinjau berdasarkan SDGs Goals 11

Goal 11. Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable	**Karakteristik Klaster III**
11.1. Meningkatkan akses terhadap permukiman layak (*adequate*), aman (*safe*), terjangkau (*affordable housing*), dan akses terhadap sarana pelayanan umum (*basic services*) serta mengatasi permukiman kumuh	Klaster III hanya memiliki 17% bangunan memenuhi standar *durability of dwellings* dan *habitability* (kondisi permanen tanpa kerusakan)
	37% wilayah di Kluster III tidak terletak di lokasi berbahaya. Ancaman yang terdapat di Klaster III adalah genangan.
	Sanitasi tergolong katagori *Limited* dengan pengelolaan *offsite.*
	Terdapat 54% unit bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan bermukim (*security of tenure*) dimana bangunan tidak memiliki surat atau bukti kepemilikan resmi sehingga penghuni rawan ancaman penggusuran.
	Hanya memiliki 17% KK yang memenuhi standar *Affordability* atau terjangkau dalam mengakses rumah layak huni.

Goal 11. Make Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable	**Karakteristik Klaster III**
	Masih terdapat eksklusifitas akses sarana kesehatan terutama bagi MBR.
11.3. Menciptakan urbanisasi yang positif dan partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam tergolong tinggi dimana 78% KK terlibat. Namun keterlibatan tersebut hanya dalam proses pelaksanaan, yang artinya masyarakat tidak terlibat dalam persetujuan program atau evaluasi.
11.6. Kualitas udara dan pengelolaan limbah	Pengelolaan limbah dilakukan secara *offsite* dimana setiap bangunan sudah memiliki *septictank*, yang kemudian diangkut dan dikelola secara komunal.
11.7. Ruang publik yang aman dan inklusif	Klaster III tidak memiliki RTH
	Tingkat kriminalitas di Klaster III rendah, tidak terjadi tindak kriminalitas.

Sumber: Analisis, 2020

Berdasarkan penjelasan SDGs tersebut, berikut perbandingan ketercapaian kriteria SDGs dari masing-masing Klaster ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 4.18. Perbandingan Ketercapaian Kriteria SDGs Klaster I, Klaster II, dan Klaster III

Kriteria	Ketercapaian Kriteria SDGs		
	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Durability of Dwellings	72%	53%	17%
Compliance with Building Code	72%	53%	17%
Not in need of Major Repair	72%	53%	17%
Location of House	46%	61%	37%
Access to Adequate Sanitation	100%	100%	100%
Security of Tenure	71%	49%	54%
Planning Regulations	100%	100%	100%
Building Regulations	72%	53%	17%
Legal Security of Tenure	71%	49%	54%
Affordability	80%	73%	17%
Habitability	72%	53%	17%

Kriteria	Ketercapaian Kriteria SDGs		
	Klaster I	**Klaster II**	**Klaster III**
Accessibility	Eksklusifitas MBR	Eksklusifitas MBR	Eksklusifitas MBR
Location	46%	61%	37%
Cultural Adequacy	Kerja bakti 1-2 bulan sekali	Kerja bakti >1 kali sebulan	Kerja bakti >1 kali sebulan
Tingkat Partisipasi	75%	81%	78%
Pengelolaan Limbah	100%	100%	100%
Persentase Luas Ruang Publik	0%	0%	0%
Frekuensi Kekerasan	4 kali/ tahun (*Street Crime*)	4 kali/ tahun	0 kali

Sumber: Analisis, 2020

Keterangan :

Kriteria Terpenuhi

Kriteria Tidak Terpenuhi

4.3. Analisa Kebijakan terkait Peremajaan Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya

Analisis kebijakan terkait peremajaan permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya dilakukan dengan metode *Content Analysis (CA).* Analisis tersebut dilakukan dengan memberi kode pada setiap variabel di masing-masing dokumen kebijakan. Berikut hasil *Content Analysis* pada Dokumen RDTRK Surabaya Tahun 2018-2038, RP2KPKP, dan RPLP.

4.3.1. Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2018-2038

Tabel 4.19. Hasil Pengkodean Data pada Dokumen Kebijakan 1 (Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2018-2038)

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Keteraturan Bangunan (V1)	**Penataan permukiman** dalam meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan sarana dan prasarana seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V1.1	Penataan permukiman	Melakukan penataan pada bangunan di permukiman

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Penataan kawasan permukiman	D1. V1.2	Penataan permukiman	Bangunan yang terdapat di kawasan permukiman ditata agar lebih teratur
	Perlu adanya keseimbangan dalam **penataan antara bangunan dan lingkungan** agar menciptakan ruang berkegiatan dan ruang hidup yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi penduduk kota.	D1. V1.3		
Kepadatan Bangunan (V2)	**Membatasi tingkat kepadatan bangunan** di kawasan banjir dan mengatur proporsi KDH tiap bangunan di kawasan rawan banjir	D1. V2.1	Pembatasan kepadatan bangunan	Pada kawasan permukiman rawan banjir perlu pembatasan kepadatan bangunan dengan cara mengontrol secara rutin bangunan baru
	Penataan **kepadatan bangunan** sesuai dengan fungsi ruang melalui	D1. V2.2	Mengatur kepadatan bangunan	Mengatur KDB, KLB, GSB dan KDH

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	pengaturan KDB, KLB, GSB dan KDH			
	Mengendalikan kepadatan perumahan eksisting	D1. V2.3	Mengendalikan kepadatan	Mengendalikan kepadatan bangunan
Kualitas Bangunan (V3)	**Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan** perkampungan (perumahan kepadatan tinggi).	D1. V3.1	Kualitas lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan
	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui **peningkatan kualitas lingkungan**, penyediaan sarana prasarana pendukung dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase	D1. V3.2	Kualitas lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Peningkatan kualitas hunian kawasan perumahan padat	D1. V3.3	Peningkatan kualitas	Meningkatkan kualitas permukiman tidak layak huni
	Untuk **perumahan kepadatan tinggi** dengan kondisi **kurang layak huni** dapat dilakukan **perbaikan lingkungan**	D1. V3.4		
Lokasi Hunian (V4)	**Penyediaan jalur-jalur evakuasi** yang cepat dan aman bagi **kawasan permukiman yang masuk dalam kawasan rawan bencana**	D1. V4.1	Jalur evakuasi bencana	Pada kawasan permukiman rawan bencana, perlu disediakan jalur evakuasi

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Sedangkan dalam penananganan **kawasan rawan bencana banjir,** dibentuk jalur evakuasi bencana banjir (banjir rob) yang dilakukan dengan menyediakan **jalur evakuasi**	D1. V4.2		
	Menetapkan zona lindung setempat berupa **sempadan SUTT/ SUTET** untuk RTH atau jaringan prasarana	D1. V4.3	Sempadan SUTT	Menyediakan sempadan SUTT berupa RTH atau jalan
	Penentuan **garis sempadan jaringan tenaga listrik** mengikuti **Permen PU 5 Tahun 2008** dengan jarak bervariasi antara 3,5 m hingga 20 m	D1. V4.4	Garis sempadan SUTT	Mengatur sempadan SUTT sesuai Permen PU 5 Tahun 2008

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Mengatur sempadan SUTT yang berbatasan langsung dengan permukiman dengan **jarak 20 m**.	D1. V4.5	Jarak sempadan SUTT	SUTT yang berbatasan langsung dengan permukiman harus memiliki sempadan dengan jarak 20 m.
	Melindungi kawasan sepanjang sempadan SUTT dari kegiatan pembangunan, kecuali pendirian bangunan pendukungnya.	D1. V4.6	Perlindungan sempadan SUTT	Sempadan SUTT tidak diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan kecuali bangunan yang mendukung SUTT tersebut.
	Mengembangkan RTH berupa jalur hijau dan taman pasif di sepanjang **sempadan SUTT.**	D1. V4.7	Mengem-bangkan RTH	Sempadan SUTT yang dikembangkan berupa jalur hijau atau taman pasif.

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Mengatur kawasan sepanjang SUTT yang berada dibawah permukaan tanah.	D1. V4.8	Kawasan SUTT	Melindungi kawasan sekitar SUTT
	Perlu disediakan **ruang aman**, yaitu ruang sekeliling penghantar kawat listrik SUTT atau SUTET yang harus dibebaskan dari kegiatan manusia	D1. V4.9	Ruang aman SUTT	Memberikan ruang sekitar SUTT agar bebas dari kegiatan manusia
	Perlindungan kawasan sepanjang **sempadan SUTT/ SUTET**	D1. V4.10	Sempadan SUTT	Melindungi sempadan SUTT
	Pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan lahan dan kegiatan sepanjang **jalur SUTT/SUTET**	D1. V4.11		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Menyediakan **bangunan pengaman atau pagar pembatas SUTET/SUTT**	D1. V4.12	Pembatas SUTT	Menyediakan pembatas SUTT berupa bangunan pengaman atau pagar pembatas
	Sempadan SUTET/SUTT yang peruntukannya berupa taman, jalur hijau, bozem tetap dipertahankan dan tidak boleh dialihfungsikan	D1. V4.13	Mempertahan-kan sempadan SUTT	Sempadan SUTT berupa taman, jalur hijau, bozem tetap dipertahankan keberadaannya
	Sempadan SUTET/SUTT yang peruntukannya berupa fungsi budidaya tetap dipertahankan **selama berada di dalam zona aman induksi listrik** dan tidak boleh mengganggu fungsi ekologis sempadan SUTET/SUTT	D1. V4.14	Zona aman induksi listrik	Sempadan SUTT dengan peruntukkan budidaya dapat dipertahankan dengan syarat berada di zona aman induksi listrik

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Sempadan SUTET/SUTT dapat dikembangkan sebagai **taman dan jalur hijau**	D1. V4.15	Mengembang-kan taman dan jalur hijau	Mengembangkan sempadan SUTT menjadi taman atau jalur hijau
Kondisi Jalan (V5)	**Meningkatkan kualitas jalan** dengan **perkerasan** agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran pada kawasan rawan kebakaran	D1. V5.1	Kualitas jalan	Meningkatkan kualitas dan menambahkan perabot jalan
	Meningkatkan kualitas perkerasan jalan	D1. V5.2		
	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan, **penyediaan sarana prasarana pendukung** dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase	D1. V5.3		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan prasarana** seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V5.4		
	Peningkatan **mutu perkerasan** jalan	D1. V5.5		
Kelancaran Drainase (V6)	Pengelolaan **sistem drainase untuk mengurangi banjir dan genangan** melalui: pembangunan **pintu air dan rumah pompa,** normalisasi dan **perawatan saluran** serta retensi dan detensi pond/ waduk	D1. V6.1	Pengelolaan sistem drainase	Dalam mengurangi genangan, dilakukan pengelolaan drainase, diantaranya pembangunan pintu air, rumah pompa dan perawatan saluran air.
	Mempertahankan saluran drainase yang sudah ada dengan jalan **mengevaluasi kapasitas saluran**	D1. V6.2	Kapasitas saluran	Dilakukan pengawasan terhadap kapasitas drainase

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan, **penyediaan sarana prasarana pendukung** dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase	D1. V6.3	Sarana dan prasarana pendukung	Menyediakan sarana prasarana pendukung permukiman termasuk drainase
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan prasarana** seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V6.4	Peningkatan sarana prasarana	Melakukan peningkatan kualitas drainase
	Perluasan jaringan ke wilayah-wilayah permukiman dan **penyediaan saluran** sesuai perkiraan kebutuhan.	D1. V6.5	Perluasan saluran drainase	Penyediaan saluran drainase sesuai kebutuhan penduduk

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Penyediaan saluran drainase pada setiap kawasan perumahan	D1. V6.6	Penyediaan drainase	Menyediakan drainase pada setiap kawasan yang belum terlayani
	Terpenuhinya jaringan listrik, **drainase** dan air bersih untuk kebutuhan perumahan	D1. V6.7	Pemenuhan drainase	Memenuhi pelayanan drainase
Ketersediaan Air Bersih (V7)	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan, **penyediaan sarana prasarana pendukung** dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase	D1. V7.1	Sarana dan prasarana pendukung	Menyediakan sarana prasarana pendukung permukiman termasuk air bersih
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan**	D1. V7.2	Peningkatan sarana prasarana	Melakukan peningkatan kualitas air bersih

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	prasarana seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau			
	Pengembangan sistem penyediaan air minum yang mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.	D1. V7.3	Pengembangan air minum	Mengembangkan jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan
	Monitoring kualitas air bersih untuk menjaga kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk sesuai dengan standar baku mutu pada seluruh SUB-UP.	D1. V7.4	Kualitas air bersih	Air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk harus dijaga kualitasnya
	Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan **air bersih** untuk kebutuhan perumahan	D1. V7.5	Pemenuhan air bersih	Memenuhi pelayanan air bersih

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kondisi Sanitasi (V8)	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan, **penyediaan sarana prasarana pendukung** dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase	D1. V8.1	Sarana dan prasarana pendukung	Menyediakan sarana prasarana pendukung permukiman termasuk sanitasi
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan prasarana** seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V8.2	Peningkatan sarana prasarana	Melakukan peningkatan kualitas sanitasi
	Tersedia **prasarana pembuangan limbah domestik** sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem offsite)	D1. V8.3	Prasarana pembuangan limbah	Menyediakan prasarana limbah domestik
Kondisi Persampahan (V9)	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui	D1. V9.1	Sarana dan prasarana pendukung	Menyediakan sarana prasarana pendukung

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	peningkatan kualitas lingkungan, **penyediaan sarana prasarana pendukung** dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase			permukiman termasuk persampahan
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan prasarana** seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V9.2	Peningkatan sarana prasarana	Melakukan peningkatan kualitas persampahan
	Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;	D1. V9.3	Pengaturan jadwal dan penyediaan sarana	Pengumpulan sampah dilakukan dengan terjadwal yaitu minimal dua hari sekali dan disediakan sarana pengumpul sampah.
	Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.	D1. V9.4		
	Pengumpulan sampah dari sumbernya **minimal 2 (dua) hari sekali**	D1. V9.5		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Peningkatan pelayanan persampahan baik untuk sistem **pengangkutan maupun pengelolaan** dengan mengembangkan konsep **bank sampah** pada seluruh SUB UP	D1. V9.6	Peningkatan pengangkutan dan Pengelolaan	Meningkatkan pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dikembangkan dengan konsep Bank Sampah.
	Pengembangan sistem **pengangkutan dan pengelolaan** sampah	D1. V9.7	Pengangkutan dan pengelolaan	Meningkatkan frekuensi pengangkutan dan pengelolaan sampah
Proteksi Kebakaran (V10)	Penyediaan **jalur dan ruang evakuasi** pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran	D1. V10.1	Jalur dan ruang evakuasi	Menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran
	Menyediakan **hidran** pada setiap lingkungan dan **sumur kebakaran atau reservoir air** dan sebagainya yang memudahkan instansi	D1. V10.2	Hidran, sumur kebakaran dan reservoir air	Menyediakan fasilitas untuk memadamkan kebakaran berupa hidran, sumur

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	pemadam kebakaran untuk menggunakannya			kebakaran atau reservoir air
	Penanganan terhadap kawasan rawan bencana kebakaran adalah dengan **menyediakan jalur dan ruang evakuasi** pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran,melakukan integrasi jaringan air minum dengan jaringan hydrant kebakaran serta pemenuhan standart keamanan bangunan pada kawasan bencana kebakaran	D1. V10.3	Penanganan kawasan rawan kebakaran	Menyediakan jalur dan ruang evakuasi, sinkronisasi jaringan air minum dan hydrant, serta memenuhi standar keamanan bangunan
	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan, **penyediaan sarana prasarana**	D1. V10.4	Sarana dan prasarana pendukung	Menyediakan sarana prasarana pendukung permukiman termasuk proteksi kebakaran

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	pendukung dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase			
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan prasarana** seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V10.5	Peningkatan sarana prasarana	Melakukan peningkatan kualitas proteksi kebakaran
	Adapun prinsip penanganan dari risiko bencana ini adalah **meningkatkan ketersediaan sarana parasana penanganan bencana kebakaran** baik yang bersifat individu pada masing--masing bangunan maupun secara komunal/masyarakat.	D1. V10.6	Sarana dan prasarana kebakaran	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran
Akses Sarana Kesehatan (V11)	**Mempertahankan fasilitas umum** yang ada	D1. V11.1	Penyediaan fasilitas umum	Menyediakan fasilitas umum termasuk sarana kesehatan sesuai

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Menyediakan fasilitas umum seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan	D1. V11.2		kebutuhan pelayanannya
	Penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan **jangkauan radius** area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu	D1. V11.3	Penempatan fasilitas kesehatan	Menyediakan fasilitas kesehatan sesuai radius area pelayanan
	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan, **penyediaan sarana** prasarana pendukung dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase	D1. V11.4	Sarana dan prasarana pendukung	Menyediakan sarana prasarana pendukung permukiman termasuk sarana kesehatas

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan prasarana** seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V11.5	Peningkatan sarana prasarana	Melakukan peningkatan sarana kesehatan
	Mempertahankan fasilitas pusat pelayanan dan **meningkatkan kualitas.**	D1. V11.6	Meningkat-kan kualitas	Meningkatkan kualitas Puskesmas
	Mempertahankan fasilitas jasa kesehatan dan **meningkatkan kualitas**	D1. V11.7	Jasa kesehatan	Meningkatkan kualitas jasa kesehatan termasuk dokter dan klinik
	Mempertahankan dan pengembangan **sarana pelayanan umum** yang proporsional dengan kebutuhan masyarakat dan **terdistribusi** secara merata meliputi pendidikan, **kesehatan**, peribadatan,	D1. V11. 8	Distribusi sarana kesehatan	Menyediakan sarana kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	transportasi, olahraga serta perkantoran di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, sesuai dengan fungsi kegiatan yang telah ditetapkan pada masing-masing Sub Unit Pengembangan			
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum **kesehatan**	D1. V11. 9	Penyediaan dan pemeliharaan	Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana kesehatan
Akses Sarana Pendidikan (V12)	**Mempertahankan fasilitas umum** yang ada	D1. V12.1	Penyediaan fasilitas umum	Menyediakan fasilitas umum termasuk sarana pendidikan sesuai kebutuhan pelayanannya
	Menyediakan fasilitas umum seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan	D1. V12.2		
	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan,	D1. V12.3	Sarana dan prasarana pendukung	Menyediakan sarana prasarana pendukung permukiman termasuk sarana pendidikan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	penyediaan sarana prasarana pendukung dan Ruang Terbuka Hijau, serta penataan sistem drainase			
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan prasarana** seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V12.4	Peningkatan sarana prasarana	Melakukan peningkatan sarana pendidikan
	Perbaikan kualitas fisik dan lingkungan fasilitas pendidikan yang ada, sesuai standar yang telah ditetapkan.	D1. V12. 5	Perbaikan fisik dan lingkungan	Dilakukan perbaikan fisik sarana pendidikan dan lingkungannya.
	Mempertahankan dan pengembangan sarana pelayanan umum yang proporsional dengan kebutuhan masyarakat dan **terdistribusi** secara merata meliputi	D1. V12. 6	Distribusi sarana pendidikan	Menyediakan sarana pendidikan sesuai kebutuhan pelayanan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, olahraga serta perkantoran di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, sesuai dengan fungsi kegiatan yang telah ditetapkan pada masing-masing Sub Unit Pengembangan			
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum pendidikan	D1. V12. 7	Penyediaan dan pemeliharaan	Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan
Ketersediaan RTH (V13)	**Kawasan hijau pertamanan lingkungan** yang ada direncanakan pada tiap-tiap kecamatan, kelurahan dan **unit-unit lingkungan.**	D1. V13.1	Kawasan hijau pertamanan	Mengembangkan pertamanan
	Mengembangkan pola cluster-cluster perumahan untuk menghindari pengelompokan	D1. V13.2	Penyediaan RTH	Menyediakan RTH

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	(aglomerasi) kawasan permukiman, dan diantara cluster perumahan disediakan **ruang terbuka hijau.**			
	Mempertahankan dan mengembangkan **RTH publik**	D1. V13.3	RTH Publik	RTH publik yang telah ada dipertahankan keberadaannya
	Mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada pada kawasan perencanaan	D1. V13.4		
	Menyediakan **taman aktif** di setiap kelurahan di UP V Tanjung Perak.	D1. V 13.5	Taman aktif	Setiap kelurahan di UP V Tanjung Perak diperlukan taman yang dapat digunakan oleh masyarakat.
	Mewujudkan **RTH publik** sebesar 5% pada permukiman eksisting (berupa **taman lingkungan/RT/ RW** dll)	D1. V13. 6	RTH publik	RTH publik disediakan sebesar 5% dari luas kawasan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Rencana penanganan untuk perkampungan padat yaitu dengan penataan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan, **penyediaan sarana prasarana pendukung** dan **Ruang Terbuka Hijau**, serta penataan sistem drainase	D1. V13. 7	Sarana dan prasarana pendukung	Menyediakan sarana prasarana pendukung permukiman termasuk RTH
	Penataan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan, **meningkatkan sarana dan prasarana** seperti menambahkan Ruang Terbuka Hijau	D1. V13. 8	Peningkatan sarana prasarana	Melakukan peningkatan kualitas RTH
	Mempertahankan dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (**RTH**)	D1. V13. 9	RTH	RTH di kawasan dipertahankan dan dikembangkan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Penyediaan dan peningkatan **kualitas dan kuantitas RTH** di kawasan perumahan	D1. V13. 10		
	Penyediaan taman di setiap kelurahan di UP V Tanjung Perak	D1. V13. 11	Taman	Menyediakan taman kelurahan
	Disediakan **Ruang Terbuka Hijau**	D1. V13. 12	Penyediaan RTH	Menyediakan RTH
Status Kepemilikan Lahan (V14)	Ketentuan yang memberikan **intensif** bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat berupa : keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan	D1. V14.1	Insentif dan disinsentif	Memberikan kemudahan dalam pemberian perizinan kepemilikan lahan pada bangunan yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, dan memberikan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	infrastruktur, **kemudahan prosedur perizinan**, dan/atau penghargaan**.**			disinsentif seperti prasyarat khusus dalam pengurusan perizinan lahan yang tidak sesuai
	Ketentuan yang memberikan **disinsentif** bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negative bagi masyarakat, dapat berupa: pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, **persyaratan khusus dalam pemberian perizinan,** kewajiban memberi kompensasi, kewajiban memberi imbalan; dan/atau penalti	D1. V14.2		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Status Legalitas Bangunan (V15)	**Tidak diizinkan** KDB 100% bagi pengajuan izin baru seperti pada **pengajuan izin bangunan** rumah di **R2**	D1. V15.1	Pelarangan izin bangunan untuk KDB 100%	Melarang izin baru bagi bangunan dengan KDB 100%
Kepadatan Penduduk (V16)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk Kepadatan Penduduk)*	-	-	-
Tingkat Pendidikan (V17)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk tingkat pendidikan)*	-	-	-
Tingkat Partisipasi (V18)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk tingkat partisipasi)*	-	-	-

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Frekuensi Kegiatan Masyarakat (V19)	*(Tidak terdapat arahan kebijakan untuk frekuensi kegiatan masyarakat)*	-	-	-
Frekuensi Kriminalitas (V20)	Mengembangkan lampu penerangan jalan yang cukup terutama di kawasan perdagangan dan perkantoran yang malam hari tutup untuk **mengurangi tingkat kriminalitas tinggi.**	D1. V20.1	Mengurangi kriminalitas	Mengurangi kriminalitas dengan memberikan penerangan di daerah yang rawan
Tingkat Kemiskinan (V21)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk tingkat kemiskinan*)	-	-	-

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni (V22)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk kemampuan pemenuhan rumah layak huni*)	-	-	-
Tingkat Pendapatan (V23)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk tingkat pendapatan*).	-	-	-

Sumber : Analisis Penulis, 2020

4.3.2. Arahan Kebijakan dalam Rencana Penanganan Permukiman Kumuh

Adapun rencana penanganan dalam bentuk program/ kegiatan penanganan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan di wilayah studi dalam Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surabaya dan Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Wonokusumo.

- **Rencana Penanganan Permukiman Kumuh dalam Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surabaya**

Tabel 4.20. Hasil Pengkodean Data pada Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surabaya

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Keteraturan Bangunan (V1)	**Penataan hunian** sempadan sungai dan **penataan bangunan tidak teratur**	D2. V1.1	Penataan bangunan	Memperbaiki dan melakukan penataan pada bangunan yang tidak teratur
	Perbaikan dan penanganan **ketidakteraturan bangunan**	D2. V1.2		
Kepadatan Bangunan (V2)	Mempertahankan proporsi antara ketinggian bangunan dengan **jarak antar bangunan yang nyaman** untuk digunakan	D2. V2.1	Jarak antar bangunan	Perlu memperhatikan jarak antar bangunan dengan tujuan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
				kenyamanan masyarakat
Kualitas Bangunan (V3)	Peningkatan penyediaan dan **peningkatan kualitas rumah** sederhana khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik berupa rumah tidak bersusun maupun rumah susun, karena masih banyak kawasan yang terdapat perumahan padat dan rumah tidak layak huni.	D2. V3.1	Peningkatan kualitas rumah	Meningkatkan kualitas bangunan yang tidak layak huni
	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada	D2. V3.2	Peningkatan kualitas	Meningkatkan kualitas bangunan dengan perbaikan fisik
	Meningkatkan kualitas perkampungan secara terpadu baik fisik maupun sosial	D2. V3.3	Perbaikan kawasan permukiman	Memperbaiki fisik kawasan permukiman yang rusak

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	ekonomi melalui **perbaikan lingkungan,** penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan dan **perbaikan kawasan perumahan dan permukiman**			
Lokasi Hunian (V4)	**Melindungi kawasan sepanjang sempadan SUTT/ SUTET** dari kegiatan pembangunan, kecuali pendirian bangunan pendukungnya	D2. V4.1	Sempadan SUTT/ SUTET	Sempadan SUTT/ SUTET tidak boleh digunakan untuk kegiatan pembangunan kecuali bangunan yang mendukung SUTT/ SUTET tersebut
Kondisi Jalan (V5)	**Peningkatan sarana prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D2. V5.1	Peningkatan prasarana permukiman	Meningkatkan kualitas sarana prasarana jalan di kawasan permukiman

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Beberapa kegiatan penanganan terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang termasuk dalam kategori kumuh sedang tersebut antara lain **penanganan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana jalan** dan saluran drainase, pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK, persampahan, air bersih), serta perbaikan atau penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran	D2. V5.2	Perbaikan prasarana jalan	Melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Peningkatan kualitas jalan serta pemenuhan **kebutuhan sarana prasarana pendukung**	D2. V5.3	Kualitas dan sarana pendukung jalan	Memperbaiki jalan yang memiliki kualitas buruk dan memenuhi kebutuhan pendukung jalan
	Perbaikan jalan aspal	D2. V5.4	Perbaikan jalan	Memperbaiki jalan yang memiliki kualitas buruk
Kelancaran Drainase (V6)	**Peningkatan sarana prasarana** perumahan dan kawasan permukiman.	D2. V6.1	Peningkatan prasarana permukiman	Meningkatkan kualitas prasarana drainase di kawasan permukiman
	Beberapa kegiatan penanganan terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang termasuk dalam kategori kumuh sedang tersebut antara lain penanganan prasarana dan	D2. V6.2	Perbaikan saluran drainase	Melakukan perbaikan saluran drainase

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	sarana lingkungan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana jalan dan **saluran drainase**, pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK, persampahan, air bersih), serta perbaikan atau penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran			
	Perbaikan drainase yang rusak dan **pengerukan drainase yang dangkal**	D2. V6.3	Perbaikan dan pengerukan drainase	Melakukan perbaikan drainase yang mengalami kerusakan dan mengeruk drainase yang mengalami pendangkalan
	Peningkatan/ rehabilitasi saluran drainase	D2. V6.4	Rehabilitasi saluran drainase	

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Ketersediaan Air Bersih (V7)	**Peningkatan sarana prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D2. V7.1	Peningkatan prasarana permukiman	Meningkatkan kualitas prasarana air bersih di kawasan permukiman
	Meningkatkan **kuantitas dan kualitas air** menjadi layak dan siap minum pada kawasan budidaya yang dilakukan secara bertahap.	D2. V7.2	Perbaikan prasarana air bersih	Melakukan perbaikan prasarana air bersih
	Beberapa kegiatan penanganan terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang termasuk dalam kategori kumuh sedang tersebut antara lain penanganan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana jalan dan saluran	D2. V7.3		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	drainase, **pembangunan dan perbaikan** prasarana sanitasi lingkungan (MCK, persampahan, **air bersih**), serta perbaikan atau penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran			
	Mewujudkan penyediaan **air minum yang dapat memenuhi kebutuhan** masyarakat secara **kualitas** dan kontinuitas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum	D2. V7.4	Pemenuhan kebutuhan air minum	Air minum yang disediakan harus sesuai kebutuhan dan kualitas yang layak
Kondisi Sanitasi (V8)	Beberapa kegiatan penanganan terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang termasuk dalam kategori kumuh	D2. V8.1	Perbaikan sanitasi	Memperbaiki kondisi sanitasi yang tidak layak

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	sedang tersebut antara lain penanganan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana jalan dan saluran drainase, pembangunan dan **perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK**, persampahan, air bersih), serta perbaikan atau penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran			
	Meningkatkan **kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi** yang dapat menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat	D2. V8.2	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kondisi Persampahan (V9)	Beberapa kegiatan penanganan terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang termasuk dalam kategori kumuh sedang tersebut antara lain penanganan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana jalan dan saluran drainase, **pembangunan dan perbaikan prasarana** sanitasi lingkungan (MCK, **persampahan**, air bersih), serta perbaikan atau penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran	D2. V9.1	Perbaikan sarana prasarana persampahan	Melakukan perbaikan sarana dan prasarana persampahan
	Peningkatan dan pelayanan **sarana prasarana persampahan**	D2. V9.2	Peningkatan sarana prasarana persampahan	Melakukan perbaikan sarana dan prasarana persampahan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Proteksi Kebakaran (V10)	**Peningkatan sarana prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D2. V10.1	Peningkatan prasarana permukiman	Meningkatkan kualitas sarana prasarana proteksi kebakaran di kawasan permukiman
	Menyediakan hidran pada setiap lingkungan **dan sumur kebakaran atau reservoir air** dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya	D2. V10.2	Penyediaan hidran, sumur kebakaran atau reservoir air	Menyediakan proteksi kebakaran berupa hidran, sumur kebakaran atau reservoir air
	Menyediakan **jalur dan ruang evakuasi** pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran	D2. V10.3	Jalur dan ruang evakuasi	Menyediakan jalur dan evakuasi bencana kebakaran

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Kawasan ruang evakuasi bencana untuk bencana banjir, **kebakaran**, dan bencana lainnya, meliputi: **ruang terbuka meliputi taman, lapangan, parkir, halaman atau pekarangan fasilitas umum dan sosia**l di sekitar kawasan rawan bencana kebakaran	D2. V10.4	Ruang evakuasi kebakaran	Penyediaan ruang evakuasi bencana berupa ruang terbuka seperti taman, lapangan, parkir dan halaman
	Beberapa kegiatan penanganan terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang termasuk dalam kategori kumuh sedang tersebut antara lain penanganan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana jalan dan saluran	D2. V10.5	Sumber air untuk pemadaman kebakaran	Menyediakan sumber air yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	drainase, pembangunan dan perbaikan prasarana sanitasi lingkungan (MCK, persampahan, air bersih), serta **perbaikan atau penyediaan sumber air untuk pemadaman kebakaran**			
	Perencanaan **akses pemadam kebakaran dan pembangunan sarana prasana** proteksi kebakaran	D2. V10.6	Akses dan sarana prasarana kebakaran	Meningkatkan akses dan kualitas sarana prasarana proteksi kebaka-ran
Akses Sarana Kesehatan (V11)	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas pendidikan, **kesehatan** dan pelayanan sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.	D2. V11.1	Pemerataan akse-sibilitas dan pelayanan kese-hatan	Meningkatkan akses dan pelaya-nan terhadap sarana kesehatan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Misi tersebut dapat dicapai melalui **pemerataan layanan kesehatan** yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya, terwujudnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya, terwujudnya generasi muda yang berkualitas.	D2. V11.2		
	Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman.	D2. V11.3	Peningkatan sarana permukiman	Meningkatkan kualitas sarana kesehatan di kawasan permukiman
Akses Sarana Pendidikan (V12)	Mewujudkan **pemerataan aksesibilitas pendidikan**, kesehatan dan pelayanan sosial yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.	D2. V12.1		Meningkatkan akses dan pelayanan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Misi tersebut dapat dicapai melalui pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya, **terwujudnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan** bagi seluruh warga Kota Surabaya, terwujudnya generasi muda yang berkualitas.	D2. V12.2	Pemerataan akse-sibilitas dan pela-yanan pendidikan	terhadap sarana pendidikan.
	Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman	D2. V12.3	Peningkatan sarana permukiman	Meningkatkan kualitas sarana pendidikan di kawasan permukiman
	Pengembangan fasilitas pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah tersebar sesuai dengan **tingkat dan lingkup pe-layananya**	D2. V12.4	Pengembangan fasiitas pendidikan	Mengembangkan fasilitas pendi-dikan sesuai tingkat pelayanannya

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Ketersediaan RTH (V13)	**Mengembangkan ruang terbuka hijau** dan/atau ruang terbuka non hijau di sepanjang sempadan SUTT/SUTET	D2. V13.1	RTH sempadan SUTT/ SUTET	RTH dikembangkan di daerah sempadan SUTT/SUTET
	Melindungi dan tidak mengalihfungsikan **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	D2. V13.2	Melindungi RTH	RTH tidak dialihfungsi untuk kegiatan atau guna lahan lainnya.
Status Kepemilikan Lahan (V14)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk status kepemilikan lahan*).	-	-	-

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Status Legalitas Bangunan (V15)	Pemberian izin susun kepada masyarakat serta pemantauan terhadap **izin mendirikan bangunan**	D2. V15.1	Pemantauan IMB	Mengawasi kepemilikan IMB
Kepadatan Penduduk (V16)	*(Tidak terdapat arahan kebijakan untuk kepadatan penduduk)*	-	-	-
Tingkat Pendidikan (V17)	Misi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keunggulan kompetitif ekonomi lokal yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi serta **sumber daya manusia yang berkualitas.**	D2. V17.1	SDM berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM dengan pengetahuan dan keterampilan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Misi tersebut dapat dicapai melalui pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya, terwujudnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya, **terwujudnya generasi muda yang berkualitas**.	D2. V17.2		
	Mewujudkan **sumber daya masyarakat yang berkualitas**	D2. V17.3		
Tingkat Partisipasi (V18)	Meningkatkan akses, kesadaran, **partisipasi dan kontrol publik** dalam pemanfaatan ruang, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik.	D2. V18.1	Partisipasi dan kontrol publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Meningkatkan **peran masyarakat**/ pengem-bang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.	D2. V18.2	Peran masyarakat	Peengadaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat
Frekuensi Kegiatan Masyarakat (V19)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk frekuensi kegiatan masyarakat)*	-	-	-
Frekuensi Kriminalitas (V20)	Memelihara **keamanan dan ketertiban umum.**	D2. V20.1	Kamanan dan ketertiban	Menjaga keamanan dan ketertiban dengan dengan meminimalisir frekuensi kriminalitas

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Tingkat Kemiskinan (V21)	Misi tersebut dapat dica-pai dengan cara **peningkatan kualitas hidup** perempuan dan anak serta penningkatan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	V21.1	Peningkatan kualitas hidup	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pember-dayaan
Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni (V22)	Terwujudnya masyarakat yang **mampu memenuhi kebutuhan perumahannya** dalam permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan.	V22.1	Mampu meme-nuhi kebutuhan perumahan	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak
Tingkat Pendapatan (V23)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk tingkat pendapatan*)	-	-	-

Sumber : Analisis Penulis, 2020

- **Rencana Penanganan Permukiman Kumuh dalam Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Wonokusumo**

Tabel 4.21. Hasil Pengkodean Data pada Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Wonokusumo

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Keteraturan Bangunan (V1)	Konsolidasi lahan dan **penataan bangunan**	D3. V1.1	Penataan bangunan	Melakukan penataan terhadap bangunan yang tidak teratur
	Pencegahan pembangunan permukiman yang akan memakan badan jalan melalui sosialisasi kepada masyarakat	D3. V1.2	Pencegahan bangunan yang menghalangi jalan	Mencegah bangunan yang menghalangi jalan
Kepadatan Bangunan (V2)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk kepadatan bangunan)*	-	-	-

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kualitas Bangunan (V3)	Program **perbaikan rumah tidak layak huni** (RTLH)	D3. V3.1	Perbaikan rumah	Memperbaiki rumah yang tidak layak huni
	Perbaikan **rumah tidak layak huni (RTLH)**	D3. V3.2	Pengawasan kelayakan bangunan	Mengawasi bangunan agar tetap layak untuk dihuni
	Pengawasan dan pengendalian perizinan, standar teknis, dan **kelayakan fungsi bangunan hunian**	D3. V3.3		
Lokasi Hunian (V4)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk Lokasi Hunian)*	-	-	-
Kondisi Jalan (V5)	Memantapkan **infrastruktur jalan** untuk mengembangkan	D3. V5.1	Kualitas dan sarpras	

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	aksesibitas wilayah Kota Surabaya		pendukung jalan lingkungan	Meningkatkan kualitas jalan dan sarpras pendukung termasuk penerangan jalan
	Peningkatan sarana **prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D3. V5.2		
	Meningkatkan **kualitas jalan lingkungan dengan perkerasan** agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran pada kawasan rawan kebakaran	D3. V5.3		
	Peningkatan **Kualitas Jalan** serta pemenuhan kebutuhan **sarana prasarana pendukung**	D3. V5.4		
	Peningkatan pelayanan **kualitas jalan lingkungan.**	D3. V5.5		
	Memantapkan **kinerja sarana dan prasarana drainase** kota	D3. V6.1		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kelancaran Drainase (V6)	dan sistem sanitasi yang terintegrasi		Peningkatan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas prasarana permukiman termasuk drainase
	Peningkatan sarana **prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D3. V6.2		
	Penyediaan **sarana dan prasarana pelengkap** pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai dengan tipe masing-masing	D3. V6.3		
	Pembangunan drainase tambahan dan perbaikan saluran drainase di beberapa ruas jalan, dan diperlukan pintu air tambahan sebagai upaya antisipasi terjadinya bencana	D3. V6.4	Membangun dan memperbaiki drainase	Membangun drainase pada kawasan yang belum terlayani dan memperbaiki drainase yang rusak
	Pada saluran-saluran sekunder yang tidak memenuhi kapasitas rencana perlu di desain ulang	D3. V6.5	Perubahan dimensi saluran	Menambah kapasitas saluran sekunder jika tidak memenuhi

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	seperti **melakukan perubahan dimensi saluran air**			
	Perbaikan drainase yang rusak dan **pengerukan drainase** yang dangkal serta penambahan pompa air	D3. V6.6	Perbaikan dan pengerukan drainase	Melakukan perbaikan drainase dan mengeruk drainase yang dangkal
Ketersediaan Air Bersih (V7)	Menjaga dan mempertahankan **kualitas sumber daya air.**	D3. V7.1	Menjaga kualitas air	Menjaga kualitas air agar tidak tercemar
	Peningkatan sarana **prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D3. V7.2	Peningkatan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas prasarana permukiman termasuk air bersih
	Penyediaan **sarana dan prasarana pelengkap** pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai dengan tipe masing-masing	D3. V7.3		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Peningkatan **pelayanan penyediaan air bersih**	D3. V7.4	Peningkatan pelayanan air bersih	Meningkatkan pelayanan air bersih melalui perbaikan dan penambahan saluran air PDAM
	Pengawasan dan pengendalian standar teknis dan **kelayakan fungsi sarpras penyediaan air bersih**	D3. V7.5	Pengawasan kelayakan air bersih	Mengawasi kelayakan air bersih
Kondisi Sanitasi (V8)	Peningkatan sarana **prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D3. V8.1	Peningkatan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas prasarana permukiman termasuk pengelolaan limbah
	Penyediaan **sarana dan prasarana pelengkap** pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai dengan tipe masing-masing	D3. V8.2		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Perbaikan sanitasi yang rusak dan pembuatan IPAL Komunal	D3. V8.3	Perbaikan sanitasi	Memperbaiki kondisi sanitasi yang tidak layak
	Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengelolaan air limbah	D3. V8.4		
	Perbaikan sanitasi yang rusak dan pembuatan jamban komunal jika dibutuhkan	D3. V8.5		
Kondisi Persampahan (V9)	Peningkatan **sarana prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D3. V9.1	Peningkatan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana prasarana persampahan
	Penyediaan **sarana dan prasarana pelengkap** pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai dengan tipe masing-masing	D3. V9.2		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Terwujudnya Semampir sebagai lingkungan yang Sehat, Bersih, Hijau dan Nyaman tercermin dari banyaknya penghijauan, penurunan jumlah area langganan banjir, **penambahan lingkungan Bebas Sampah** pada masing-masing Kelurahan	D3. V9.3	Lingkungan bebas sampah	Menghilangkan area yang menjadi timbunan sampah
	Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali	D3. V9.4	Pengumpulan sampah	Sampah dikumpulkan dan diangkut minimal dua hari sekali
	Menyediakan **Sarana dan Prasarana persampahan** yang memadai	D3. V9.5	Sarana prasarana persampahan	Menyediakan sarana prasarana persampahan

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengelolaan sampah	D3. V9.6	Pelayanan dan kualitas sarpras	Meningkatkan kualitas sarana persampahan dan memastikan semua kawasan terjangkau pelayanan pengangkutan secara rutin
	Pengendalian untuk pengangkutan sampah secara rutin dengan memastikan terpenuhi sarana pengangkutan sampah serta petugas pengangkut sampah	D3. V9.7		
Proteksi Kebakaran (V10)	Peningkatan **sarana prasarana** perumahan dan kawasan permukiman	D3. V10.1	Peningkatan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas sarana prasarana permukiman termasuk proteksi kebakaran
	Penyediaan **sarana dan prasarana pelengkap** pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai dengan tipe masing-masing	D3. V10.2		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Ruang yang dimaksud dapat diwujudkan dengan **sebuah lapangan yang memiliki jarak yang aman dari bangunan-bangunan di sekitarnya** (untuk **bencana kebakaran**)	D3. V10.3	Ruang evakuasi kebakaran	Menyediakan ruang evakuasi bencana kebakaran
	Menyediakan **hidran** pada setiap lingkungan dan **sumur kebakaran atau reservoir air** dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya	D3. V10.4	Hidran dan sumur kebakaran atau reservoir air	Menyediakan sarana pemadam kebakaran berupa hidran, sumur kebakaran, atau reservoir air.
	Pemberian **Apar dan sumur pompa**	D3. V10.5	Apar dan sumur pompa	Pengadaan Apar dan sumur pompa
Akses Sarana Kesehatan (V11)	Misi tersebut dapat dicapai melalui **pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas** bagi seluruh lapisan masyarakat	D3. V11.1	Pemerataan layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan harus dapat didapatkan oleh semua golongan masyarakat

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Kota Surabaya kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya, terwujudnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya, terwujudnya generasi muda yang berkualitas.			
	Peningkatan **sarana** prasarana perumahan dan kawasan permukiman	D3. V11.2	Peningkatan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas sarana permukiman termasuk sarana kesehatan
	Penyediaan **sarana dan prasarana pelengkap** pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai dengan tipe masing-masing	D3. V11.3		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Akses Sarana Pendidikan (V12)	Misi tersebut dapat dicapai melalui pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya, **terwujudnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya**, terwujudnya generasi muda yang berkualitas.	D3. V12.1	Pemerataan layanan pendidikan	Pelayanan kesehatan harus dapat didapatkan oleh semua golongan masyarakat
	Peningkatan **sarana** prasarana perumahan dan kawasan permukiman	D3. V12.2	Peningkatan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas sarana permukiman termasuk sarana pendidikan
	Penyediaan **sarana dan prasarana pelengkap** pada kawasan perumahan dengan	D3. V12.3		

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	kepadatan tinggi sesuai dengan tipe masing-masing			
Ketersediaan RTH (V13)	Peningkatan **sarana** prasarana perumahan dan kawasan permukiman	D3. V13.1	Peningkatan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas sarana permukiman termasuk RTH
	Penyediaan **sarana dan prasarana pelengkap** pada kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai dengan tipe masing-masing	D3..2		
Status Kepemilikan Lahan	Lahan-lahan permukiman baik yang sudah berkembang maupun yang akan	D3. V14.1	Status lahan permukiman	Melakukan pemantauan status kepemilikan lahan baik permukiman yang

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
(V14)	dikembangkan **diperjelas keberadaan statusnya**			sudah ataupun yang akan direncanakan
	Memperjelas status lahan pada kawasan permukiman	D3. V14.2		
Status Legalitas Bangunan (V15)	Peningkatan pada fungsi control bangunan, pemberian izin susun kepada masyarakat serta **pemantauan terhadap izin mendirikan bangunan**	D3. V15.1	Pemantauan IMB	Melakukan pemantauan terhadap kepemilikan IMB
	Pengawasan dan pengendalian perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi bangunan hunian	D3. V15.2	Pengawasan perizinan	Mengawasi kepemilikan IMB

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
Kepadatan Penduduk (V16)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk kepadatan penduduk*)	-	-	-
Tingkat Pendidikan (V17)	Misi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keunggulan kompetitif ekonomi lokal yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi serta **sumber daya yang berkualitas.**	D3. V17.1	SDM yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM untuk mendorong ekonomi.
	Misi tersebut dapat dicapai melalui pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya, **t**erwujudnya aksesibilitas dan	D3. V17.2	SDM yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Kota Surabaya, **terwujudnya generasi muda yang berkualitas**.			
	Mewujudkan **sumber daya masyarakat yang berkualitas**	D3. V17.3	SDM yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM
Tingkat Partisipasi (V18)	Meningkatkan akses, kesadaran, **partisipasi dan kontrol publik** dalam pemanfaatan ruang, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik.	D3. V18.1	Partisipasi dan kontrol publik	Partisipasi masyarakat perlu dilibatkan mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan rencana.
	Menciptakan Penataan Lingkungan dan Peningkatan Fungsi maupun Kapasitas sarana dan prasarana,	D3. V18.2	Peran serta dan kerjasama masyarakat	Partisipasi masyarakat dilibatkan dalam menata permukiman

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Infrastruktur lingkungan pemukiman melalui **peran serta dan kerjasama dengan masyarakat**			
Frekuensi Kegiatan Masyarakat (V19)	(*Tidak terdapat arahan kebijakan untuk frekuensi kegiatan masyarakat*)	-	-	-
Frekuensi Kriminalitas (V20)	Memelihara **keamanan dan ketertiban umum**	D3. V20.1	Keamanan dan ketertiban umum	Meminimalisir kriminalitas
Tingkat Kemiskinan (V21)	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial dalam **meningkatkan kualitas hidup**.	D3. V21.1	Pemberdayaan untuk mening-katkan kualitas hidup	Meningkatkan kualitas hidup dengan pemberdayaan masyarakat.

Variabel Penelitian	Kutipan	Kode	Kata Kunci	Analisis
	Misi tersebut dapat dicapai dengan cara **peningkatan kualitas hidup** perempuan dan anak serta peningkatan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	D3. V21.2		
Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni (V22)	Memberikan **fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni** bagi setiap wargakota	D3. V22.1	Fasilitasi rumah layak huni	Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni
Tingkat Pendapatan (V23)	(Tidak terdapat arahan kebijakan untuk tingkat pendapatan)	-	-	-

Sumber : Analisis Penulis, 2020

4.3.3. Hasil *Content Analysis* pada Dokumen Kebijakan

Berdasarkan *Content Analysis* dari ketiga dokumen tersebut, berikut hasil yang didapatkan.

Tabel 4.22. Hasil *Content Analysis* berdasarkan Dokumen Kebijakan Terpilih

Hasil Analisis	RDTRK		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Melakukan penataan pada bangunan yang tidak teratur	D1.V1.1., D1.V1.2., D1.V1.3.	√	D2.V1.1., D2.V1.2.	√	D3.V1.1., D3.V1.2.	√	Terkonfirmasi
Melakukan pengaturan terhadap KDB, KLB, GSB dan KDH	D1.V2.1., D1.V2.2., D1. V2.3	√	D2.V2.2.	√	-	-	Terkonfirmasi
Memperbaiki kualitas bangunan yang tidak layak huni	D1.V3.1., D1.V3.2., D1.V3.3., D1.V3.4.	√	D2.V3.1., D2.V3.2., D2.V3.3., D2.V3.4.,	√	D3.V3.1., D3.V3.2., D3.V3.3.	√	Terkonfirmasi
Menyediakan jalur dan ruang evakuasi di kawasan rawan bencana banjir rob	D1.V4.1., D1.V4.2.		-		-		Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RDTRK		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Menyediakan jalur dan ruang evakuasi kebakaran	D1.V10.1., D1.V10.3.	√	D2.V10.3, D2.V10.4, D2.V10.6.	√	D3.V10.3.	√	Terkonfirmasi
Melindungi sempadan SUTT/SUTET dari kegiatan budidaya termasuk permukiman sejauh 20 m dari titik tengah menara dengan mengembangkan RTH pasif	D1.V4.3., D1.V4.4., D1.V4.5., D1.V4.6., D1.V4.7., D1.V4.8., D1.V4.9., D1.V4.10., D1.V4.11., D1.V4.12., D1.V4.13., D1.V4.14., D1.V4.15.,	√	D2.V4.1.,	√	-	-	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RDTRK		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
	D1.V4.16., D1.V4.17.						
Meningkatkan kualitas perkerasan jalan	D1.V5.1., D1.V5.2., D1.V5.3., D1.V5.4., D1.V5.5	√	D2.V5.1., D2.V5.2., D2.V5.3., D2.V5.4., D2.V5.8.	√	D3.V5.1., D3.V5.2., D3.V5.3., D3.V5.4., D3.V5.5.,	√	Terkonfirmasi
Menyediakan dan memperbaiki kualitas drainase	D1.V6.1., D1.V6.3., D1.V6.4., D1.V6.5., D1.V6.6., D1.V6.7.,	√	D2.V6.1., D2.V6.2., D2.V6.3., D2.V6.4.	√	D3.V6.1., D3.V6.2., D3.V6.3., D3.V6.4., D3.V6.6	√	Terkonfirmasi
Meningkatkan kapasitas saluran drainase	D1.V6.2.	√	D2.V6.3.	√	D3.V6.5., D3.V6.6.	√	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RDTRK		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Menyediakan dan meningkatkan kualitas air bersih	D1.V7.1., D1.V7.2., D1.V7.3., D1.V7.4., D1.V7.5.	√	D2.V7.1., D2.V7.2., D2.V7.3., D2.V7.4.	√	D3.V7.1., D3.V7.2., D3.V7.3., D3.V7.4., D3.V7.5	√	Terkonfirmasi
Menyediakan dan meningkatkan kualitas sanitasi	D1.V8.1., D1.V8.2., D1.V8.3.	√	D2.V8.1., D2.V8.2.,	√	D3.V8.1., D3.V8.2., D3.V8.3., D3.V8.4., D3.V8.5	√	Terkonfirmasi
Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana persampahan	D1.V9.1., D1.V9.2., D1.V9.4	√	D2.V9.1., D2.V9.2.,	√	D3.V9.1., D3.V9.2., D3.V9.3., D3.V9.5., D3.V9.6.,	√	Terkonfirmasi
Mengatur jadwal pengumpulan sampah	D1.V9.3., D1.V9.5., D1.V9.6., D1.V9.7	√	-	-	D3.V9.4., D3.V9.7.	√	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RDTRK		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Menyediakan dan meningkatkan proteksi kebakaran berupa hidran, sumur kebakaran, reservoir air dan lainnya	D1.V10.2., D1.V10.4., D1.V10.5., D1.V10.6,	√	D2.V10.1., D2.V10.2., D2.V10.5., D2.V10.6.,	√	D3.V10.1., D3.V10.2., D3.V10.4., D3.V10.5.,	√	Terkonfirmasi
Menyediakan serta meningkatkan sarana kesehatan sesuai jangkauan area pelayanan dan kebutuhan	D1.V11.1., D1.V11.2. D1.V11.3., D1.V11.4. D1.V11.5., D1.V11.6. D1.V11.7., D1.V11.8. D1.V11.9	√	D2.V11.1., D2.V11.2., D2.V11.3.	√	D3.V11.1., D3.V11.2., D3.V11.3.	√	Terkonfirmasi
Menyediakan serta meningkatkan sarana pendidikan sesuai jangkauan area pelayanan	D1.V12.1., D1.V12.2., D1.V12.3., D1.V12.5.,	√	D2.V12.1., D2.V12.2., D2.V12.3., D2.V12.4.,	√	D3.V12.1., D3.V12.2., D3.V12.3.	√	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RDTRK		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
	D1.V12.6., D1.V12.7						
Menyediakan RTH Publik berupa taman	D1.V13.1., D1.V13.2., D1.V13.3., D1.V13.4., D1.V13.5., D1.V13.6., D1.V13.7., D1.V13.8., D1.V13.9., D1.V13.10. D1.V13.11., D1.V13.12. D1.V13.13.,	√	D2.V13.1. D2.V13.2.	√	D3.V13.1., D3.V13.2	√	Terkonfirmasi
Memperjelas status legalitas lahan dan bangunan dengan insentif dan disinsentif	D1.V14.1. D1.V14.2.	√	-	-	D3.V14.1., D3.V14.2.	√	Terkonfirmasi

Hasil Analisis	RDTRK		RP2KPKP		RPLP		Kesimpulan
Meningkatkan kualitas SDM	-	-	D2.V17.1. D2.V17.2. D2.V17.3.	√	D3.V17.1., D3.V17.2. D3.V17.3.	√	Terkonfirmasi
Meningkatkan partisipasi dalam pengadaan sarana dan prasarana	-	-	D2.V18.1. D2.V18.2.	√	D3.V18.1., D3.V18.2.	√	Terkonfirmasi
Meningkatkan keamanan dengan mengurangi kriminalitas	D1.V20.1.	√	D2.V20.1.	√	D3.V20.1.	√	Terkonfirmasi
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	-	-	D2.V21.1.	√	D3.V21.1., D3.V21.2.		Terkonfirmasi
Memfasilitasi masyarakat untuk memnuhi kebutuhan rumah layak huni	-	-	D2.V22.1.	√	D3.V22.1.	√	Terkonfirmasi

Sumber : Analisis Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Berdasarkan hasil *Content Analysis* tersebut, didapatkan beberapa rencana atau program penanganan kumuh yang akan menjadi *support system* dalam perumusan strategi peremajaan di Wonokusumo. Hasil tersebut diklasifikasikan berdasarkan katagori yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Fisik Bangunan

V1	➢ Melakukan penataan pada bangunan yang tidak teratur termasuk bangunan yang berada di sempadan SUTT dan bangunan yang menghalangi jalan.
V2	➢ Membatasi kepadatan bangunan melalui intensitas (KDB, KLB, dan KDH) serta tata bangunan (GSB dan tinggi bangunan).
V3	➢ Memperbaiki kualitas bangunan tidak layak huni
V4	➢ Mengembangkan sempadan SUTT/SUTET yang terbebas dari kegiatan budidaya. Sempadan SUTT/SUTET dapat berupa taman pasif atau jaringan prasarana yang jaraknya 20 m dari titik tengah menara.

2. Sarana dan Prasarana

V5	➢ Meningkatkan kualitas perkerasan jalan
V6	➢ Menyediakan drainase ke seluruh kawasan, meningkatkan kapasitas drainase, dan memperbaiki kualitas drainase
V7	➢ Menyediakan dan meningkatkan kualitas air bersih
V8	➢ Meningkatkan kualias dengan perbaikan sanitasi yang rusak.
V9	➢ Meningkatkan sarana prasarana persampahan dan mengatur jadwal pengumpulan sampah dengan rutin.

V10	➢ Meningkatkan proteksi kebakaran dengan menyediakan hidran, sumur kebakaran/ reservoir air, apar atau sumur pompa.
	➢ Menyediakan jalur dan ruang evakuasi berupa lapangan di setiap unit lingkungan
V11	➢ Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana kesehatan sesuai jangkauan radius area.
V12	➢ Pemerataan sarana pendidikan sesuai jangkaua pelayanan dan diarahkan untuk dikembangkan secara vertikal.
V13	➢ Menyediakan RTH Publik berupa taman kelurahan atau taman RT/RW

3. Status Legalitas

V14 **V15**	➢ Memperjelas legalitas lahan dan bangunan dengan insentif dan disinsentif.

4. Sosial Kependudukan

V17	➢ Meningkatkan kualitas SDM dengan pemberdayaan
V18	➢ Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan sarana prasarana.
V20	➢ Meningkatkan keamanan dengan mengurangi kriminalitas.

5. Sosial Ekonomi

V21	➢ Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberdayaan.
V22	➢ Memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni

Setelah dilakukan *Content Analysis* pada ketiga dokumen tersebut, dihasilkan 20 arahan kebijakan yang dapat diinduksi pada tiga klaster ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.23. Induksi Hasil Content Analisis Kebijakan terhadap Klaster I, II dan III

Arahan/ Kebijakan	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Melakukan penataan pada bangunan yang tidak teratur termasuk bangunan yang berada di sempadan SUTT dan bangunan yang menghalangi jalan.	√		
Membatasi kepadatan bangunan melalui intensitas (KDB, KLB, dan KDH) serta tata bangunan (GSB dan tinggi bangunan).	√	√	
Memperbaiki kualitas bangunan tidak layak huni			√
Mengembangkan sempadan SUTT/SUTET yang terbebas dari kegiatan budidaya. Sempadan SUTT/SUTET dapat berupa taman pasif atau jaringan prasarana yang jaraknya 20 m dari titik tengah menara.	√		
Meningkatkan kualitas perkerasan jalan	√	√	√
Menyediakan drainase ke seluruh kawasan, meningkatkan kapasitas drainase, dan memperbaiki kualitas drainase	√	√	√

Arahan/ Kebijakan	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Menyediakan dan meningkatkan kualitas air bersih	√	√	
Meningkatkan kualias dengan perbaikan sanitasi yang rusak.	√	√	√
Meningkatkan sarana prasarana persampahan dan mengatur jadwal pengumpulan sampah dengan rutin.	√	√	
Meningkatkan proteksi kebakaran dengan menyediakan hidran, sumur kebakaran/ reservoir air, apar atau sumur pompa.	√	√	√
Menyediakan jalur dan ruang evakuasi berupa lapangan di setiap unit lingkungan	√	√	√
Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana kesehatan sesuai jangkauan radius area.	√	√	√
Pemerataan sarana pendidikan sesuai jangkauan pelayanan dan diarahkan untuk dikembangkan secara vertikal.	√	√	√
Menyediakan RTH Publik berupa taman kelurahan atau taman RT/RW	√	√	√
Memperjelas legalitas lahan dan bangunan dengan insentif dan disinsentif.	√	√	√

Arahan/ Kebijakan	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Meningkatkan kualitas SDM dengan pemberdayaan			√
Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan sarana prasarana.	√	√	√
Meningkatkan keamanan dengan mengurangi kriminalitas.	√	√	
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberdayaan.		√	√
Memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni			√

Sumber : Analisa Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

4.4. Analisis Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh di Wonokusumo Kota Surabaya

Perumusan strategi peremajaan permukiman kumuh di Wonokusumo dilakukan dengan analisis SWOT. Adapun unsur dari SWOT dipisahkan dalam pokok persoalan internal (kekuatan/ *strength* dan kelemahan/ *weakness*) serta pokok persoalan eksternal (peluang/ *opportunity* dan tantangan/ *threat*). Faktor-faktor internal didapatkan dari sasaran 1, dimana karakteristik dari masing-masing klaster dapat menghasilkan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan, faktor-faktor eksternal didapatkan dari arahan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam *output* sasaran 2.

4.4.1. Tahap Pengumpulan Data untuk Analisis SWOT

Tahap pengumpulan data SWOT dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan IFAS (*Internal Strategic Factory Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Strategic Factory Analysis Summary).* IFAS didapatkan dari faktor internal yang disusun dalam *strength (S)* dan *weakness (W).* Sedangkan EFAS didapatkan dari faktor eksternal yang disusun dalam *opportunities* dan *threats.*EFAS dan IFAS dalam penelitian ini dijelaskan oleh tabel sebagai berikut.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Tabel 4.24. Penentuan IFAS dan EFAS dalam Klaster I

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster I			
Faktor Internal	**Kekuatan/ *Strength***		
	Kondisi sanitasi baik dimana seluruh KK tersambung *septictank* dengan pengelolaan *offsite.*	Sanitasi sudah baik dengan kategori *Limited*	**S1**
	Tingkat pendidikan tinggi	Kesadaran masyarakat dalam pendidikan tinggi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan maupun IPM	**S2**
	Tingkat pendapatan tinggi		
	Tingkat kemiskinan rendah		
	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi rumah layak huni tinggi	Kesadaran dalam memenuhi rumah layak huni tinggi	**S3**
	Kualitas bangunan dalam pemenuhan *durability of dwellings* dan *habitability* baik.		

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster I			
	Tingkat partisipasi tinggi	Masyarakat partisipatif dalam penanganan kumuh	**S4**
	Kelemahan/ *Weakness*		
	Keteraturan bangunan tergolong sedang, 70% bangunan menggunakan badan jalan atau lahan sekitarnya	Kawasan padat dan tidak teratur	**W1**
	Memiliki kepadatan bangunan tinggi		
	Kepadatan penduduk tinggi		
	Memiliki sempadan SUTT yang digunakan sebagai permukiman dan kegiatan warga	Memiliki kawasan sempadan SUTT yang ditinggali warga	**W2**
	Mengalami penumpukkan sampah karena beberapa lokasi tidak dapat dilewati pelayanan pengangkutan sampah	Terjadi penumpukkan sampah di beberapa kawasan karena tidak	**W3**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster I			
		terlayani pengangkutan sampah	
	Tidak memiliki proteksi kebakaran	Tidak tersedia proteksi kebakaran	**W4**
	Tidak memiliki ruang terbuka hijau	Tidak tersedia RTH	**W5**
	Status legalitas lahan tergolong sedang dan bangunan tergolong rendah, dimana masih terdapat ancaman penggusuran	Kurangnya kesadaran dalam legalitas lahan dan bangunan	**W6**
	Kriminalitas tinggi di ruang publik berupa maling dan copet	Kriminalitas tinggi mengancam keamanan di ruang publik	**W7**
	Keamanan lokasi hunian buruk dimana 46% kawasan terancam genangan.	Kawasan rawan genangan	**W8**
	Peluang/ *Opportunity*		

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster I			
Faktor Ekster-nal	Sudah terdapat arahan kebijakan untuk mengatur bangunan di sempadan SUTT dan bangunan yang menghalangi jalan	Terdapat arahan pengaturan penataan bangunan	**O1**
	Sudah terdapat arahan untuk membebaskan area sempadan SUTT sejauh 20 m dari titik tengah menara		
	Sudah terdapat arahan kebijakan pembatasan kepadatan melalui intensitas bangunan.	Terdapat arahan pengaturan intensitas bangunan	**O2**
	Sudah terdapat arahan peningkatan kualitas jalan	Terdapat arahan peningkatan kualitas jalan	**O3**
	Sudah terdapat arahan peningkatan sarana prasarana persampahan dan arahan untuk mengatur jadwal pengangkutan secara rutin	Terdapat arahan peningkatan sarpras persampahan	**O4**
	Terdapat arahan peningkatan proteksi kebakaran	Terdapat arahan peningkatan proteksi kebakaran	**O5**
	Terdapat arahan penyediaan jalur dan ruang evakuasi kebakaran		

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster I			
	Terdapat arahan penyediaan RTH Publik	Terdapat arahan penyediaan RTH	**O6**
	Terdapat arahan pengawasan status legalitas dengan metode insentif dan disinsentif	Terdapat arahan insentif dan disinsentif untuk mengawasi kepemilikan status legalitas	**O7**
	Sudah terdapat arahan kebijakan untuk meningkatkan keamanan.	Terdapat arahan peningkatan keamanan	**O8**
	Sudah terdapat arahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas drainase	Terdapat arahan peningkatan kualitas dan kapasitas drainase	**O9**
	Tantangan/ *Threats*		
	Terdapat klaim tanah oleh PT.KAI sehingga menghambat proses pengajuan legalitas bangunan warga	Terdapat ketidakpastian klaim tanah oleh PT.KAI	**T1**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster I			
		yang menghambat legalitas bangunan	
	Belum terdapat program atau fasilitas penanganan resiko bencana di seluruh kawasan permukiman	Belum terdapat kegiatan pengurangan resiko bencana	**T2**
	Bantuan pemerintah dalam akses sarana kesehatan masih belum sepenuhnya membantu kelompok MBR, dimana terdapat pemblokiran bantuan terhadap beberapa warga karena tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi.	Syarat administrasi dalam bantuan kesehatan yang cukup kaku membuat eksklusifitas kelompok MBR	**T3**

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Tabel 4.25. Penentuan IFAS dan EFAS dalam Klaster II

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster II			
Faktor Internal	**Kekuatan/ *Strength***		
	Tingkat pendidikan masyarakat tinggi	Masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi	**S1**
	Keteraturan bangunan tergolong tinggi	Keteraturan bangunan tinggi sehingga kawasan lebih tertata dengan baik	**S2**
	Kondisi sanitasi baik dimana seluruh KK tersambung *septictank* dengan pengelolaan *offsite.*	Sanitasi sudah baik dengan kategori *Limited*	**S3**
	Tingkat partisipasi tinggi	Masyarakat partisipatif dalam penanganan kumuh	**S4**
	Lokasi keamanan hunian baik	Kawasan minim terjadi genangan	**S5**
	Kualitas bangunan dalam pemenuhan *durability of dwellings* dan *habitability* baik		**S6**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster II			
	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi rumah layak huni tinggi	Kesadaran masyarakat dalam hunian layak tergolong baik	
	Kelemahan/ *Weakness*		
	Tingkat kemiskinan sedang	Tingkat pendidikan yang tinggi kurang membuat masyarakat sejahtera	**W1**
	Tingkat pendapatan tergolong sedang		
	Tidak memiliki proteksi kebakaran	Tidak tersedia proteksi kebakaran	**W2**
	Tidak memiliki ruang terbuka hijau	Tidak tersedia RTH	**W3**
	Status legalitas lahan dan bangunan tergolong sedang, dimana masih terdapat ancaman penggusuran	Kurangnya kesadaran dalam legalitas lahan dan bangunan	**W4**
	Kepadatan penduduk tergolong tinggi yaitu 684 jiwa/Ha	Kepadatan penduduk tinggi	**W5**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster II			
	Kepadatan bangunan tergolong tinggi yaitu 104 unit/Ha	Kepadatan bangunan tinggi	**W6**
	Tingkat kriminalitas tinggi berupa maling dan pengedar obat-obatan (sabu-sabu)	Kriminalitas tinggi menyebabkan hilangnya rasa aman di permukiman	**W7**
	Kondisi persampahan buruk sehingga terjadi penumpukkan sampah	Terjadi penumpukkan sampah di beberapa kawasan karena tidak terlayani pengangkutan sampah	**W8**
Faktor Ekster-nal	**Peluang/ *Opportunity***		
	Sudah terdapat arahan kebijakan pembatasan kepadatan melalui intensitas bangunan.	Terdapat arahan pengaturan intensitas bangunan	**O1**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster II			
	Sudah terdapat arahan kebijakan peningkatan kualitas dan pelayanan sarpras persampahan	Terdapat arahan peningkatan sarpras persampahan	**O2**
	Sudah terdapat arahan kebijakan peningkatan proteksi kebakaran	Terdapat arahan peningkatan proteksi kebakaran	**O3**
	Sudah terdapat arahan penyediaan jalur dan ruang evakuasi kebakaran		
	Sudah terdapat arahan penyediaan RTH Publik	Terdapat arahan penyediaan RTH	**O4**
	Sudah terdapat arahan pengawasan status legalitas dengan metode insentif dan disinsentif	Terdapat arahan insentif dan disinsentif untuk mengawasi kepemilikan status legalitas	**O5**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster II			
	Sudah terdapat arahan kebijakan untuk meningkatkan keamanan dengan mengurangi kriminalitas	Terdapat arahan pengurangan kriminalitas	**O6**
	Sudah terdapat arahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Terdapat arahan peningkatan kualitas hidup	**O7**
	Tantangan/ *Threats*		
	Terdapat klaim tanah oleh PT.KAI sehingga menghambat proses pengajuan legalitas bangunan warga	Terdapat ketidakpastian klaim tanah oleh PT.KAI yang menghambat legalitas bangunan	**T1**
	Belum terdapat program atau fasilitas penanganan resiko bencana di seluruh kawasan permukiman	Belum terdapat kegiatan pengurangan resiko bencana	**T2**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster II			
	Bantuan pemerintah dalam akses sarana kesehatan masih belum sepenuhnya membantu kelompok MBR, dimana terdapat pemblokiran bantuan terhadap beberapa warga karena tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi.	Syarat administrasi dalam bantuan kesehatan yang cukup kaku membuat eksklusifitas MBR	**T3**

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Tabel 4.26. Penentuan IFAS dan EFAS dalam Klaster III

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster III			
Faktor Internal	**Kekuatan/ *Strength***		
	Keteraturan bangunan tinggi, 96% bangunan teratur	Kawasan tertata dengan kepadatan rendah	**S1**
	Kepadatan bangunan rendah yaitu 58 unit per Ha		
	Kepadatan penduduk rendah yaitu 377 jiwa per Ha		
	Kondisi sanitasi baik dimana seluruh KK tersambung *septictank* dengan pengelolaan *offsite*.	Sanitasi sudah baik dengan katagori *Limited*	**S2**
	Kondisi persampahan baik yang dilayani pengangkutan rutin	Persampahan baik dengan pengangkutan rutin	**S3**
	Tingkat partisipasi tinggi	Masyarakat partisipatif dalam penanganan kumuh	**S4**
	Kriminalitas rendah, dimana tidak pernah terjadi tindak kriminal	Kriminalitas rendah menciptakan permukiman yang aman	**S5**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster III			
	Kelemahan/ *Weakness*		
	Tingkat pendidikan rendah dimana mayoritas tidak lulus pendidikan dasar	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga berdampak kemiskinan dan IPM	**W1**
	Tingkat pendapatan tergolong rendah		
	Tingkat kemiskinan tinggi dimana 76% masyarakat termasuk MBR		
	Kualitas bangunan dalam pemenuhan *durability of dwellings* dan *habitability* rendah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi rumah layak huni	**W2**
	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi rumah layak huni rendah		
	Lokasi hunian buruk, dimana 63% mengalami genangan	Kawasan rawan terjadi genangan	**W3**
	Tidak memiliki proteksi kebakaran	Tidak tersedia proteksi kebakaran	**W4**
	Tidak memiliki ruang terbuka hijau	Tidak tersedia RTH	**W5**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster III			
	Status legalitas lahan dan bangunan tergolong sedang, dimana masih terdapat ancaman penggusuran	Kurangnya kesadaran dalam legalitas lahan dan bangunan	**W6**
Faktor Ekster-nal	**Peluang/ *Opportunity***		
	Sudah terdapat arahan kebijakan dalam perbaikan kualitas bangunan yang tidak layak huni	Tedapat arahan peningkatan kualitas bangunan	**O1**
	Sudah terdapat arahan kebijakan dalam peningkatan perkerasan jalan	Terdapat arahan peningkatan perkerasan jalan	**O2**
	Sudah terdapat arahan kebijakan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas drainase	Terdapat arahan peningkatan kualitas dan kapasitas drainase	**O3**
	Terdapat arahan peningkatan proteksi kebakaran	Terdapat arahan peningkatan proteksi kebakaran	**O4**
	Terdapat arahan penyediaan jalur dan ruang evakuasi kebakaran		

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster III			
	Terdapat arahan penyediaan RTH Publik	Terdapat arahan penyediaan RTH	**O5**
	Terdapat arahan pengawasan status legalitas dengan metode insentif dan disinsentif	Terdapat arahan insentif dan disinsentif untuk mengawasi kepemilikan status legalitas	**O6**
	Sudah terdapat arahan kebijakan peningkatan kualitas SDM dengan pemberdayaan	Terdapat arahan peningkatan kualitas SDM	**O7**
	Sudah terdapat arahan kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pemberdayaan	Terdapat arahan peningkatan kualitas hidup masyarakat	**O8**
	Sudah terdapat arahan kebijakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni	Terdapat arahan fasilitasi pemenuhan masyarakat dalam Rumah Layak Huni	**O9**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster III			
	Sudah terdapat arahan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih	Terdapat arahan peningkatan fasilitas air bersih	**O10**
	Tantangan/ *Threats*		
	Terdapat klaim tanah oleh PT.KAI sehingga menghambat proses pengajuan legalitas bangunan warga	Terdapat ketidakpastian klaim tanah oleh PT.KAI yang menghambat legalitas bangunan	**T1**
	Belum terdapat program atau fasilitas penanganan resiko bencana di seluruh kawasan permukiman	Belum terdapat kegiatan pengurangan resiko bencana	**T2**
	Bantuan pemerintah dalam akses sarana kesehatan masih belum sepenuhnya membantu kelompok MBR, dimana terdapat pemblokiran bantuan terhadap beberapa warga karena tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi.	Syarat administrasi dalam bantuan kesehatan yang cukup kaku membuat eksklusifitas kelompok MBR	**T3**

SWOT	Karakteristik	Faktor	
Klaster III			
	Ketersediaan lahan kosong di Klaster III membuat warga dari kawasan lain membuang sampah di tempat tersebut	Masih terdapat warga dari luar klaster yang membuang sampah di lahan kosong	**T4**

Sumber: Analisa Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

4.4.2. Tahap Analisis Data SWOT

Tabel 4.27. Penyilangan SWOT Klaster I

	Strength (S)	**Weakness (W)**
	1. Sanitasi sudah baik dengan kategori *Limited* (S1) 2. Kesadaran masyarakat dalam pendidikan tinggi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan maupun IPM (S2). 3. Kesadaran memenuhi rumah layak huni tinggi (S3). 4. Masyarakat partisipatif dalam penanganan kumuh (S4)	1. Kawasan padat dan tidak teratur (W1) 2. Memiliki kawasan sempadan SUTT yang ditinggali warga (W2) 3. Terjadi penumpukkan sampah di beberapa kawasan karena tidak terlayani pengangkutan sampah (W3). 4. Tidak tersedia proteksi kebakaran (W4). 5. Tidak tersedia RTH (W5). 6. Kurangnya kesadaran dalam legalitas lahan dan bangunan (W6). 7. Kriminalitas tinggi mengancam keamanan di ruang publik (W7). 8. Kawasan rawan genangan (W8).
Opportunity (O) 1.Terdapat arahan pengaturan penataan bangunan (O1). 2.Terdapat arahan pengaturan intensitas bangunan (O2). 3.Terdapat arahan peningkatan kualitas jalan (O3). 4.Terdapat arahan peningkatan sarpras persampahan (O4). 5.Terdapat arahan peningkatan proteksi kebakaran (O5). 6.Terdapat arahan penyediaan RTH (O6). 7.Terdapat arahan insentif dan disinsentif untuk mengawasi kepemilikan status legalitas (O7). 8.Terdapat arahan peningkatan keamanan (O8).	**STRATEGI S-O** 1. Meningkatkan biaya retribusi sampah agar pengangkutan sampah bersedia menjangkau kawasan yang sulit dilewati (S3, S4, O4). 2. Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan (O3, O4, O5, O9, O10, S4). 3. Pemberian langkah disinsentif berupa teguran, penyuluhan terkait kategori pelanggaran dan sanksi yang dapat menjerat, serta evaluasi terkait himbauan yang telah dilakukan sebelumnya (S3, S4, O1, O2, O7). 4. Membentuk satuan keamanan dan fasilitas pengamanan untuk mencegah tindak kriminal (S4, O8).	**STRATEGI W-O** 1. Melindungi kawasan sempadan SUTT yang digunakan untuk permukiman warga dengan membangun RTH pasif (O1, O6, W1, W2, W5). 2. Melengkapi perabot jalan seperti lampu penerangan (O3, O8, W3, W8). 3. Mengurangi timbunan sampah dengan pemilahan sampah mandiri yang dapat dikordinir oleh Ibu-Ibu PKK atau Kelompok Jentik (O4, W3). 4. Menyediakan proteksi kebakaran berupa jalur evakuasi dan APAR (O5, W4). 5. Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O2, O7, W1, W6).

9.Terdapat arahan peningkatan kualitas dan kapasitas drainase (O9). 10. Terdapat peningkatan air bersih (O10).		
Threat (T)	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**
1. Terdapat ketidakpastian klaim tanah oleh PT.KAI yang menghambat legalitas bangunan (T1). 2. Belum terdapat kegiatan pengurangan resiko bencana (T2). 3. Syarat administrasi dalam bantuan kesehatan yang cukup kaku membuat eksklusifitas kelompok MBR (T3).	1. Melakukan Land Clarification antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S4, T1). 2. Membentuk kader relawan yang dilatih oleh professional sehingga tanggap bencana (S4, T2). 3. Menyediakan Disaster Recovery berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2). 4. Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan dengan pendampingan serta bantuan administrasi. (S4, T3).	1. Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung Land Clarification dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W6). 2. Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W4).

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Tabel 4.28. Penjelasan Strategi Peremajaan di Klaster I

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
1.	Meningkatkan biaya retribusi sampah agar pengangkutan sampah bersedia menjangkau kawasan yang sulit dilewati (S3, S4, O4)	**RDTR** Pada jaringan persampahan di UP V Tanjung Perak sudah diakomodasi TPS di masing-masing kecamatan kecuali di Kelurahan Monokrembangan. Terdapat arahan berupa mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan menyediakan lahan bagi TPS serta mendukung pengelolaan persampahan mandiri. Selain itu terdapat arahan untuk mengatur jadwal pengumpulan minimal 2 hari sekali. **RP2KPKP** Diarahkan untuk meningkatkan dan pelayanan sarana prasarana persampahan, memelihara TPS dan penambahan gerobak sampah. **RPLP** Diarahkan untuk mereduksi dan mengolah sampah sejak skala rumah tangga dengan pemberdayaan serta membangun TPS dan pengolahan sampah pada lingkungan penghasil sampah tinggi. **Rattekarua, 2017** Pada pengumpulan sampah di Kelurahan Bandarhajo Semarang dilakukan dengan intervensi lembaga setempat yaitu pengurus RW/RT dalam pembiayaan dan penyediaan sarana pengumpul sampah. Sehingga pada lingkungan tidak melakukan kegiatan pengumpulan sampah secara sendiri-sendiri dan dapat menjangkau seluruh RW/ RT.	**Meningkatkan Biaya Retribusi Sampah** Berdasarkan hasil wawancara, beberapa lokasi tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pengangkutan sampah. Hal tersebut disebabkan sempitnya akses jalan menuju lokasi tersebut. Akhirnya warga menumpuk sampah terlebih dahulu dan membuang sendiri sampahnya ke lokasi sekitar dalam kurun waktu setidaknya satu minggu sekali. Sedangkan, keberadaan TPS yang terletak di Wonokusumo Kidul dirasa cukup jauh dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih untuk membuang sampah di lingkungan sekitar. Untuk biaya retribusi yang dibayarkan saat ini sekitar Rp.10.000,00 hingga Rp.12.000,00 setiap bulannya. Sehingga, dengan **peningkatan biaya persampahan kepada petugas sampah** diharapkan dapat menjangkau kawasan yang tidak terjangkau tersebut.
2.	Mengurangi timbunan sampah dengan pemilahan sampah mandiri yang dapat dikordinir oleh Ibu-Ibu PKK atau Kelompok Jentik (O4, W3).	**RDTR** Diarahkan untuk mengelola persampahan mandiri. **RPLP** Diarahkan untuk mereduksi dan mengolah sampah sejak skala rumah tangga **Widiyanto, 2015** Bentuk pengelolaan persampahan di Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara dilakukan dengan pemberdayaan	**Pemilahan sampah mandiri dengan dikordinir Ibu-Ibu PKK atau Kelompok Jentik** Dalam mengurangi penumpukkan sampah, maka perlu dilakukan pemilahan sampah dengan membedakan sampah organik dan non organik. Berdasarkan kondisi eksisting, pendidikan masyarakat di Kluster I tergolong tinggi sehingga diharapkan mampu menjalankan program tersebut.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
		PKK dalam memilah dan mengelola persampahan, dimana dilakukan dengan cara pendampingan dengan perguruan tinggi untuk penyuluhan dari tenaga ahli dan narasumber serta bekerjasama dengan mahasiswa dalam pengadaan sarpras, juga melatih PKK untuk pemilahan sampah organik dan non organik	Adapun sampah yang telah dipilah dapat disetorkan kepada *Bank* sampah yang direncanakan dibangun di Kluster II.
3.	Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan (O3, O4, O5, O9, S4)	**RP2KPKP** Diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan penyusunan kebijakan. **RPLP** Dalam penyediaan infrastruktur lingkungan, diarahkan untuk bekerjasama dengan masyarakat. **Pratiwi, 2018** Keterlibatan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh Parit Nenas Kelurahanan Siantan Hulu dilakukan dengan cara : sosialisasi program , melibatkan masyarakat dalam perencanaan menggunakan *mind mapping*, pemetaan swadaya dimana warga bertanggung jawab terkait sarana prasarana di lokasi yang telah ditentukan dan mempercepat implementasi program yang telah dirumuskan agar partisipasi masyarakat tidak menurun.	**Pelibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan** Partisipasi masyarakat di Kluster I hanya sebatas partisipasi dalam kerja bakti (pelaksanaan). Sehingga, untuk membantu perbaikan prasarana dapat **melibatkan peran masyarakat setempat** dengan tujuan mengefisiensikan waktu dan biaya yang dikeluarkan mengingat Klaster I memiliki jumlah penduduk dan tingkat partisipasi yang tinggi.
4.	Pemberian langkah disinsentif berupa teguran, penyuluhan terkait kategori pelanggaran dan sanksi yang dapat menjerat, serta evaluasi terkait himbauan yang telah dilakukan sebelumnya (S3, S4, O1, O2, O7).	**RDTR** Diarahkan untuk memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, berupa : pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam perizinan dan kewajiban memberikan kompensasi.Berdasarkan arahan zonasi pada subzona perumahan kepadatan tinggi, kegiatan rumah tinggal yang diizinkan memiliki ketentuan KDB maksimum untuk lebar jalan ≤3 meter adalah 100% untuk bangunan 1-2 lantai, KDH 0% untuk KDB 100%, dan ketinggian 10 meter untuk bangunan 2 lantai.	**Disinsentif Berupa Teguran, Penyuluhan Kategori Pelanggaran dan Sanksi yang Menjerat serta Evaluasi Himbauan yang Telah Dilakukan** Berdasarkan kondisi eksisting, keteraturan bangunan banyak disebabkan oleh bangunan turun temurun yang dipetak-petakkan menjadi beberapa rumah. Karena permukiman kumuh Wonokusumo didominasi oleh bangunan yang tidak bersertifikat, pemberlakuan pajak yang tinggi tidak dapat dilakukan. Sehingga, langkah awal yang dapat dilakukan berupa pemberian teguran, penyuluhan rutin terkait pelanggaran bangunan terutama yang

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
		Latanratu, 2012 Kebijakan disinsentif pada bangunan yang menggunakan sempadan sungai di sekitar Sungai Je'neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah pengenaan pajak yang tinggi. **Suprapti dkk, 2012** Dalam kajian pelanggaran bangunan di Kompleks perumahan di Kota Surabaya terkait sempadan bangunan, sanksi yang dapat diberikan berupa: penghentian proses IMB, pencabutan IMB yang diterbitkan, penyesuaian IMB yang ada, pembongkaran bangunan. Adapun disebutkan dapat dikenakan denda administrasi paling banyak Rp.50.000.000, pembekuan atau pencabutan IMB, dan penyegelan bangunan.	menggunakan badan jalan beserta sanksi yang dapat menjerat penghuni. Selain itu, untuk memastikan penyuluhan berjalan efektif, diperlukan evaluasi terhadap himbauan atau penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya.
5.	Membentuk satuan keamanan dan fasilitas pengamanan untuk mencegah tindak kriminal (S4, O8).	**RDTR** Diarahkan untuk mengenmbangkan lampu penerangan pada kawasan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. **RP2KPKP** Diarahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. **RPLP** Diarahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. **Tamara, 2018** Kriminalitas di permukiman bantaran Sungai Karang Mumus Kecamatan Samarinda Ulu sebagian besar berupa kejahatan jalanan (*street crime*). Dalam upaya penanangannya dilakukan dengan : merencanakan kawasan permukiman dengan tidak memusat, memperbaiki kualitas lingkungan, memasang penerangan jalan umum, dan memasang CCTV. **Pramono, 2018** Dalam meningkatkan keamanan di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dilakukan dengan membentuk satlinmas. Satlinmas tersebut bertanggungjawab langsung terhadap Kepala	**Membentuk satuan keamanan dan fasilitas pengamanan** Berdasarkan hasil wawawancara, kriminalitas tergolong tinggi yang umumnya terjadi di ruang publik seperti maling dan copet. Sehingga diperlukan pengamanan terutama pada akses keluar dan masuk permukiman. Maka, perlu dibentuk **satuan keaman** yang secara rutin melakukan patroli keamanan terutama saat malam hari.Selain itu dapat memasang **fasiltas pengamanan** seperti **CCTV dan portal keluar masuk kawasan.**

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
		Desa/Lurah, yang terdiri dari masyarakat setempat. Satlinmas tersebut terbagi menjadi pengamanan saat bencana dan pengamanan dari tindak kriminalitas.	
6.	Melindungi kawasan sempadan SUTT yang digunakan untuk permukiman warga dengan membangun RTH pasif (O1, O6, W1, W2, W5).	**RDTR** Diarahkan untuk melindungi sempadan SUTT yang berbatasan langsung dengan permukiman dengan pengembangan jalur hijau, taman pasif, bozem, bangunan pengaman atau pagar pembatas. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008** Diarahkan untuk mengatur jarak minimum SUTT dan SUTET dengan bangunan lain, dimana untuk SUTT 150 KV ditetapkan sejauh 20 m. Adapun RTH SUTT dapat ditanami semak, pohon sedang, dan pohon kecil. **Rejeki, 2006** Permukiman sekitar Koridor SUTT 150 KV di Kota Semarang pada Kelurahan Ngemplak Simongan, Manyaran, Kembang Arum, Purwoyoso, Sampangan dan Petompon termasuk permukiman padat sebesar 8960 jiwa/km^2. Dikatakan bahwa permukiman tersebut tidak dapat mengurus kelegalan tanah karena pihak DTKP tidak bersedia mengesahkan jika jarak rumah kurang dari batas aman jaringan. Pada penelitian dirumuskan strategi pengurangan bahaya elektromagnetik tegangan listrik dengan cara melarang pembangunan pada lahan yang berjarak kurang dari batas aman jaringan dan menetapkan lahan tersebut sebagai kawasan hijau atau *open space*.	**Pembangunan RTH Pasif di sempadan SUTT** Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat SUTT sebesar 150KV di Klaster I. SUTT tersebut berada ditengah-tengah permukiman warga dimana bagian bawah digunakan untuk aktivitas penduduk seperti berjualan, berinteraksi, parkir kendaraan ataupun sarana bermain anak-anak. Kegiatan tersebut sangat berbahaya bagi warga, sehingga diperlukan **penertiban dengan membangun taman pasif di sempadan SUTT.** Kegiatan penertiban tersebut juga didukung kondisi permukiman sempadan SUTT tidak memiliki surat kepemilikan lahan dan bangunan dimana berdasarkan studi literatur tidak dapat disahkan jika jarak rumah kurang dari batas aman.
7.	Melengkapi perabot jalan seperti lampu penerangan (O3, O8, W3, W8).	**RDTR** Diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan, menambah perabot jalan dan tanaman. **RP2KPKP**	**Melengkapi Perabot Jalan seperti Lampu Penerangan** Melengkapi perabot jalan berupa perbaikan penerangan yang masih berasal dari swadaya masyarakat. Hal tersebut juga bertujuan mengurangi

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
		Diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan dengan perbaikan perkerasan. **RPLP** Diarahkan untuk meningkatkan kualitas perkerasan jalan **Sugiharto dan Lestari** Upaya pengurangan kriminalitas berupa perampasan sepeda motor di Kota Semarang dengan cara: menjalin kerjasama antar kepolisian dengan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur jalan dengan menambah pos polisi dan fasilitas penerangan di daerah yang dianggap rawan.	kriminalitas di Kluster I yang umumnya terjadi di ruang publik (jalan).
8.	Menyediakan proteksi kebakaran berupa jalur evakuasi dan APAR (O5, W4).	**RDTR** Diarahkan untuk menyediakan ruang dan jalur evakuasi kebakaran, menyediakan hidran di setiap lingkungan, dan sumur kebakaran/ reservoir air. **RP2KPKP** Diarahkan untuk menyediakan hidran, sumur kebakaran/ reservoir air, jalur dan ruang evakuasi, dan melatih masyarakat. **RPLP** Diarahkan untuk menyediakan lapangan, hidran, sumur kebakaran/ reservoir air, dan Apar. **Wahyudi, 2019** Penyediaan proteksi kebakaran di permukiman kumuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman berupa penyediaan hidran yang diletakkan di tengah kawasan kumuh, penyediaan akses jalan yang dapat dilewati kendaraan, dan menyediakan alat komunikasi berupa kentungan dan sirine. **SNI 03-1735-2000 mengenai Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung** Jika tidak tersedia hidran kota, maka diperlukan hidran halaman. Pasokan air untuk hidran halaman sekurang-kurangnya 2400 liter/ menit serta mampu mengalirkan air minimal 45 menit.	**Menyediakan sarana prasarana kebakaran** Berdasarkan kondisi eksisting, kepadatan hunian yang tinggi sangat riskan jika terjadi kebakaran. Sehingga ruang evakuasi diarahkan berada di taman yang direncanakan di Kluster III. Adapun **jalur evakuasi diarahkan ke titik tersebut tidak boleh melewati SUTT**. Selain itu perlu disediakan APAR sebagai alat perlindungan warga jika terjadi kebakaran.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
9.	Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O2, O7, W1, W6).	**RDTR** Diarahkan untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan dan melarang pengajuan izin bangunan dengan KDB 100% **RP2KPKP** Diarahkan untuk memantau izin mendirikan bangunan **RPLP** Diarahkan untuk mengawasi IMB dengan sistem *reward and punishment*	**Pengawasan Penerbitan Izin bangunan dan Fasilitasi Pengurusan Izin Bangunan Komunal** Berdasarkan kondisi eksisting, kepadatan bangunan di Kluster I sudah tergolong tinggi. Sehingga adanya bangunan baru akan membuat kawasan semakin padat. Berdasarkan hal tersebut, perlu **pengawasan penerbitan izin bangunan** dimana sesuai arahan tidak diizinkan untuk bangunan baru dengan KDB 100%.Adapun masyarakat enggan mengurus izin bangunan karena harus mengurus dari awal (dari proses pengukuran) dimana bangunannya telah dipetak-petakkan menjadi dua atau lebih bangunan. Akibatnya akan menghabiskan waktu serta biaya yang besar. Sehingga, **bantuan pengurusan izin bangunan secara komunal** dapat membantu permasalahan tersebut.
10.	Melakukan *Land Clarification* antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S4, T1).	**Hariyanti, 2008** Pada penanganan klaim tanah aset PT. KAI yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan cara masyarakat memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai, dimana hak pengelolaan atas tanah tetap dimiliki PT KAI.	**Melakukan *Land Clarification* berupa kesepakatan antara masyarakat dan PT. KAI** Menurut informasi dari masyarakat, beberapa penolakan pengurusan izin legalitas bangunan disebabkan adanya klaim PT.KAI secara bersamaan. Sehingga, diperlukan ***Land Clarification* berupa kesepakatan atau MoU** antara masyarakat dan PT.KAI terlebih dahulu dengan **difasilitasi pemerintah** sebelum mengajukan izin ke BPN. Hal tersebut mengingat landasan klaim tanah PT.KAI berupa *groundchart***(*)** atau peta bidang tahun 1996 dan beberapa masyarakat pun memiliki Petok D(**). **(*)** *Groundchart* merupakan peta aset tanah pemerintah dalam hal ini BUMN dimana

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
			memuat batas-batas tanah secara historis (pada zaman kolonial). **(**)** Petok D adalah surat hak atas tanah dimana sebagai bukti pembayaran pajak yang biasanya diwariskan secara turun-temurun.
11.	Membentuk kader relawan yang dilatih oleh profesional sehingga tanggap bencana (S4, T2).	**Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011** Relawan bencana berperan dalam : pelatihan bersama masyarakat, penyuluhan, pengadaan informasi bencana, peningkatan kewaspadaan masyarakat, membantu evakuasi warga dan kegiatan lain terkait kedaruratan. **Kankanamge, 2019** Kegiatan relawan bencana dalam penelitian ini menggunakan *social media* berupa penyebaran informasi, merekrut relawan tambahan dari lokasi lain, membentuk forum *online* dan penggalangan dana jika terjadi bencana	**Membentuk relawan yang dilatih Profesional** Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak didapatkan proteksi bencana, sosialisasi ataupun relawan bencana. Sehingga kondisi sangat rentan terutama jika terjadi bencana sewaktu-waktu. Sehingga **diperlukan relawan** yang diharapkan membantu mengamankan warga. Kelompok relawan tersebut dapat dibentuk dari **Kelompok Karang Taruna** dimana bertugas dalam edukasi dan sosialisasi warga terhadap tanggap bencana, membantu evakuasi warga saat bencana, dan meningkatkan kewaspadaan bencana di lingkungan permukiman. Kelompok tersebut juga dapat mengadakan *online forum* sebagai *platform* untuk koordinasi antar relawan dan membantu penyebaran informasi bencana.
12.	Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan dengan pendampingan serta bantuan administrasi. (S4, T3).	**Suhaila, 2017** Untuk meningkatkan implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara dilakukan dengan cara : 1. Kejelasan administrasai BPJS secara *lift live* kepada masyarakat berupa poster untuk memperoleh informasi. 2. Bantuan finansial dengan melakukan pelayanan berobat dahulu baru anggaran dana keluar dan PBI (Penerima bantuan iuran) dari pemerintah bagi golongan fakir miskin, orang tidak mampu, dan penderita cacat total.	**Perluasan akses kesehatan** Berdasarkan kondisi eksisting, sudah terdapat bantuan akses kesehatan seperti BPJS dan KIS. Namun, beberapa bantuan tersebut terblokir karena persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh beberapa kelompok MBR, seperti pembayaran iuran, persyaratan KTP setempat, kondisi rumah tinggal yang dibuktikan dengan dokumentasi dan lainnya. Sehingga perlu dilakukan bantuan kepengurusan

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
			syarat administrasi bagi MBR yang sudah terbukti tinggal di permukiman kumuh Wonokusumo.
13	Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung *Land Clarification* dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W6).	**RPLP** Diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan izin bangunan **Hariyanti, 2008** Pada penanganan klaim tanah aset PT. KAI yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan saran/ masukan sebagai materi yang akan disepakati dengan PT.KAI dimana difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	**Penyuluhan Status Legalitas Untuk Mendukung *Land Clarification*** Berdasarkan hasil observasi, belum pernah dilakukan penyuluhan terkait legalitas lahan ataupun bantuan ataus permasalahan klaim tanah PT KAI. Dilain sisi status tanah warga yang sebagian besar Petok D tidak dapat dinaikkan menjadi SHM atau IMB karena kendala klaim tanah PT KAI dan bangunan turun temurun yang dipetak-petakkan secara mandiri. Sehingga, *Land Clarification* perlu didukung oleh seluruh masyarakat dengan pemberihan penyuluhan.
14.	Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W4).	**BNPB, 2018** Titik kumpul berupa rambu yang berada di daerah yang terbebas dari segala sesuatu yang menjadi penghalang dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Titik kumpul berada di lokasi yang aman, berada di tempat terbuka yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame serta relatif mudah diakses untuk keperluan pertolongan kedaruratan. Jalur evakuasi berupa jalur untuk menuju titik kumpul yang terbebas dari segala penghalang.	**Menetapkan sistem peringatan bencana** Berdasarkan kondisi eksisting, **titik kumpul dapat berada di taman lingkungan** yang direncanakan di Kluster III karena terbebas dari bangunan tinggi dan penghalang lainnya, serta **jalur evakuasi diarahkan untuk menuju lokasi tersebut dan tidak diarahkan untuk melewati SUTT**. Jalur tersebut perlu dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga dapat dijadwalkan simulasi bencana secara rutin atau penyuluhan dari para pakar. Selain itu diberikan papan penanda titik kumpul dan rambu-rambu sepanjang rute jalur evakuasi. Kawasan juga perlu dilengkapi **alat komunikasi berupa kentungan atau sirine.**

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
15.	Menyediakan Disaster Recovery berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2).	**Sukmana, 2016** Pada *Post-Disaster Recovery* Permukiman di Kecamatan Porong Sidoarjo dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Program bantuan sosial dengan melaksanakan pengawasan dan pemantauan evakuasi warga terdampak 2. Perlindungan sosial dengan bentuk fasilitasi ganti rugi dan jual beli tanah dan bangunan, penanganan kompensasi gagal panen, kompensasi perusahaan yang berhenti beroperasi, kompensasi UKM dan penanganan unjuk rasa. 3. Pemulihan sosial, dengan bentuk konseling bagi masyarakat yang mengalami goncangan psikososial.	***Disaster Recovery* Berupa Kesiapan Dana Untuk Bantuan Sosial Pasca Bencana** Bencana yang mengancam kawasan permukiman kumuh Wonokusumo berupa kebakaran dan rawan genanganan. Sehingga kesiapan dana disiapkan sebagai bentuk *Disaster Recovery* jika sewaktu-waktu bencana tersebut terjadi.

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Tabel 4.29. Penyilangan SWOT Klaster II

	Strength (S)	Weakness (W)
	1. Masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi (S1) 2. Keteraturan bangunan tinggi sehingga kawasan lebih tertata dengan baik (S2) 3. Sanitasi sudah baik dengan katagori *Limited* (S3) 4. Masyarakat partisipatif dalam penanganan kumuh (S4) 5. Kawasan minim terjadi genangan (S5). 6. Kesadaran masyarakat dalam hunian layak tergolong baik (S6).	1. Tingkat pendidikan yang tinggi kurang membuat masyarakat sejahtera (W1) 2. Tidak tersedia proteksi kebakaran (W2). 3. Tidak tersedia RTH (W3) 4. Kurangnya kesadaran dalam legalitas lahan dan bangunan (W4) 5. Kepadatan penduduk tinggi (W5) 6. Kepadatan bangunan tinggi (W6) 7. Kriminalitas tinggi menyebabkan hilangnya rasa aman di permukiman (W7) 8. Terjadi penumpukkan sampah di beberapa kawasan karena tidak terlayani pengangkutan sampah (W8)
Opportunity (O) 1.Terdapat arahan pengaturan intensitas bangunan (O1). 2.Terdapat arahan peningkatan sarpras persampahan (O2). 3.Terdapat arahan peningkatan proteksi kebakaran (O3). 4.Terdapat arahan penyediaan RTH (O4). 5.Terdapat arahan insentif dan disinsentif untuk mengawasi kepemilikan status legalitas (O5). 6.Terdapat arahan pengurangan kriminalitas (O6). 7.Terdapat arahan peningkatan kualitas hidup (O7)	**STRATEGI S-O** 1. Membentuk kader yang dapat mendukung keberadaan *bank sampah* dengan mengelola dan mendaur ulang sampah *(*O2, S1, S6). 2. Meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat dengan berinovasi dalam produk usaha rumahan (O7, S1). 3. Membentuk satuan keamanan untuk mencegah tindak kriminal (O6, S4). 4. Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan (O2, O3, O8,O9, O10, S4).	**STRATEGI W-O** 1. Meningkatkan perekonomian berupa perluasan pasar dalam memaksimalkan usaha rumahan dengan penguatan *e commerce*, dimana sudah terdapat potensi penjualan secara *online* mengingat lahan terbatas untuk sentra produksi dan pemasaran (O7, W1,W6). 2. Menyediakan proteksi kebakaran berupa jalur evakuasi dan APAR (O3, W2). 3. Menyediakan *vertical garden* (O4, W3, W6). 4. Membangun *bank sampah* dengan kegiatan daur ulang (O2, W8). 5. Penyuluhan hidup sehat dan bahaya penggunaan obat-obatan terlarang (O6, W7)

8. Terdapat arahan peningkatan kualitas jalan (O8) 9. Terdapat arahan peningkatan kualitas dan pelayanan drainase (O9) 10. Terdapat arahan peningkatan kualitas air bersih (O10).		6. Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O1, O5, W4, W6).
Threat (T)	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**
1. Terdapat ketidakpastian klaim tanah oleh PT.KAI yang menghambat legalitas bangunan (T1) 2. Belum terdapat kegiatan pengurangan resiko bencana (T2) 3. Syarat administrasi dalam bantuan kesehatan yang cukup kaku membuat eksklusifitas kelompok MBR (T3)	1. Melakukan *Land Clarification* antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S1, S4, T1). 2. Membentuk kader relawan yang dilatih oleh professional sehingga tanggap bencana (S4, T2). 3. Menyediakan *Disaster Recovery* berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2). 4. Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan dengan pendampingan serta bantuan administrasi (S4, T3)	1. Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung Land Clarification dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W4) 2. Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W2)

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Tabel 4.30. Penjelasan Strategi Peremajaan di Klaster II

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
1.	Membangun *bank sampah* dengan kegiatan daur ulang (O2, W8).	**RDTR** Diarahkan untuk menyediakan sarana prasarana dan mengelola sampah agar meminimalisir timbunan. **RP2KPKP** Diarahkan untuk menyediakan sarana prasarana persampahan dan mengelola sampah secara mandiri **RPLP** Diarahkan untuk meningkatan sarana prasarana persampahan dan mengelola sampah berbasis 3R. **Anggraini, 2015** Pada Bank Sampah Sri Wilis yang berada di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kediri dilakukan dengan: pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan, pembuatan kerajinan dan daur ulang kompos secara gratis. **Syahbiba, 2017** Pada Bank Sampah Jasmine di Kelurahan Gundih Surabaya dilakukan penyetoran sampah dalam waktu dua kali/ bulan. Sedangkan Bank Sampah Tanjung Mandiri melakukan penyetoran satu kali per bulan. Hasil penyetoran tersebut diuangkan sesuai banyaknya sampah yang diberikan masyarakat. Setelah itu, pengangkutan ke pengepul melibatkan becak sekitar.	**Mengembangkan Bank Sampah** Berdasarkan observasi, bebrapa kawasan sulit untuk dilewati kendaraan pengangkutan sampah. Sehingga warga yang tidak terlayani pengangkutan cenderung membuang sendiri sampahnya ke lingkungan sekitar, termasuk ke lahan kosong yang terdapat di Klaster III. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu melakukan pengurangan timbunan sampah, seperti pengadaan **Bank Sampah.** Selain mengurangi penumpukkan sampah, bank tersebut dapat meningkatan pendapatan masyarakatnya. Dalam pengembangannya, Bank sampah dapat melakukan kegiatan berikut: 1. Warga memilah sampah organik dan non organik. 2. Sampah organik dapat dikelola menjadi pupuk untuk dipasok kepada Program *Women Earn Money* di Klaster III. 3. Sampah anorganik didaur ulang atau diserahkan kepada pengepul untuk meningkatkan nilai ekonomis.
2.	Membentuk kader yang dapat mendukung keberadaan *bank sampah* dengan mengelola dan mendaur ulang sampah (O2, S1, S6)	**Purwanto, 2019** Pada Bank Sampah Gang Merak Cikarang Utara melibatkan kader yang berasal dari PKK, swasta (pengusaha), Ketua RT dan masyarakat setempat. Hasil penjualan disetorkan ke bendahara Gang Merak dimana uang tersebut digunakan untuk perbaikan lingkungan. **Sujiyanto, 2016**	**Membentuk Kader Bank Sampah** Berdasarkan kondisi eksisting, penduduk Klaster II memiliki pendidikan yang tergolong tinggi. Sehingga diharapkan dapat mengelola sampah secara kreatif dan memiliki kesadaran lebih baik dalam pengurangan sampah di lingkungannya.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
		Pada Bank Sampah Malang memiliki kader yang berasal dari PKK, sekolah-sekolah se kota Malang, swasta (pengusaha) dan warga setempat.	Dalam hal ini, dapat melibatkan **Ibu-Ibu PKK** yang sebagian besar bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga.
3.	Meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat dengan berinovasi dalam produk usaha rumahan (O7, S1).	**Rochdiani, 2018** Pada usaha rumahan Desa Sidangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang mengolah makanan yang berasal dari olahan tepung (tepung terigu, tepung tapioca dan tepung kanji) yang masih dilakukan secara tradisional. Kemudian warga melakukan diferensiasi produk dengan menjual *cheese stick* aneka rasa dengan bantuan pelatihan dari pemerintah. Selain diberikan pelatihan dalam diferensiasi produk, juga diberikan pelatihan dalam teknik pengemasan yang lebih baik. Sehingga penjualan produk tersebut semakin meningkat dan pasar semakin luas.	**Meningkatkan produk yang berdaya saing** Berdasarkan hasil wawancara, Kelompok Ibu-Ibu PKK tergolong aktif dalam berwirausaha, dimana sudah berinovasi untuk berjualan produk makanan secara *online*. Hasil dari penjualan tersebut dimasukkan kas PKK yang dibagikan setiap bulannya. Hal tersebut menunjukkan Kelompok PKK di Klaster II cukup mahir dalam *ecommerce*. Namun penjualan produk berupa kue kering hanya meraup untung besar di beberapa waktu saja, seperti Hari Raya. **Dengan peningkatan keterampilan dalam inovasi produk sehingga lebih berdaya saing** diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warganya. Inovasi produk makanan tersebut dapat didukung oleh Klaster III dalam Program *Women Earn Money* dengan menyediakan bahan dasar.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
4.	Membentuk satuan keamanan untuk mencegah tindak kriminal (O6, S4).	**RDTR** Diarahkan untuk mengenmbangkan lampu penerangan pada kawasan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. **RP2KPKP** Diarahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. **RPLP** Diarahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. **Pramono, 2018** Dalam meningkatkan keamanan di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dilakukan dengan membentuk satlinmas. Satlinmas tersebut bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Desa/Lurah, yang terdiri dari masyarakat setempat. Satlinmas tersebut terbagi menjadi pengamanan saat bencana dan pengamanan dari tindak kriminalitas.	**Membentuk satuan keamanan dan pos jaga** Berdasarkan hasil wawancara, kriminalitas tergolong tinggi yang umumnya terjadi di ruang privat/ rumah seperti maling (motor dan elektronik) dan pengguna obat-obatan (sabu-sabu). Sehingga, penangan dilakukan dengan **membentuk satuan keamanan** yang secara rutin melakukan patroli keamanan terutama saat malam hari. Satuan keamanan tersebut dapat dibentuk dari **anggota Karang Taruna** dengan pembentukan jadwal piket harian, dengan pertimbangan anggota kartar telah memahami lingkungan tempat tinggalnya sehingga dapat lebih responsif saat terjadi tindak kriminal.
5.	Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan (O2, O3, S4)	**RP2KPKP** Diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan penyusunan kebijakan. **RPLP** Dalam penyediaan infrastruktur lingkungan, diarahkan untuk bekerjasama dengan masyarakat. **Pratiwi, 2018** Keterlibatan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh Parit Nenas Kelurahanan Siantan Hulu dilakukan dengan cara : sosialisasi program , melibatkan masyarakat dalam perencanaan menggunakan *mind mapping*, pemetaan swadaya dimana warga bertanggung jawab terkait sarana prasarana di lokasi yang telah ditentukan dan mempercepat implementasi program yang telah dirumuskan agar partisipasi masyarakat tidak menurun.	**Pelibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan** Partisipasi masyarakat di Kluster II juga hanya sebatas partisipasi dalam kerja bakti (pelaksanaan). Sehingga, untuk membantu perbaikan prasarana dapat **melibatkan peran masyarakat setempat** dengan tujuan mengefisiensikan waktu dan biaya yang dikeluarkan mengingat Klaster II memiliki jumlah penduduk dan tingkat partisipasi yang tinggi.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
6.	Meningkatkan perekonomian berupa perluasan pasar dalam memaksimalkan usaha rumahan dengan penguatan *e commerce*, dimana sudah terdapat potensi penjualan secara *online* mengingat lahan terbatas untuk sentra produksi dan pemasaran (O7, W1, W6)	**Zuhri, 2013** Pada pengembangan usaha kecil *home indsutri* sangkar ayam di Desa Kebomlati Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dilakukan dengan strategi : memperluas pasar ke daerah yang belum pernah dimasuki produk sangkar ayam dan meningkatkan kualitas sangkar ayam. **Kurniawati, 2016** Pada kegiatan perekonomian rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo khususnya kegiatan Home Industri Dompet dilakukan pengembangan usaha dengan cara memfasilitasi peralatan usaha, melakukan *branding* dengan logo/label, pelatihan marketing online dan membuat blog untuk pemasaran serta pembuatan banner.	**Perluasan pasar dengan penguatan *ecommerce*** Berdasarkan hasil wawancara, sudah terdapat kegiatan perekonomian di Klaster II berupa penjualan produk makanan oleh Ibu-Ibu PKK yang dilakukan secara *online*. Sehingga, **dilakukan penguatan kegiatan tersebut dengan cara memperluas *marketplace* yang digunakan, melakukan *branding* produk dan meningkatkan promosi secara *online*.**
7.	Menyediakan proteksi kebakaran berupa jalur evakuasi dan APAR (O3, W2)	**RDTR** Diarahkan untuk menyediakan ruang dan jalur evakuasi kebakaran, menyediakan hidran di setiap lingkungan, dan sumur kebakaran/ reservoir air. **RP2KPKP** Diarahkan untuk menyediakan hidran, sumur kebakaran/ reservoir air, jalur dan ruang evakuasi, dan melatih masyarakat. **RPLP** Diarahkan untuk menyediakan lapangan, hidran, sumur kebakaran/ reservoir air, dan Apar. **Wahyudi, 2019** Penyediaan proteksi kebakaran di permukiman kumuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman berupa penyediaan hidran yang diletakkan di tengah kawasan kumuh, penyediaan akses jalan yang dapat dilewati kendaraan, dan menyediakan alat komunikasi berupa kentungan dan sirine. **SNI 03-1735-2000 mengenai Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung**	**Menyediakan sarana prasarana kebakaran** Berdasarkan kondisi eksisting, kepadatan hunian yang tinggi sangat riskan jika terjadi kebakaran. Sehingga ruang evakuasi diarahkan berada di taman lingkungan yang direncanakan di Kluster III, dengan pertimbangan lain bahwa Kluster II cukup dekat dengan Kluster III. Adapun **jalur evakuasi diarahkan ke titik tersebut**. Selain itu perlu disediakan APAR sebagai alat perlindungan warga jika terjadi kebakaran.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
		Jika tidak tersedia hidran kota, maka diperlukan hidran halaman. Pasokan air untuk hidran halaman sekurang-kurangnya 2400 liter/ menit serta mampu mengalirkan air minimal 45 menit.	
8.	Menyediakan *vertical garden* (O4, W3, W6)	**Baldan, 2018** Pengembangan *vertical garden* yang dilakukan di Desa Pojok Sukoharjo dilakukan dengan memanfaatkan botol plastic bekas yang telah dicat warna warni kemudian dimasukkan media tanam berupa tanah dan sekam dengan tanaman yang dibudidayakan. Botol tersebut diletakkan di trails dengan berbagai bentuk sehingga menambah estetika. Pembuatan *vertical garden* tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan dikordinir oleh kelompok tani.	**Penyediaan Vertical Garden** Berdasarkan kondisi eksisting, kepadatan bangunan tinggi di Kluster II membuat ketidaktersediaan lahan untuk pembangunan RTH Publik seperti taman atau lapangan olahraga. Sehingga, kebutuhan ruang hijau di lahan yang terbatas dapat dipenuhi dengan **vertical garden.**
9.	Penyuluhan hidup sehat dan bahaya penggunaan obat-obatan terlarang (O6, W7)	**Kadir, 2018** Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara sosialisasi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama, pendirian pusat pengobatan, pendirian pusat konseling, dan melakukan penyuluhan di sektor pendidikan.	**Penyuluhan kesehatan dan penggunaan obat-obatan terlarang** Berdasarkan hasil wawancara masih ditemukan pengguna obat-obatan dengan jenis sabu-sabu. Sehingga diperlukan **penyuluhan tentang bahaya penggunaan obat-obatan terlarang** secara rutin serta **melakukan kampanye melalui berbagai media seperti poster, brosur** dan lainnya. Penyuluhan juga dilakukan kepada sekolah-sekolah untuk menanamkan sejak dini akan arti hidup sehat, serta dapat disampaikan dalam kajian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di lingkungan sekitar.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
10.	Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O1, O5, W4, W6).	**RDTR** Diarahkan untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan dan melarang pengajuan izin bangunan dengan KDB 100% **RP2KPKP** Diarahkan untuk memantau izin mendirikan bangunan **RPLP** Diarahkan untuk mengawasi IMB dengan sistem *reward and punishment*	**Pengawasan Penerbitan Izin bangunan dan Fasilitasi Pengurusan Izin Bangunan Komunal** Berdasarkan kondisi eksisting, kepadatan bangunan di Kluster II sudah tergolong tinggi. Sehingga adanya bangunan baru akan membuat kawasan semakin padat. Berdasarkan hal tersebut, perlu **pengawasan penerbitan izin bangunan** dimana sesuai arahan tidak diizinkan untuk bangunan baru dengan KDB 100%.Adapun masyarakat enggan mengurus izin bangunan karena harus mengurus dari awal (dari proses pengukuran) dimana bangunannya telah dipetak-petakkan menjadi dua atau lebih bangunan. Akibatnya akan menghabiskan waktu serta biaya yang besar. Sehingga, **bantuan pengurusan izin bangunan secara komunal** dapat membantu permasalahan tersebut.
11.	Melakukan Land Clarification antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S1, S4, T1).	**Hariyanti, 2008** Pada penanganan klaim tanah aset PT. KAI yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan cara masyarakat memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai, dimana hak pengelolaan atas tanah tetap dimiliki PT KAI.	**Melakukan *Land Clarification* berupa kesepakatan antara masyarakat dan PT. KAI** Menurut informasi dari masyarakat, beberapa penolakan pengurusan izin legalitas bangunan disebabkan adanya klaim PT.KAI secara bersamaan. Sehingga, diperlukan ***Land Clarification* berupa kesepakatan atau MoU** antara masyarakat dan PT.KAI terlebih dahulu dengan **difasilitasi pemerintah** sebelum mengajukan izin ke BPN. Hal tersebut mengingat landasan klaim tanah PT.KAI berupa *groundchart***(*)** atau peta bidang tahun 1996 dan beberapa masyarakat pun memiliki Petok D(**). **(*)** *Groundchart* merupakan peta aset tanah pemerintah dalam hal ini BUMN dimana memuat batas-batas tanah secara historis (pada zaman kolonial).

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
			(**) Petok D adalah surat hak atas tanah dimana sebagai bukti pembayaran pajak yang biasanya diwariskan secara turun-temurun.
12	Membentuk kader relawan yang dilatih oleh profesional sehingga tanggap bencana (S4, T2).	**Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011** Relawan bencana berperan dalam : pelatihan bersama masyarakat, penyuluhan, pengadaan informasi bencana, peningkatan kewaspadaan masyarakat, membantu evakuasi warga dan kegiatan lain terkait kedaruratan. **Kankanamage, 2019** Kegiatan relawan bencana dalam penelitian ini menggunakan *social media* berupa penyebaran informasi, merekrut relawan tambahan dari lokasi lain, membentuk forum *online* dan penggalangan dana jika terjadi bencana	**Membentuk relawan yang dilatih Profesional** Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak didapatkan proteksi bencana, sosialisasi ataupun relawan bencana. Sehingga kondisi sangat rentan terutama jika terjadi bencana sewaktu-waktu. Sehingga **diperlukan relawan** yang diharapkan membantu mengamankan warga. Kelompok relawan tersebut dapat dibentuk dari **Kelompok Karang Taruna** dimana bertugas dalam edukasi dan sosialisasi warga terhadap tanggap bencana, membantu evakuasi warga saat bencana, dan meningkatkan kewaspadaan bencana di lingkungan permukiman. Kelompok tersebut juga dapat mengadakan *online forum* sebagai *platform* untuk koordinasi antar relawan dan membantu penyebaran informasi bencana.
	Menyediakan Disaster Recovery berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2).	**Sukmana, 2016** Pada *Post-Disaster Recovery* Permukiman di Kecamatan Porong Sidoarjo dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Program bantuan sosial dengan melaksanakan pengawasan dan pemantauan evakuasi warga terdampak 2. Perlindungan sosial dengan bentuk fasilitasi ganti rugi dan jual beli tanah dan bangunan, penanganan kompensasi gagal panen, kompensasi perusahaan yang berhenti beroperasi, kompensasi UKM dan penanganan unjuk rasa. 3. Pemulihan sosial, dengan bentuk konseling bagi masyarakat yang mengalami goncangan psikososial.	***Disaster Recovery* Berupa Kesiapan Dana Untuk Bantuan Sosial Pasca Bencana** Bencana yang mengancam kawasan permukiman kumuh Wonokusumo berupa kebakaran dan rawan genanganan. Sehingga kesiapan dana disiapkan sebagai bentuk *Disaster Recovery* jika sewaktu-waktu bencana tersebut terjadi.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
13.	Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan. (S4, T3)	**Suhaila, 2017** Untuk meningkatkan implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara dilakukan dengan cara : 1. Kejelasan administrasai BPJS secara *lift live* kepada masyarakat berupa poster untuk memperoleh informasi. 2. Bantuan finansial dengan melakukan pelayanan berobat dahulu baru anggaran dana keluar dan PBI (Penerima bantuan iuran) dari pemerintah bagi golongan fakir miskin, orang tidak mampu, dan penderita cacat total.	**Perluasan akses kesehatan** Berdasarkan kondisi eksisting, sudah terdapat bantuan akses kesehatan seperti BPJS dan KIS. Namun, beberapa bantuan tersebut terblokir karena persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh beberapa kelompok MBR, seperti pembayaran iuran, persyaratan KTP setempat, kondisi rumah tinggal yang dibuktikan dengan dokumentasi dan lainnya. Sehingga perlu dilakukan bantuan kepengurusan syarat administrasi bagi MBR yang sudah terbukti tinggal di permukiman kumuh Wonokusumo.
14.	Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung Land Clarification dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W4)	**RPLP** Diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan izin bangunan **Hariyanti, 2008** Pada penanganan klaim tanah aset PT. KAI yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan saran/ masukan sebagai materi yang akan disepakati dengan PT.KAI dimana difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	**Penyuluhan Status Legalitas Untuk Mendukung *Land Clarification*** Berdasarkan hasil observasi, belum pernah dilakukan penyuluhan terkait legalitas lahan ataupun bantuan ataus permasalahan klaim tanah PT KAI. Dilain sisi status tanah warga yang sebagian besar Petok D tidak dapat dinaikkan menjadi SHM atau IMB karena kendala klaim tanah PT KAI dan bangunan turun temurun yang dipetak-petakkan secara mandiri. Sehingga, *Land Clarification* perlu didukung oleh seluruh masyarakat dengan pemberihan penyuluhan.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
15.	Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W2)	**BNPB, 2018** Titik kumpul berupa rambu yang berada di daerah yang terbebas dari segala sesuatu yang menjadi penghalang dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Titik kumpul berada di lokasi yang aman, berada di tempat terbuka yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame serta relatif mudah diakses untuk keperluan pertolongan kedaruratan. Jalur evakuasi berupa jalur untuk menuju titik kumpul yang terbebas dari segala penghalang.	**Menetapkan sistem peringatan bencana** Berdasarkan kondisi eksisting, **titik kumpul dapat berada di taman lingkungan** Kluster III karena terbebas dari bangunan tinggi dan penghalang lainnya, serta **jalur evakuasi diarahkan untuk menuju lokasi tersebut**. Jalur tersebut perlu dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga dapat dijadwalkan simulasi bencana secara rutin atau penyuluhan dari para pakar. Selain itu diberikan papan penanda titik kumpul dan rambu-rambu sepanjang rute jalur evakuasi. Kawasan juga perlu dilengkapi **alat komunikasi berupa kentungan atau sirine.**

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Tabel 4.31. Penyilangan SWOT Klaster III

	Strength (S)	Weakness (W)
	1. Kawasan tertata dengan kepadatan rendah (S1). 2. Sanitasi sudah baik dengan katagori *Limited* (S2) 3. Persampahan baik dengan pengangkutan rutin (S3) 4. Masyarakat partisipatif dalam penanganan kumuh (S4). 5. Kriminalitas rendah menciptakan permukiman yang aman (S5).	1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga berdampak kemiskinan dan IPM (W1). 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi rumah layak huni (W2). 3. Buruknya kondisi drainase mengakibatkan genangan (W3) 4. Tidak tersedia proteksi kebakaran (W4) 5. Tidak tersedia RTH (W5) 6. Kurangnya kesadaran dalam legalitas lahan dan bangunan (W6)
Opportunity (O) 1.Tedapat arahan peningkatan kualitas bangunan (O1). 2.Terdapat arahan peningkatan perkerasan jalan (O2). 3.Terdapat arahan peningkatan kualitas dan kapasitas drainase (O3). 4.Terdapat arahan peningkatan proteksi kebakaran (O4). 5.Terdapat arahan penyediaan RTH (O5). 6.Terdapat arahan insentif dan disinsentif untuk mengawasi kepemilikan status legalitas (O6). 7.Terdapat arahan peningkatan kualitas SDM (O7) 8.Terdapat arahan peningkatan kualitas hidup masyarakat (O8). 9.Terdapat arahan fasilitasi pemenuhan masyarakat dalam Rumah Layak Huni (O9).	**STRATEGI S-O** 1. Memanfaatkan ketersediaan lahan kosong untuk pembangunan taman lingkungan serta menghilangkan WC umum yang sudah lama tidak digunakan (O5, S1, S2). 2. Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan (O2, O3, O4, O10, S4). 3. Melibatkan kelompok masyarakat dalam pelatihan keterampilan dasar yang bernilai ekonomi sehingga meningkatkan kualitas hidup (O7, O8, S4). 4. Menjaga kepadatan lingkungan dengan penyuluhan rutin terkait sanksi bangunan yang melanggar. (S1, O6)	**STRATEGI W-O** 1. Mengadakan pelatihan dasar dengan pendampingan secara rutin untuk mendorong perekonomian (O7, O8, W1). 2. Melakukan penyuluhan terkait pentingnya hunian yang sehat dan layak (O1, O9, W2). 3. Membangun taman lingkungan untuk kegiatan sosialisasi warga (O5, W5). 4. Menyediakan proteksi kebakaran berupa ruang evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, dan hidran. (O4, W4). 5. Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O6, W1, W6).

10. Terdapat arahan peningkatan fasilitas air bersih (O10).		
Threat (T)	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**
1. Terdapat ketidakpastian klaim tanah oleh PT.KAI yang menghambat legalitas bangunan (T1) 2. Belum terdapat kegiatan pengurangan resiko bencana (T2) 3. Syarat administrasi dalam bantuan kesehatan yang cukup kaku membuat eksklusifitas kelompok MBR (T3) 4. Masih terdapat warga dari luar klaster yang membuang sampah di lahan kosong (T4)	1. Melakukan *Land Clarification* antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S4, T1). 2. Membentuk kader relawan yang dilatih oleh professional sehingga tanggap bencana (S4, T2). 3. Menyediakan *Disaster Recovery* berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2). 4. Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan dengan pendampingan serta bantuan administrasi. (S4, T3) 5. Melarang masyarakat untuk membuang sampah di lahan kosong (T4, S3, S4)	1. Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung *Land Clarification* dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W6) 2. Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W4)

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Tabel 4.32. Penjelasan Strategi di Klaster III

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
1.	Memanfaatkan ketersediaan lahan kosong untuk pembangunan taman lingkungan serta menghilangkan WC umum yang sudah lama tidak digunakan (O5, S1, S4).	**RDTR** Diarahkan untuk mendirikan pertamanan lingkungan/ taman RT/ RW sebagai RTH publik sebesar 5%. **RP2KPKP** Taman dapat digunakan sebagai fungsi ekologis dan olahraga. **RPLP** Menyediakan anggaran untuk RTH **Esther, 2017** Penelitian ini mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang dapat mendukung kepuasan pengunjung *public parks* di permukiman padat Hongkong sebagai bagian peremajaan. Aspek tersebut berupa : *mobility*,, *sosial connection*, dan *supporting facilities*. Mobility berupa kemudahan akses untuk mecapai RTH, *social connection* berupa kemudahan interaksi antar generasi dan *supporting facilities* yang diusulkan berupa *sitting area, greenery, sport field, water feature, community garden* dan *toilet.*	**Membangun Taman Lingkungan** Membangun taman di Klaster III tepatnya di RT 21 RW 7 yang memiliki lahan kosong dimana secara eksisting cukup luas dan digunakan untuk timbunan sampah. Dilihat dari aksesibilitas, lokasi tersebut dapat diakses melalaui Jalan Raya Mrutu Kalianyar sehingga cukup mudah diakses oleh penduduk di RT/RW lain.
2.	Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan kualitas prasarana lingkungan (O2, O3, O4, O10, S4).	**RP2KPKP** Diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan penyusunan kebijakan. **RPLP** Dalam penyediaan infrastruktur lingkungan, diarahkan untuk bekerjasama dengan masyarakat. **Pratiwi, 2018** Keterlibatan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh Parit Nenas Kelurahanan Siantan Hulu dilakukan dengan cara : sosialisasi program , melibatkan masyarakat dalam perencanaan menggunakan *mind mapping*, pemetaan swadaya dimana warga bertanggung jawab terkait sarana prasarana di lokasi	**Pelibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan** Tidak berbeda dengan Kluster I dan Kluster II, partisipasi masyarakat juga hanya sebatas partisipasi dalam kerja bakti (pelaksanaan). Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam perumusan atau musyawarah mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di lokasi. Sehingga, untuk membantu perbaikan prasarana dapat **melibatkan peran masyarakat setempat** dengan tujuan mengefisiensikan waktu dan biaya yang dikeluarkan.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
		yang telah ditentukan dan mempercepat implementasi program yang telah dirumuskan agar partisipasi masyarakat tidak menurun.	
3.	Melibatkan kelompok masyarakat dalam pelatihan keterampilan dasar yang bernilai ekonomi sehingga meningkatkan kualitas hidup (O7, O8, S4)	**Elgizawy, 2016** Implementasi ***LEM (Learn to Earn Money)*** di permukiman kumuh sebagai bagian dari ***Zero Waste Concepts*** membagi dua kelompok yang berperan yaitu *Womens Role* (*Women Development Program*) dan *Mens Role* (*Waste Recycling*). Kelompok wanita terdiri dari ibu-ibu, lansia dan disabilitas akan dibekali keterampilan dasar yang mudah dan *mens role* berperan dalam mendaur ulang material bangunan sebagai bahan konstruksi atau dijual kembali.	**Melibatkan Kelompok Ibu-Ibu PKK (*Women Earn Money*)** Berdasarkan hasil observasi, Klaster III memiliki kelompok masyarakat berupa **Ibu-Ibu PKK** yang dapat diberdayakan dengan pelatihan untuk mendorong ekonomi. Hal tersebut sesuai mengingat kelompok PKK didominasi Ibu-Ibu Rumah Tangga umumnya memiliki banyak waktu di rumah dan memiliki ikatan sosial yang cukup kuat.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
4.	Mengadakan pelatihan dasar dengan pendampingan secara rutin untuk mendorong perekonomian (O7, O8, W1)	**Elzigawy, 2016** *Women Development Program* difokuskan pada kegiatan-kegiatan kecil yang dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal untuk membuat komunitas tersebut (ibu-ibu, lansia dan disabilitas) merasa nyaman. Adapun pelatihan yang diberikan berupa *basic skill* yang membutuhkan sedikit pelatihan, seperti menjahit, menenun, *rooftop gardening*, menanam jamur, beternak hewan dan menjualnya serta kegiatan lainnya.	**Pelatihan dan Pendampingan Keterampilan Dasar** Berdasarkan hasil analisis, Klaster III memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah yaitu tidak lulus pendidikan dasar. Selain itu, juga ditemukan cukup banyak responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga pelatihan yang diberikan tidak hanya dilakukan secara verbal, melainkan melalui upaya pendampingan dalam Program *Women Earn Money*. Berdasarkan literatur, *skill* dasar yang dapat dilatih berupa menjahit, menenun, bertanam dan beternak hewan. Dari kegiatan tersebut, kegiatan bertanam dapat diterapkan mengingat tidak memerlukan terlalu banyak modal seperti menjahit dan beternak. Selain itu, hasil tanam dari program ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk diversifikasi produk makanan di Klaster II. Dilain sisi, program Bank Sampah di Klaster II dapat memberikan pasokan pupuk dari olahan sampah organik.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
5.	Menjaga kepadatan lingkungan dengan penyuluhan rutin terkait sanksi bangunan yang melanggar. (S1, O6)	**RDTR** Diarahkan untuk menjaga kepadatan eksisting dan lebih diarahkan untuk pembangunan rumah vertikal. **RP2KPKP** Diarahkan untuk menjaga jarak antar bangunan **RPLP** Mengawasi perizinan bangunan dengan sistem *reward and punishment*.	**Menjaga kepadatan dengan penyuluhan** Berdasarkan kondisi eksisting, Klaster III memiliki kawasan yang lebih tertata dengan kepadatan paling rendah dibandingkan Klaster I dan Klaster II. Namun masih terdapat bangunan turun temurun yang dipetak-petakkan menjadi beberapa rumah. Karena permukiman kumuh Wonokusumo didominasi oleh bangunan yang tidak bersertifikat, pemberlakuan pajak yang tinggi tidak dapat dilakukan. Sehingga, langkah awal yang dapat dilakukan berupa penyuluhan rutin terkait pelanggaran bangunan terutama yang menggunakan badan jalan beserta sanksi yang dapat menjerat penghuni.
6.	Melakukan penyuluhan terkait pentingnya hunian yang sehat dan layak (O1, O9, W2).	**RP2KPKP** Masyarakat diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahannya. **RPLP** Diarahkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan rumah yang layak	**Penyuluhan Pentingnya Rumah Layak Huni** Melakukan penyuluhan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah layak huni. Dalam hal ini kemampuan layak huni berkaitan dengan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hunian. Sehingga penyuluhan dilakukan dengan memotivasi warga untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
7.	Membangun taman lingkungan untuk kegiatan sosialisasi warga (O5, W5).	**Esther, 2017** Penelitian ini mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang dapat mendukung kepuasan pengunjung *public parks* di permukiman padat Hongkong sebagai bagian peremajaan. Aspek tersebut berupa : *mobility*,, *sosial connection*, dan *supporting facilities*. Mobility berupa kemudahan akses untuk mecapai RTH, *social connection* berupa kemudahan interaksi antar generasi dan *supporting facilities* yang diusulkan berupa *sitting area, greenery, sport field, water feature, community garden* dan *toilet.*	**Membangun taman lingkungan sebagai sarana interaksi dan sosialisasi** Membangun taman lingkungan yang dapat digunakan untuk sarana interaksi yang dilengkapi *sitting area, greenery, sport field*, dan fitur lainnya.
10.	Menyediakan proteksi kebakaran berupa ruang evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, dan hidran. (O4, W4).	**RDTR** Diarahkan untuk menyediakan ruang dan jalur evakuasi kebakaran, menyediakan hidran di setiap lingkungan, dan sumur kebakaran/ reservoir air. **RP2KPKP** Diarahkan untuk menyediakan hidran, sumur kebakaran/ reservoir air, jalur dan ruang evakuasi, dan melatih masyarakat. **RPLP** Diarahkan untuk menyediakan lapangan, hidran, sumur kebakaran/ reservoir air, dan Apar. **Wahyudi, 2019** Penyediaan proteksi kebakaran di permukiman kumuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman berupa penyediaan hidran yang diletakkan di tengah kawasan kumuh, penyediaan akses jalan yang dapat dilewati kendaraan, dan menyediakan alat komunikasi berupa kentungan dan sirine.	**Menyediakan sarana prasarana kebakaran** Menyediakan **ruang evakuasi** berupa taman lingkungan dan **jalur evakuasi** berupa rute jalur yang menuju ruang evakuasi tersebut. Selain itu, disediakan **hidran** yang berada di sekitar taman lingkungan atas pertimbangan lokasi tersebut dapat diakses melalui Jalan Raya Mrutu Kalianyar.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
11.	Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O6, W1, W6).	**RDTR** Diarahkan untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan **RP2KPKP** Diarahkan untuk memantau izin mendirikan bangunan **RPLP** Diarahkan untuk mengawasi IMB dengan sistem *reward and punishment*	**Pengawasan Penerbitan Izin bangunan dan Fasilitasi Pengurusan Izin Bangunan Komunal** Berdasarkan hasil observasi, masyarakat enggan mengurus izin bangunan karena harus mengurus dari awal (dari proses pengukuran) dimana bangunannya telah dipetak-petakkan menjadi dua atau lebih bangunan. Akibatnya akan menghabiskan waktu serta biaya yang besar. Sehingga, pengawasan penerbitan izin bangunan dan bantuan pengurusan izin bangunan secara komunal dapat membantu permasalahan tersebut.
13	Melakukan Land Clarification antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S4, T1).	**Hariyanti, 2008** Pada penanganan klaim tanah aset PT. KAI yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan cara masyarakat memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai, dimana hak pengelolaan atas tanah tetap dimiliki PT KAI.	**Melakukan *Land Clarification* berupa kesepakatan antara masyarakat dan PT. KAI** Menurut informasi dari masyarakat, beberapa penolakan pengurusan izin legalitas bangunan disebabkan adanya klaim PT.KAI secara bersamaan. Sehingga, diperlukan ***Land Clarification* berupa kesepakatan atau MoU** antara masyarakat dan PT.KAI terlebih dahulu dengan **difasilitasi pemerintah** sebelum mengajukan izin ke BPN. Hal tersebut mengingat landasan klaim tanah PT.KAI berupa *groundchart***(*)** atau peta bidang tahun 1996 dan beberapa masyarakat pun memiliki Petok D(**). **(*)** *Groundchart* merupakan peta aset tanah pemerintah dalam hal ini BUMN dimana memuat batas-batas tanah secara historis (pada zaman kolonial). **(**)** Petok D adalah surat hak atas tanah dimana sebagai bukti pembayaran pajak yang biasanya diwariskan secara turun-temurun.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
14.	Membentuk kader relawan yang dilatih oleh professional sehingga tanggap bencana (S4, T2).	**Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011** Relawan bencana berperan dalam : pelatihan bersama masyarakat, penyuluhan, pengadaan informasi bencana, peningkatan kewaspadaan masyarakat, membantu evakuasi warga dan kegiatan lain terkait kedaruratan. **Kankanamage, 2019** Kegiatan relawan bencana dalam penelitian ini menggunakan *social media* berupa penyebaran informasi, merekrut relawan tambahan dari lokasi lain, membentuk forum *online* dan penggalangan dana jika terjadi bencana	**Membentuk relawan yang dilatih Profesional** Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak didapatkan proteksi bencana, sosialisasi ataupun relawan bencana. Sehingga kondisi sangat rentan terutama jika terjadi bencana sewaktu-waktu. Sehingga **diperlukan relawan** yang diharapkan membantu mengamankan warga. Kelompok relawan tersebut dapat dibentuk dari **Kelompok Karang Taruna** dimana bertugas dalam edukasi dan sosialisasi warga terhadap tanggap bencana, membantu evakuasi warga saat bencana, dan meningkatkan kewaspadaan bencana di lingkungan permukiman. Kelompok tersebut juga dapat mengadakan *online forum* sebagai *platform* untuk koordinasi antar relawan dan membantu penyebaran informasi bencana.
15.	Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan dengan pendampingan serta bantuan administrasi. (S4, T3).	**Suhaila, 2017** Untuk meningkatkan implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara dilakukan dengan cara : 1. Kejelasan administrasai BPJS secara *lift live* kepada masyarakat berupa poster untuk memperoleh informasi. 2. Bantuan finansial dengan melakukan pelayanan berobat dahulu baru anggaran dana keluar dan PBI (Penerima bantuan iuran) dari pemerintah bagi golongan fakir miskin, orang tidak mampu, dan penderita cacat total.	**Perluasan akses kesehatan** Berdasarkan kondisi eksisting, sudah terdapat bantuan akses kesehatan seperti BPJS dan KIS. Namun, beberapa bantuan tersebut terblokir karena persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh beberapa kelompok MBR, seperti pembayaran iuran, persyaratan KTP setempat, kondisi rumah tinggal yang dibuktikan dengan dokumentasi dan lainnya. Sehingga perlu dilakukan bantuan kepengurusan syarat administrasi bagi MBR yang sudah terbukti tinggal di permukiman kumuh Wonokusumo.
16.	Melarang masyarakat untuk membuang sampah di lahan kosong (T4, S3, S4).	**RDTR** Diarahkan untuk menyediakan sarana prasarana dan mengelola sampah agar meminimalisir timbunan. **RP2KPKP** Diarahkan untuk menyediakan sarana prasarana persampahan dan mengelola sampah secara mandiri	**Pelarangan Membuang Sampah di Lahan Kosong** Berdasarkan hasil observasi, secara eksisting lahan kosong di Kluster III mengalami penumpukkan sampah akibat beberapa RT tidak dapat dilewati pengangkutan sampah. Sehingga diperlukan **pelarangan membuang sampah** di lahan kosong

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
		RPLP Diarahkan untuk meningkatan sarana prasarana persampahan dan mengelola sampah berbasis 3R. **Wibisono, 2014** Pada permasalahan membuang sampah sembarangan di Dusun Deles Desa Jogonayan dilakukan dengan sosialisasi, menyebarkan brosur tentang bahaya membuang sampah sembarangan dan brosusr penggolongan sampah.	dengan cara **sosialisasi, peletakkan tanda pelarangan membuang sampah, dan membangun Bank Sampah yang direncanakan di Klaster II.**
17.	Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung Land Clarification dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W6).	**RPLP** Diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan izin bangunan **Hariyanti, 2008** Pada penanganan klaim tanah aset PT. KAI yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan saran/ masukan sebagai materi yang akan disepakati dengan PT.KAI dimana difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.	**Penyuluhan Status Legalitas Untuk Mendukung *Land Clarification*** Berdasarkan hasil observasi, belum pernah dilakukan penyuluhan terkait legalitas lahan ataupun bantuan ataus permasalahan klaim tanah PT KAI. Dilain sisi status tanah warga yang sebagian besar Petok D tidak dapat dinaikkan menjadi SHM atau IMB karena kendala klaim tanah PT KAI dan bangunan turun temurun yang dipetak-petakkan secara mandiri. Sehingga, *Land Clarification* perlu didukung oleh seluruh masyarakat dengan pemberihan penyuluhan.

No	Strategi	Literatur/ *Best Practice*	Penjelasan
18.	Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W4)	**BNPB, 2018** Titik kumpul berupa rambu yang berada di daerah yang terbebas dari segala sesuatu yang menjadi penghalang dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Titik kumpul berada di lokasi yang aman, berada di tempat terbuka yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame serta relatif mudah diakses untuk keperluan pertolongan kedaruratan. Jalur evakuasi berupa jalur untuk menuju titik kumpul yang terbebas dari segala penghalang.	**Menetapkan sistem peringatan bencana** Berdasarkan kondisi eksisting, **titik kumpul dapat berada di taman lingkungan** Kluster III karena terbebas dari bangunan tinggi dan penghalang lainnya, serta **jalur evakuasi diarahkan untuk menuju lokasi tersebut**. Jalur tersebut perlu dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga dapat dijadwalkan simulasi bencana secara rutin atau penyuluhan dari para pakar. Selain itu diberikan papan penanda titik kumpul dan rambu-rambu sepanjang rute jalur evakuasi. Kawasan juga perlu dilengkapi **alat komunikasi berupa kentungan atau sirine.**
19	Menyediakan Disaster Recovery berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2).	**Sukmana, 2016** Pada *Post-Disaster Recovery* Permukiman di Kecamatan Porong Sidoarjo dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Program bantuan sosial dengan melaksanakan pengawasan dan pemantauan evakuasi warga terdampak 2. Perlindungan sosial dengan bentuk fasilitasi ganti rugi dan jual beli tanah dan bangunan, penanganan kompensasi gagal panen, kompensasi perusahaan yang berhenti beroperasi, kompensasi UKM dan penanganan unjuk rasa. 3. Pemulihan sosial, dengan bentuk konseling bagi masyarakat yang mengalami goncangan psikososial.	***Disaster Recovery* Berupa Kesiapan Dana Untuk Bantuan Sosial Pasca Bencana** Bencana yang mengancam kawasan permukiman kumuh Wonokusumo berupa kebakaran dan rawan genanganan. Sehingga kesiapan dana disiapkan sebagai bentuk *Disaster Recovery* jika sewaktu-waktu bencana tersebut terjadi.

Sumber: Analisa Penulis, 2020

4.4.3. Tahap Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil analisis SWOT masing-masing klaster, dapat disimpulkan strategi peremajaan permukiman kumuh sebagai berikut.

Tabel 4.33. Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh Klaster I, Klaster II dan Klaster III

Aspek	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Persampahan	Meningkatkan biaya retribusi sampah agar pengangkutan sampah bersedia menjangkau kawasan yang sulit dilewati (S3, S4, O4).	Membangun *bank sampah* dengan kegiatan daur ulang (O2, W8).	Melarang masyarakat untuk membuang sampah di lahan kosong (T4, S3, S4).
	Mengurangi timbunan sampah dengan pemilahan sampah mandiri yang dapat dikordinir oleh Ibu-Ibu PKK atau Kelompok Jentik (O4, W3).	Membentuk kader yang dapat mendukung keberadaan *bank sampah* dengan mengelola dan mendaur ulang sampah (O2, S1, S6).	
Partisipasi Masyarkat	Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan (O3, O4, O5, O9, S4)	Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan (O2, O3, S4)	Melibatkan peran masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan (O2, O3, O4, O10, S4).
Kepadatan dan Keteraturan Bangunan	Pemberian langkah disinsentif berupa teguran, penyuluhan terkait kategori pelanggaran dan sanksi yang dapat menjerat, serta evaluasi terkait himbauan yang telah dilakukan sebelumnya (S3, S4, O1, O2, O7).	Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O1, O5, W4, W6).	Menjaga kepadatan lingkungan dengan penyuluhan rutin terkait sanksi bangunan yang melanggar. (S1, O6)
	Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O2, O7, W1, W6).		Pengawasan penerbitan izin bangunan dan memfasilitasi pengurusan izin bangunan secara komunal (O6, W1, W6).
Legalitas Bangunan	Melakukan Land Clarification antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S4, T1).	Melakukan Land Clarification antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S1, S4, T1)	Melakukan Land Clarification antara pemerintah, masyarakat dan PT.KAI yang mengenai klaim tanah di Wonokusumo (S4, T1).
	Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung Land	Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung Land	Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya status legalitas sehingga masyarakat dapat mendukung Land

Aspek	Klaster I	Klaster II	Klaster III
	Clarification dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W6).	Clarification dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W4).	Clarification dengan PT.KAI dan pemerintah. (T1, W6).
Keamanan Lokasi Hunian dan RTH	Melindungi kawasan sempadan SUTT yang digunakan untuk permukiman warga dengan membangun RTH pasif (O1, O6, W1, W2, W5).	Menyediakan *vertical garden* (O4, W3, W6)	Memanfaatkan ketersediaan lahan kosong untuk pembangunan taman lingkungan serta menghilangkan WC umum yang sudah lama tidak digunakan (O5, S1, S2).
			Membangun taman lingkungan untuk kegiatan sosialisasi warga (O5, W5).
Proteksi Bencana	Menyediakan proteksi kebakaran berupa jalur evakuasi dan APAR (O5, W4).	Menyediakan proteksi kebakaran berupa jalur evakuasi dan APAR (O3, W2)	Menyediakan proteksi kebakaran berupa ruang evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, dan hidran (O4, W4).
	Membentuk kader relawan yang dilatih oleh professional sehingga tanggap bencana (S4, T2).	Membentuk kader relawan yang dilatih oleh professional sehingga tanggap bencana (S4, T2).	Membentuk kader relawan yang dilatih oleh professional sehingga tanggap bencana (S4, T2).
	Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W4).	Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W2)	Menyediakan simulasi dan sistem peringatan bencana berupa arahan jalur evakuasi dan alat komunikasi sebagai peringatan saat bencana berupa kentungan atau sirine (T2, W4)
	Menyediakan Disaster Recovery berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2).	Menyediakan Disaster Recovery berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2).	Menyediakan Disaster Recovery berupa kesiapan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana (S4, T2).
Akses Kesehatan	Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan dengan pendampingan serta bantuan administrasi. (S4, T3).	Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan dengan pendampingan serta bantuan administrasi. (S4, T3).	Memperluas akses kesehatan untuk MBR yang terbukti tinggal di kawasan dengan pendampingan serta bantuan administrasi. (S4, T3).
Kriminalitas	Membentuk satuan keamanan dan fasilitas pengamanan untuk mencegah tindak kriminal (S4, O8)	Membentuk satuan keamanan untuk mencegah tindak kriminal (O6, S4).	(Kriminalitas Klaster III tergolong rendah sehingga kondisi tersebut sudah cukup aman bagi warganya)
	Melengkapi perabot jalan seperti lampu penerangan (O3, O8, W3, W8)	Penyuluhan hidup sehat dan bahaya penggunaan obat-obatan terlarang (O6, W7)	

Aspek	Klaster I	Klaster II	Klaster III
Ekonomi	(Kondisi SDM dan Ekonomi Klaster I tergolong baik)	Meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat dengan berinovasi dalam produk usaha rumahan (O7, S1).	Mengadakan pelatihan dasar dengan pendampingan secara rutin untuk mendorong perekonomian (O7, O8, W1)
		Meningkatkan perekonomian berupa perluasan pasar dalam memaksimalkan usaha rumahan dengan penguatan *e commerce*, dimana sudah terdapat potensi penjualan secara *online* mengingat lahan terbatas untuk sentra produksi dan pemasaran (O7, W1, W6).	Melibatkan kelompok masyarakat dengan keterampilan dasar yang bernilai ekonomi sehingga meningkatkan kualitas hidup (O7, O8, S4)
			Melakukan penyuluhan terkait pentingnya kepemilikan hunian yang sehat dan layak (O1, O9, W2).

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Berdasarkan strategi peremajaan permukiman berdasarkan SDGs Goals 11 tersebut, berikut perbandingannya dengan rencana atau program permukiman yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Tabel 4.34. Nilai Tambah Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh Berdasarkan Prinsip SDGs

Aspek	Program Rencana Permukiman	Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh berdasarkan Prinsip SDGs
Persampahan	Pengelolaan persampahan pada **skala kota**	Strategi yang dirumuskan pada **skala RT** dimana masing-masing Klaster memiliki strategi yang berbeda namun saling bekerjasama
	Belum menyebutkan **lokasi** penyelenggaraan program/ rencana	Menyebutkan **lokasi** diterapkannya strategi berdasarkan karakteristik masing-masing Klaster
	Belum melibatkan **kelompok masyarakat** dalam pengelolaan persampahan	Melibatkan **kelompok masyarakat** dalam pengelolaan persampahan
Partisipasi Masyarakat	Rencana hanya menyebutkan **peningkatan partisipasi.**	Peningkatan partisipasi pada perbaikan prasarana lingkungan.
Kepadatan dan Keteraturan Bangunan	Rencana yang dirumuskan berupa **perbaikan fisik** yaitu rehab rumah dimana tidak dirumuskan program insentif dan disinsentif.	Strategi yang dirumuskan berupa **jenis insentif dan disinsentif** yang dapat diterapkah untuk kepadatan dan keteraturan bangunan.

Aspek	Program Rencana Permukiman	Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh berdasarkan Prinsip SDGs
Legalitas Bangunan	Belum disebutkan atau dirumuskan rencana penanganan **klaim tanah PT.KAI** yang menjadi penghambat legalitas bangunan.	Merumuskan **strategi untuk masalah klaim tanah** oleh PT.KAI dengan melibatkan peran masyarakat, pemerintah dan PT.KAI itu sendiri.
Keamanan Lokasi Hunian dan RTH	Tidak ditemukan rencana perlindungan **sempadan SUTT**	Variabel lokasi keamanan bermukim menghasilkan **strategi perlindungan sempadan SUTT.**
Proteksi Bencana	Hanya menyebutkan pengadaan **alat proteksi kebakaran** dan tidak **menyebutkan lokasi** diterapkannya rencana	Strategi yang dihasilkan berupa **bentuk ruang evakuasi dan jalur evakuasi, alat komunikasi kebakaran** beserta **lokasi penerapannya.**
	Tidak merumuskan rencana **kesiapsiagaan dan *disaster recovery*.**	Merumuskan strategi **kesiapsiagaan dan *disaster recovery.***
	Tidak melibatkan **peran masyarakat/ komunitas** dalam rencana proteksi kebakaran	Melibatkan **peran masyarakat/ komunitas**.

Aspek	Program Rencana Permukiman	Strategi Peremajaan Permukiman Kumuh berdasarkan Prinsip SDGs
Akses Kesehatan	Rencana berupa **keterjangkauan dan perbaikan fisik.**	Strategi mempertimbangkan **fisik dan non fisik** (**akses semua kelompok masyarakat terhadap sarana kesehatan**).
Kriminalitas	Rencana hanya berupa **peningkatan keamanan** (belum dispesifikkan bagaimana peningkatan tersebut dilakukan ataupun lokasi penerapannya).	Strategi lebih spesifik dimana berdasarkan **jenis kriminalias** beserta lokasi penerapannya.
Ekonomi	Rencana hanya berupa **peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat** (belum dispesifikkan bagaimana peningkatan atau pemberdayaan tersebut dilakukan)	Strategi lebih spesifik dimana peningkatan ekonomi **berdasarkan kemampuan masyarakatnya** (tingkat pendidikan dan tingkat pendapatannya). Sehingga menghasilkan peningkatan kualitas hidup serta pemberdayaan yang berbeda.

Sumber: Analisa Penulis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Permukiman kumuh di Kelurahan Wonokusumo memiliki luas tertinggi dibandingkan kawasan lain di Surabaya dan menduduki Prioritas I dalam penanganannya masih memiliki permasalahan yang mengancam pencapaian SDGs Goals 11. Dilihat dari tingkat kekumuhannya, Kelurahan Wonokusumo tergolong kumuh sedang sehingga perlu dilakukan upaya peremajaan dengan penanganan secara fisik dan non fisik sesuai prinsip *Goals 11 SDGs.*
2. Peremajaan permukiman kumuh Wonokusumo diklasifikasikan dalam tiga klaster untuk menghasilkan strategi sesuai kesamaan karakteristik, yaitu Klaster I (RW 7 RT 1, 2, 4, 5, 8, 11, RW 15 RT 2-5, dan RW 6 RT6), Klaster II (RW 7 RT 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, dan RW 6 RT 5), serta Klaster III (RW 7 RT 18 dan RT 21). Klaster I memiliki permasalahan dalam keteraturan bangunan, kepadatan, keamanan lokasi hunian, persampahan, proteksi kebakaran, ketersediaan RTH, status kepemilikan lahan dan bangunan, dan kriminalitas. Klaster II memiliki permasalahan dalam kepadatan bangunan, persampahan, proteksi kebakaran, ketersediaan RTH, status kepemilikan lahan dan bangunan, kriminalitas, kemiskinan, dan tingkat pendapatan. Sedangkan, Klaster III memiliki permasalahan dalam kualitas bangunan, keamanan lokasi hunian, proteksi kebakaran, ketersediaan RTH, status kepemilikan lahan dan bangunan, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, kemampuan pemenuhan rumah layak huni, dan tingkat pendapatan.

3. Keseluruhan peluang dan tantangan penanganan kumuh di Wonokusumo hampir sama, dimana dilihat dari kebijakan dalam aspek fisik secara umum sudah diatur untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Tantangan yang terdapat di ketiga Klaster juga hampir sama, yaitu berupa klaim tanah PT.KAI, tidak terdapat pengurangan resiko bencana, dan eksklusifitas MBR dalam akses kesehatan. Adapun tantangan di Klaster III terdapat perbedaan berupa warga dari kawasan lain membuang sampah di lahan kosong yang tersedia.
4. Klaster I memerlukan strategi berupa peningkatan biaya retribusi sampah dan pemilahan sampah yang dapat diberikan kepada Bank Sampah yang direncanakan di Klaster II. Pada prasarana lingkungan perlu dilibatkan peran masyarakat. Selain itu, diperlukan disinsentif berupa teguran, penyuluhan, evaluasi serta pengawasan penerbitan izin bangunan. Dirumuskan juga insentif berupa perumusan izin bangunan secara komunal. Sama halnya dengan Klaster II dan III, dirumuskan strategi *Land Clarification* yang didukung dengan penyuluhan untuk permasalahan klaim tanah PT.KAI. Selain itu, perlu dibangun RTH pasif untuk melindunggi sempadan SUTT dan perlindungan bencana berupa jalur evakuasi, APAR, kader relawan, simulasi dan sistem peringatan bencana dan kesiapan dana bantuan untuk *disaster recovery*. Eksklusifitas MBR diatasi dengan perluasan akses dengan pendampingan dan bantuan administrasi. Sedangkan, kriminalitas Klaster I berupa *street crime* dirumuskan strategi berupa pembentukan satuan keamanan, fasilitas pengamanan dan melengkapi perabot jalan berupa lampu penerangan.
5. Klaster II direncanakan untuk pengadaan sampah yang disertai kader untuk mendaur ulang sampah, pelibatan masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan, *Land Clarification* permasalahan klaim tanah PT.KAI yang didukung penyuluhan, penyediaan

vertical garden, serta penyediaan proteksi bencana berupa jalur evakuasi, APAR, kader relawan, simulasi dan sistem peringatan bencana, dan kesiapan dana untuk *disaster* recovery. Selain itu dirumuskan strategi perluasan akses kesehatan MBR dengan pendampingan dan bantuan administrasi, pengurangan kriminalitas dengan pembentukan satuan keamanan dan penyuluhan hidup sehat, serta peningkatan ekonomi dengan meningkatkan keterampilan inovasi produk usaha rumahan serta perluasan pasar dengan *e* commerce.

6. Klaster III dirumuskan strategi untuk memanfaatkan lahan kosong dengan pembangunan taman lingkungan dan sebagai ruang evakuasi bencana serta mengurangi lahan untuk menimbun sampah di kluster tersebut. Kluster III juga direncanakan untuk menjaga kepadatan dan keteraturan bangunan dengan penyuluhan rutin serta pengawasan penerbitan izin bangunn. Selain itu, klaster III dirumuskan untuk melibatkan masyarakat dalam perbaikan prasarana lingkungan, *Land Clarification* untuk permasalahan klaim tanah PT.KAI yang ditunjang penyuluhan, penyediaan proteksi bencana dengan ruang evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, hidran, kader relawan, simulasi dan sistem peringatan bencana, dan kesiapan dana untuk *disaster recovery*. Selain itu dirumuskan strategi perluasan akses kesehatan MBR dengan pendampingan dan bantuan administrasi, serta peningkatan ekonomi dengan pelatihan dasar dan pendampingan rutin.

5.2. Saran

Rekomendasi yang diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Dalam melaksanakan strategi-strategi peremajaan tersebut, perlu adanya penanganan bagi masyarakat terdampak seperti hunian sementara dan ganti rugi.

2. **Penelitian lanjutan:**
   a. Perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai kesiapan secara sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat serta pihak lain yang terkait terutama pemerintah terhadap strategi yang telah dirumuskan.
   b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan permukiman ditinjau dari peluang dan tantangan sebagai masukkan untuk mencegah adanya permukiman kumuh baru.
   c. Dapat dilakukan penelitian peremajaan kumuh wilayah lain dengan prinsip-prinsip keberlanjutan pada SDGs Goals 11.

DAFTAR PUSTAKA

Almaden, Catherine Rowen. (2014). Housing Affordability Challenges: the Case of the Median Income Households in Cagayan de Oro City Philippines. *Journal of Hummanities and Social Science Vol.4 No.10.* Filipina: Xavier University.

Amirullah. (2015). Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis dan Teknik). Malang: Bayumedia Publishing Malang.

Arafat, Gusti Yasser. (2018). Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. *Jurnal Alhadharah Vol.17 No.33.* Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.

Asa, Diana Margaretha. (2015). Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. Skripsi. Malang: Institut Teknologi Nasional Malang.

As'ari, Ruli., & Fadjarani, Siti. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi Vol. 15 No. 1.* Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Asia-Pacific Economic Cooperation. (2013). APEC Building Codes, Regulations, and Standards.

Aulia, Rizky., & Santosa, Happy Ratna. (2013). Alternatif Desain Properti di Kawasan Kota yang Diminati Masyarakat Menengah ke Atas). *Jurnal Sains dan Seni POMITS Vol.1 No.2.* Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. (2017) . Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2017.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

Badan Pusat Statistik. (2012). Kecamatan Semampir dalam Angka 2012. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik. (2013). Kecamatan Semampir dalam Angka 2013. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik. (2014). Kecamatan Semampir dalam Angka 2014. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik. (2015). Kecamatan Semampir dalam Angka 2015. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik. (2016). Kecamatan Semampir dalam Angka 2016. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik. (2017). Kecamatan Semampir dalam Angka 2017. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik. (2018). Kecamatan Semampir dalam Angka 2018. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Badmos, Olabisi. (2020). Determinants Of Residential Location Choices By Slum Dwellers In Lagos Megacity. *Jurnal Cities Vol. 98*. Germany: *Elsevier.Ltd*.

Beddu, Syarif., & Yahya, M. (2015). Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Penataan Bangunan dan Lingkungan Studi Kasus Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.*Jurnal Unhas.* Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.

Creswell, John W. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Edition 4. Singapura: SAGE Publication Inc.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2018-2038.

Ervianto, Wulfram I., & Felasari, Sushardjanti. (2019). Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan. *Jurnal Spektran Vol.7 No.2*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fathia, Annisa Nur., dkk. (2016). Analsis Klaster Kecamatan di Kabupaten Semarang Berdasarkan Potensi Desa Menggunakan

Metode Ward dan Single Linkage. *Jurnal GAUSSIAN Vol. 5 No.4.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Fauzi, Akhmad., & Oxtanianus, Alex. (2014). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol.30 No.1. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Feil, Alexandre Andre., & Schreiber, Dusan. (2017). Sustainability and Sustainable Development: Unraveling Overlays And Scope Of Their Meanings.*Cad EBAPE BR Vol.14 no.3.* Brazil: Universidade do Vale do Taquari.

Fitria, Niken., & Setiawan, Rulli Pratiwi. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik POMITS Vol.3 No.2.* Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Foye, Chris. (2017). The Relationship Between Size of Living Space and Subjective Well-Being. *Journal Happiness Stud.* Singapore: Springer.

Gomis, Alexis Jacobo., dkk. (2010). Rethinking The Concept of Sustainability. *Journal of Business and Society Vol.116 No,2.* Valencia: Institute for Ethics in Communication and Organizations.

Handryant, Aisyah Nur. (2011). Permukiman Kumuh, Sebuah Kegagalan Pemenuhan Aspek Permukiman Islami. *Journal of Islamic Architecture Vol.1 No.3.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hariyanti, Septi. (2008). Penanganan Masalah Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang Dikuasai Masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hariyanto, Asep. (2007). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang).

Jurnal Perencanaan Wilayan dan Kota Vol. 7 No.2. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Hermanislamet, Bondan. (1993). Pembangunan Permukiman Menuju Keseimbangan Desa-Kota. *Journal of Regional and City Planning Vol.4 No.9b*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Istikasari, May., & Khadiyanto, Parfi. (2014). Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi. *Jurnal Ruang Vol. 2 No.4*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jaya, Askar. (2004). Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Kankanamge, Nayomi., dkk. (2019). Can Volunteer Crowdsourcing Reduce Disaster Risk? A Systematic Review Of The Literature. *International Journal of Disaster Risk Reduction Vol.35*. Australia: Elsevier Ltd.

Klarin, Tomislav. (2018). The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. *Journal of Economics and Business Vol.21 No.1*. Kroasia: University of Zagreb.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2006). Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh 2006.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2008). Peraturan Menteri Negera Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Wonokusumo Tahun 2018.

Krisandriyana, Maresty., dkk. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Jurnal Desa-Kota Vol.1 No.1*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kristiani, Indah. (1994). Peranan Petok D Dalam Proses Pendaftaran Tanah. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Latanratu, Sri Haryatati. (2012). Pengendalian Permukiman Kumuh di Sekitar Tanggul Sungai Je'Neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa. Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Marsh, Emily., & White, Marllyn Domas. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. *Journal of IDEALS Vol. 55 No.1*. US: University of Maryland.

Mentari, Dwi May., & Djoeffan, Sri Hidayati. (2018). Peremajaan Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung). *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Muhadjir, Noeng. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Musthofa, Zaini. (2011). Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh Studi Kasus Program Relokasi Permukiman di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pramono, Joko., & Kinasih, Wulan. (2018). Optimalisasi Peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.3 No.1.* Surakarta: Universitas Slamet Riyadi.

Prasetyo, Adi. (2009). Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pratiwi, Sari Aji., dkk. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Parit Nenas Kelurahan Siantan Hulu.*Jurnal Teknik Sipil Vol. 5 No.2.* Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Rachman, Hamzah Fatur. (2010). Kajian Pola Spasial Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rachmad, Dwi Sasono. (2020). Klasifikasi Pada Tempat Tinggal Menurut Provinsi dan Jenis Kepemilikan Berdasarkan Algoritma K-Means. *STRING Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi Vol.4 No.3.* Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Rahmatsyah. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Lampung Utara. Thesis. Jakarta: Universitas Terbuka.

Ramadhana, Ainun Nurma & Prakoso, Bambang Sriyanto. (2018). Analisis Keterediaan dan Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Metro. *Jurnal Bumi Indonesia Vol. 7 No.3.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rattekarua, Lucky Mutiara., & Widjonarko. (2017). Pola Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bandarharjo. *Jurnal Teknik PWK*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rejeki, Sri. (2006). Karakteristik Permukiman Sekitar Koridor SUTT. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Solehati, Dini., dkk. (2017). Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Gampong Telaha Tujuh Kota Langsa Aceh. *Jurnal Teknik Sipil Vol.1 No.2*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Schwartz, Mary., & Wilson, Ellen. (2018). Who Can Afford To Live in a Home?: A Look at data From the 2006 American Community Survey. US: US Bureau.

SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

SNI 03-1735-2000 mengenai Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.

Suhaila, Choiri. (2017). Implementasi Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sirnayatin, Titin Ariska. (2017). Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sejarah. Susunan Artikel Pendidikan Vol.1 No.3. Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI.

Sugiharto., & Lestari, Rina. (2015). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polretabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.2 No.2.* Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sunarti., dkk. (2019). Spatial Assessment of Slum Area in Jepara City from Physical and Non-Physical Aspects Perspective. *Journal of Earth and Environmental Science Vol. 313.* Semarang: Institue of Physics (IOP Conference).

Suprapti., dkk. (2012). Pelanggaran Perluasan Bangunan di Kompleks Perumahan di Kota Surabaya Ditinjau dari Peraturan tentang Garis Sempadan Bangunan. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH) Vol.5 No.1.* Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Suud, Barno., & Navitas, Prananda. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. *Jurnal Teknik POMITS Vol.4 No.1.* Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Sukmana, Oman. (2016). Proses Pemulihan Pascabencana berdasarkan Model Permukiman Sosial. *Jurnal PKS Vol.15 No.4.* Jakarta: Kementrian Sosial.

Syam, Muhajir. (2017). Identifikasi Kawasan Kumuh Dan Strategi Penanganannya Pada Permukiman Di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tamara, Mitha Ayu., & Kurniawan, Andri. (2018). Skripsi. Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (Street Crime) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Teferi, Zafi Assefa., & Newman, Peter. (2017). Slum Regeneration and Sustainability: Applying the Extended Metabolism Model and the SDGs. *Journals of Sustainability Vol.9 No.12.* Curtin: Curtin University.

Uddin, Nasir. (2018). Assessing Urban Sustainability Of Slum Settlements In Bangladesh: Evidence From Chittagong City. *Journal of Urban Management Vol.7.* Bangladesh: Elsevier.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

United Nations. (2019). The Sustainable Development Goals Report 2019.

UN Habitat. (2015). Sustainable Development Goals 11 A Guide to Assist National and Local Governments to Monitor and Report on SDG Goal 11 Indicator.

UN Habitat. (2016). Slum Almanac 2015/2016 Tracking Improvement in the Lives of Slum Dwellers.

UNICEF (2019). Ensure Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation for All.

Wahyudi, Bayu., dkk. (2019). Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Pasir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. *Jurnal Teknik Sipil Vol.2 No.3*. Padang: Universitas Bung Hatta.

WHO. (2017). Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene.

Wibawa, Wardana., & Alwin. (2019). Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Penerapan Konsep Ecovillage. *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan Vol.3 No.1*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Widiyanto, Agnes Fitria., dkk. (2015). Pendampingan Kelompok PKK dalam Usaha Optimalisasi Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Domestik Menuju Desa Mandiri Sampah. *Jurnal Kesmasindo Vol.7 No.2*. Purwakarta: Universitas Jenderal Soedirman.

Wilandari, Anindita., & Sulistyarso, Haryo. (2017). Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi. *Jurnal Teknik ITS Vol. 6 No.2*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Wimardana, Abi Syarwan. (2016). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. Skripsi. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Wiratawan, Gede Yoga. (2017). Prediksi Harga Lahan di Kawasan Rungkut Madya Pasca Beroperasinya Merr Surabaya. Skripsi. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Lampiran 1. Desain Survey Penelitian

Tabel 1.a. Desain Survey Penelitian

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
1.	Keteraturan Bangunan	➢ Jumlah total bangunan di masing-masing RT terdelineasi kumuh ➢ Jumlah unit bangunan yang teratur (tidak menghalangi jalan, tidak berada di sempadan pantai atau sungai, dan tidak mengganggu aktivitas penduduk)	2018	➢ Survey sekunder	➢ *Baseline* permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo	➢ Tingkat keteraturan bangunan di masing-masing RT (%)

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
2	Kepadatan Bangunan	➢ Jumlah total bangunan di masing-masing RT terdelineasi kumuh ➢ Luas masing-masing RT terdelineasi kumuh	2018	➢ Survey sekunder	➢ *Baseline* permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo	➢ Tingkat kepadatan bangunan di masing-masing RT (unit/Ha)
3	Kualitas Bangunan	➢ Jumlah unit bangunan yang memiliki kondisi layak huni (permanen tanpa kerusakan)	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil kuisioner/ observasi	➢ Persentase bangunan yang memiliki kondisi layak huni (permanen tanpa kerusakan)

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
4	Lokasi Hunian	➢ Luas masing-masing RT terdelineasi kumuh ➢ Luas kawasan permukiman tidak terjadi genangan atau banjir ➢ Luas kawasan permukiman tidak berada di sempadan SUTT	2020	➢ Survey sekunder ➢ Survey primer	➢ *Baseline* permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo	➢ Persentase kawasan permukiman yang tidak terletak di lokasi yang berbahaya

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
5	Kondisi Jalan	➢ Total panjang jaringan jalan di masing-masing RT terdelineasi kumuh ➢ Panjang jalan yang sudah diperkeras dan tidak mengalami kerusakan	2020	➢ Survey sekunder ➢ Survey primer	➢ *Baseline* permukiman kumuh Kelurahan Wonokuumo	➢ Persentase panjang jalan yang sudah diperkeras dan tidak mengalami kerusakan
6	Kelancaran Drainase	➢ Total panjang jaringan drainase di masing-masing RT terdelineasi kumuh ➢ Panjang drainase yang rusak sehingga tidak dapat mengalirkan limpasan air	2018	➢ Survey sekunder	➢ *Baseline* permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo	➢ Persentase panjang drainase yang dapat mengalirkan limpasan air sehingga tidak terjadi genangan

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
7	Kondisi Sanitasi	➢ Jumlah KK yang memiliki akses sanitasi layak (tertutup, maksimal digunakan dua keluarga dan pengolahan *in situ* atau *off site*)	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil kuisioner/ observasi	➢ Persentase KK yang memiliki ketersediaan sanitasi layak
8	Kondisi Persampahan	➢ Jumlah dan persebaran fasilitas persampahan ➢ Frekuensi pengangkutan persampahan	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil kuisioner/ observasi	➢ Persentase KK yang terlayani fasilitas persampahan dan pengangkutan

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
9	Proteksi Kebakaran	➢ Jumlah dan persebaran sarana dan prasarana proteksi kebakaran	2020	➢ Survey sekunder ➢ Survey primer	➢ RPLP Kelurahan Wonokusumo ➢ Hasil wawancara/ observasi	➢ Persentase KK yang terlayani sarana dan prasarana proteksi kebakaran
10	Akses Sarana Kesehatan	➢ Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan ➢ Kualitas fisik dan pelayanan fasilitas kesehatan	2020	➢ Survey sekunder ➢ Survey Primer	➢ Kecamatan dalam Angka ➢ Hasil wawancara/ observasi	➢ Sebaran fasilitas kesehatan ➢ Jumlah KK yang dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan layak

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
11	Akses Sarana Pendidikan	➢ Jumlah dan sebaran fasilitas pendidikan ➢ Kualitas fisik dan pelayanan fasilitas pendidikan	2020	➢ Survey sekunder ➢ Survey Primer	➢ Kecamatan dalam Angka ➢ Hasil wawancara/ observasi	➢ Jumlah dan sebaran fasilitas pendidikan ➢ Jumlah KK yang dapat mengakses fasilitas pendidikan dengan layak
11.	Ketersediaan RTH	➢ Jumlah dan sebaran RTH ➢ Luas RTH	2020	➢ Survey primer ➢ Survey sekunder	➢ Hasil observasi/ wawancara ➢ RDTRK Surabaya	➢ Persentase luas RTH terhadap luas kawasan
12.	Status Kepemilikan Lahan	➢ Jumlah unit bangunan yang	2018	➢ Survey sekunder	➢ *Baseline* permukiman kumuh	➢ Persentase bangunan yang

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
		memiliki SHM atau petok D			Kelurahan Wonokusumo	memiliki SHM atau petok D
13.	Status Legalitas Bangunan	➢ Jumlah unit bangunan yang memiliki IMB	2018	➢ Survey sekunder	➢ *Baseline* permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo	➢ Persentase bangunan yang memiliki IMB
14.	Kepadatan Penduduk	➢ Jumlah penduduk masing-masing RT terdelineasi kumuh ➢ Luas masing-masing RT terdelineasi kumuh	2018	➢ Survey sekunder	➢ *Baseline* permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo	➢ Tingkat kepadatan penduduk masing-masing RT (jiwa/ Ha)
15.	Tingkat Pendidikan	➢ Jumlah penduduk berdasarkan tingkat	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil wawancara	➢ Jumlah penduduk yang tidak

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
		pendidikan terakhir yang ditempuh				menempuh pendidikan, menempuh pendidikan dasar dan menengah
16.	Tingkat Partisipasi	➢ Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil wawancara	➢ Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
17.	Frekuensi Kegiatan Masyarakat	➢ Intensitas kegiatan gotong royong masing-masing RT	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil wawancara	➢ Intensitas gotong royong dalam satu bulan di masing-masing RT
18.	Frekuensi Kriminalitas	➢ Intensitas dan jenis kriminalitas di masing-masing RT	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil wawancara	➢ Intensitas dan jenis kriminalitas di masing-masing RT
19.	Tingkat Kemiskinan	➢ Jumlah penduduk MBR di masing-masing RT ➢ Jumlah penduduk di masing-masing RT	2018	➢ Survey sekunder	➢ *Baseline* permukiman kumuh Kelurahan Wonokusumo	➢ Persentase penduduk MBR di masing-masing RT

No.	Variabel	Data yang diperlukan	Tahun Data	Teknik Survey	Sumber Data	Output
20.	Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni	➢ Jumlah pemasukan setiap KK per bulan ➢ Pengeluaran per bulan untuk mengakses listrik, air, dan persampahan.	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil wawancara	➢ Persentase KK yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam hunian layak
21.	Tingkat Pendapatan	➢ Jumlah biaya pemasukan yang diterima masing-masing KK per bulan (gaji)	2020	➢ Survey primer	➢ Hasil wawancara	➢ Mayoritas tingkat pendapatan di masing-masing RT

Sumber: Hasil Analisis, 2020

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Lampiran 2. Kuisioner Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh

	DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA **FAKULTAS ARSITEKTUR DESAIN DAN PERENCANAAN** **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER** **2020**

KUISIONER PENELITIAN
STRATEGI PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN WONOKUSUMO KOTA SURABAYA BERDASARKAN PRINSIP GOALS 11 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

A. Latar Belakang

Bapak/ Ibu yang saya hormati, saya Olivia Pandora selaku mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian yang berjudul Strategi Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya berdasarkan Prinsip Goals 11 *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dalam mencapai sasaran pertama, diperlukan identifikasi karakteristik permukiman kumuh Wonokusumo. Identifikasi tersebut selanjutnya menjadi faktor dalam perumusan strategi peremajaan yang sesuai dengan kondisi di Kelurahan Wonokusumo. Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam kuisioner ini dijamin kerahasiaannya dan hanya akan dipakai untuk keperluan penelitian saja. Dengan ini, saya ucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuisioner ini.

Hormat saya,
Olivia Pandora (08211640000110)
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP ITS

B. Identitas Responden

1. Nama : ……..
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*
3. Alamat : …….
   ……
4. Usia : … tahun
5. Lama tinggal di Wonokusumo : … tahun
6. Nomor Telepon/ HP : ……..

C. Kondisi Fisik Bangunan

1. Jenis konstruksi rumah Bapak/ Ibu :
   a. Atap : (Genteng / Seng / Genteng dan Seng)*
   b. Dinding : (Tembok / Papan / Tembok dan Papan)*
   c. Lantai : (Keramik / Semen / Tanah)*
2. Kerusakan konstruksi bangunan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan keselamatan :
   a. Atap : (Ada berupa …….....…. / Tidak)*
   b. Dinding : (Ada berupa …….....…. / Tidak)*
   c. Lantai : (Ada berupa …….....…. / Tidak)*
3. Status kepemilikan lahan/ bangunan yang dimiliki Bapak/Ibu:
   a. Surat Kepemilikan Lahan : (Ada berupa ……/ Tidak)*
   b. Surat Kepemilikan Bangunan : (Ada berupa …..../ Tidak)*

D. Kondisi Sosial Ekonomi

1. Berapa jumlah tanggungan KK dalam satu rumah Bapak/ Ibu?
   a. 1 (Satu) KK
   b. 2 (Dua) KK
   c. 3 (Tiga) KK
   d. 4 (Empat) KK
   e. 5 (Lima) KK
   f. Lainnya : … KK
2. Apakah pekerjaan Bapak/ Ibu?
   a. Pegawai Negeri Sipil
   b. Pegawai Swasta
   c. Pedagang
   d. Wiraswasta
   e. TNI/ POLRI
   f. Lainnya ……

3. Tingkat pendidikan terakhir Bapak/ Ibu?
   a. Tidak lulus pendidikan dasar
   b. Lulus Pendidikan dasar (SD)
   c. Lulus Pendidikan menengah (SMP/ SMA)
   d. Diploma
   e. Sarjana
4. Berapakah Pendapatan Bapak/ Ibu setiap bulan?
5. Berapakah biaya yang dikeluarkan Bapak/ Ibu (setiap bulan) untuk mengakses kebutuhan dasar rumah layak huni (*affordability*) sebagai berikut?
   a. Kebutuhan Listrik :Rp…….
   b. Kebutuhan Air Bersih :Rp…….
   c. Kebutuhan Air Minum :Rp…….
   d. Kebutuhan Persampahan :Rp…….
   e. Kebutuhan Gas :Rp…….
   f. Pajak bangunan :Rp…….

E. Kondisi Sosial Budaya

1. Frekuensi gotong royong di RT Bapak/ Ibu?
   a. <1 bulan sekali
   b. 1-2 bulan sekali
   c. >2 bulan sekali
2. Kelompok masyarakat di RT Bapak/ Ibu?
   a. PKK
   b. Karang Taruna
   c. Banser
   d. Lainnya ……
3. Keterlibatan dalam gotong royong royong? (Ya / Tidak)*
4. Keterlibatan dalam kelompok masyarakat? (Ya/ Tidak)*
5. Kondisi Kriminalitas di lingkungan RT Bapak/ Ibu?
   a. Frekuensi kriminalitas dalam satu tahun terakhir? (1 kali / 2 kali / 3 kali / Lainnya … kali)*
   b. Jenis kriminalitas yang terjadi di RT Bapak/Ibu? (Pencopetan / Maling / Lainnya …..)*
   c. Lokasi kejadian kriminalitas?
   d. Apakah terdapat perlindungan kriminalitas di lingkungan Bapak/ Ibu? (Ya / Tidak)*

F. Kondisi Sarana Prasarana

1. Kondisi Sanitasi

- Apakah jenis sanitasi Bapak/ Ibu?
  a. *Open defecation* (sanitasi terbuka ke alam seperti lapangan, hutan, semak-semak, dan lainnya)
  b. *Unimproved sanitation* (seperti jamban dan pispot)
  c. *Limited* (sanitasi terutup digunakan lebih dari 1 KK)
  d. *Safely managed* (sanitasi tertutup digunakan 1 KK)
- Apakah jenis pengelolaan limbah Bapak/ Ibu?
  a. *Insitu* (pengelolaan ditempat dimana limbah tetap berada di tanah)
  b. *Offsite* (dikumpulkan truk melalui *septictank*)
- Berapa jumlah KK yang mengakses sanitasi yang Bapak/ Ibu gunakan?
  a. 1 (Satu) KK
  b. 2 (Dua) KK
  c. 3 (Tiga) KK
  d. 4 (Empat) KK
  e. 5 (Lima) KK
  f. Lainnya : … KK

2. Air Bersih

- Apakah jenis sumber air bersih yang Bapak/ Ibu gunakan?
  a. PDAM
  b. Sumur
  c. Lainnya ……..
- Bagaimana kualitas air bersih yang Bapak/ Ibu gunakan?
  a. Jernih, tidak berbau, dan tidak berasa
  b. Keruh, berbau dan berasa
- Berapa waktu akses Bapak/ Ibu terhadap sumber air?
  a. Selalu tersedia (0 menit)
  b. Lainnya : … menit

3. Persampahan

- Apakah Bapak/Ibu memiliki sarana pembuangan sampah?
  a. Ya
  b. Tidak, membuang sampah ke ……..
- Apakah Bapak/ Ibu terlayani pengangkutan rutin sampah?
  a. Ya, … kali dalam satu minggu
  b. Tidak terlayani pengangkutan sampah

4. Akses Sarana Kesehatan

- Apakah tersedia sarana kesehatan di lingkungan Bapak/Ibu?
  a. Tersedia, berupa ……
  b. Tidak tersedia sarana kesehatan
- Bagaimana kondisi fisik sarana kesehatan di lingkungan Bapak/ Ibu?
  a. Memadai dengan kondisi baik
  b. Kurang memadai dengan kondisi baik
  c. Memadai dengan kondisi buruk
  d. Kurang memadai dengan kondisi buruk
- Bagaimana pelayanan sarana kesehatan tersebut?
  a. Ya, pelayanan sarana kesehatan sudah baik
  b. Pelayanan kurang baik, karena ……..
- Apakah terdapat program bantuan untuk mengakses fasilitas kesehatan?
  a. Ya, terdapat berupa (BPJS/ KIS/ lainnya)
  b. Tidak terdapat bantuan kesehatan (lanjutkan pertanyaan ke Nomor 5)
- Apakah bantuan tersebut dapat memenuhi akses sarana kesehatan masyarakat?

  ……...

5. Akses Sarana Pendidikan

- Apakah tersedia sarana pendidikan di lingkungan Bapak/ Ibu?
  a. Tersedia, berupa……..
  b. Tidak tersedia sarana pendidikan
- Bagaimana kondisi fisik sarana pendidikan di lingkungan Bapak/ Ibu?
  a. Memadai dengan kondisi baik
  b. Kurang memadai dengan kondisi baik

c. Memadai dengan kondisi buruk
d. Kurang memadai dengan kondisi buruk

- Bagaimana keterjangkauan pelayanan pendidikan tersebut?
  a. Ya, pelayanan pendidikan sudah menjangkau semua masyarakat.
  b. Tidak terjangkau, karena…….

6. Jaringan Drainase

- Apakah drainase di lingkungan Bapak/ Ibu dapat mengalirkan limpasan air sehingga tidak terjadi genangan?
  a. Ya, dapat mengalirkan limpasan air
  b. Tidak, terjadi genangan … meter selama … menit
- Apakah terdapat program perbaikan drainase dalam kurun satu tahun terakhir?
  a. Ya, pada Bulan …… b. Tidak
- Apakah terdapat masyarakat berperan dalam perbaikan drainase?
  a. Ya b. Tidak

7. Jaringan Jalan

- Apakah terdapat program perbaikan jalan dalam kurun satu tahun terakhir?
  a. Ya, pada Bulan …… b. Tidak
- Apakah masyarakat berperan dalam perbaikan jalan?
  b. Ya b. Tidak

8. Proteksi Kebakaran

- Apakah terdapat proteksi kebakaran di lingkungan Bapak/ Ibu?
  a. Ya, terdapat berupa ……
  b. Tidak terdapat proteksi kebakaran
- Apakah terdapat program atau sosialisasi terkait penanganan bencana (banjir dan kebakaran)?

a. Ya, terdapat pada Bulan …….
b. Tidak terdapat program atau sosialisasi

9. Ruang Terbuka Hijau

- Apakah terdapat ruang terbuka hijau di lingkungan Bapak/Ibu?
  a. Ya, berupa …… yang terdapat di ……..
  b. Tidak terdapat RTH
- Bagaimana kondisi fisik RTH tersebut?
  a. Memadai dengan kondisi baik
  b. Kurang memadai dengan kondisi baik
  c. Memadai dengan kondisi buruk
  d. Kurang memadai dengan kondisi buruk

Lampiran 3. Rekapitulasi Data Karakteristik Permukiman Kumuh Kelurahan Wonokusumo

Rekapitulasi perhitungan masing-masing variable dari setiap RT terdapat di *link* dan *QR Code* sebagai berikut.

Intip.in/karakteristikkumuh

Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Sebelum dilakukan *Cluster Analysis*, perlu dilakukan beberapa uji data. Uji data tersebut terdiri dari Uji Validitas, Uji Reabilitas, dan Uji Normalitas.Uji data tersebut dilakukan menggunakan *Software* SPSS.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran (Ayunita, 2018). Sedangkan, uji validitas diartikan sebagai alat uji yang mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar dalam Matondang, 2009). Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa uji validitas bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang hendak digunakan sebagai instrumen penelitian. Hasil dari uji validitas menyatakan apakah data yang didapatkan valid atau tidak. Variabel penelitian yang baik adalah variabel yang valid. Artinya, variabel-variabel tersebut harus dapat mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Sehingga uji validitas perlu dilakukan pada penelitian, termasuk menguji kevalidan data atau informasi yang didapatkan dari para responden.

Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuisioner yang diberikan kepada responden.Adapun jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 170 responden (KK). Adapun variabel yang diuji antara lain : kualitas bangunan, ketersediaan air bersih, kondisi persampahan, akses sarana kesehatan, tingkat pendidikan, partisipasi masyarakat, frekuensi kegiatan masyarakat, frekuensi kriminalitas, kemampuan pemenuhan rumah layak huni, dan tingkat pendapatan. Untuk data masing-masing responden sebagai *input* uji validitas terdapat di *link* atau *QR Code* sebagai berikut.

intip.in/valid

Sebelumnya, perlu dilakukan perumusan hipotesis sebagai berikut.

1. H_0 : Hasil pengukuran kualitas bangunan tidak valid.
   H_1 : Hasil pengukuran kualitas bangunan valid.
2. H_0 : Hasil pengukuran air bersih tidak valid.
   H_1 : Hasil pengukuran air bersih valid.
3. H_0 : Hasil pengukuran kondisi persampahan tidak valid.
   H_1 : Hasil pengukuran kondisi persampahan valid.

4. H_0 : Hasil pengukuran akses sarana kesehatan tidak valid.
   H_1 : Hasil pengukuran akses sarana kesehatan valid.
5. H_0 : Hasil pengukuran tingkat pendidikan tidak valid.
   H_1 : Hasil pengukuran tingkat pendidikan valid.
6. H_0 : Hasil pengukuran partisipasi masyarakat tidak valid.
   H_1 : Hasil pengukuran partisipasi masyarakat valid.
7. H_0 : Hasil pengukuran frekuensi kegiatan masyarakat tidak valid
   H_1 : Hasil pengukuran frekuensi kegiatan masyarakat valid
8. H_0 : Hasil pengukuran frekuensi kriminalitas tidak valid.
   H_1 : Hasil pengukuran frekuensi kriminalitas valid.
9. H_0 : Hasil pengukuran kemampuan pemenuhan rumah layak huni tidak valid.
   H_1 : Hasil pengukuran kemampuan pemenuhan rumah layak huni valid.
10. H_0 : Hasil pengukuran tingkat pendapatan tidak valid.
    H_1 : Hasil pengukuran tingkat pendapatan valid.

Berikut proses uji validitas yang dilakukan peneliti.

1. Menginput hasil kuisioner setiap variabel yang ingin diuji dari 170 responden. Hasil tersebut harus dikatagorikan dalam numerik sebagaimana ditunjukkan gambar berikut. (tabel dapat diakses melalui link atau *QR Code*).

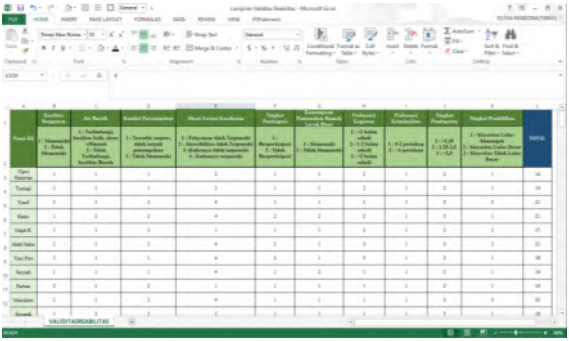

2. Pada *row* masing-masing responden dilakukan penjumlahan nilai dari sepuluh variabel yang diuji, sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

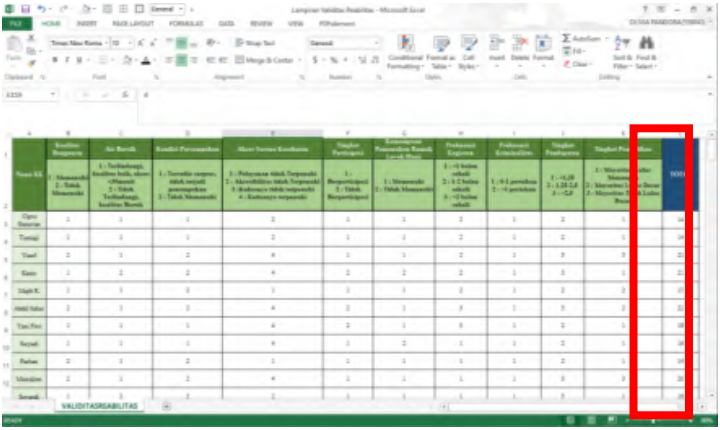

3. Buka SPSS, lalu pilih tab *Variabel View*. Pada bagian Name ditulis nama masing-masing variabel dan skor total. Pada *Type* gunakan *numeric*, pada *Label* tuliskan nama yang ingin ditampilkan di *output SPSS* (peneliti menulis nama variabel dan Skor Total), dan pada kolom *Measure* gunakan *Scale.*

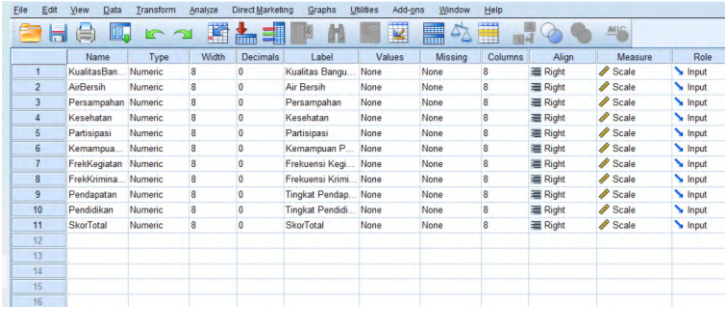

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	KualitasBan...	Numeric	8	0	Kualitas Bangu...	None	None	8	Right	Scale	Input
2	AirBersih	Numeric	8	0	Air Bersih	None	None	8	Right	Scale	Input
3	Persampahan	Numeric	8	0	Persampahan	None	None	8	Right	Scale	Input
4	Kesehatan	Numeric	8	0	Kesehatan	None	None	8	Right	Scale	Input
5	Partisipasi	Numeric	8	0	Partisipasi	None	None	8	Right	Scale	Input
6	Kemampua...	Numeric	8	0	Kemampuan P...	None	None	8	Right	Scale	Input
7	FrekKegiatan	Numeric	8	0	Frekuensi Kegi...	None	None	8	Right	Scale	Input
8	FrekKrimina...	Numeric	8	0	Frekuensi Krimi...	None	None	8	Right	Scale	Input
9	Pendapatan	Numeric	8	0	Tingkat Pendap...	None	None	8	Right	Scale	Input
10	Pendidikan	Numeric	8	0	Tingkat Pendidi...	None	None	8	Right	Scale	Input
11	SkorTotal	Numeric	8	0	SkorTotal	None	None	8	Right	Scale	Input
12											
13											
14											
15											
16											

4. Pilih tab *Data View* dan lakukan *copy paste* semua data yang dibuat di *Excel* sebelumnya sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

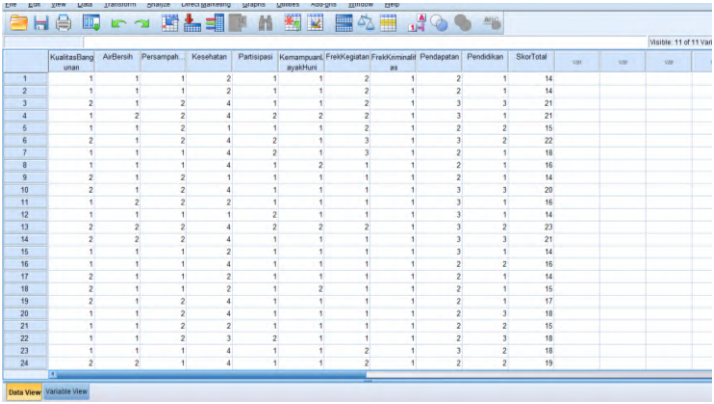

	KualitasBangunan	AirBersih	Persampah...	Kesehatan	Partisipasi	KemampuanLayakHuni	FrekKegiatan	FrekKriminalitas	Pendapatan	Pendidikan	SkorTotal
1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	14
2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	14
3	2	1	2	4	1	1	2	1	3	3	21
4	1	2	2	4	2	2	2	1	3	1	21
5	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	15
6	2	1	2	4	2	1	3	1	3	2	22
7	1	1	1	4	2	1	3	1	2	1	16
8	1	1	1	4	1	2	1	1	2	1	16
9	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	14
10	2	1	2	4	1	1	1	1	3	3	20
11	1	2	2	2	1	1	1	1	3	1	16
12	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	14
13	2	2	2	4	2	2	2	1	3	2	23
14	2	2	2	4	1	1	1	1	3	3	21
15	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	14
16	1	1	1	4	1	1	1	1	2	2	16
17	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	14
18	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	15
19	2	1	2	4	1	1	1	1	2	1	17
20	1	1	2	4	1	1	1	1	2	3	18
21	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	15
22	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	18
23	1	1	1	4	1	1	2	1	3	2	18
24	2	2	1	4	1	1	2	1	2	2	19

5. Pilih *Analyze – Correlate – Bivariate.* Masukkan semua item ke kotak *Variabel.* Pada *Correlation Coefficients* pilih *Pearson.* Pada *Test Significance* pilih *Two Tailed* dan centang *Flag significant correlation*, sebagaimana ditunjukkan gambar berikut

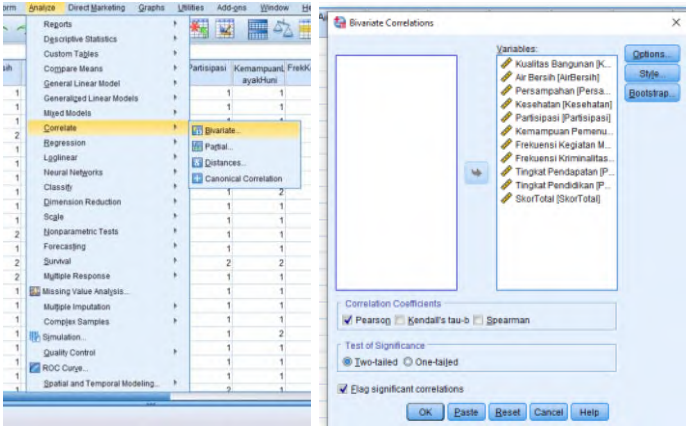
Analyze
Direct Marketing
Graphs
Utilities
Add-ons
Window
Reports
Descriptive Statistics
Custom Tables
Compare Means
General Linear Model
Generalized Linear Models
Mixed Models
Correlate
Regression
Loglinear
Neural Networks
Classify
Dimension Reduction
Scale
Nonparametric Tests
Forecasting
Survival
Multiple Response
Missing Value Analysis...
Multiple Imputation
Complex Samples
Simulation...
Quality Control
ROC Curve...
Spatial and Temporal Modeling...
Bivariate...
Partial...
Distances...
Canonical Correlation
Bivariate Correlations
Variables:
Kualitas Bangunan [K...
Air Bersih [AirBersih]
Persampahan [Persa...
Kesehatan [Kesehatan]
Partisipasi [Partisipasi]
Kemampuan Pemenu...
Frekuensi Kegiatan M...
Frekuensi Kriminalitas...
Tingkat Pendapatan [P...
Tingkat Pendidikan [P...
SkorTotal [SkorTotal]
Options...
Style...
Bootstrap...
Correlation Coefficients
Pearson
Kendall's tau-b
Spearman
Test of Significance
Two-tailed
One-tailed
Flag significant correlations
OK
Paste
Reset
Cancel
Help

6. Klik OK dan akan didapatkan *output* sebagai berikut.

Correlations

		Kualitas Bangunan	Air Bersih	Persampahan	Kesehatan	Partisipasi	Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni	Frekuensi Kegiatan Masyarakat	Frekuensi Kriminalitas	Tingkat Pendapatan	Tingkat Pendidikan	SkorTotal
Kualitas Bangunan	Pearson Correlation	1	.122	.022	.140	.136	-.062	.075	.023	-.064	.062	.340**
	Sig. (2-tailed)		.112	.773	.069	.077	.419	.333	.770	.406	.421	.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Air Bersih	Pearson Correlation	.122	1	-.134	.000	.162*	.148	.182*	.226**	.083	.200**	.438**
	Sig. (2-tailed)	.112		.080	.999	.035	.054	.018	.003	.284	.009	.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Persampahan	Pearson Correlation	.022	-.134	1	-.047	.045	-.056	-.001	-.092	.086	-.062	.152*
	Sig. (2-tailed)	.773	.080		.541	.562	.469	.986	.234	.265	.419	.048
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Kesehatan	Pearson Correlation	.140	.000	-.047	1	.094	-.067	.156*	-.005	.154*	.113	.582**
	Sig. (2-tailed)	.069	.999	.541		.222	.383	.043	.946	.045	.144	.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Partisipasi	Pearson Correlation	.136	.162*	.045	.094	1	.079	.212**	.151*	-.038	.072	.395**
	Sig. (2-tailed)	.077	.035	.562	.222		.304	.005	.050	.618	.349	.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni	Pearson Correlation	-.062	.148	-.056	-.067	.079	1	.148	.252**	-.208**	.208**	.278**
	Sig. (2-tailed)	.419	.054	.469	.383	.304		.054	.001	.006	.006	.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Frekuensi Kegiatan Masyarakat	Pearson Correlation	.075	.182*	-.001	.156*	.212**	.148	1	.230**	-.008	.043	.499**
	Sig. (2-tailed)	.333	.018	.986	.043	.005	.054		.003	.916	.580	.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Frekuensi Kriminalitas	Pearson Correlation	.023	.226**	-.092	-.005	.151*	.252**	.230**	1	-.105	.099	.322**
	Sig. (2-tailed)	.770	.003	.234	.946	.050	.001	.003		.175	.198	.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Tingkat Pendapatan	Pearson Correlation	-.064	.083	.086	.154*	-.038	-.208**	-.008	-.105	1	-.134	.265**
	Sig. (2-tailed)	.406	.284	.265	.045	.618	.006	.916	.175		.082	.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Tingkat Pendidikan	Pearson Correlation	.062	.200**	-.062	.113	.072	.208**	.043	.099	-.134	1	.486**
	Sig. (2-tailed)	.421	.009	.419	.144	.349	.006	.580	.198	.082		.000
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
SkorTotal	Pearson Correlation	.340**	.438**	.152*	.582**	.395**	.278**	.499**	.322**	.265**	.486**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.048	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai kevalidan kualitas bangunan sebesar 0,340, nilai kevalidan air bersih sebesar 0,438, nilai kevalidan kondisi persampahan 0,152, nilai kevalidan akses sarana kesehatan sebesar 0,582, nilai validitas kemampuan pemenuhan rumah layak huni sebesar 0,395, nilai kevalidan frekuensi kegiatan masyarakat sebesar 0,278, nilai kevalidan frekuensi kriminalitas sebesar 0,499, nilai kevalidan tingkat pendapatan 0,322,nilai kevalidan tingkat pendidikan sebesar 0,265, dan nilai kevalidan partisipasi sebesar 0,486. Nilai tolak H_0 adalah jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, atau nilai signifikan < alpha (α). Nilai r tabel didapatkan dari rumus sebagai berikut.

r tabel = (N-2, alfa)

dimana,

N = Jumlah responden, yaitu 170 KK

alfa = Tingkat signifikansi penelitian, yaitu 5% atau 0,05.

Maka, r tabel = (170-2, 0,05) = (168, 0,05). Setelah itu, nilai didapatkan perpotongan df (N-2) dan alfa pada tabel sebagai berikut.

df = (N-2)	Tingkat Signifikansi				
	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
166	0.1273	0.1515	0.1794	0.1982	0.2517
167	0.1270	0.1510	0.1788	0.1976	0.2509
168	0.1266	**0.1506**	0.1783	0.1971	0.2502
169	0.1262	0.1501	0.1778	0.1965	0.2495
170	0.1258	0.1497	0.1773	0.1959	0.2488

Sehingga, nilai dari r tabel adalah 0,1506. Jika dibandingkan dengan nilai r_{hitung} dari *output SPSS*, seluruh variabel yang diunji memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel(N-2,alfa)}$, maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan pengukuran variabel diterima. Selain dilihat dari nilai r_{hitung} dan r_{tabel}, uji validitas juga dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai alfa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05.

Sedangkan, berdasarkan *output SPSS* ,nilai alfa variabel sebesar 0,000. Sehingga, uji tersebut juga memberikan hasil bahwa H_0 ditolak atau dapat dikatakan pengukuran variabel diterima. Kesimpulan uji validitas menunjukkan bahwa **semua hasil pengukuran VALID** sebagai berikut.

1. Hasil pengukuran kualitas bangunan valid.
2. Hasil pengukuran air bersih valid.
3. Hasil pengukuran kondisi persampahan valid.
4. Hasil pengukuran akses sarana kesehatan valid.
5. Hasil pengukuran tingkat pendidikan valid.
6. Hasil pengukuran partisipasi masyarakat valid.
7. Hasil pengukuran frekuensi kegiatan masyarakat valid
8. Hasil pengukuran frekuensi kriminalitas valid.
9. Hasil pengukuran kemampuan pemenuhan rumah layak huni valid.
10. Hasil pengukuran tingkat pendapatan valid

2. Uji Reliabilitas

Selain dilakukan Uji Validitas, perlu juga dilakukan Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk menilai apakah kuisioner mampu mendapatkan hasil yang sama jika digunakan pada waktu yang berbeda (Adiguna dan Partiwi, 2019). Berdarkan definisi tersebut, uji reliabilitas ini bertujuan mengetahui seberapa konsisten data-data yang didapatkan. Semakin tinggi koefisien reliabilitas maka konsistensi antara hasil pengenaan dua tes tersebut semakin baik dan hasil ukur kedua tes itu dikatakan semakin reliabel, demikian pula sebaliknya. (Saifuddin A, 2000). Dalam penelitian ini, koefisien reabilitas yang digunakan adalah *Alpha Cronbach's* dengan kategori sebagai berikut.

Nilai Koefisien *Alpha Cronbach's*	Kategori
0,00 – 0,20	Kurang Reliabel
0,21 – 0,40	Agak Reliabel
0,41 – 0,60	Cukup Reliabel
0,61 – 0,80	Reliabel
0,81 – 1,00	Sangat Reliabel

Uji reliabilitas dalam penelitian ini masih menggunakan *input* yang sama dengan uji validitas yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut langkah yang dilakukan peneliti.

1. Pilih *Analyze* – *Scale* – *Reliability Analysis*, lalu masukkan semua variabel ke kotak *Items.*Kemudian pada bagian *Model* pilih *Alpha* sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

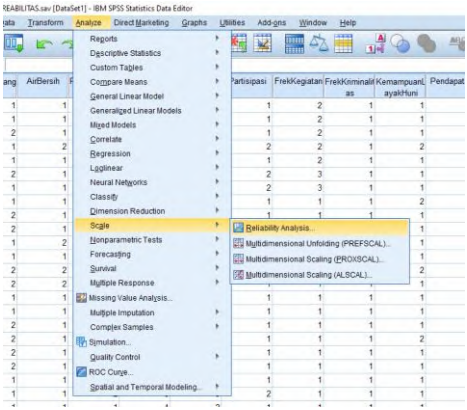

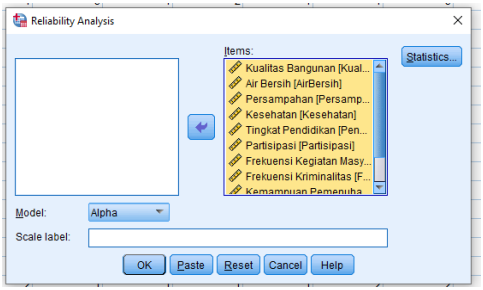

2. Selanjutnya klik *Statistic* dan akan muncul kotak *Reability Analysis: Statistic*. Kemudian, pada bagian *Descriptive for* centang *Scale if item deleted* lalu klik *Continue* sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

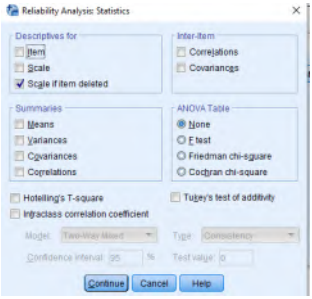

3. Klik *OK* dan muncul *output* dari uji reliabilitas. Berikut *output* dan penjelasan dari masing-masing tabel.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	170	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	170	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel *Case Processing Summary* menunjukkan bahwa total seluruh sampel yang akan diuji yang berjumlah 170 KK, yang artinya tidak ada sampel yang dikeluarkan.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.635	11

Tabel *Reability Statistics* menunjukkan koefisien *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan yaitu 0,639 atau 63,9%. Berdasarkan katagori *Cronbach's Alpha,* nilai tersebut menunjukkan bahwa data hasil pengukuran termasuk katagori **RELIABEL**. Sehingga proses analisis dapat dilanjutkan.

Lampiran 5. Hasil Analisis Pembagian Cluster Menggunakan SPSS

Dalam pembanguan cluster untuk mencapai sasaran 1, peneliti menggunakan metode *cluster hierarki. S*etelah masing-masing variabel di setiap RT diolah dalam persentase, selanjutnya dikelompokkan dalam kategori bobot sesuai Tabel 3.9. Berikut bobot yang digunakan untuk proses *Cluster Analysis.*

RW/RT	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V9	V11	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
RW 7 RT 1	20	50	20	50	30	20	20	50	30	50	50	50	20	20	30	30	20	20	30
RW 7 RT 2	50	50	30	50	50	30	20	50	20	30	30	50	20	20	20	30	30	20	20
RW 7 RT 3	20	20	20	30	30	30	30	50	30	20	20	20	20	30	20	20	30	20	20
RW 7 RT 4	50	20	30	30	50	20	20	50	30	20	30	30	20	20	20	30	20	20	30
RW 7 RT 5	30	30	30	20	50	30	30	30	20	30	50	50	20	20	20	20	20	20	30
RW 7 RT 6	20	20	30	20	30	20	20	30	20	30	30	20	20	20	20	20	50	20	20

RW/RT	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V9	V11	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
RW 7 RT 7	20	20	20	20	20	20	20	50	30	30	30	30	20	20	30	30	30	20	20
RW 7 RT 8	20	20	20	30	50	20	20	50	20	30	50	30	20	20	20	20	20	20	20
RW 7 RT 9	20	50	30	30	20	30	30	50	30	30	30	50	30	20	20	20	30	30	20
RW 7 RT 10	20	50	30	20	20	50	50	50	20	30	30	50	20	50	50	20	30	30	20
RW 7 RT 11	20	20	20	20	50	20	20	50	20	30	50	20	20	20	30	30	20	30	30
RW 7 RT 12	20	50	30	20	20	30	30	30	20	30	30	50	20	20	20	20	30	20	30
RW 7 RT 13	20	50	20	30	30	20	20	30	20	30	30	50	20	20	30	30	30	30	30
RW 7 RT 14	20	50	30	30	20	30	30	30	20	30	30	50	20	30	20	30	30	20	20

RW/RT	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V9	V11	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
RW 7 RT 15	20	50	30	30	20	30	30	30	50	30	30	50	20	20	20	20	30	20	20
RW 7 RT 16	20	50	30	30	30	30	30	30	20	30	30	50	20	20	30	20	30	20	30
RW 7 RT 17	20	30	30	20	30	50	50	30	30	30	30	50	20	20	20	20	30	20	30
RW 7 RT 18	20	20	50	20	30	50	50	20	20	30	30	20	30	20	20	20	50	50	20
RW 7 RT 19	20	50	20	20	30	30	30	20	20	30	30	50	20	30	30	30	30	30	20
RW 7 RT 20	20	20	20	30	20	20	20	20	30	30	30	20	20	20	20	20	30	20	30
RW 7 RT 21	20	20	50	50	30	30	30	20	20	30	30	30	50	20	30	20	50	50	50
RW 7 RT 22	20	30	20	20	50	20	20	50	20	30	30	50	30	50	20	20	30	30	30

RW/RT	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V9	V11	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
RW15 RT2	50	50	20	30	30	20	20	20	20	20	20	50	20	20	20	20	20	30	50
RW15 RT3	50	30	20	30	50	30	20	20	20	30	50	50	20	20	20	20	20	20	20
RW15 RT4	50	50	20	30	50	30	30	20	20	50	50	50	20	30	20	20	20	20	20
RW15 RT5	50	50	20	30	20	30	30	20	30	50	50	50	30	30	20	20	20	20	20
RW 6 RT 5	30	50	30	20	30	30	30	30	20	30	30	50	20	20	30	20	30	20	20
RW 6 RT 6	30	50	20	20	50	20	20	20	20	50	50	50	30	20	20	20	20	50	20

Keterangan:

V1 = Keteraturan Bangunan
V2 = Kepadatan Bangunan
V3 = Kualitas Bangunan
V4 = Lokasi Hunian
V5 = Kondisi Jalan
V6 = Kelancaran Drainase
V7 = Ketersediaan Air Bersih
V9 = Kondisi Persampahan
V11 = Akses Sarana Kesehatan

V14 = Status Kepemilikan Lahan
V15 = Status Legalitas Bangunan
V16 = Kepadatan Penduduk
V17 = Tingkat Pendidikan
V18 = Tingkat Partisipasi
V19 = Frekuensi Kegiatan Masyarakat
V20 = Frekuensi Kriminalitas
V21 = Tingkat Kemiskinan
V22 = Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni
V23 = Tingkat Pendapatan

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

Nilai masing-masing variabel di setiap RT tersebut kemudian di *input* ke SPSS sebagai berikut.

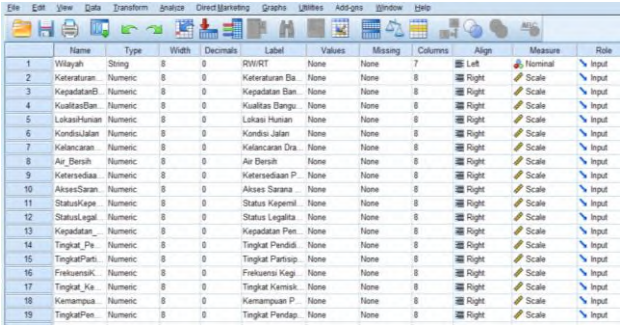

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Wilayah	String	8	0	RW/RT	None	None	7	Left	Nominal	Input
2	Keteraturan...	Numeric	8	0	Keteraturan Ba...	None	None	8	Right	Scale	Input
3	KepadatanB...	Numeric	8	0	Kepadatan Ban...	None	None	8	Right	Scale	Input
4	KualitasBan...	Numeric	8	0	Kualitas Bangu...	None	None	8	Right	Scale	Input
5	LokasiHunian	Numeric	8	0	Lokasi Hunian	None	None	8	Right	Scale	Input
6	KondisiJalan	Numeric	8	0	Kondisi Jalan	None	None	8	Right	Scale	Input
7	Kelancaran...	Numeric	8	0	Kelancaran Dra...	None	None	8	Right	Scale	Input
8	Air_Bersih	Numeric	8	0	Air Bersih	None	None	8	Right	Scale	Input
9	Ketersediaa...	Numeric	8	0	Ketersediaan P...	None	None	8	Right	Scale	Input
10	AksesSaran...	Numeric	8	0	Akses Sarana ...	None	None	8	Right	Scale	Input
11	StatusKepe...	Numeric	8	0	Status Kepemil...	None	None	8	Right	Scale	Input
12	StatusLegal...	Numeric	8	0	Status Legalita...	None	None	8	Right	Scale	Input
13	Kepadatan_...	Numeric	8	0	Kepadatan Pen...	None	None	8	Right	Scale	Input
14	Tingkat_Pe...	Numeric	8	0	Tingkat Pendidi...	None	None	8	Right	Scale	Input
15	TingkatParti...	Numeric	8	0	Tingkat Partisip...	None	None	8	Right	Scale	Input
16	FrekuensiK...	Numeric	8	0	Frekuensi Kegi...	None	None	8	Right	Scale	Input
17	Tingkat_Ke...	Numeric	8	0	Tingkat Kemisk...	None	None	8	Right	Scale	Input
18	Kemampua...	Numeric	8	0	Kemampuan P...	None	None	8	Right	Scale	Input
19	TingkatPen...	Numeric	8	0	Tingkat Pendap...	None	None	8	Right	Scale	Input

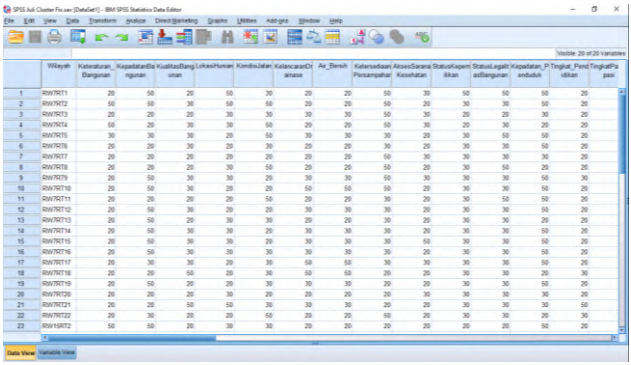

	Wilayah	Keteraturan_Bangunan	KepadatanBangunan	KualitasBangunan	LokasiHunian	KondisiJalan	Kelancaranarasse	Air_Bersih	Ketersediaan Persampahan	AksesSarana Kesehatan	StatusKepemilikan	StatusLegalitasBangunan	Kepadatan_Penduduk	Tingkat_Pendidikan	TingkatPartisipasi
1	RW/RT1	20	50	20	50	30	20	20	50	30	50	50	50	20	
2	RW/RT2	50	50	30	50	50	20	20	50	20	30	30	50	20	
3	RW/RT3	20	20	20	30	30	30	30	50	30	20	20	30	20	
4	RW/RT4	50	20	30	30	50	20	20	50	30	20	30	20	20	
5	RW/RT5	30	30	30	20	50	30	30	30	20	20	30	50	20	
6	RW/RT6	20	20	30	20	30	20	20	30	20	30	30	50	20	
7	RW/RT7	20	20	20	20	20	20	20	50	30	30	30	30	20	
8	RW/RT8	20	20	20	30	50	20	20	50	20	30	50	20	20	
9	RW/RT9	20	50	30	30	20	30	30	50	30	30	30	50	30	
10	RW/RT10	20	50	30	20	20	50	50	50	20	30	30	50	20	
11	RW/RT11	20	20	20	20	50	20	20	30	20	30	50	50	20	
12	RW/RT12	20	50	30	20	20	30	30	30	20	30	30	50	20	
13	RW/RT13	20	50	20	30	30	20	20	30	20	30	30	20	20	
14	RW/RT14	20	50	30	30	20	30	30	30	20	30	30	50	20	
15	RW/RT15	20	50	30	30	20	30	30	30	50	30	30	50	20	
16	RW/RT16	20	50	30	30	30	30	30	30	20	30	30	50	20	
17	RW/RT17	20	30	30	20	30	50	50	30	30	30	30	50	20	
18	RW/RT18	20	20	50	20	30	50	50	20	20	30	30	20	30	
19	RW/RT19	20	50	20	20	30	30	30	20	20	30	30	50	20	
20	RW/RT20	20	20	20	30	20	20	20	20	30	30	30	30	20	
21	RW/RT21	20	20	50	50	30	30	30	20	20	30	30	30	50	
22	RW/RT22	20	30	20	20	50	20	20	50	20	30	30	20	30	
23	RW15RT2	50	50	20	30	30	20	20	20	20	20	20	50	20	

Sebelum dilakukan pembagian *cluster*, variabel perlu di *Z-Score* yaitu untuk menyamakan standar nilai data yang dilakukan dengan memilih *Analyze – Descriptive Statistics – Descriptives.* Setelah muncul kotak *Descriptives*, masukkan semua variabel tersebut ke bagian *Variable(s)*. Kemudian centang *save standardized values as variables* dan klik OK. Setelah itu akan muncul *output* sebagai berikut.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keteraturan Bangunan	28	20	50	27.50	12.360
Kepadatan Bangunan	28	20	50	37.50	14.044
Kualitas Bangunan	28	20	50	26.43	8.262
Lokasi Hunian	28	20	50	27.86	9.172
Kondisi Jalan	28	20	50	32.86	11.819
Kelancaran Drainase	28	20	50	27.50	9.280
Air Bersih	28	20	50	27.50	9.280
Ketersediaan Persampahan	28	20	50	33.21	12.488
Akses Sarana Kesehatan	28	20	50	23.57	6.785
Status Kepemilikan	28	20	50	31.79	8.189
Status Legalitas Bangunan	28	20	50	35.00	10.000
Kepadatan Penduduk	28	20	50	41.07	12.573
Tingkat Pendidikan	28	20	50	22.86	6.587
Tingkat Partisipasi	28	20	50	23.93	8.317
Frekuensi Kegiatan	28	20	50	23.93	6.853
Tingkat Kemiskinan	28	20	50	28.57	8.909
Kemampuan Pemenuhan Rumah Layak Huni	28	20	50	25.71	9.595
Frekuensi Kriminalitas	28	20	50	28.57	13.801
Tingkat Pendapatan	28	20	50	25.71	8.357
Valid N (listwise)	28				

Dapat dilihat dari Tabel *Descriptive Statistic* menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki jumlah populasi yang sama dan valid untuk dilakukan analisis *cluster*. Kolom N menunjukkan jumlah data yang valid sejumlah 28 buah yang yang artinya tidak ada data yang hilang dan semua data siap diproses. *Minimum* dan *Maximum* menunjukkan data terendah dan tertinggi dari masing-masing variabel. Standar deviasi (*Std. Deviation*) menunjukkan jarak atau kedekatan setiap data ke *mean* atau rata-rata sampel.

Setelah muncul tabel tersebut, didapatkan nilai *Z-Score* masing-masing variabel. Maka nilai tersebut yang digunakan dalam analisis *cluster* berikutnya.

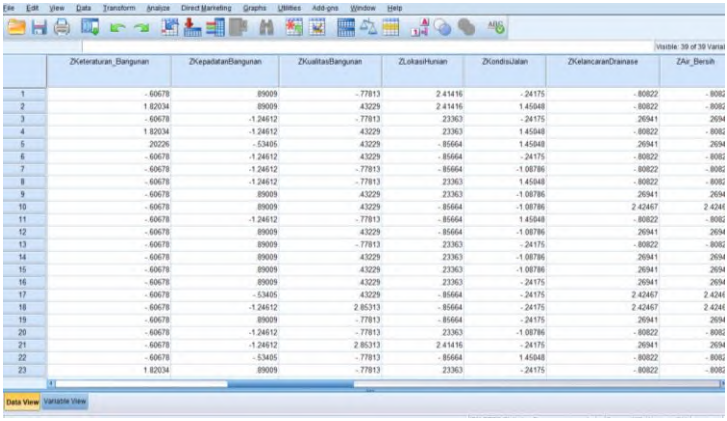

	ZKeteraturan_Bangunan	ZKepadatanBangunan	ZKualitasBangunan	ZLokasiHunian	ZKondisiJalan	ZKelancaranDrainase	ZAir_Bersih
1	-.60678	.89009	-.77813	2.41416	-.24175	-.80822	-.808
2	1.82034	.89009	.43229	2.41416	1.45848	-.80822	-.808
3	-.60678	-1.24612	-.77813	.23363	-.24175	.26941	.269
4	1.82034	-1.24612	.43229	.23363	1.45848	-.80822	-.808
5	.20226	-.53405	.43229	-.85664	1.45848	.26941	.269
6	-.60678	-1.24612	.43229	-.85664	-.24175	-.80822	-.808
7	-.60678	-1.24612	-.77813	-.85664	-1.08786	-.80822	-.808
8	-.60678	-1.24612	-.77813	.23363	1.45848	-.80822	-.808
9	-.60678	.89009	.43229	.23363	-1.08786	.26941	.269
10	-.60678	.89009	.43229	-.85664	-1.08786	2.42467	2.424
11	-.60678	-1.24612	-.77813	-.85664	1.45848	-.80822	-.808
12	-.60678	.89009	.43229	-.85664	-1.08786	.26941	.269
13	-.60678	.89009	-.77813	.23363	-.24175	-.80822	-.808
14	-.60678	.89009	.43229	.23363	-1.08786	.26941	.269
15	-.60678	.89009	.43229	.23363	-1.08786	.26941	.269
16	-.60678	.89009	.43229	.23363	-.24175	.26941	.269
17	-.60678	-.53405	.43229	-.85664	-.24175	2.42467	2.424
18	-.60678	-1.24612	2.85313	-.85664	-.24175	2.42467	2.424
19	-.60678	.89009	-.77813	-.85664	-.24175	.26941	.269
20	-.60678	-1.24612	-.77813	.23363	-1.08786	-.80822	-.808
21	-.60678	-1.24612	2.85313	2.41416	-.24175	.26941	.269
22	-.60678	-.53405	-.77813	-.85664	1.45848	-.80822	-.808
23	1.82034	.89009	-.77813	.23363	-.24175	-.80822	-.808

Langkah selanjutnya adalah membentuk klaster. Pada menu, pilih *Analyze – Classify – Hierarchycal Cluster.* Kemudian, masukkan nilai-nilai *Z-Score* ke kotak *Variable(s)* dan masukkan RT/RW ke *Label Case by.* Pada bagian *Cluster* centang *Cases* dan pada bagian *Display* centang *Statistic* dan *Plots.*

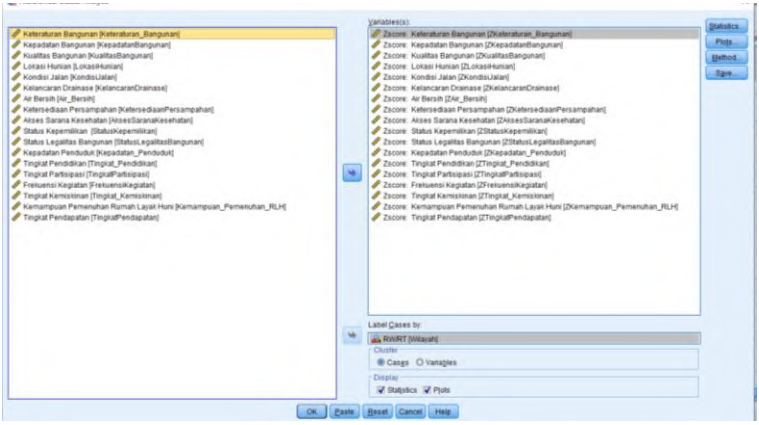

Kemudian, pilih tombol "*Statistics…*"dan muncul kotak *Hierarchical Cluster Analysis: Statistics*. Beri centang pada *Agglomeration schedule* dan *Proximity matrix.* Pada bagian *Cluster Membership* pilih *Range of solutions* dengan memberikan angka 2

pada *Minimum number of clusters* dan angka 3 pada *Maximum number of clusters.* Artinya, pada bagian ini akan ditampilkan susunan untuk dua dan tiga klaster. Lalu klik *Continue.*

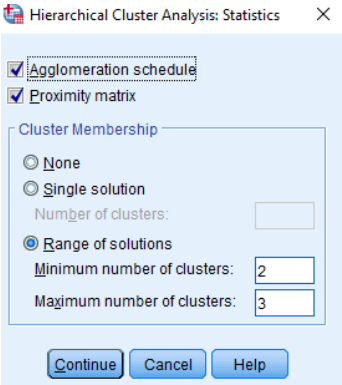

Selanjutnya, pilih tombol "*Plots…*" dan muncul kotak *Hierarchical Cluster: Plots.* Beri centang *Dendogram.* Pada bagian *Icicle* beri centang *None.* Lalu klik *Continue.*

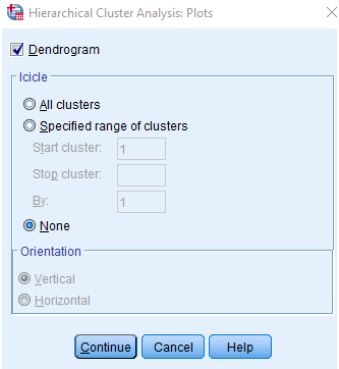

Kemudian, pilih tombol *"Method…"* dan muncul kotak *Hierarchical Cluster Analysis: Method.* Pada *Cluster Method* pilih *Ward's method.* Pada *Interval* pilih *Squared Euclidean distance* lalu klik *Continue.*

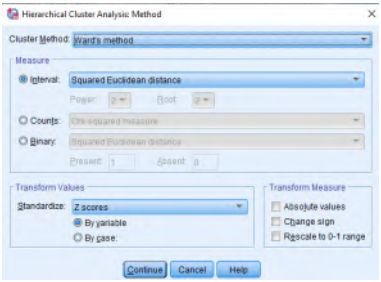

Kemudian, pilih tombol *"Save…"* dan muncul kotak *Hierarchical Cluster Analysis: Save.* Pada *Range of Solutions,* berikan nilai 2 untuk *Minimum number of cluster* dan nilai 3 untuk *Maximum number of clusters.* Lalu klik *Continue.*

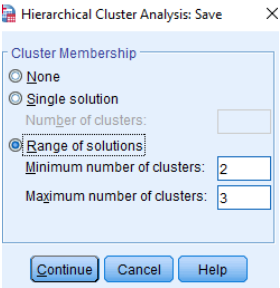

Setelah itu tekan OK dan *output* yang muncul adalah sebagai berikut.

Cluster Membership

Case	3 Clusters	2 Clusters
1:RW7RT1	1	1
2:RW7RT2	1	1
3:RW7RT3	2	1
4:RW7RT4	1	1
5:RW7RT5	1	1
6:RW7RT6	2	1
7:RW7RT7	2	1

8:RW7RT8	1	1
9:RW7RT9	2	1
10:RW7RT10	2	1
11:RW7RT11	1	1
12:RW7RT12	2	1
13:RW7RT13	2	1
14:RW7RT14	2	1
15:RW7RT15	2	1
16:RW7RT16	2	1
17:RW7RT17	2	1
18:RW7RT18	3	2
19:RW7RT19	2	1
20:RW7RT20	2	1
21:RW7RT21	3	2
22:RW7RT22	2	1
23:RW15RT2	1	1
24:RW15RT3	1	1
25:RW15RT4	1	1
26:RW15RT5	1	1
27:RW6RT5	2	1
28:RW6RT6	1	1

Dalam menentukan berapa jumlah cluster yang relevan terhadap penelitian, dapat dilihat pada dendogram kemudian dibadingkan dengan keheterogenan atau kehomogenan karakteristik yang terbentuk. Pada penelitian ini, dendogram yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

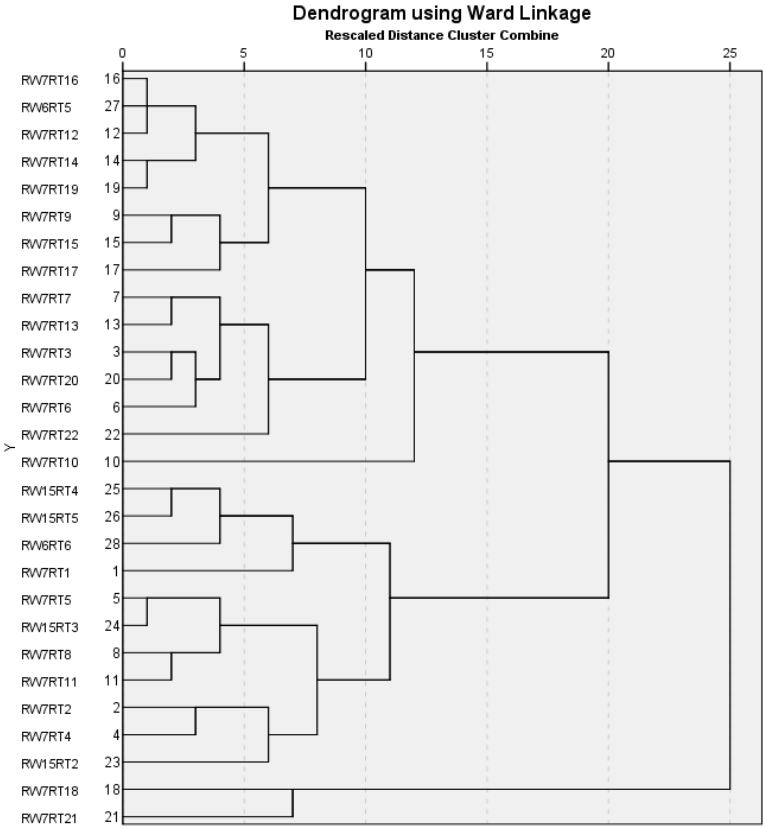

Pertama dilakukan pembacaan dari sisi sebelah kanan (sekat I). Berdasarkan dendogram tersebut, 2 klaster terbentuk. Dilihat dari anggota serta karakteristik yang terbentuk, ternyata anggota cluster mengalami ketimpangan dimana klaster pertama memiliki 26 anggota, sedangkan cluster kedua hanya memiliki 2 anggota. Selain itu, karakteristik pada klaster pertama masih belum menggambarkan karakteristik permasalahan lingkungan dan ekonomi sehingga peneliti melanjutkan kepada pembacaan sekat selanjutnya. Pada sekat selanjutnya terbentuk tiga klaster, dimana klaster yang ketiga

ini tetap konsisten tidak bergabung kepada anggota lainnya. Adapun anggota cluster yang terpisah adalah anggota klaster pertama yang terbentuk sebelumnya. Sehingga anggota klaster yang terbentuk adalah sebagai berikut.

- Klaster I terdiri dari RW 7 pada RT 1, 2, 4, 5, 8, 11, kemudian RW 15 pada RT 2, 3, 4, 5 dan RW 6 RT 6.
- Klaster II terdiri dari RW 7 pada RT 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, kemudian RW 6 pada RT 5.
- Klaster III terdiri dari RW 7 RT 18 dan RT 21.

Berdasarkan pembentukan tersebut, klaster awal yang memiliki 26 anggota terpecah menjadi dua klaster dimana klaster I memiliki 11 anggota, klaster II memiliki 15 anggota dan klaster III tetap memiliki 2 anggota. Jika ditinjau dari karaktersitiknya sudah menggambarkan heterogenitas pada permasalahan ekonomi dan lingkungan terutama di Klaster I dan II.

Jika diteruskan untuk membentuk 4 cluster, perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan dimana anggota yang terpisah hanya 1 RT yaitu RW 7 RT 10. Sehingga penulis menetapkan 3 cluster dalam penelitian ini.

Lampiran 6. Hasil Coding Dokumen Kebijakan

Hasil coding dokumen kebijakan dapat diakses melalui *link* dan *QR Code* sebagai berikut.

Intip.in/kodingca

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BIOGRAFI PENULIS

Penulis dengan nama Olivia Pandora dilahirkan pada 15 November 1997 di Kota Cirebon dari pasangan Thien Suhartini dan Ali Suhardi. Terlahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri Kebon Baru IV Kota Cirebon (2004-2010), SMP Negeri 1 Kota Cirebon (2010-2013), SMA Negeri 2 Kota Cirebon (2013 – 2016), dan saat ini terdaftar sebagai mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota ITS. Selama menjadi mahasiswi, penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Planologi pada Departemen Keilmiahan dan Keprofesian. Selain itu, penulis senang mengikuti acara lingkup fakultas, institut atau luar kampus dalam bentuk kepanitiaan, mentor, pelatihan dan *exchange*. Ketertarikan penulis akan permukiman dan isu global dalam SDGs mendorong penulis untuk memilih topik peremajaan permukiman dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai SDGs. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran terkait Tugas Akhir ini. Untuk berdiskusi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menghubungi kontak penulis di *pandoraolivia@gmail.com.*

"Halaman ini sengaja dikosongkan"